

Akuntansi Hindu

by I Wayan Suartina

Submission date: 29-Dec-2020 04:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1481851559

File name: PENGANTAR_Akuntansi_Hindu.pdf (1.66M)

Word count: 79340

Character count: 487613

AKUNTANSI HINDU

“Suvivrtam Sunirajam Indra Twadatam id Yasah, Gavam Apa Vrajam Vrdhi Krnusva Radho Adrivah” (RgvedaI. 10. 7)

“ **Wahai Tuhan** Yang Maha Pemurah, bukalah gerbang pengetahuan dan kekayaan, karena hanya Engkau sajalah yang dapat memberinya kemudahan pencapaian dan memberi kami kelimpahan “ (Rgveda, I. 10. 7)

BABI

MENGGALI DASAR-DASAR AKUNTANSI HINDU

1. WEDA AJARAN KEBENARAN YANG TERTUA.

Ajaran yang dimuat dalam Weda adalah ajaran Dharma atau ajaran Kebajikan. Kata **Dharma** dalam Kamus Sanskerta-Indonesia, disusun oleh I Made Surada, hal. 169, ternyata mempunyai lebih dari 10 (sepuluh) arti, antara lain, **hukum, kebajikan, aturan, kebiasaan, kebenaran, tugas, keadilan**, dan sebagainya.

Agama Weda atau biasa disebut dengan Agama Hindu. Agama Hindu mempunyai usia terpanjang, merupakan agama yang pertama dikenal oleh manusia. Banyak penulis mengatakan, bahwa Weda merupakan ajaran spiritual tertua dan terlengkap. Sejarah agama menyatakan, tidak ada yang melebihi, lebih tua dari semua agama yang masih hidup sekarang ini, yaitu Agama Hindu, yang konon berasal dari 6 sampai dengan 10 ribu tahun yang lalu.

Banyak ahli menyatakan bahwa Weda sebagai ajaran spiritual yang terlengkap dan memberikan sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia.

Pernyataan tersebut mempunyai dasar yang kuat, yaitu sejalan dengan ungkapan dalam Sarasamusccaya butir V, hal. 4 :

“ Tatan hana aji ring bhuwana, tan pakacraya iking byasa wacana, kadyangganing sarira tan hana, ya tan pakasrayangahara “.

“ Tidak ada sastra di dunia ini, jika tidak ada bantuan dari ajaran Bhagawan Byasa, seperti halnya manusia tidak akan ada, jika tidak ada bantuan makanan “.

Berdasarkan uraian di atas, ajaran Weda dinyatakan berfungsi sebagai menyediakan makanan yang bergizi bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk satu suku bangsa, satu ras, atau satu daerah dengan agama tertentu, tetapi disediakan bagi seluruh umat manusia. Yang dimaksud dengan makanan disini adalah jenis makanan yang bersifat non fisik, makanan bagi jiwa atau rohani berupa ide-ide atau petunjuk yang bersifat universal, terkait dengan manusia sebagai suatu kesatuan mahluk hidup yang termulia, tidak dibagi menjadi kelas, agama, bangsa dan ras. Siapa saja, umat manusia, berhak menggali makanan rohani dan ilmu pengetahuan yang terpendam dalam Weda. Kautilya, dalam Arthasastra, Bk. I, Bab. 2, ayat 5, menjelaskan bahwa pengetahuan Weda merupakan payung bagi seseorang yang ingin menjalankan kehidupan secara baik di dunia.

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia juga harus memahami 3 jenis pengetahuan lainnya, yaitu bidang politik, ekonomi dan filsafat.

Jadi menurut Kautilya, manusia harus memahami 4 (empat) jenis ilmu, yaitu ilmu filsafat (anvikhaki), ilmu ekonomi (varta), ilmu politik (dandaniti), dan pengetahuan Veda (Arthashastra, Kangle, Bk. I, Bab 2, ayat 1-8)

Sebagaimana diketahui, ilmu akuntansi merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Masalah-masalah ekonomi juga banyak dijelaskan dalam Veda. Dalam kaitan ini, makna kata dharma akan disesuaikan dengan pokok bahasannya, yaitu dharma akan dimaknai antara lain sebagai **aturan, kebenaran, kebiasaan** dan **tugas**. **Subyek** dari **akuntansi** adalah pemilik kekayaan atau pengelola kekayaan. Pada perusahaan yang masih kecil antara pemilik kekayaan dan pengelola kekayaan sering menjadi satu atau dirangkap, sedangkan pada perusahaan yang lebih besar, pemilik kekayaan menyerahkan pengelolaan atas kekayaan tersebut kepada pihak lain sebagai manajemen profesional. Sebagai **obyek** dari **akuntansi** adalah kekayaan itu sendiri yang harus dikelola oleh manajemen dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara periodik dan terus menerus kepada pemilik kekayaan dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan kekayaan tersebut. Alat dan tata cara mempertanggungjawabkan serta melaporkan kekayaan dimaksud **diatur dan dirumuskan oleh akuntansi**.

Di dalam Veda, ditemukan beberapa ayat yang menguraikan masalah ekonomi, diawali dengan petunjuk tentang pembentukan modal awal dari sebuah perusahaan yang disebut dengan kekayaan atau ekuitas, selanjutnya diberikan petunjuk tentang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, petunjuk masalah perpajakan, masalah industri, masalah ilmu pengobatan dengan jenis-jenis obatnya, dan sebagainya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ekonomi ditemukan dalam **Rgveda, Yajurveda**, dan **Atharvaveda**, sedangkan yang berkaitan dengan masalah pengobatan dan jenis-jenis obat secara khusus diuraikan dalam **Yajurveda**. Masalah ilmu pengobatan dan segala jenis obat-obatan yang diproduksi ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan akuntansi.

2. RAMAYANA DAN MAHABARATHA.

40

Dalam ajaran Hindu, dikenal dua epos besar, yaitu **Ramayana** dan **Mahabharata**. Epos **Ramayana** ditulis oleh Rsi Walmiki, sedangkan epos yang kedua, **Mahabharata**, ditulis oleh Bhagawan Byasa. Epos **Ramayana**, keberadaannya jauh lebih awal dari epos **Mahabharata**. Kedua epos tersebut merupakan kelompok itihasa. Ditinjau dari arti kata **Itihasa** (berasal dari kata “Iti”, “ha” dan “asa”), artinya adalah “kejadian sesungguhnya”. **Kejadian itu** adalah nyata.

Sesuai karya Walmiki, Rama digambarkan sebagai manusia yang agung dan unik, dan bahkan **Rama** juga diposisikan sebagai **Avatar Tuhan**.

2.1. Ramayana

Buku **Ramayana**, gubahan C. Rajagopalachari, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, diterjemahkan, Penerbit Fajar Pustaka Baru, Banguntapan, Yogyakarta, Agustus 2002, memuat 75 bagian ceritera. Bagian ke 75 merupakan Bagian Akhir Cerita

Berikut ini diuraikan secara ringkas isi dari beberapa bagian buku tersebut untuk dapat diketahui alur ceritera dari epos **Ramayana** tersebut.

Bagian 1, menceritakan tentang kerajaan besar **Kosala** yang subur diairi oleh sungai Sarayu. Ibu Kota kerajaan Kosala adalah **Ayodya**, dengan rajanya **Dasarata**. Rakyat Kosala berbahagia, sentosa dan berbudi luhur. Negeri ini dilindungi oleh pasukan yang perkasa, dengan benteng-benteng yang dikelilingi dengan parit yang lebar dan banyak alat-alat pertahanan.

Raja dari kerajaan Kosala bernama **Dasarata**, dibantu oleh 8 (delapan) Menteri yang bijaksana dan merupakan negarawan terbaik. Pada zaman itu hidup para Resi besar, seperti **Resi Wasista** dan **Resi Wamadewa** dan para **Brahmana lainnya**. Para **Resi dan Brahmana bertugas mengajarkan Dharma serta menjalankan ritual dan upacara korban**. Kepada para pengusaha dan rakyat dipungut pajak, tetapi tidak memberatkan yang bersangkutan. Kepada para pelaku kejahatan dikenakan hukuman secara adil sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Ayodhya berarti yang tidak dapat ditaklukkan dengan perang.

Bagian 2, memuat ceritera lahirnya putera Dasarata, yaitu Rama, dengan ibu Kausalya, dan Barata dengan ibu Kaikeyi. Istri ke 3 dari Dasarata bernama Sumitra melahirkan Lakshmana dan Satrugna.

Bagian 3, riwayat mengenai seorang raja termashyur bernama Trinsanku dari Dinasti Matahari, yang sedang memerintah. Ia seorang raja yang sangat mencintai keindahan tubuhnya dan tak mau membayangkan terpisah dari keindahan tubuhnya pada saat kematian. Ia mendambakan diangkat ke surgaloka dengan tubuh yang sama. Tetapi apa yang diinginkannya tidak pernah tercapai, bahkan menimbulkan petaka baginya, karena dikutuk oleh Putera Rsi Wasistha.

Bagian 4, menceritakan Rama yang masih bocah, terpaksa meninggalkan istana kerajaan atas permintaan **Rishi Wiswamitra**. Tugas Rama adalah menumpas raksasa Maricha dan Subahu yang mengganggu upacara yang dilakukan oleh **Rsi Wiswamitra**. Raja Dasarata, ayahanda Rama, sebetulnya sangat khawatir dan keberatan atas kepergian Rama yang masih bocah.

Atas saran penasihat raja, yaitu **Rishi Wasistha**, maka Rama ditemani oleh Lakshmana diizinkan berangkat bersama **RishiWiswamitra**.

Bagian 5, Rama dan Lakshmana membunuh raksasa Maricha dan Subahu menggunakan senjata **Ramachandra-astra**, yang diberikan oleh **RishiWiswamitra**.

Lakshmana membunuh **Maricha** menggunakan senjata **Manawastra**. Maricha tidak langsung dibunuh, tetapi **dibungkus dalam daya yang tidak dapat ditolak**, dan dilemparkan **100 (seratus)yojana** penuh ke dekat lautan. Satu *Yojana* = 8 mil. Jadi total jaraknya 800 mil atau kurang lebih **1.000 km**.

Rama membunuh raksasa Subahu dengan senjata **Agyastra**.

Bagian 6, Janaka, raja dari kerajaan Mathila, memperoleh seorang bayi yang berasal dari anugrah Dewi Bumi, yang diberi nama Sita. Raja Janaka menemukan bayi tersebut dalam hutan. Janaka, adalah raja yang tidak bisa mempunyai keturunan. Janaka dikenal sebagai raja yang melaksanakan Karma Yogi. Sita sangat cantik, secantik Dewi Bumi.

Bagian 7, memuat riwayat sungai Gangga. Sungai ini dapat turun mengairi Patala atas permohonan raja Bagirata. Aliran sungai Gangga yang turun mengairi Patala disebut **Bagirati**. Didijelaskan pula bahwa barang siapa yang mandi di sungai Gangga akan dibersihkan dari dosa dan dikaruniai kebijakan serta kekuatan.

Bagian 9, Rama dapat mempersunting Sita, melalui sayembara. Sayembara yang dimenginya adalah karena dapat membentangkan busur yang sangat berat yang diangkut oleh **kereta kuda beroda delapan**.

Bagian 10 s.d. 74, memuat hikayat tentang keperkasaan dari Rama dalam pengembaraannya dihutan, sampai dengan masuk ke Langka mengalahkan Rahwana.

Sebagai perancang penyerangan ke Alengka adalah **Anggada**. Anggada dibantu dan diperkuat oleh pasukan wanara. Pasukan wanara tertua bernama **Jambawan**. **Hanoman** berada dalam pasukan wanara tersebut. **Jambawan** meminta kepada Hanoman untuk mengabdikan dirinya kepada Rama, mencari Dewi Sita dan mengalahkan Rahwana. Jambawan mengetahui bahwa hanya Hanomanlah yang dapat melaksanakan tugas berat tersebut. Hanoman merupakan putra Dewa Angin dengan ibu bernama Anjana. Kesaktian dan kekuatan Hanoman sama dengan Dewa Angin. Tidak ada senjata yang dapat melukai Hanoman. Kematian hanya akan datang jika Hanoman menghendaknya. Kekuatan Hanoman sama dengan kekuatan Garuda. Dikatakan, karena saking kuatnya, Hanoman dapat **mengelilingi duniapaling sedikitdua puluh satu kali**.

Untuk dapat mencapai Alengka, Hanoman melakukannya dengan terbang. Sebelum terbang, Hanoman melakukan ancang-ancang, bertumpu pada kakainya dan berjalan beberapa langkah. Bulu-bulu⁹⁴ Hanoman berdiri, dan meraung keras serta memukul-mukulkan ekornya ketanah. Kemudian, ia membungkuk dan mengambil napas dalam. Ia tumpukkan kekuatannya pada kaki, menutup telinga dan mengencangkan semua otot, lalu melompat keudara.

Setelah Hanoman mencapai Alengka, lalu melakukan pengamatan atas keadaan kerajaan Rahwana dan kekuatan pasukannya. Diketahui, bahwa kerajaan Alengka sangat kaya dan makmur. Kerajaan dikelilingi dengan tembok yang tinggi dan kuat, dengan struktur bangunan yang indah, serta dijaga oleh angkatan perang yang kuat, terdiri dari pasukan gajah perang, kereta kuda, pasukan kuda, dan perajurit tempur. Semuanya dilengkapi dengan pakaian perang dan senjata selengkapya.

Bagian 75, yaitu bagian akhir, memuat ceritera penobatan Wibisana sebagai raja Langka dalam upacara besar dan indah.

Upacara besar tersebut diselenggarakan setelah Rawana dikalahkan oleh Rama dalam pertempuran besar dan sangat sengit. Rahwana dapat dikalahkan oleh Rama dengan senjata ampuhnya yang bernama **Brahma-astra**. Pada saat itu Rama menaiki kereta milik Indra dengan **kusir Matali**.

Kisah Ramayana diperkirakan terjadi pada zaman **Treta-Yuga**, karena pada halaman 42 buku Ramayana, oleh C. Rajagopalachari, Bharatiya Vidya Bhavan, ditemukan informasi, bahwa seorang raja yang bernama **Sagara**, dari **Kerajaan Ayodya** hidup sampai dengan **30.000 tahun**. Mungkin maksud yang sebenarnya waktu hidup raja Sagara sampai dengan **300 tahun**.

Informasi ini akan sejalan dengan uraian dalam ayat 83, Bk. I Manava Dharmasastra, yang menyatakan bahwa pada **zaman Kreta-yuga** manusia hidup **400 tahun** lamanya, pada **zaman Treta-yuga 300 tahun**, **Dwapara-yuga 200 tahun** dan **Kali-yuga masa hidup manusia secara rata-rata 100 tahun**.

Dibawah ini dikutip bunyi lengkap dari ayat 83 buku I Manava Dharmasastra, sebagai berikut :

ManavaDharmasastraI. 83

*arogāḥ sarva sidhārthāc
Catur varṣ a śatāyus aḥ
Kreta tratādiṣ u hyeṣ ām
āyurhrasati pādaśaḥ*

45

Pada zaman Kretayuga manusia bebas dari penyakit, serba berhasil dalam tujuan,

serta hidup 400 tahun lamanya; tetapi pada Treta dan zaman-zaman berikutnya masa hidup Manusia berkurang dengan seperempatnya.

Pada setiap periode perubahan zaman dinyatakan umur manusia berkurang dengan masing-masing seperempatnya dari 400 tahun. Jadi umur manusia secara rata-rata berkurang dengan 100 tahun (25 %), sehingga pada zaman Kaliyuga saat ini, **umur manusia secara rata-rata menjadi 100 tahun.**

Yang menarik pula, pada zaman Ramayana kemajuan ilmu dan teknologi sudah demikian pesat.

Kemajuan ilmu dan teknologi pada zaman Ramaya, saat ini terbukti dari temuan mutakhir NASA (lembaga antariksa Amerika), yang dianggap temuan kontroversial, ¹⁰⁷um situs internet yaitu <http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS033&roll=78&frame=73> yang diklik dilansir oleh NASA dengan tema *NASA Digital Courtesy Image*, memuat foto-foto hasil pemotretan udara Satelit NASA yang menunjukkan adanya struktur di dasar laut yang menyerupai jembatan yang menghubungkan India dengan Sri Lanka. Jembatan di dasar laut itu diberi nama ‘ **Jembatan Adam** (*Adam Bridge*) untuk menunjukkan usianya yang sangat tua, dan diyakini sebagai buatan manusia (Suryanto, 2007 : 105).

Selanjutnya dijelaskan, Je⁷¹atan Adam tersebut terdiri dari bongkahan batu cadas, **sepanjang kurang lebih 30 Km**, berada di dasar Selat Palk yang menghubungkan India dengan Sri Lanka. Dari bentuk lengkungan jembatan dan komposisi usianya, menunjukkan bahwa struktur itu adalah buatan manusia. Baik legenda maupun kajian arkeologi menyatakan bahwa tanda-tanda awal adanya ¹³³hidupan manusia di Sri Lanka menunjuk pada kurun waktu yang sangat tua, yaitu **sekitar 1.750.000 tahun yang lalu dan usia jembatan** itu diperkirakan dari masa yang sama. Informasi ini menjadi ⁷⁴pek penting dalam memahami misteri legenda Ramayana, yang diyakini berlangsung pada Zaman Treta Yuga (lebih dari 1.700.000 tahun yang lalu) (Suryanto, 2007 : 106). Dalam buku Bhagavadg⁶, disusun oleh A.C. Bhaktivedanta, Bab 8 ayat 17, antara lain dijelaskan tentang alam semesta diwujudkan dalam siklus-siklus *kalpa*. **Satu kalpa** sama dengan satu hari bagi Brahma, dan satu hari bagi Brahma terdiri dari seribu siklus yuga atau zaman. Tentang zaman lengkap dengan umurnya, dinyatakan : **Satya Yuga berumur 1.728.000 tahun, Treta Yuga 1.296.000 tahun, Dvapara Yuga 864.000 tahun dan Kali Yuga 432.000 berumur tahun.**

Mengacu pada penjelasan umur dari masing-masing yuga atau zaman tersebut di atas, bahwa di pulau **Saylon** dengan ibu kota **Sri Lanka** sudah dihuni manusia dengan peradaban sangat maju **sejak 1.750.000 tahun** yang lalu (dihitung dari saat ini) berarti tidak salah bahwa Ramayana terjadi pada zaman Treta Yuga, ditambah lagi dengan adanya pernyataan bahwa umur manusia pada zaman Ramayana rata-rata 300 tahun.

Hal ini dapat dicocokkan dengan angka-angka umur zaman yang ada sebagai berikut :

- zaman Kali Yuga yang telah dijalani sekitar	⁵⁹ 5.000 tahun
- zaman Dvapara Yuga telah dijalani	864.000 tahun
Sub jumlah	869.000 tahun
- zaman Treta Yuga	881.000 tahun
Jumlah	<u>1.750.000 tahun</u>

Berdasarkan perhitungan matematika sederhana di atas, dapat diperkirakan epos Ramayan terjadi pada zaman Treta Yuga setelah berjalan selama 405.000 tahun (1.296.000 tahun -/ 881.000 tahun).

Ditemukan pula penjelasan bahwa pada zaman Ramayana sudah ditemukan dan digunakan **sejenis bom atom** yang dahsyat untuk membunuh musuh. Yang menggunakan bom tersebut adalah **Rsi Kapila**, yaitu untuk **memusnahkan 60.000 putra/rakyat raja Sagaradari Ayodhya**. Cara **Rsi Kapila** membunuh rakyat Ayodya sebanyak itu dikatakan cukup dengan **tatapan amarah** saja. Tatapan amarah yang dapat memusnahkan orang secara serentak sebanyak 60.000 orang dapat dianalogikan dengan menggunakan **bom atom** (Rajagopalachari : 39).

Dalam buku Ramayana tersebut, pada halaman 38 dijelaskan bahwa **Raja Sagara**, pendiri kerajaan **Kosala** dengan ibukota **Ayodhya** mempunyai 2 (dua) istri, yang bernama **Kesini** dan **Sumati**.

Atas berkat **Bhagawan Bhrigu**, maka istri **Raja Sagara** yang bernama **Kesini** melahirkan seorang putra saja, yang diberi nama **Asamanjas**. Setelah besar, ternyata **Asamanjas** sangat bodoh dan mempunyai tabiat jelek dan kejam, sehingga sangat dibenci oleh rakyat. Sifat kejamnya itu adalah suka menceburkan anak kecil ke dalam sungai, dan tertawa-tawa kesenangan melihat anak itu megap-megap dan mati.

Istri raja Sagara yang bernama **Sumati** diberkati anak sebanyak **60.000 orang**. Sumati melahirkan dalam bentuk gumpalan daging lalu dipisah-pisah yang dibagi menjadi 60.000 bayi. Ceritera ini dapat dimaknai sebagai proses bayi tabung, dimana pada zaman tersebut ilmu kedokteran dalam bidang bayi tabung sudah sangat maju. **Raja Sagara**, raja dari kerajaan **Kosala** dengan ibukota **Ayodhya** yang kaya raya, mampu melaksanakan upacara apapun yang mereka kehendaki. Sesuai alur ceritera dalam buku Ramayana yang disusun oleh Rajagopalachari, **Raja Sagara** dari Ayodhya merupakan leluhur dari **Raja Dasaratha** yang terkenal itu, yang merupakan orang tua dari **awetar Rama**.

Kenapa Ramayana dikedepankan pada pembahasan Pengantar Akuntansi Hindu ?. Pertimbangannya adalah dalam kisah Ramayana, terdapat unsur perang besar di dalamnya, yaitu perang antara Rama melawan Rahwana dari kerajaan Alengka. Sesuai jalan ceriteranya, Ramayana merupakan demonstrasi dari kemajuan ilmu dan teknologi serta spiritual dari pihak kerajaan Alengka dibawah Rahwana dan Ayodya dibawah Rama. Disamping pamer kemajuan ilmu dan teknologi, juga pamer kekayaan dari masing-masing kerajaan sehingga mampu melaksanakan perang besar tersebut. Perang secara ekonomi memerlukan biaya yang besar serta harus didukung perencanaan yang matang sejak mempersiapkan keperluan prajurit tempur, keperluan peralatan tempur, alat angkut senjata, personil tempur yang terlatih dan trampil, dukungan alat-alat kesehatan, personil kesehatan, bahan makanan untuk prajurit, gajah-gajah yang disetarakan fungsinya dengan tank saat ini, dsb.nya yang tidak dapat dirinci satu persatu. Biaya pelatihan prajurit, pengadaan sarana dan prasarana untuk perang dan biaya pelaksanaan pertempuran harus dihitung dengan cermat, agar pertempuran dapat dimenangkan. Untuk mencatat perencanaan, dst.nya, menghitung, mencatat dan melaporkan biaya sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan perang memerlukan bantuan tatacara pencatatan dan pelaporan yang baik dan akurat. **Tugas penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh akuntansi**. Rama mengerahkan jutaan pasukan yang bergerak dari **Ayodya** menuju **Alengka**. Pasukan ini harus dipersiapkan dengan matang dari segala sisi, seperti : kondisi fisik pasukan, tingkat keterampilan tempur, peralatan tempur, alat-alat penyeberangan (lewat laut dan udara), logistik, alat-alat kesehatan, para dokter dan perawat, dan sebagainya. Apalagi pasukan harus

menyeberangi lautan yang konon panjangnya mencapai 100 *yojana* atau sekitar 1.000 km (1 *yojana* = 8 atau 9 mil, atau sama dengan 10 km). Pasukan Rahwana dapat menyeberangi lautan tersebut dengan mudah untuk menangkap Dewi Sinta, dan membawanya ke Alengka dengan mudah pula. Demikian pula pasukan Rama dari kerajaan Ayodya yang berlokasi di India Utara dapat dengan mudah mencapai pantai selatan India dan terus menyeberang dari daratan India Selatan menuju Alengka guna melakukan penyerangan dan membebaskan Dewi Sinta. Pasukan Rama, yang dipimpin oleh Hanuman, terlebih dahulu membangun sebuah jembatan penyeberangan untuk dapat mencapai Alengka (C.Rajagopalachari : 526). Hal ini semua melibatkan kemajuan ilmu dan teknologi, dengan biaya yang besar, namun pengarang ceritera membungkusnya dengan berbagai mistik. Semua keperluan perang tersebut harus didata dan dicatat dengan tertib dan teratur, mengenai kuantitas dan kualitasnya, tidak boleh ada yang kurang. Dengan bantuan ahli Akuntansi Manajemen, Akuntansi Biaya serta Akunansi Keuangan tugas yang tampak seperti demikian sulit akan dapat dilaksanakan dengan mudah dengan hasil yang baik. Demikian pula halnya sebagai alat membuat pertanggungjawaban setelah suatu pekerjaan selesai dan dalam hal ini se usai perang, juga menggunakan sarana akuntansi keuangan sebagai dasar pertanggungjawabannya.

2.2. Mahabharata

Mahabharata adalah **gambaran sejarah**, yang memuat kehidupan keagamaan, social dan politik, sesuai dengan ajaran Weda. Jadi bukan karangan, atau ilusi. Kitab Mahabharata terdiri dari 18 Parwa. Dalam ¹⁷Titib, 1996 : 143-144, masing-masing Parwa dan kandungan utamanya dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Adi Parwa** (melukiskan kelahiran Kaurawa dan Pandawa)
- 2) **Sabha Parwa** (melukiskan pertemuan untuk divisi kerajaan)
- 3) **Wana Parwa** (melukiskan kekalahan Pandawa dan pembuangannya ke hutan)
- 4) **Wirata Parwa** (melukiskan pembuangan Pandawa yang ke dua)
- 5) **Udyoga Parwa** (melukiskan kompromi antara Kaurawa dan Pandawa)
- 6) **Bhisma Parwa** ((melukiskan perang Bharatha dan kejatuhan Bhisma)
- 7) **Dropna Parwa** (melukiskan perang Bharata dan kematian Mahapatih Drona)
- 8) **Karna Parwa** (melukiskan perang Bharata dan kematian Mahapatih Karna)
- 9) **Salya Parwa** (melukiskan perang Bharata dan kematian Mahapatih Salya)
- 10) **Sauptika Parwa** (melukiskan perang malam oleh Aswathama dan kematian anak-anak Devi Drupadi, melukiskan kematian Duryodana)
- 11) **Stri Parwa** (melukiskan ratap tangis janda dan upacara kematian)
- 12) **Santi Parwa** (melukiskan kematian Bhisma yang seorang kakek, sebelum beliau meninggal, beliau memberikan wejangan Dharma kepada Yudistira)
- 13) **Anusasana Parwa** (melukiskan kerajaan Pandawa)
- 14) **Aswamedhika Parwa** (melukiskan Yajna Aswem¹⁷ta oleh Pandawa)
- 15) **Asramawasika Parwa** (melukiskan Asramawasa Dhrtarastra dan lain-lain)
- 16) **Mausala Parwa** (meluki¹⁴⁹ kehancuran keturunan Yadu di Dwaraka)
- 17) **Mahaprastanika Parwa** (melukiskan kepergian Pandawa ke Gunung Himawan),
- 18) **Swargarohana Parwa** (melukiskan kematian Bhima, Arjuna dan lain-lain).

Diantara parwa-parwa tersebut di atas adalah Bhismaparwa yang paling dikenal, karena di dalamnya memuat wejangan Sri Krishna kepada Arjuna, dalam medan

Kuruksetra tentang ajaran filsafat kerja yang isinya amat tinggi. Wejangan Sri Krishna ini menjadi isi kitab suci Bhagawadgita, yang amat masyur keseluruh dunia.

Dijelaskan, menurut tradisi India Maharsi Kresnadwipayana (Wedawyasa) putra Parasara dan Satyawati, menulis semua purana dalam zaman **Dwapara Yuga**. Menurut Profesor Srinivasa Raghavan dari Sri Aurobindo Study Club Circle, Madras, dikutip dalam buku Hindu Agama Bumi disusun oleh Suryanto, hal. 81, bahwa Sri Krishna meninggalkan dunia fana ini pada Amavasya, 5076 Pausa, yaitu tahun 3101 Sebelum Masehi atau 3179 tahun Saka, yang merupakan awal dari Kali-yuga. Sri Krishna muncul di dunia ini 125 tahun 4 bulan sebelum tanggal-tanggal ini, 3226 Sebelum Masehi. Perang Mahabharata mulai 36 tahun sebelum Sri Krishna meninggalkan dunia ini, yaitu tahun 3136 Sebelum Masehi pada hari Amavasya, Pausa (bulan Februari). Dengan demikian dapat dikatakan Zaman Kali-yuga saat ini (2013) telah berumur sekitar 5.114 tahun (3101 tahun + 2013 tahun) dan umur Mahabharata 5.149 tahun (3136 tahun + 2013 tahun).

Menurut Thompson, yang dikutip oleh Suryanto, hal. 77, bahwa Kali-yuga jatuh pada **tanggal 18 Februari 3012 sebelum Masehi**.

Penobatan raja Parikesit, cusu Arjuna (keluarga Pandawa) juga dilangsungkan pada tanggal 18 Februari tahun 3.012 Sebelum Masehi (Titib, Veda Sabda Suci : 1996 : 7).

Adanya perbedaan perhitungan umur Kali-yuga 1 tahun dibandingkan perhitungan sebelumnya disebabkan oleh adanya perbedaan perhitungan awal Kali-yuga, ada yang memulai dengan 0 atau menggunakan angka 1. Apabila menggunakan angka 0, maka permulaan Kali-yuga 3101 Masehi, dan bila menggunakan angka 1 menjadi 3.102.

Mahabharata juga merupakan pameran kekayaan dan kemajuan ilmu dan teknologi serta kedalaman spritual dari kedua belah pi¹⁸⁸ yang bermusuhan dan berperang, yaitu pihak Korawa dan Pandawa. Dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mempersiapkan perang, pasti melibatkan unsur akuntansi keuangan sebagai alat pencatatan dan pelaporan atas aset-aset yang sedemikian besar digunakan dalam peperangan.

Dalam buku Mahabharata dan Ramayana, C. Rajagopalachari (2013 : 245), dijelaskan bahwa pasukan Korawa terdiri 400 11 *Aksauhini* (Divisi) dan Pandawa 7 *Aksauhini* (Divisi). Satu divisi (*aksauhini*) terdiri dari 21.870 kereta kuda (kereta perang), 21.870 gajah, 65.610 kuda, dan 109.350 prajurit.

Dalam perhitungan prajurit tempur sebanyak 109.350 orang belum termasuk para prajurit yang mengawaki kereta kuda, pasukan gajah serta pasukan kuda yang jumlahnya paling sedikit sebanyak 109.350. Dengan demikian jumlah prajurit tempur yang terlibat dalam Bharatayuda paling sedikit menjadi 218.700 orang.

Ada dialog yang menarik dalam Parwa 5, hal. 228-229 (Mahabharata, susunan P. Lal, 1994), yaitu pada pertemuan antara Duryodana, Arjuna dengan Kresna ditempat peristirahatan Kresna, Duryodana mengatakan bahwa dialah yang lebih dulu masuk ke kamar Kresna dan duduk di atas bantal di dekat kepala Kresna, sedangkan Arjuna datang belakangan, dan duduk didekat kaki Kresna. Pada waktu Kresna terbangun dari tidurnya, maka yang terlihat pertama kali oleh Kresna adalah Arjuna. Oleh karena Duryodana mengajukan alasan seperti itu, yang berarti meminta kepada Kresna agar diberikan hak istimewa atau bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan Arjuna, maka Kresna memberikan penjelasan “ Aku tahu engkau yang lebih dulu masuk, tetapi matamu lebih dahulu melihat Arjuna “. Bila penjelasan Kresna dalam pertemuan tersebut dikaitkan dengan penerapan prinsip akuntansi, dapat dianalogikan, bahwa Kresna menerapkan prinsip “ **substansi mengungguli bentuk** “.

Dalam pertemuan tersebut Kresna menawarkan kepada kedua belah pihak, apakah memilih jumlah pasukan yang besar dan kuat atau memilih diri Kresna yang ikut di medan perang tetapi tidak ikut berperang. Kresna menawarkan kepada Duryodana jumlah pasukan yang sangat besar yaitu berkekuatan **100 juta prajurit**. Duryodana memilih jumlah pasukan yang lebih besar, tetapi Arjuna memilih diri pribadi Kresna agar ikut mendampingi di medan perang.

Tetapi berdasarkan kesepakatan, disetujui jumlah pasukan yang bertempur di medan laga dari pihak **Duryodana (Korawa)** sebanyak **11 divisi** dan pihak **Arjuna (Pandawa)** **7 divisi**, dengan total prajurit dari kedua belah pihak sebanyak 3.936.700 orang atau sekitar 3,94 % dari 100 juta prajurit yang disiapkan oleh Kresna.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dihitung berapa besar pasukan, sarana dan prasarana perang yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Kereta kuda sebanyak 393.660 buah, gajah 393.660 ekor, kuda 1.180.980 ekor dan prajurit 3.936.700 orang.

Rincian dari pasukan Pandawa dan Korawa dalam perang besar yang disebut dengan Baratayuda, seperti tertuang dalam Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Rincian Pasukan Pandawa dan Korawa

Kerajaan	Kereta Kuda	Gajah	Kuda	Prajurit
I. KORAWA	11 X 21.870 = 240.570	11 X 21.870 = 240.570	11 X 65.610 = 721.710	11 X 218.700 = 2.405.700
Jumlah I	240.570 (61,11 %)	240.570 (61,11 %)	721.710 (61,11 %)	2.405.700 (61,11 %)
II. PANDAWA	7 X 21.870 = 153.090	7 X 21.870 = 153.090	7 X 65.610 = 459.270	7 X 218.700 = 1.530.900
Jumlah II	153.090 (38,89 %)	153.090 (38,89 %)	459.270 (38,89 %)	1.530.900 (38,89 %)
Jumlah I + II	393.660 (100 %)	393.660 (100 %)	1.180.980 (100 %)	3.936.600 (100 %)

Dijelaskan bahwa pada zaman tersebut **Kereta Kuda** berfungsi sebagai “ **Kendaraan Lapis Baja** “, dan **Gajah** yang dilatih khusus untuk perang fungsinya sama dengan “ **Tank** “ zaman modern.

Apabila dihitung dari sisi biaya, Baratayuda biayanya sangat besar. Berdasarkan data fisik di atas, bila rata-rata biaya per unitnya, dihitung secara konserpatif dengan harga saat ini masing-masingnya Rp. 100.000.000,00, maka diperoleh angka sebesar Rp. 691.372.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua milyar Rupiah)

Rinciannya sebagai berikut :

a.	Kereta Kuda	393.660	x Rp.100.000.000,00 =	Rp. 39.366.000.000,00
b.	Gajah	393.660	x Rp.100.000.000,00 =	Rp. 39.366.000.000,00
c.	Kuda	1.180.980	x Rp.100.000.000,00 =	Rp. 118.980.000.000,00
d.	Prajurit	3.936.600	x Rp.100.000.000,00 =	Rp. 393.660.000.000,00
Total biaya.....				Rp. 691.372.000.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua milyar Rupiah)

Dalam jumlah tersebut di atas belum memperhitungkan biaya pengadaan dan pelatihan untuk tenaga cadangan tempur, tenaga kesehatan, dsb.nya. Disamping itu dalam jumlah tersebut belum diperhitungkan biaya akomodasi selama pelatihan, persiapan perang. Juga di dalamnya belum termasuk kereta, gajah, kuda untuk mengangkut berbekalan, pasukan, obat-obatan, senjata, dsb.nya. Disamping itu belum termasuk dalam perhitungan tersebut biaya upacara dan sarana prasarana pembakaran atau kremasi atas mayat-mayat prajurit yang gugur. Dengan demikian sungguh luar biasa besar biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Bratayuda tersebut.

3. PENGELOMPOKAN ZAMAN DALAM AJARAN HINDU

Mahabharatha secara garis besar memuat riwayat pertempuran antara perbuatan Dharma dengan perbuatan Adharma. Perbuatan berlandaskan Dharma diwujudkan oleh keluarga Pandawa sedangkan perbuatan Adharma dilakukan oleh pihak Korawa. Kedua kelompok keluarga ini merupakan kumpulan orang-orang pintar dan terpelajar. Satu kelompok pintar dalam bidang ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan lainnya, yang diwakili oleh raja Drestarata dibantu oleh guru besar Drona, dan yang lainnya, ternyata dengan kepintarannya berusaha keras untuk menipu keluarga Pandawa yang selalu bekerja berlandaskan Dharma. Beberapa ahli agama Hindu menyatakan bahwa zaman Kaliyuga tepat dimulai pada awal dimulainya Bharathayuda. Ciri dari zaman Kaliyuga adalah kemerosotan moral manusia dalam melaksanakan Dharma. Menurut Manava Dharmasastra, Buku I. 81, 82 dikatakan bahwa pada zaman *Krtayuga* unsur Dharma dalam perbuatan manusia 100 % sedangkan pada zaman *Kaliyuga* tinggal seperempatnya atau sama dengan 25 % dari 100 %. Hal ini disebabkan setiap perubahan zaman, dari zaman *Kratayuga, Tretayuga, Dwaparayuga dan Kaliyuga*, perbuatan Dharma manusia menurun masing-masing dengan seperempatnya. Jadi pada *Kaliyuga* ciri utamanya adalah orang-orang pintar yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan lebih banyak berusaha menipu atau mencelakakan orang-orang jujur yaitu orang yang berbuat berlandaskan Dharma.

Berikut ini dikutipkan bunyi ayat Manava Dharmasastra Buku I. 81 & 82 sebagai berikut :

Mdv. I. 81

*catuṣ pāt sakalo dharmah
satyaṁ kaiva kṛte yuga
nādharmeṇ āgamaḥ caccin
manuṣ yān prati vartate*

“ Pada zaman *Krtayuga* dharma berkaki empat dan sempurna, demikian pula halnya dengan **satya (kebenaran)**; tak ada keuntungan yang akan diperoleh manusia dengan perilaku adharma “.

Pada zaman *Krtayuga*, semua manusia dalam melaksanakan kegiatannya 100 % berlandaskan Dharma, tidak ada yang berani berbuat diluar ketentuan Dharma, karena mereka semua mengetahui bahwa bila mereka berbuat **adharma** tidak memperoleh keuntungan apapun. Ini dapat diartikan bahwa mereka semua telah menyadari benar akan kebenaran berlakunya hukum karma sebagai hukum alam, yaitu apa yang ditanam hasilnya itu pula yang akan dipetik. Apabila jagung yang ditanam jangan mengharapkan hasilnya akan berubah menjadi pisang, dengan alasan yang berbuat itu sangat senang akan buah pisang.

Mdv.I. 82.

*itareṣ vāgamād dharmāḥ
pāda śastvaropitaḥ ,
caurikānrta māyābhir
dharmāś cāpa iti padaśaḥ*

“ Adapun jaman lainnya karena adharma yang dilakukan, dharma itu berturut-turut dikurangi kakinya oleh adanya pencurian, kebohongan, dan penipuan sehingga kebajikan manusia berkurang seperempatnya dalam setiap yuganya “.

Dengan kita mengetahui makna dari zaman Kaliyuga ini, maka kita seharusnya selalu waspada dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Perlu diulas lagi mengenai ayat Sarasamusccaya di atas, yang berbunyi tidak ada sastra di dunia ini, jika tidak ada bantuan dari ajaran Bhagawan Byasa, yang dikatakan memberikan bantuan makanan atau bantuan kehidupan bagi ajaran-ajaran lainnya. Ajaran Bhagawan Byasa dapat bersifat mempengaruhi bahkan mungkin diambil langsung oleh ajaran-ajaran filsafat dan spiritual lainnya. Ajaran yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur yang tertuang dalam **Bhagawadgita**.

Selanjutnya, dalam Sarasamusccaya butir 1, hal.7 dinyatakan :

*“ Anaku kamung Janamejaya, Salwiring warawarah, yawat makapadarthang
caturwarga sawataranya, sakopanyasanya, hana juga ya ngke, sangksepanya, ikang
hana ngke, ya ika hana ing len sangkeriki, ikang tan hana ngke, tan hana ika ring len
sang keriki “.*

Anakda Janamejaya, segala ajaran tentang **caturwarga (dharma, artha, kama dan moksa)** baikpun sumber, maupun uraian arti atau tafsirnya, ada dan terdapat disini; singkatnya, segala yang terdapat di sini akan terdapat dalam sastra lain; yang tidak terdapat disini tidak akan terdapat dalam sastra lain dari sastra ini.

Pernyataan di atas menegaskan, bahwa ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci Hindu adalah ajaran filsafat yang terlengkap dibandingkan dengan ajaran filsafat lainnya.

Dalam buku “ Penghormatan Kepada Agama Hindu “, Buku I, disusun oleh Sushama Londe, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan diterbitkan oleh Media Hindu 2011, pada Bab 1, tentang Filsuf, diuraikan bahwa banyak Filsuf dunia terkenal pada abad 17 s.d. 20 yang mengagumi dan sangat menghargai ajaran Hindu, bahkan ada yang sampai berpindah agama dari agama yang dipeluk sebelumnya.

Filsuf terkenal dimaksud adalah : (1) Francois Marie Arouet Voltaire (1694-1774), (2) Immanuel Kant (1712-1804), (3) Arthur Schopenhauer (1788-1860), (4) Ralph Waldo Emerson (1803-1882), (5) Henry David Thoreau (1817-1862), (6) Friedrich Nietzsche (1844-1900), (7) George Wilhelm Friedrich Hegel (1887-1961), (8) Cyril Edwin Mitchinson Joad (1891-1953), (9) Houston Smith (1919).

Arouet Voltaire antara lain mengatakan, bahwa “ sangat penting untuk dicatat bahwa sekitar 2500 tahun yang lalu paling tidak Pythagoras pergi dari Samos ke Gangga untuk mempelajari ilmu ukur. Tetapi ia pasti tidak akan melakukan perjalanan yang demikian aneh seandainya reputasi dari ilmu para Brahmin tidak hadir sejak lama di Eropa “. Disamping itu Arouet Voltaire juga mengatakan bahwa ilmu astronomi, astrologi, pengetahuan tentang reinkarnasi, dan lain-lainnya telah turun kepada kita dari tepi sungai Gangga.

Demikian pula dengan Filsuf-Filsuf yang lainnya memberikan pujian kepada ajaran Hindu tidak kurang dari pujian yang diberikan oleh Voltaire.

Weda sebagai lampu penuntun kehidupan umat Hindu, dinyatakan sebagai Agama Terbesar di Dunia. Dari segi jumlah pengikutnya, hampir satu milyar, tersebar diseluruh belahan bumi dan bangsa di dunia ini.

Secara umum, sebuah agama yang benar memiliki hal-hal sebagai berikut : satu keyakinan dan bentuk pemujaan, satu aturan resmi mengenai doktrin dan disiplin, satu sejarah agama, satu kongregasi (jemaah/penyembah), pendeta, misionaris, kitab-kitab suci, tempat sembahyang, pelayanan (kebaktian) agama yang regular, sekolah teologi (calon mendidik pendeta) dan sekolah-sekolah agama.

Agama Weda (Hindu) melampaui syarat untuk semua hal itu. Keyakinannya merupakan satu set keyakinan tentang karma, reinkarnasi, keberadaan Tuhan yang melingkupi segalanya dan jalan untuk kebebasan (moksha). Bentuk-bentuk pemujaannya sangat kompleks (termasuk perayaan-perayaan, tirtayatra seperti Kumbhamela, yang merupakan pengumpulan orang terseser di dunia. Lebih dari 45 juta pada tiap kesempatan. Bandingkan pengumpulan orang di Mekah waktu musim Haji hanya 2 juta orang. Ditambah lagi dengan mistikal dan kekuatan yang energik dari kehidupan sehari-hari setiap orang Hindu. Doktrinnya sangat luas, disiplinnya kaya dalam Yoga, pengakuan, penyesalan, meditasi dan penyucian.

4. STRUKTUR WEDA

Weda adalah kitab suci yang memuat petunjuk untuk berbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Berdasarkan materi, isi dan luas cakupannya, maka jenis Weda itu banyak. Maha Resi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smerti. Pembagian ini juga dipergunakan untuk menamakan jenis buku yang dikelompokkan sebagai kitab Weda, baik yang telah berkembang dan tumbuh menurut tafsir sebagaimana dilakukan secara turun temurun menurut tradisi maupun sebagai wahyu yang berlaku secara institusional ilmiah. Kelompok **Weda Sruti**, adalah Weda yang isinya berasal dari wahyu. Kelompok **Weda Smerti**, isinya bersumber dari Weda Sruti, merupakan manual, buku pedoman yang memuat penjelasan lebih rinci, untuk bekal kehidupan manusia sehari-hari. Isinya tidak boleh bertentangan dengan Weda Sruti.

Baik Weda Sruti maupun Weda Smerti, keduanya merupakan sumber ajaran agama Hindu, yang tidak boleh diragukan kebenarannya.

Pernyataan di atas dipertegas oleh penjelasan dalam Manawa Dharmasastra sebagai berikut :

Mdv. II.6 :

*idāniñ dharma pramānamyāha
vedo khilo dharma mūlam
smṛtiṣīle ca tadvidām.
ācāraścaiva sādḥūnūm
ātmanastuṣ ṭ ir eva ca.*

“ Seluruh pustaka suci Weda merupakan **sumber pertama dari dharma**, kemudian **adat istiadat**, lalu **tingkah laku yang terpuji dari orang-orang bijak** yang mendalami ajaran suci Weda; **juga tatacara kehidupan orang suci**“.

Buku II.10 :

*śrutis tu vedo vijneyo
dharmasāstram tu vai smartih,
te sarvārtheṣ va mīmāṃsye
tābhyām dharmo hi nirbahau.*

“ Yang dimaksud dengan Sruti, ialah Weda dan Smerti adalah Dharmasastra, kedua macam pustaka suci ini tak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma “.

Pustaka suci Weda sebagai Sruti, tidak dapat diubah, karena berupa wahyu Tuhan yang diterima oleh mahluk suci yang terpilih, dan bersifat universal, mengatasi dan berlaku pada semua tempat, semua manusia dan semua zaman. **Hukum Weda tidak memerlukan pengakuan, perlindungan siapapun, tetap berlaku dan mengikat umat manusia.**

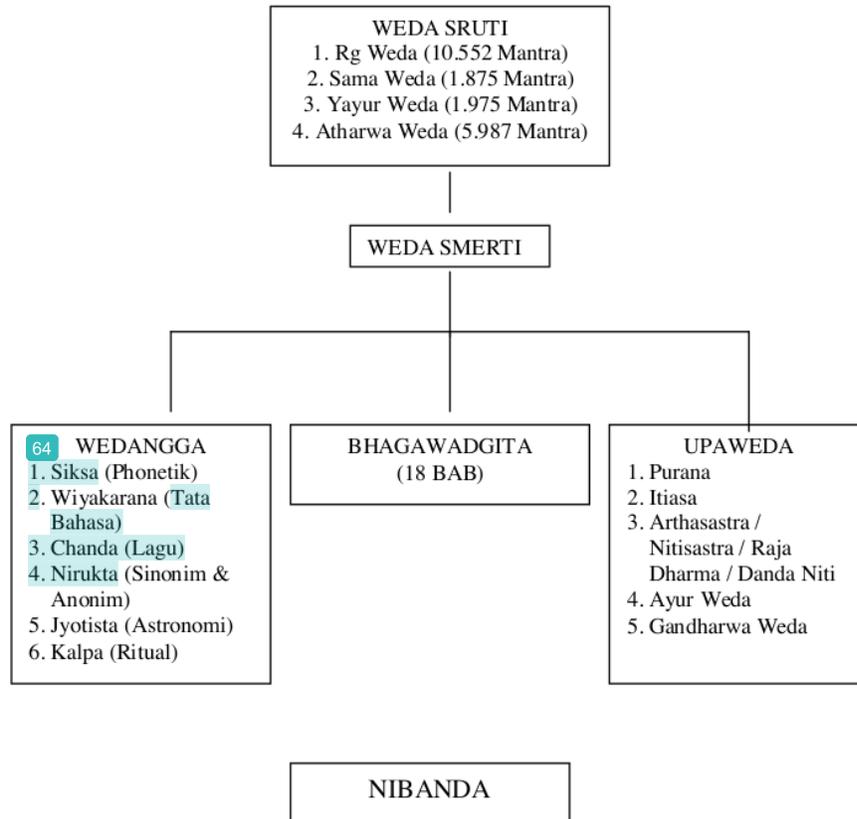
Smerti merupakan peraturan pelaksanaan dari ayat-ayat yang ada dalam Sruti, disesuaikan dengan **tempat, waktu dan kondisi (desa, kala, patra)** masyarakat yang akan menggunakan. Smerti ini bersifat fleksibel, mengikuti perubahan sesuai tempat (desa), waktu (kala) dan kondisi (patra) masyarakatnya. **Perubahan pada Smerti tidak memerlukan perubahan pada Sruti.**

Oleh karena struktur Weda seperti yang dijelaskan di atas secara ringkas, serta struktur Weda sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini, menyebabkan ajaran Weda masih dapat bertahan sampai saat ini, yaitu sejak kelahirannya beberapa ribu tahun yang lalu, bahkan sampai dimasa yang akan datang dalam kurun waktu yang tidak terbatas.

Adapun bagan struktur Weda yang memberikan gambaran mengenai posisi Weda Sruti dan Weda Smerti secara garis besar sebagai berikut :

Bagan I.1.

BAGAN STRUKTUR VEDA



Sumber : I Gusti Made Ngurah, tahun 1988
Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali, tahun 2003.

Perlu menguraikan Struktur Weda, karena Akuntansi Hindu yang menjadi sasaran kajian ternyata diuraikan dalam Buku Arthasastra dengan cukup jelas.

Arthasastra masuk dalam kelompok Weda Smerti, dengan sub kelompok Upaweda. Kelompok Upaweda, dapat pula disebut dengan Nitisastra, Raja Dharma, dan Dandaniti.

Disamping itu dari Struktur Weda dapat diketahui betapa luasnya cakupan ilmu yang terdapat di dalamnya. Setiap bagian dari ilmu tersebut sudah dibukukan dengan baik dan rapi, sehingga para pecinta ajaran Weda dapat mempelajarinya dengan mudah.

Jumlah buku WEDA SRUTI (turunnya melalui Wahyu Tuhan) dan WEDA SMERTI (tafsiran oleh fihak yang kompeten), lebih kurang sebanyak 244 buah. Apabila ditambah dengan NIBANDA (ada kaitannya dengan Weda) yang berjumlah sebanyak 54 buah, maka jumlahnya menjadi paling sedikit sebanyak 298 buah.

Sesuai Bagan Struktur Weda yang disusun oleh I Gusti Made Ngurah, tahun 1988, posisi Weda dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu : 1) Weda Sruti dan (132) Weda Smerti. Yang termasuk dalam kelompok Weda Sruti adalah : 1) **Reg Weda** ; 2) **Sama Weda** ; 2) **Yajur Weda** dan 4) **Atharwa Weda**.

Kumpulan mantra (stanza) dari ke-empat Weda Sruti tersebut adalah **20.389**, dengan rincian : **Rg. Weda 10.552 mantra; Sama Weda 1.875 mantra; Yajur Weda 1.975 mantra**, dan **Atharwa Weda 5.987 mantra**.

Arthasastra termasuk dalam sub kelompok Weda Smerti. Kelompok pertama dari Weda Smerti adalah : Wedangga dan (64) Upa Weda.

Wedangga memiliki unsur-unsur : 1) **Siksa** (Phonetik); 2) **Wyakarana** (Tata Bahasa); **Chanda** (lagu); 4) **Jyotista** (Astronomi); 5) **Kalpa** (Ritual). Selanjutnya, Upa Weda memiliki unsur-unsur : 1) **Purana** ; 2) **Itihasa**; 3) **Arthasastra /Niti sastra / Raja Dharma / Danda Niti**; 4) **Ayur Weda**; 5) **Gandarwa Weda**.

Kelompok Smerti yang terakhir adalah **BHAGAWADGITA** dengan **700 sloka** atau sekitar **3,34 % dari 20.389** jumlah mantra yang ada pada ke-empat Weda.

Kelompok lainnya yang disebut dengan **NIBANDA** (ada kaitannya), mempunyai 15 Sub Kelompok yaitu : 1) **Sarasmusccaya**; 2) **Purwamimamsa**; 3) **Bhasya**; 4) **Brhatika**; 5) **Agama/Tantra**; 6) **Brahmasutra**; 7) **Wedantasutra**; 8) **Wahya**; 9) **Brahmamimamsa**; 10) **Uttaramimamsa**; 11) **Wariga** (dengan 8 subbagian); 12) **Gubahan dari Itihasa** (dengan 16 subbagian); 13) **Puja Mantra** (dengan 10 subbagian); 14) **Kelompok Babad** (75) dengan 2 subbagian); dan 15) **Kelompok Tantri** (dengan 9 takep lontar).

Hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintahan, **Ekonomi**, **Akuntansi**, **Politik**, **Sosial dan Budaya** diuraikan dalam Buku Arthasastra.

Arthas (36) a sebagai kelompok ilmu mempunyai sub kelompok terdiri dari 10 jenis, yaitu : 1) **Usana**; 2) **Nitisara**; 3) **Sukraniti**; 4) **Manawa Dharmasastra**; 5) **Purwadigama**; 6) **Agama**; 7) **Sarasamusccaya**; 8) **Dewadigama**; 9) **Nagarakramasasana**; dan 10) **Wratiasana**.

Untuk menggambarkan Struktur Weda selengkapnya, dalam buku ini disajikan dalam lampiran 1.

5. MENGGALI DASAR-DASAR AKUNTANSIHINDU MELALUIVEDA DAN ARTHASASTRA

5.1. Sumber Akuntansi Dari Weda

Yang menjadi sasaran pencatatan dan pelaporan oleh akuntansi adalah kekayaan atau aset dari individu ataupun entitas atau badan usaha.

Di dalam uraian beberapa aya (50) ri veda ditemukan penjelasan yang berkaitan dengan kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Kepada Manusia. Hal ini berarti uraian dalam ayat Weda tersebut berkaitan dengan akuntansi, maka layak ditelusuri (21) lebih jauh.

Dalam Rgveda X.60.12 ditemukan penjelasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia kepada manusia berupa kekayaan yang diletakkan ditangan kanannya. Kekayaan yang diletakkan ditangan kanan tersebut agar lebih bermanfaat harus dipinda (49) n ketangan kiri, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak lagi.

Selanjutnya dalam Atharvaveda VII.115.3 dijelaskan bahwa sejak kelahirannya manusia telah mewarisi kekayaan yang tak terkira banyaknya. Manusia dituntut untuk memanfaatkan kekayaan tersebut secara bijaksana dan tidak boleh menghamburkannya atau digunakan dengan tujuan yang tidak mensejahterakan masyarakat.

Kekayaan yang dikaruniakan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan ditaruh di samudra (laut dalam) (Rgveda VII.6.7), juga kekayaan disembunyikan di gunung-gunung dan kekayaan tersebut tidak bisa habis (Rgveda I.130.3), kekayaan juga disembunyikan di hutan-hutan dan diperairan (laut dangkal dan danau) serta di dalam api (Rgveda I.59.3), selanjutnya dijelaskan pula bahwa ada kekayaan yang tersembunyi di langit dan di perut bumi (Rgveda VIII.40.4).

³⁸ temukan pula penjelasan bahwa kekayaan dapat diperoleh melalui perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Pedagang melakukan kegiatan bisnis dengan melakukan pembelian dan penjualan barang (Atharvaveda III. 15. 1 & 4)

Kekayaan dapat diperoleh melalui usaha perdagangan luar negeri yaitu ekspor dan impor. Sesuai dengan bunyi ayat Veda berikut, para pengusaha didorong untuk melakukan perdagangan luar negeri untuk kemajuan perusahaannya dan melipat gandakan kekayaannya. Penjelasaannya antara lain ditemukan pada Rgveda I. 49.3 “hendaknyalah mereka membawa kekayaan dari negeri-negeri disebelah laut”; para pedagang memperoleh kekayaan dengan berdagang melalui rute laut (Rgveda I.67.2).

Para pengusaha dalam menjalankan perusahaannya harus bertindak efektif, efisien dan ekonomis sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik (Atharvaveda XIX. 8.2)

Tatacara menyimpan kekayaan juga diberikan petunjuk, yaitu harus disimpan ditempat yang aman. Pengertian menyimpan kekayaan secara fisik harus ditempat yang aman berlaku untuk kekayaan yang bersifat lancar, utamanya uang kas dan juga aset yang mudah dicuri, seperti barang-barang persediaan. Uang kas hendaknya disimpan di Bank yang bonafide, sedangkan aset fisik lainnya hendaknya dibuatkan tempat penyimpanan yang baik dan aman. Dalam pengertian adanya kewajiban menyimpan kekayaan secara aman juga termasuk ¹³⁵ tata sistem pencatatan dan pelaporan dari kekayaan tersebut (Rgveda VII. 86.8). Dalam hal ini diperlukan suatu sistem akuntansi dari aset yang baik.

Raja selaku kepala pemerintahan kerajaan agar dapat menjalankan pemerintahan yang baik, benar dan adil memerlukan biaya yang besar. Sudah disadari sumber pembiayaan pemerintah kerajaan pada saat itu adalah dari pajak. Dijelaskan bahwa sumber penghasilan bagi pemerintah kerajaan adalah pajak-pajak yang dibayar oleh rakyat. Disamping pajak, sumber penghasilan pemerintah juga berasal dari hasil hutan, hasil laut, hasil dari sungai-sungai, pertambangan, perkebunan dan sebagainya (Rgveda III. 51.5).

Dijelaskan pula bahwa yang pertama kali memperkenalkan sistem perpajakan adalah “**Dewa Yama**” (Atharvaveda VI.116.2)

Pemerintah seharusnya mengetahui dengan baik berbagai sumber yang dapat menghasilkan pajak dan cara memungutnya, serta mengatur dengan peraturan perundangan tentang tatacara pemungutannya dari rakyat (Rgveda VII.6.5).

Memungut pajak dari rakyat harus dilandasi dengan undang-undang, karena pajak pada dasarnya adalah mengambil bagian dari hak atau kekayaan rakyat. Setelah pemungutan pajak dilandasi dengan peraturan perundangan, maka setelah pajak dipungut harus ditata usahakan dengan tertib dan teratur agar terhindar ¹⁸⁴ dari kemungkinan kecurangan sejak pemungutan dan penggunaannya. Pada sisi ini diperlukan adanya sistem akuntansi perpajakan yang baik dan benar.

5.2. Sumber Akuntansi Dari Arthasastra

Arthasastra dinyatakan ditulis sekitar tahun 321-296 Sebelum Masehi oleh Kautilya yang dikenal juga sebagai Vishnugupta. Dengan demikian, sampai saat ini, Arthasastra telah berumur lebih dari 2000 tahun.

Dalam Struktur Veda, Arthashastra masuk dalam kelompok Upaweda, yang berada satu kelompok dengan Purana, Itihasa, Ayur Veda dan Gandharwaweda. ⁵⁸ Arthashastra dinyatakan sebagai karya klasik yang menguraikan tentang politik tata negara, ekonomi, budaya dan sebagainya, bahkan dianggap sebagai sebuah manual bagi seorang pemimpin dalam mengelola Negara.

Dalam Arthashastra terdapat ungkapan yang sangat filosofis dan sangat baik bila dapat diterapkan oleh seorang pemimpin yaitu ⁴¹ “ **Pada kebahagiaan rakyatlah letak kebahagiaan seorang raja (pemimpin), apa yang bermanfaat bagi rakyat juga bermanfaat bagi raja. Apa yang berharga bagi dirinya (raja) belum tentu berharga bagi rakyatnya, tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya tentu berharga bagi dirinya (raja) (Buku I, bab 19, ayat 34).**

Masalah betapa pentingnya sistem pencatatan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan atas kekayaan Negara ditemukan uraiannya pada Arthashastra Buku II yang terdiri dari 36 Bab, yaitu menjelaskan **Tugas dan Fungsi Para Kepala Departemen.**

Mengenai betapa pentingnya sistem pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas kekayaan yang bersifat fisik milik kerajaan, ditemukan uraiannya pada Buku II, bab 2, ayat 11, yang menyatakan bahwa **Pimpinan Pengawas Hutan dan Gajah** wajib membuat catatan tertulis atas gajah-gajah yang ada di hutan, baik gajah yang bergerak secara kelompok, bergerak sendirian, gajah yang tersesat dari kelompoknya, gajah liar, gajah mabuk, anak gajah dan gajah yang dilepas dari kurungannya.

Terhadap gajah-gajah yang ada di hutan belantara saja harus dilakukan pencatatan secara detil seperti itu, dengan demikian, dapat diperkirakan aset kerajaan yang lainnya yang jauh lebih berharga, pasti tata cara pencatatan dan pelaporannya jauh lebih teliti, tertib dan teratur, sehingga dapat terhindar dari kemungkinan kecurangan dan lainnya.

Barang-barang milik kerajaan disamping harus dicatat dengan tertib dan teratur juga harus disimpan dalam gudang pemerintah yang baik. Disamping itu, barang-barang tersebut juga harus diawasi secara teratur oleh pengawas keuangan yang independent (Buku II, bab 4, ayat 10).

Catatan dan laporan aset Negara yang dibuat oleh para pejabat pemerintah, dimana laporan tersebut harus disimpan dengan baik, karena data dalam laporan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang memerlukan sampai dengan kurun waktu 100 tahun (Buku II, bab 5, ayat 22).

Dalam akuntansi dikenal beberapa prinsip yang harus ditaati dalam pelaksanaannya, seperti prinsip **perlakuan akuntansi** yang terdiri dari prinsip : **(1) pengakuan, (2) pengukuran, (3) penyajian, dan (4) pengungkapan.** Prinsip perlakuan akuntansi sudah diterapkan dalam Arthashastra. Prinsip lainnya, seperti **prinsip kas** dan **prinsip akrual.** Arthashastra ternyata bukan menerapkan prinsip kas suatu prinsip yang sederhana, tetapi menerapkan prinsip akrual, yaitu prinsip akuntansi yang digunakan saat ini dalam dunia akuntansi modern. Contoh telah diterapkannya prinsip akrual dalam akuntansi dapat dijumpai antara lain pada Buku II, bab 5, ayat 13, yang antara lain menyatakan bahwa pendapatan negara dapat berasal dari pendapatan yang bersumber dari tagihan (piutang), disamping dari sumber lainnya, seperti saldo lebih anggaran.

Para pengawas keuangan negara terdiri dari para **akuntan** yang telah mendapat pendidikan yang cukup dalam teori akuntansi dan auditing, serta cukup pengalaman dalam praktek audit. Dalam Buku II, bab 7, ayat 16, 22, 34 ditemukan sebutan “ **akuntan** “, (**Sanskerta = Samkhyayaka; Bali = Akontan**), sedangkan pada beberapa ayat lainnya ditemukan kata “ **mengecek, memeriksa, mengaudit, mengawasi** “, yang boleh dikatakan semua istilah tersebut berkaitan dengan pekerjaan para akuntan.

Kata akuntan dan kata pengawas, juga ditemukan pada beberapa ayat dalam Buku II, bab 8.

Berkaitan dengan beberapa hal lainnya, seperti masalah terminology Debet (D) dan Kredit (K), jenis-jenis akun, masalah perpajakan, dan sebagainya akan diuraikan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

6. AKUNTANSI DALAM KERANGKA DASAR AJARAN HINDU

Ilmu akuntansi digali dari kasanah Veda, yaitu dari Sruti terdiri dari Rg. Veda, Sama Veda, Jayur Veda dan Atharva Veda, serta dari Smerti yang terdiri dari Wedangga, Bhagavadgita dan Uvaveda. Sedangkan dari kelompok Susila atau Etika Hindu terdiri dari Catur Warga/Catur Purusartha, Catur Marga, Trikaya Parisuda.

Akuntansi dalam kaitannya dengan Tatwa/Folpsofi, masuk dalam kelompok percaya dengan hukum karma (hukum kerja/perbuatan), sedangkan dengan Etika (susila) berkaitan dengan Trikaya Parisuda, selanjutnya berkaitan dengan ritual/upacara bertalian erat dengan Manusia Yadnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas berikut ini dikutipkan gambaran ringkas tentang Skema Kerangka Dasar Agama Hindu secara garis besar terdiri dari : (1)Tatwa/Filosofi ; (2)Susila/Etika dan (3) Upacara/Ritual sebagai berikut :

6.1. Tatwa/Dogma/Filosofi

Tatwa ajaran Hinduterdiri dari Panca Srada, lima dasar kepercayaan, yaitu :

- (1.1) Percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa
- (1.2) Percaya dengan adanya Atman
- (1.3) Percaya dengan Hukum Karmapala
- (1.4) Percaya dengan Purnabawa/ Reinkarnasi
- (1.5) Percaya dengan Moksa (manunggaling Atman dengan Parama Atman)

6.2 Susila/Etika

Dalam rangka menjalani kehidupan di jagat raya ini, manusia wajib memperhatikan susila/etika, sopan santun, tatakrama dalam pergaulan baik yang dilakukan terhadap unsur alam yang mempunyai jiwa/roh, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhna, dan lainnya, serta unsur alam yang tampak tanpa tanpa roh, seperti tanah, batu-batuan, dan sebagainya, agar tercipta masyarakat yang tertib, teratur, aman, damai, berkeadilan dan berkemakmuran.

Secara garis besar Susila/Etika terdiri dari 23 (dua puluh tiga) unsur, dan masing-masing unsur dirinci lagi dalam subunsur yang berfungsi sebagai standar operating prosedur (SOP) sehingga dengan mudah dapat dilaksanakan.

Unsur-unsur dari Etika/susila adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1). Catur Marga | 13). Catur aiswarya |
| 2). Tri Kaya Parisuda | 14). Sad Paramitha |
| 3). Yama Niyama Brata | 15). Astha siddhi |
| 4). Dasa Dharma | 16). Dasa Paramartha |
| 5). Catur Purusartha. | 17). Tri Brata. |
| 6). Catur Paramitha | 18). Tri Sadhana |

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 7). Tri Hita Karana | 19). Dasa Sila |
| 8). Astha Bratha | 20). Tri Parartha. |
| 9). Sad Mitra | 21). Catur Prawrthi |
| 10). Sad Guna | 22). Wiweka |
| 11). Asada Baratha | 23). Tatwan Asi |
| 12). Dasa Indria | |

6.3. Upacara/Ritual

Upacara terdiri dari lima unsur besar yang disebut dengan Panca Yadnya. Masing-masing unsur memiliki subunsur. Masing-masing Subunsur terbagi lagi kedalam teknik-teknis pelaksanaan yang berfungsi sebagai standar operating prosedur (SOP).

Adapun unsur-unsur dari Upacara/Ritual adalah :

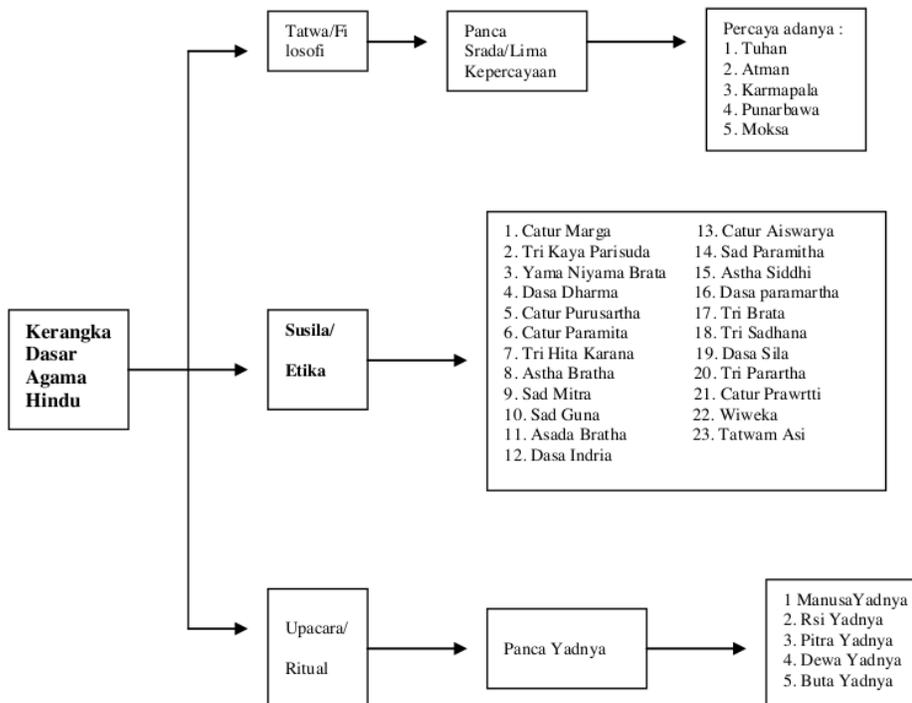
- 1) Manusia Yadnya
- 2) Rsi Yadnya
- 3) Pitra Yadnya
- 4) Dewa Yadnya
- 5) Buta Yadnya

6.4. Bagan Kerangka Dasar Agama Hindu.

Kerangka dasar Agama Hindu sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam sebuah Bagan, maka terlihat seperti berikut ini.

Bagan I.2

KERANGKA DASAR AGAMA HINDU



Sumber : Sukardana, **Catur Marga**, Paramita, Surabaya, 2010.

Berdasarkan Bagan Kerangka Dasar Agama Hindu di atas, yang pada pokoknya terdiri dari tiga hal, yaitu **(1) Tatwa/Filosofi**, **(2) Susila/Etika**, dan **(3) Upacara/Ritual**, maka dari ketiga Dasar Agama Hindu tersebut yang berkaitan dengan masalah akuntansi pada sisi Tatwa adalah Karma Pala, pada sisi Susila/Etika adalah Tri Kaya Parisuda, sedangkan dalam kelompok pelaksanaan Upacara/Ritual adalah **Manusia Yadnya**. Untuk melaksanakan upacara yang terdiri dari 5 jenis upacara, yaitu : **(1) Manusia Yadnya; (2) Rsi Yadnya; (3) Pitra Yadnya; (4) Dewa Yadnya; dan (5)**

Buta Yadnya, manusia memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dalam pengertian fisik dan non fisik. Pengorbanan fisik maupun non fisik dapat dinilai dengan uang. Apabila jumlah pengelurannya cukup material maka perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib dan teratur. Untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan secara tertib dan teratur serta kewajiban pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan bagi pengelolanya secara baik, maka peran akuntansi keuangan sangat diperlukan. Apalagi kalau di Bali, umat Hindu pada umumnya dalam melaksanakan Panca Yadnya tersebut lebih sering melibatkan pengeluaran materi yang cukup besar.

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

- P.1-1. Berikan komentar atas pernyataan Sarasamusccaya butir V yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “ Tidak ada sastra di dunia ini, jika tidak ada bantuan dari ajaran Bhagavan Byasa, seperti halnya manusia tidak akan ada, jika tidak ada bantuan makanan “.
- P.1-2. Jelaskan pemahaman Saudara tentang pernyataan Kautilya, bahwa Veda berfungsi sebagai payung kehidupan manusia di dunia ini.
- P.1-3. Menurut Kautilya, bahwa manusia perlu memahami beberapa jenis ilmu dalam menjalani kehidupannya. Sebutkan jenis-jenis ilmu yang dimaksud.
- P.1.4. Ilmu akuntansi dinyatakan sebagai bagian dari ilmu ekonomi, benarkan demikian ? Jelaskan pendapat Saudara.
- P.1-5. Jelaskan obyek dan subyek dari akuntansi pada zaman Arthasastra.
- P.1-6. Apakah obyek dan subyek akuntansi sejak zaman Arthasastra sampai dengan zaman ini mengalami perubahan ?
Apabila Saudara menjawab Ya maupun Tidak harap diberikan alasannya.
- P.1-7. Dalam menelusuri Akuntansi Hindu dimulai dengan mempelajari/menelusuri kisah atau riwayat Ramayana dan Mahabharata. Apa alasan yang mendasari mempelajari Akuntansi Hindu harus melalui riwayat Ramayana dan Mahabharata ?
- P.1-8. Sebutkan nama kerajaan dan ibukotanya serta nama rajanya yang terkait dengan Ramayana.
- P.1-9. Apakah kisah Ramayana memang benar-benar ciptaan Rsi Walmiki ?
- P.1-10. Saudara tunjukkan kapan Ramayana terjadi. Berikan perhitungannya.
- P.1-11. Jelaskan penemuan citra oleh Satelit NASA tentang dasar jempatan yang ada di Selat Falk yang menghubungkan India Selatan dengan pulau Saylor (Srilangka)
- P.1-12. Dengan adanya penemuan (citra) Satelit NASA seperti dijelaskan di atas bagaimana pendapat Saudara tentang Ramayana ?
- P.1-13. Bagaimana pendapat Sudara Tentang Bharatayuga ?
- P.1-14. Menurut perhitungan para ahli sejarah dan ahli astronomi, kapan Barathayuda diperkirakan terjadi ?
- P.1-15. Kapan Sri Krishna diperkirakan meninggalkan dunia ini ?.
- P.1-16. Pada zaman apa terjadinya perang Bharata (Bharathayuda) tersebut, dan pada tahun berapa jika dihitung dari sekarang.
- P.1-17. Jelaskan apa saja yang terjadi pada tanggal 18 Februari tahun 3.102 Sebelum Masehi ?
- P.1-18. Jelaskan komposisi pasukan yang terlibat dalam pertempuran Barathayuda.
- P.1-19. Kenapa komposisinya seperti itu ?
- P.1-20. Apabila dihitung dengan Rupiah dengan prinsip kehati-hatian berapa kira-kira biaya perang Bharatha tersebut ?. Sertakan perhitungannya !.
- P.1-21. Dari pihak manakah yang sebenarnya menginginkan perang tersebut ?

- P.1-22. Sebutkan kerangka dasar ajaran Hindu.
- P.1-23. Berapa lamakah perang Bhartha berlangsung ?
- P.1-24. Jelaskan berapa jumlah mantra (sloka) yang ada pada ke-empat Veda, yaitu Rg. Veda, Jayur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Tunjukkan secara rinci jumlah mantra pada masing-masing Veda dimaksud.
- P.1-25. Kelaskan berapa jumlah mantra yang ada dalam Bhagavadgita. Harap Saudara rinci jumlah mantra yang dimuat pada masing-masing bab (Bhagavadgita dengan 18 bab).
- P.1-26. Harap Saudara hitung, berapa prosen jumlah mantra dalam Bhawavadgita dibandingkan dengan jumlah mantra dalam ke-empat Veda, sesuai pertanyaan P.1.25 di atas.
- P.1-27. Menurut Barathayuda, berapa jumlah pasukan dari pihak Korawa dan Padawa ?. Siapa yang menentukan jumlah pasukan dari kedua belah pihak tersebut.
- P.1-28. Jumlah pasukan Pandawa lebih kecil dari Korawa, kenapa pihak Pandawa mau dengan jumlah pasukan lebih kecil tersebut.
- P.1-29. Jelaskan secara garis besar hubungan akuntansi dengan tatwa/filosofi Hindu, dengan etika/susila, dengan ritual/upacara.

AKUNTANSI HINDU

“ Aksetravat ksetravidam hyagrata, sa m¹⁹⁸ ksetravidanusistah, etad vai bhadrām anusasanasyo, ta khuti vindatyasjasinam “ (Rg. X 32. 7)

“ Orang yang tidak mengenal suatu tempat bertanya kepada orang yang mengetahuinya; ia meneruskan perjalanan, dibimbing oleh orang yang tahu; inilah manfaat pendidikan; dengan cara itulah seseorang bisa mencapai hal-hal yang diinginkan dengan mulus “ (Rg. X 32. 7)

BAB II

10

VEDA SUMBER SEGALA ILMU PENGETAHUAN

1. VEDA SEBAGAI SUMBER ILMU PENGETAHUAN

Veda sebagai sumber pengetahuan dinyatakan dalam Kata Pengantar terjemahan Rigveda Mandala I s.d III, yang menyatakan bahwa kitab-kitab Veda menjadi sumber utama dari pengetahuan berikutnya yang mengikuti dan selanjutnya menghidupkan kepustakaan umat manusia selama ribuan tahun.

Pada bagian selanjutnya dipertegas lagi bahwa Veda sebagai Buku Sumber Pengetahuan, karena teisme Veda menggabungkan sejumlah konsep, antara lain :

- (i) penerimaan akan konsep keberadaan Tuhan (Brahman/Hyang Widhi) tertinggi tak terbatas, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Mulia, Maha Cemerlang, dsb.nya;
- (ii) penerimaan akan realitas ciptaan Tuhan yang dinamis dan berguna, serta penghargaan atas seni ilahi ini;
- (iii) penerimaan akan konsep bahwa Tuhan memperlihatkan diri-Nya dalam ciptaan dan seni-Nya ini; dan ciptaan didasarkan pada prinsip, hukum, tatanan dan kegunaan yang seragam.
- (iv) penerimaan akan prinsip bahwa Tuhan merupakan sumber segala pengetahuan, yang diperlihatkannya kepada manusia melalui tiga jalan : melalui ciptaan ilahi; melalui kata-kata ilahi dan melalui inspirasi ilahi, sehingga tak ada pertentangan antara apa yang diamati melalui belajar tentang ciptaan ilahi (ilmu pengetahuan), kata-kata ilahi

- (v) (mempelajari Veda) dan isnpirasi ilahi (yang sampai kepada beberapa orang terpilih dalam garis perguruan khusus, yaitu para Rsi dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan f ilsafat serta pengalaman mistik; penerimaan akan prinsip bahwa Tuhan sendiri merupakan sumber dari nilai-nilai kehidupan etika tertinggi dan
- (vi) penerimaan akan prinsip bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang mengetahui hamba-Nya dan menghadiahinya dengan hasil dari perbuatannya sendiri, baik maupun buruk.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Veda secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu ilmu tentang ilahi (spiritual), dan ilmu yang bersifat material.

Ilmu yang bersifat ilahi atau spiritual adalah ilmu yang mempelajari dan menekankan pada bidang kerohanian atau Dharma. Sedangkan ilmu yang bersifat material adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersifat kebendaan atau bersifat nyata. Ilmu ekonomi dan ilmu akuntansi termasuk dalam kelompok ilmu kebendaan atau material.

2. JENIS-JENIS DAN MANFAAT ILMU

2.1. Ilmu Murni dan Ilmu Terapan

Pada kurun waktu 321-296 Sebelum Masehi (SM) sampai dengan 150 Masehi, di India terdapat sebuah kerajaan besar, bernama Maghada, dengan raja Chandragupta Maurya. Kerajaan tersebut sebelumnya dipimpin oleh seorang raja dari dinasti Nanda, dengan nama Dhana-Nanda. Raja Dhana-Nanda dikenal sangat arogan. Pada saat diadakan perayaan besar kerajaan, raja Dhana-Nanda melalui menternya mengundang Kautilya yang berkedudukan sebagai seorang Brahmin dari daerah Kerala, India Utara. Tugas yang diberikan kepada Kautilya adalah sebagai pemimpin upacara keagamaan, yaitu sebagai pendeta Lokapalasaraya. Namun karena kehadiran Kautilya yang sangat sederhana, raja Dhana-Nanda menjadi marah, dan memerintahkan mengusir Kautilya (Canakya) dari tempat upacara. Perintah raja diterima pada saat Kautilya baru memulai makan. Sehubungan dengan itu, Kautilya berjanji dalam hatinya akan menghancurkan kerajaan yang dipimpin oleh Dhana-Nanda. Kautilya adalah alumni dari perguruan tinggi negeri terkenal di Kota Taxila, India Utara (sekarang masuk wilayah Pakistan), sangat ahli dalam bidang filosofi Veda.

Dalam sebuah sayembara tentang filosofi Veda, yang dilakukan di Pataliputra, ibu kota dari kerajaan Nanda, ternyata Kautilya keluar sebagai juaranya.

Hal ini dijelaskan dalam Arthasastra, susunan Rangarajan, halaman 4, tentang Legenda Kautilya (Kautilya-The Legend), antara lain sebagai berikut :

“ Another is that he was a North Indian Brahmin, born and educated in the famous University town of Taxila, who came to Pataliputra to win laurels in philosophic disputation “.

“ Beliau adalah Brahmin berasal dari India Utara, dilahirkan dan menempuh pendidikan di Universitas terkenal di kota Taxila, datang ke Pataliputra untuk memperoleh juara dalam pertandingan bidang filosofi “.

Setelah kejadian Kautilya (Chanakya) diusir oleh raja Dhana-Nanda, Kautilya mengembara sambil mencari sekutu. Dalam pengembaraannya Kautilya bertemu dengan seseorang pemuda bernama Chandragupta Maurya yang sangat cerdas, dan mempunyai cita-cita ingin menjadi pemimpin (raja), dengan tujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Setelah melakukan persiapan secukupnya, dimana Kautilya harus mendidik Chandragupta dalam bidang kepemimpinan dan sebagainya, lalu Kautilya dengan Chandragupta secara bersama-sama memerangi raja Dhana-Nanda, dan akhirnya diperoleh kemenangan.

Sejak saat itu Chandragupta Maurya diangkat menjadi raja dari kerajaan Magada, dengan ibukota Pataliputra. Selama pemerintahan Chandragupta Maurya, kerajaan Magada yang adil dan makmur meliputi seluruh wilayah India zaman dahulu.

Dalam kerajaan, Kautilya berkedudukan sebagai **Menteri dan Penasihat Raja**.

Sesuai dengan keahlian dan jabatannya dalam kerajaan, Kautilya menyusun peraturan perundangan kerajaan yang berhubungan dengan masalah politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, kemiliteran, budaya, yang terhimpun dalam sebuah buku yang bernama **Arthashastra**. Buku tersebut saat ini dipelajari oleh para cerdik pandai diseluruh dunia.

Dalam Buku I. 1 Arthashastra (Kangle 1972), dijelaskan bahwa Arthashastra Kautilya, merupakan rangkuman dari kitab-kitab Arthashastra sebelumnya yang disusun oleh para Maha Guru (Maha Rsi) di zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melindungi bumi.

Sesuai dengan bidang keilmuan dan jabatan yang dipangkunya, Kautilya, telah mengelompokkan ilmu ke dalam 4 (empat) cabang sesuai dengan apa yang diajarkan. Beliau menyatakan, bahwa dengan bantuan filosofi Veda, seseorang dapat belajar tentang kebenaran dan kesejahteraan, karena itulah semua itu disebut dengan Widya (ilmu). Keempat kelompok ilmu tersebut disebutkan dalam Arthashastra, RP. Kangle, I. 2. 11, sebagai berikut :

- 1) kebenaran dan kebatilan tindakan manusia dipelajari dari VEDA. Veda yang merupakan wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) yang menguraikan tentang kesejahteraan dan kemiskinan adalah Ilmu Ekonomi (WARTA)
- 3) yang menguraikan kebijakan pemerintahan yang baik dan buruk adalah ILMU POLITIK (DANDANITI)
- 4). yang memberikan tuntunan kepada anggota masyarakat dalam menegakkan kebenaran berasaskan logika adalah ILMU FILSAFAT (ANVIKSHAKI).

Ilmu filsafat (berasaskan logika), bahkan dipandang sebagai sinar segala ilmu, sebagai alat, dan sebagai penunjang semua hukum dan kewajiban.

Mengacu pada penjelasan dalam Bhagavadgita, oleh Swami Ranganathananda, hal. 14, bahwa menurut ajaran Hindu, ilmu dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Tiap kelompok ilmu sudah ditentukan Dewa/Dewi yang bertugas mengayominya, seperti Dewi Saraswati untuk kelompok ilmu murni dan Dewi Lakshmi untuk kelompok ilmu terapan. Dewi Lakshmi dianggap juga sebagai Dewi Kekayaan. Kelompok ilmu yang dijelaskan oleh Kautilya di atas merupakan kelompok ilmu murni, yang masih harus dikembangkan dan diterapkan dengan berbagai bentuk (pola) sehingga dapat dinikmati dan mensejahterakan dan membahagiakan kehidupan umat manusia.

Masyarakat Hindu di Bali telah mengakui dan menghayati adanya dua kelompok ilmu ini, dibuktikan dengan memberikan penghormatan kepada Dewi Saraswati sebagai

penguasa ilmu murni dengan merayakan Hari Raya Saraswati yang jatuh tiap hari Sabtu/Saniscara, Wuku Watugunung. Perayaannya dilakukan tiap enam bulan sekali. Ilmu murnipun seharusnya mempunyai sub-sub lagi, seperti ilmu murni bidang Pertanian, Industri, Kimia, Ekonomi (Warta), Ilmu Politik (Dandaniti), Ilmu Filsafat yang berasaskan logika (Anvikshaki), ilmu Tehnik, dan yang lainnya. Namun kita tidak banyak mengenal mengenai Dewa/Dewi pengayom dari bagian ilmu murni tersebut. Misalnya, apakah Ida Bhara Rambut Sedana dapat diposisikan sebagai pengayom dari ilmu murni Ekonomi ?.

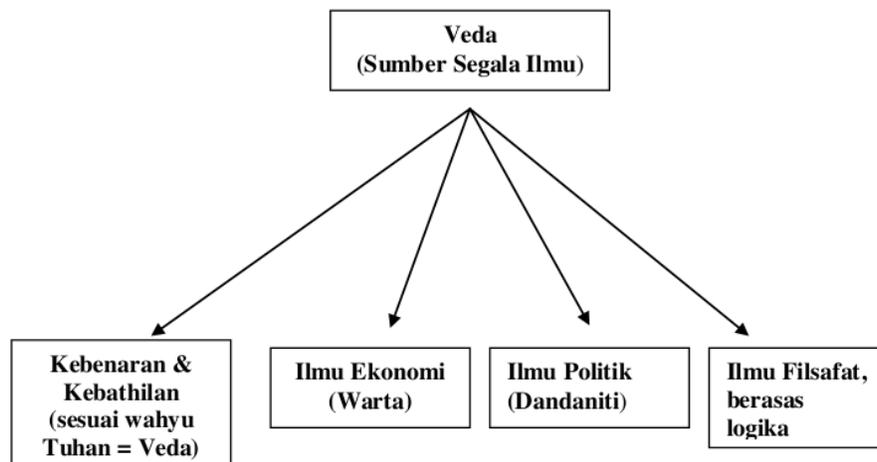
Terhadap ilmu terapan, umat Hindu di Bali juga sudah biasa memberikan penghormatan dengan merayakan pada hari-hari yang telah ditentukan, seperti yang berhubungan dengan Ilmu Pertanian. Ada hari raya untuk tumbuh-tumbuhan yang berbuah seperti kelapa, pisang, dsb.nya, jatuh pada Sa¹⁸³ara Kliwon Wuku Wariga, dengan Dewa/Dewi pengayon Ida Bhatara Sangkara. Hari Raya Tumpek Kandang, yang jatuh pada Saniscara/Sabtu Kliwon Wuku Uye, dengan tujuan memberikan penghormatan kepada Ida bhatara Rudra selaku penguasa binatang piaraan.

Terhadap ilmu¹⁴⁷pan lainnya juga diberikan penghormatan, seperti bidang kesenian, ada Hari Raya Tumpek Wayang, y¹⁹⁵ jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Wayang. Kepada para Dewa¹⁴⁶wi penguasa senjata (alat-alat yang serba tajam), juga ada hari rayanya, yaitu pada Tumpek Landep, yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Landep. Penguasa ilmu terapan yang berhubungan dengan bidang ekonomi, seperti Dewa/Dewi yang bertugas mengayomi tempat berjualan/pasar, biasa disebut dengan Ida Bhatara Melanting. Lalu siapa nama Dewa/Dewi pengayom bidang Ilmu Manajemen dan Akuntansi ?.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat sebuah kerangka atau petunjuk tentang kelompok ilmu murni yang dapat ditarik dari ajaran Kautilyayang diperlukan dalam kegiatan pemerintahan sebagai berikut :

Gambar II.1

Kelompok Ilmu Murni
(Menurut Kautilya)



Sumber : Arthasastra, Kangle 1972, Bk. I. 2. 1-8

2.2. Kebenaran dan Kebatilan

Kautilya menyatakan bahwa masalah kebenaran dan kebatilan tindakan manusia harus dipelajari dari Veda. Veda memberikan petunjuk tentang Tatwamasi (termasuk kelompok ilmu murni), yaitu manusia tidak boleh menyakiti secara fisik makhluk lainnya. Jangankan menyakiti secara fisik, mengeluarkan kata-kata kasar saja kepada manusia dan makhluk lainnya juga dilarang.

Veda memberikan petunjuk yang tegas dan jelas terhadap manusia yang melakukan tindakan kebatilan/kejahatan.

Kepada pelaku kejahatan wajib dikenakan hukuman berat, masalah ini diungkapkan dalam Atharvaveda I.16.4 yang berbunyi “Barang siapa yang membunuh sapi betina, kuda atau manusia, seharusnya ditembak mati dengan sebutir peluru”.

Ayat Veda di atas menekankan kepada penerapan rasa keadilan kepada pelaku kejahatan. Yang melakukan pembunuhan juga harus dibunuh.

Dari sisi ekonomi dan akuntansi, tindakan membunuh sapi betina, membunuh kuda dan manusia, dapat dianalogikan dengan melakukan penghancuran kepada suatu institusi atau lembaga. Membunuh sapi betina sama dengan tindakan merampas kekayaan, baik dalam bentuk uang atau kekayaan lancar lainnya yang dimiliki entitas, sehingga entitas tidak dapat melakukan kegiatannya. Sapi betina merupakan simbol dari aset lancar yang harus dikembangkan oleh perusahaan sehingga kekayaannya dapat berkembang sesuai yang diharapkan.

Membunuh kuda, dianalogikan dengan mengambil paksa aset tetap perusahaan, karena kuda dapat disamakan dengan alat transportasi atau sebagai tenaga penggerak bagi perusahaan. Membunuh manusia, dapat dianalogikan sebagai membunuh pimpinan entitas, yang dapat berakibat fatal bagi entitas tersebut. Sehubungan dengan itu patutlah Veda memberikan petunjuk, kepada pelaku pembunuhan harus dihukum mati juga.

Dalam mengusahakan kemakmuran/kekayaan dan atau berbisnis, maka manusia diharuskan bertindak secara jujur. Petunjuk tersebut ditemukan dalam Rgveda I.30.5 dan RgvedaI. 132.2. Bahkan dalam Rgveda I.104.7, manusia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar beliau berkenan menganugerahkan kekayaan yang bersifat kedewataan atau suci, bukan yang tidak suci.

2.3. Kesejahteraan dan Kemiskinan

Suatu masyarakat dapat menjadi sejahtera atau menderita kemiskinan sebagai variabelnya adalah efektivitas kerja dari masyarakat tersebut. Masyarakat yang rajin bekerja diharapkan dengan mudah memperoleh kesejahteraan. Bagi kelompok masyarakat yang tidak atau kurang rajin bekerja, kemiskinan dapat dipastikan akan menghampiri dan menimpa yang bersangkutan. Gita menyatakan hukum kerja itu sebetulnya merupakan hukum alam (Rta) (Bg.III.5). Manusia dipaksa harus mau bekerja dalam rangka memelihara dan menghidupi dirinya. Permasalahannya adalah manusia mau bekerja secara maksimal atau tidak. Yang mau bekerja maksimal akan memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Yang tidak mau bekerja akan menderita kemiskinan. Gita menyarankan⁴⁸ bahwa manusia harus **bekerja** sesuai dengan **bakatnya** atau **keahliannya**, sebab bekerja lebih baik dari pada tidak bekerja (BG. III.8).

2.4. Kebijakan Pemerintah (Dandaniti/Ilmu Politik).

Dandaniti merupakan ilmu pemerintahan, ilmu tentang kekuasaan, yang pada zaman Arthashastra dipegang oleh para raja.

Dijelaskan bahwa berbagai cara dilakukan untuk menjamin keberadaan dan perkembangan filsafat, keempat Weda dan Ekonomi, namun semua itu tergantung kepada Danda (kekuasaan yang dipegang oleh raja), yang pelaksanaan atau administrasinya merupakan suatu ilmu pemerintahan atau Dandaniti (Ilmu Politik).

Ilmu politik mempunyai tujuan memperoleh apa yang tidak dimiliki, memelihara apa yang telah dimiliki, meningkatkan apa yang ada dan memberikannya kepada yang patut menerimanya.

Pemeliharaan kehidupan dunia tergantung kepada ilmu politik .

Ilmu ekonomi termasuk ilmu Akuntansi, tergantung kepada ilmu politik (Dandaniti) yang dipegang oleh raja (sekarang Presiden atau Perdana Menteri). Sebutan Raja atau Presiden, serta Perdana Menteri atau sebutan lainnya, untuk pemimpin pemerintahan yang ada, tergantung kepada system pemerintahan yang dianut. Ilmu Akuntansi merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi (Warta).

Ilmu Ekonomi dan Ilmu Akuntansi dinyatakan tergantung kepada Ilmu Politik, maksudnya, berkembang atau tidaknya kedua ilmu tersebut sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah.

Mengambil makna dari pernyataan yang diungkapkan oleh Kautilya tersebut di atas, berarti pemerintah kerajaan pada masa itu adalah sangat pro kepada kemajuan ekonomi, baik ekonomi makro dan ekonomi yang bersifat mikro.

Di dalam Arthashastra, Made Astana, dkk, (Bk I. Bab 2. 1-9) ditemukan teks yang menggambarkan dialog antara tokoh-tokoh pemerintahan dan para ahli pada zamannya, mengenai tatacara memilih pemimpin yang terdiri dari Menteri dan Pejabat Pemerintahan lainnya.

Disebutkan tokoh-tokoh yang ikut aktif dalam dialog adalah para Resi, seperti : Rsi Bharadwaya, Wisalaksha, Parasara, Pisuna, Bahudandiputra, dan tentunya Kautilya sebagai pemimpin dialog.

Sebagai hasil dari dialog tersebut sampai kepada simpulan, bahwa apabila pemimpin berasal dari ahli ilmu, tetapi tidak mempunyai pengalaman dalam peraktek, maka akan sulit melaksanakan tugas-tugasnya. Karena dari kemampuan berkejalahan kemampuan seseorang pemimpin dinilai.

Dari ungkapan tersebut tersirat, seorang pemimpin tidak cukup hanya pintar dalam teori, tetapi harus terampil dalam memperaktekan ilmu yang dimilikinya. Mereka haruslah seorang profesional, yaitu ahli dalam teori dan terampil dalam memperaktekan teori tersebut. Pernyataan Kautilya tersebut adalah sesuai benar dengan prinsip ilmu akuntansi, sebagai ilmu terapan. Seorang akuntan adalah seorang profesional, harus mahir dalam teori dan peraktek akuntansi.

Sebagaimana diketahui, ilmu akuntansi, merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan akuntansi tunduk kepada ilmu politik (Dandaniti).

Berdasarkan hubungan ini, dapat disimpulkan bahwa ilmu akuntansi yang berkembang pada zaman tersebut juga sebagai hasil dari kesepakatan-kesepakatan para pejabat pemerintahan dan pengusaha yang ada. Namun semuanya tidak boleh terlepas dari ajaran dalam Veda.

Veda memberikan banyak petunjuk tentang sifat dan tingkah laku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pengertian pemimpin dalam hal ini mencakup arti luas, baik sebagai pemimpin formal dan non formal. Sebagai pemimpin formal, seperti pemimpin pemerintahan dari sebuah Negara (sebagai Raja atau Presiden), pemimpin

pemerintahan dibawah presiden, sampai dengan tingkat Kepada Desa, dan seterusnya. Pemimpin formal disektor swasta, seperti Direktur Utama dan para Direktur lengkap dengan jajarannya. Pada organisasi non formal dimulai dari Kepala Rumah Tangga, Perkumpulan Arisan, dan organisasi-organisasi non formal lainnya. Petunjuk yang diberikan oleh Veda bagi Pemimpin adalah sebagai berikut :

- (1) Harus mencintai rakyatnya tanpa pilih kasih; seorang pemimpin diumpamakan sebagai api, mencintai tanpa pilih kasih kepada seluruh rakyatnya.
- (2) Harus melindungi rakyatnya, dan tidak boleh merugikan mereka;
- (3) Harus melindungi seluruh wilayah negaranya
- (4) Harus mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Petunjuk-petunjuk tersebut di atas antara lain dapat ditemukan dalam ayat-ayat Veda berikut :

Rgveda X.91.2

“ Pemimpin bagaikan api, adalah seorang tokoh yang mencintai sesama manusia dan tidak membenci kepada siapapun. Dia dermawan bagi seluruh rakyatnya. Dia hidup di tengah-tengah rakyatnya. Dia melayani setiap kebutuhan umat manusia “.

Pemimpin diumpamakan sebagai api, artinya memberikan kehangatan atau panas kepada siapa saja yang memerlukan, tanpa pilih kasih. Kehangatan yang diberikan oleh api (seorang pemimpin) sesuai dengan kehangatan yang diperlukan oleh yang bersangkutan. Dengan bantuan ilmu dan teknologi, kehangatan yang dimiliki oleh api dapat dimanfaatkan oleh penggunaanya sesuai dengan keperluannya.

Seorang pemimpin harus melindungi negara dan warga negaranya (rakyatnya), dan tidak boleh merugikan mereka.

Penjelasan masalah ini antara lain ditemukan dalam :

Yajurveda VII.17

“ Wahai pemimpin, lindungilah para rakyatmu “.

Yajurveda XIII.30.

“ Wahai pemimpin, lindungilah warga negaramu, tanpa merugikan mereka “

Seorang pemimpin harus mensejahterakan semua rakyatnya. Pemimpin harus mensejahterakan dan melindungi seluruh rakyatnya (termasuk para cendekiawan/ilmuwan).

Penjelasan ini ditemukan pada :

Rgveda I.54.11

“ Wahai pemimpin, buatlah kami sejahtera dan lindungilah para cendekiawan “.

Veda memberikan tempat dan penghargaan begitu tinggi kepada para cendekiawan atau ilmuwan, dengan pertimbangan kemajuan suatu masyarakat sangat tergantung pada perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi digali dan dikembangkan oleh para ilmuwan.

Dari bunyi ayat-ayat Veda tersebut di atas dapat dimaknai secara tersurat dan tersirat bahwa Raja sebagai pemimpin Negara mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyatnya dalam arti luas yaitu memberikan kesejahteraan secara lahir dan batin. Kesejahteraan batin diberikan melalui pendidikan rohani dan kesejahteraan lahir melalui penyediaan sandang, pangan dan papan secara mencukupi. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kesejahteraan lahir merupakan lingkup bidang ekonomi dimana di dalamnya termasuk bidang akuntansi. Bidang akuntansi terlibat sejak perencanaan awal sampai dengan pertanggungjawaban akhir.

Tujuan pokok akuntansi adalah sebagai alat pelindung bagi asset entitas. Sebagai pelindung, akuntansi harus menegakkan prinsip keadilan, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk merugikan salah satu pihak, seperti merugikan pemilik, manajemen, pegawai, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Penerapan prinsip keadilan oleh akuntansi dimulai sejak : (1) pengakuan keberadaan suatu transaksi; (2) pengukuran atau penentuan nilai suatu transaksi; (3) penyajian atau pencatatan suatu transaksi harus sesuai dengan prinsip pencatatan yang baik; dan (4) pengungkapan, artinya pemberian penjelasan terhadap transaksi yang dicatat harus sesuai dengan sifat, keberadaan transaksi tersebut.

2.5. Ilmu Filsafat (Anvikshaki)

Kautilya menyatakan bahwa **filsafat (ilmu yang berasaskan logika)** dianggap sebagai sinar segala ilmu, sebagai alat dan penunjang semua hukum dan kewajiban manusia.

Tentang disiplin pada manusia dapat bersumber dari dua keadaan, yaitu disiplin yang dibawa sejak lahir dan disiplin yang diperoleh melalui latihan.

Mempelajari suatu ilmu menuntut disiplin. Seorang siswa yang mempunyai hasrat untuk belajar, harus disiplin dalam mendengar apa yang dikatakan oleh guru, disiplin dalam belajar, belajar mengingat, belajar memahami, belajar merenungkan sesuatu, berani menolak pandangan yang palsu, sungguh-sungguh dalam mempelajari kebenaran. Semua itu harus dilakukan sendiri, bukan melalui orang lain. Belajar dan melakukan latihan dalam ilmu-ilmu penting yang dipilih oleh siswa harus melalui para guru yang berwenang dalam bidang ilmu yang bersangkutan (Arthashastra, Made Astana, dkk, Bk. I Bab 5. 3-5)

3. MENGEMBANGKAN EKONOMI MELALUI ILMU PENGETAHUAN DAN KERJA KERAS.

Masalah ilmu ekonomi dicoba digali melalui naskah dalam Weda Sruti, seperti Rgveda, Bhagawadgita dan Veda lainnya.

Ternyata banyak ayat-ayat dalam Weda yang mempunyai makna ekonomi. Ayat-ayat Weda yang bermakna ekonomi ditemukan antara lain dalam Rg. Veda Samhita, yang merupakan Weda yang pertama kali diturunkan. Cukup jelas ayat-ayat dimaksud menguraikan masalah ekonomi meliputi : harta, kekayaan, kemakmuran, penggunaan kekayaan, kesejahteraan, perdagangan dan perniagaan serta hukum, khususnya hukum warisan (*dhayabhaga*). Hal ini berarti, bahwa Weda tidak hanya memuat tuntunan

tentang kebenaran dan kebatilan, yang bersifat non fisik, atas tindakan manusia dalam menjalani hidupnya di alam ini, sehingga pada akhir hidupnya dapat memperoleh sorga sebagaimana diinginkannya. Tetapi Weda juga memberikan tuntunan tentang bagaimana caranya memperoleh kesejahteraan dalam bentuk materi (fisik) selama hidupnya. Dalam upaya memperoleh kesejahteraan untuk pribadi dapat dilakukan dengan bekerja. Bekerja pada orang lain, pada pada sektor pemerintahan atau sektor usaha swasta. Bekerja dalam pengertian yang lain yaitu dengan membuka usaha. Dengan membuka usaha, apabila usahanya berhasil dan semakin besar akan ada peluang menampung tenaga kerja sesuai bidangnya. Dengan dapat menampung tenaga kerja berarti dapat mengurangi pengangguran, dan dapat membantu mensejahterakan orang lain.

Dalam Rgveda I. 15. 7, antara lain ditemukan petunjuk bahwa suatu persyaratan dari para pencari kekayaan dan kebijaksanaan harus dengan **melakukan kerja keras** dan **berpendidikan**. Disamping itu harus disertai dengan berdoa, mohon petunjuk dan bimbingan kepada Ida Hayng Widhi Wasa.

Rgveda I. 15. 7

*Draviṇodādraviṇaso
Grāvahastāso adhavare
Yajneṣu devamilate*

“Semoga para pencari kekayaan dan kebijaksanaan yang diperlengkapi dengan kerja keras dan pendidikan, meminta Penguasa alam semesta melalui kegiatan dan doa devosional guna mendapatkan kemakmuran material dan spiritual “.

Wedā menjelaskan bahwa kepada manusia diwariskan kekayaan yang tak terkira banyaknya, namun dalam memperoleh dan mengelola kekayaan tersebut dituntut untuk menjauhkan diri dari naluri-naluri yang kotor, dan mengembangkan kecenderungan yang jernih, baik tanpa noda. Dijelaskan bahwa warisan kekayaan yang melimpah ruah tersebut diletakkan ditangan kanan manusia. Jadi tangan kanan merupakan tangan keberuntungan, dan tangan kiri dinyatakan sebagai lebih beruntung lagi. Tangan kanan juga dinyatakan sebagai obat untuk menyembuhkan semua penyakit, dan tangan kiri sebagai obat pula, dan daya menyembuhkannya jauh lebih hebat lagi karena cukup dengan melakukan sentuhan saja.

Pernyataan bahwa manusia mewarisi kekayaan yang melimpah ruah, tak terkira banyaknya, ada di daratan, di lautan bahkan di angkasa, dimuat dalam beberapa ayat Veda berikut ini :

Atharwaweda VII. 115. 3

*Ekaśataṁ laṁṁmyo martyasya
sākaṁtanvā januso-adhi jātāh,
tāsām pāpiṣṭhā nir itaḥ pra hiṇmaḥ
śivā asmabhyaṁjātavedo niyaccha.*

“Manusia mewarisi **kekayaan(naluri)** yang tak terkira banyaknya bersamaan dengan **kelahirannya**. Kita seharusnya membuang naluri-naluri yang kotor. Ya,

Tuhan Yang Maha Esa, berilah kami naluri-naluri dan kecendrungan yang jernih tanpa noda “ (Titib, 1996 : 522)

Pernyataan yang menjelaskan bahwa kekayaan yang melimpah diletakkan ditangan kanan dan didayagunakan melalui tangan kiri manusia dijelaskan dalam :

Rgveda X. 60. 12.

*Ayaṁme hasto bhagavān
ayaṁme bhagavatataṛaḥ
ayaṁme viśsvabheṣ aḥ
ayaṁsivābhimarśanaḥ*

“ Ya, Tuhan Yang Maha Esa, satu tangan (kanan) saya memiliki keberuntungan yang bagus dan satu tangan (kiri) yang lain lebih beruntung. Tangan kananku adalah obat untuk semua penyakit dan tangan kiri mampu berbuat sama bahkan dengan sentuhan “ (Titib, 1996 : 522).

Ada ayat yang menyatakan bahwa warisan kekayaan yang melimpah ruah tersebut tersimpan dipegunungan, atau tersembunyi dibawah tanah, atau terbenam di samudra yang tidak dapat diukur, yaitu dimuat dalam :

Rgveda VIII. 45. 41 :

*Yad vīdav-īndra yat sthīre
Yat parśane parābhartam.
Vasu spārthamīdad ā bhara.*

“ Ya, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Engkau melimpahkan kekayaan yang bermanfaat pada kami, yang tersimpan di pegunungan dan lain-lain, atau tersembunyi di bawah tanah, atau terbenam di samudra yang tidak dapat diukur “ (Titib, 1996 : 523)

Dalam Bhagavadgita, percakapan ke-II.47 tentang Sankya Yoga, ditemukan ayat yang mengharuskan Arjuna bekerja keras, namun bekerja yang berkualitas tertinggi yaitu tanpa mengharapakan hasil.

Bhagavadgita II. 47

*karmaṇy evāṅkaraṣ te
māāphaleṣu kadācana
mā karma phala hetur bhūr
mā te sango stv akarmaṇi*

“ Kewajibanmu kini hanya bertindak, bekerja tiada mengharapakan hasil, jangan sekali pahala menjadi motifmu, jangan pula hanya berdiam-diri jadi tujuanmu “.

Dalam Bhagawadgita Bab III tentang Karma Yoga, lebih banyak lagi ayat yang memberi petunjuk tentang keharusan manusia bekerja keras selama hidupnya, seperti disebutkan dalam Bg. Bab III. 3, bahwa hanya ada dua disiplin dalam

hidup, yaitu jalan ilmu pengetahuan bagi cendekiawan dan jalan tindakan bagi karyawan.

8

Bhagavadgita III.3.

*śrībhagavān uvācha
loke śmin dvividhā
purā proktā mā naghā
jñānayogena sāmkyānām
Karmayogena yoginām.*

“ Sri Bhagawan menjawab :
telah kukatakan sejak dahulu, oh Anagha
ada dua disiplin dalam hidup ini,
jalan ilmu-pengetahuan bagi cendekiawan,
jalan tindakan, kerja bagi karyawan “.

Mengelola ekonomi agar dapat menciptakan kemakmuran bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder), maka harus menggunakan alat secara terpadu yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi serta kerja keras.

Dalam Bg. Bab III. 5 ditemukan petunjuk lagi, bahwa seseorang tidak akan bisa tidak bekerja walaupun sesaat saja, karena hukum alam yang memaksa manusia harus bekerja.

102

Bhagavadgita III. 5

*na hi kaśchit kshanam api
jātu tiśthaty akarmakrit
kāryate hy avāśaḥ karma
sarvaḥ praktikijair guṇaiḥ*

“ tidak seorangpun tidak bekerja
walaupun untuk sesaat jua
karena dengan tiada bekerja manusia
dibuatbertindak oleh hukum alam “.

Hal ini ada 132 itannya dengan sarana penopang kehidupan manusia, minimal dalam bentuk sandang, pangan dan papan. Sandang, pangan dan papan dapat diperoleh dengan baik hanya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan kerja pisik yang keras. Tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik saja tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan tentang kerja. Demikian pula untuk bisa mendapatkan sandang, pangan serta papan yang cukup tidak cukup hanya dengan berwacana atau berteori saja, tetapi harus dibarengi dengan bekerja keras.

Manusia harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan keahliannya, sebab bekerja lebih baik dari tidak bekerja. Kebutuhan sehari-hari yang bersangkutan-pun hanya dapat dipenuhi dengan jalan bekerja. Namun dalam melakukan kerja harus sesuai dengan tuntunan Dharma.

Bhagavadgita III. 8.

*niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīrayatra pi cha te
na prasidhyed akarmaṇaḥ*

“ bekerjalah seperti yang telah ditentukan
sebab bekerja lebih baik dari tak kerja
kalau engkau tidak bekerja
hidup sehari-haripun tidak mungkin.

Bahkan Sri Krisna memberitahukan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada para penganut Veda, bahwa beliau pun terus-menerus dan tidak pernah berhenti bekerja, karena beliau bila tidak bekerja sedetikpun, maka dunia akan hancur.

Bhagavadgita. III. 24

*utsīdeyur ime lokā
na kuryām karma ched aham
Samkarsya cha kartā syam
Upahanyām imāḥ prajāḥ*

jika aku berhenti bekerja
dunia ini akan hancur-lebur
dan Aku jadi pencipta keruntuhan
memusnahkan manusia ini semua

Dijelaskan pula tugas dan fungsi dari struktur warna, khususnya untuk warna Waisia dan Sudra, dimana warna Waisia bertugas memelihara ternak dan perdagangan, dan warna Sudra bertugas memberikan pelayanan kepada warna-warna lainnya, yaitu warna Brahmana, Ksatria dan Waisia.

Bhagavadgita XVIII.44

*krishi gaurakshya vāṇījyam
vaiśyakarma svabhāvājam
paricharyātmakaṁ karma
śūdrasyā pi svābhāvājam*

73 pertanian memelihara ternak **73** in perdagangan
adalah tugas waisia terlahir dari sifatnya
kegiatan kerja tergolong dalam pelayanan
adalah tugas sudra yang terlahir dari sifatnya

Ditegaskan pula bahwa hakekat dari kerja adalah pelayanan, pelayanan kepada Sang Maha Pencipta, pelayanan kepada diri sendiri, pelayanan kepada masyarakat dan makhluk-mahluk lainnya.

Dalam kaitan dengan bekerja, Bhagawadgita memberikan peringatan keras kepada semua orang yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dalam melakukan pekerjaan. Bhagawadgita mengganti kata pemimpin dengan sebutan orang besar. Pengertian pemimpin disini tentu harus dimulai dari tingkatan pemimpin yang paling bawah, yaitu dari pemimpin rumah tangga, pemimpin organisasi kemasyarakatan, pemimpin pemerintahan sesuai dengan tingkatannya pula (eksekutif, yudikatif dan legislative) serta pemimpin sector bisnis, baik bisnis pemerintah dan swasta. Semua kelompok pemimpin tersebut dalam melaksanakan kewajibannya dengan cara kerja harus super hati-hati, karena apa yang mereka lakukan akan menjadi contoh dan ditiru oleh para pengikutnya.

Bhagawadgita III.21.

8

*Yad-yadācharati śreshthas
Tad-tad eve taro janah
Sa yat pramāṇam kurute
Lokas tad anuvatate*

apa saja yang dilakukan orang besar
orang-orang lain akan mengikutinya
contoh apa saja yang diberikannya
seluruh dunia akan menurutinya.

Sesuai petunjuk Veda, bahwa umat penganut Veda, **tidak dilarang** mengumpulkan materi yang biasa disebut dengan kekayaan, asalkan mentaati syarat-syarat berikut :

- 1) kekayaan yang diperoleh harus melalui kerja keras.
- 2) agar supaya dalam melakukan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, memperoleh hasil yang terbaik, dengan biaya yang tidak mahal (efektif dan efisien), para pekerja tersebut harus mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- 3) setiap akan melakukan pekerjaan dan selama melakukan pekerjaan, para pekerja wajib memohon petunjuk kepada Ida Hyang Widhi Wasa. Karena pada hakekatnya apa yang dikerjakan adalah bentuk pengabdian kepada beliau. Pekerjaan tersebut adalah milik beliau. Bahkan seluruh alam semesta dengan segala isinya adalah milik beliau.
- 4) Setelah diperoleh kekayaan berupa materi disamping untuk kepentingan pribadi juga harus dimanfaatkan untuk kegiatan ilahi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Namun dalam kenyataannya, pada saat manusia mencari harta dan kama sering melupakan dharma. Oleh karena itu dalam Sarasamuscāṇa butir 11, ditemukan tuntunan berupa peringatan yang berbunyi, antara lain : **Itulah sebabnya hamba, melambai-lambai, berseru memberi ingat, kata hamba : dalam mencari artha dan kama**

itu hendaknya selalu didasari dharma. Jangan sekali-kali bertindak bertentangan dengan dharma. Namun demikian tidak ada yang memperhatikannya. Katanya, adalah sukar berbuat atau bertindak berdasarkan Dharma.

Dalam rangka manusia mencari harta dan kama harus didasari dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan yang baik, hasilnya dapat dipastikan tidak dapat maksimal. Hal ini mengandung maksud bahwa Veda mendorong para penganutnya untuk rajin belajar menambah ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui pendidikan formal dan non formal.

Dalam Sarasamuscaya 39 ditemukan ungkapan, bahwa Veda takut kepada orang-orang yang bodoh atau sedikit pengetahuannya.

Demikianlah petunjuk yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan cara bekerja manusia pada umumnya yang ditemukan tuntunannya dalam beberapa ajaran Veda.

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

- P.2.1. Jelaskan kelompok ilmu menurut Rsi Kautilya ?
- P.2.2. Kelompok ilmu yang manakah paling berkaitan dengan masalah akuntansi ?
- P.2.3. Berkaitan dengan pertanyaan No. 2, kenapa masalah akuntansi sangat berkaitan dengan kemakmuran masyarakat ?
- P.2.4. Bila sebuah Negara memutuskan untuk berperang atau berdamai termasuk dalam kelompok ilmu yang mana dalam ajaran Kautilya ?
- P.2.5. Jelaskan apa makna peringatan bagi seorang pemimpin yang dimuat dalam Bhagavadgita 3.21. Siapa sajakah yang dimaksud dengan pemimpin dalam rangkaian ayat Bhagavadgita dimaksud ?
- P.2.6. Jelaskan makna dari ayat Bhagavadgita III.3 dan kaitkan pula dengan Kaliyuga.
- P.2.7. Kutip bunyi beberapa ayat Bhagavadgita yang mewajibkan bahwa manusia harus bekerja.
- P.2.8. Kutip dan jelaskan ayat Bhavadgita yang berkaitan dengan umat Hindu bukan tabu melakukan bisnis.
- P.2.9. Bila golongan bukan waisia ikut melakukan bisnis apakah dibolehkan oleh Bhagavadgita.
Temukan ayat dalam Bhagavadgita yang melarang dan atau membenarkan langkah tersebut.
- P.2.10. Apa sebenarnya arti kerja dalam Bhagavadgita ?
- P.2.11. Tuliskan ungkapan Sarasamuscaya 39, dan berikan maknanya sesuai pemahaman Saudara.
- P.2.11. Tuliskan ungkapan Sarasamuscaya 11, dan berikan maknanya sesuai pemahaman Saudara.
- P.2.12. Bila dalam ujian Saudara melakukan kerjasama dengan teman-teman dalam menjawab soal ujian, adakah sejalan dengan maksud Sarasamuscaya butir 11 ? Jelaskan pendapat Saudara.
- P.2.13. Bila membahas masalah hukum dan pengadilan, maka menurut Kautilya, hal itu masuk dalam kelompok ilmu yang mana ?
- P.2.14. Sebutkan beberapa Dewa-Dewi yang berkaitan dengan bidang Ilmu Pengetahuan tertentu menurut ajaran Hindu ?
- P.2.15. Dalam Sarasanuscaya ditemukan ayat yang berbunyi bahwa Veda takut kepada

- orang yang bodoh atau sedikit pengetahuannya. Jelaskan komentara Saudara mengenai hal tersebut.
- P.2.16. Bagaimana pendapat Saudara tentang kota Taxila, pada zaman Kautilya sudah mempunyai perguruan tinggi yang tersohor. Salah satu mahasiswanya adalah Chanakya.
- P.2.17. Berikan pendapat Saudara tentang makna dari bunyi ayat Bhagawadgita III. 21, “ apa saja yang dilakukan orang besar, orang-orang lain akan mengikutinya contoh apa saja yang diberikannya, seluruh dunia akan menurutinya “.
- P.2.18. Jelaskan makna dari ungkapan Bhagawadgita III. 21 dalam kaitannya dengan penerapan prinsip akuntansi dan pekerjaan bagian akuntansi serta pejabat di atasnya.
- P.2.19. Apakah ilmu akuntansi dalam perakteknya dapat masuk ke dalam ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu filsafat. Jelaskan jawaban Saudara.
- P.2.20. Ilmu Akuntansi dinyatakan merupakan bagian dari ilmu ekonomi, kenapa demikian keadaannya. Berikan komentar Sdr. tentang pernyataan tersebut.

AKUNTANSI HINDU

” Na karmanam anarambhan, naishkarmyam purusho snuta, na cha samnyasanad eva, siddhim samadhigachachaaaaati “. (Bg. III. 4)

“ Orang tidak akan mencapai kebebasan karena diam tidak bekerja, juga ia takkan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja “. (Bg. III. 4)

BAB III

16 HUBUNGAN CATUR YUGA, CATUR WARGA DENGAN AKUNTANSI

1. PERKEMBANGAN AKUNTANSI KOMPENSIONAL.

Akuntansi telah mengalami perjalanan dan perkembangan yang panjang untuk sampai pada bentuknya yang modern sekarang ini. Para ahli akuntansi menyatakan bahwa tidak ada catatan yang dapat dijadikan rujukan, mulai kapan akuntansi diperaktekkan. Namun para ahli yakin, bahwa sistem pembukuan atau akuntansi telah dikenal dan diperaktekan pada **tahun 3.600 Sebelum Masehi** (Tuanakota, 2000 : 53) Disadari bahwa perkembangan sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi), akan sejalan dengan perkembangan peradaban serta kemajuan perekonomian masyarakat dari suatu bangsa.

Dinyatakan bahwa terdapat beberapa bukti empiris yang dapat dijadikan tinjauan, seperti bangsa Aztec dan Inca di pedalaman Amerika, bangsa Dravida di Dataran Asia Selatan, bangsa Cina dan Jepang di kawasan Asia Tengah dan Timur, bangsa Sumeria, Mesir kuno, dan Mesopotamia di dataran Arab, bangsa Yunani dan Romawi di benoa Eropa, dimana pada zamannya sudah merupakan bangsa-bangsa yang maju. Hal ini diketahui dari manuskrip-manuskrip yang ditemukan di gua-gua prasejarah telah menunjukkan bahwa manusia pada zaman itu telah mengenal hitung-hitungan meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Akuntansi adalah buatan atau rekayasa atau teknologi yang dibuat manusia sesuai dan searah dengan idiologi dan tujuan hidup yang dimilikinya. Akuntansi dirancang sesuai dengan kepentingan para pemakainya dan kepentingan idiologinya (Safri Harahap, 1993 : 17).

Output akuntansi dapat mempengaruhi perilaku orang yang mempergunakannya. Output akuntansi dapat menyebabkan orang marah atau senang, seperti bila dari data akuntansi entitas atau perusahaan menggambarkan keberhasilan usaha (laba) sesuai dengan keinginan manajemen dan pemilik, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan merasa senang, dan demikian dengan sebaliknya, mereka akan marah.

Akuntansi dalam konteks tersebut di atas mempunyai bias idiologi. Informasi akuntansi bisa mempengaruhi orang yang menggunakannya dan system informasi akuntansi disusun oleh sekelompok masyarakat yang memiliki idiologi dan tujuan hidup yang sama.

Ilmu akuntansi merupakan cabang ilmu ekonomi, baik ekonomi pemerintahan dan ekonomi bisnis.

Informasi tentang akuntansi yang dijelaskan di atas kemungkinan besar hanya menggambarkan perkembangannya pada zaman Kaliyuga. Sesuai ajaran Hindu, termuat dalam Manava Dharmasastra (I. 69, 70) dan Bhagawadgita (VIII. 17), bahwa alam semesta ini dibagi dalam empat zaman, yang masing-masing zaman mempunyai rentang waktu masa berlakunya, yaitu zaman Satya-yuga/Krete-yuga berjalan selama 1.728.000, Treta-yuga berjalan selama 1.296.000 tahun, zaman Dwapara-yuga berjalan selama 864.000 tahun, zaman Kali-yuga berjalan selama 432.000 tahun. Dalam buku Veda, Sabda Suci (Titib, hal. 152), dinyatakan bahwa Zaman Kali-yuga telah berjalan sejak 5089 tahun yang lalu. Zaman Kali-yuga dimulai sejak 3101 sebelum Masehi. Jadi pada tahun 2013 Masehi, zaman Kali-yuga sudah berjalan sekitar 5114 tahun. Sesuai pendapat para ahli, bahwa akuntansi telah dikenal dan dipraktikkan sejak 3.600 tahun Sebelum Masehi, maka dapat diartikan bahwa akuntansi telah dipraktikkan paling sedikit sejak zaman Dwapara-yuga.

16

2. HUBUNGAN CATUR YUGA, CATUR WARGA DENGAN AKUNTANSI.

Akuntansi telah mengalami perjalanan yang panjang, yaitu sejak dikembangkannya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun Sebelum Masehi, sampai dengan saat ini. Dengan perjalanan yang panjang tersebut, akuntansi telah menarik minat para pemerhati bahkan para pihak yang mau mendalami secara tulus dan mengembangkannya sehingga sampai pada kemajuan konsep akuntansi sekarang ini.

Banyak diuraikan, bahwa para ahli akuntansi telah melakukan debat berkepanjangan menyangkut apakah akuntansi sebagai seni atau sebuah ilmu (sains). Pendapat para ahli tersebut dituangkan dalam literatur-literatur akuntansi. Para pakar yang berpendapat bahwa akuntansi itu adalah seni atau keakhlian, menyarankan agar keahlian akuntansi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang akuntan yang baik harus diajarkan dan memerlukan pendekatan “legalistik” terhadap akuntansi tersebut.

Para pendukung akuntansi adalah ilmu yang sebaliknya menyarankan agar mengajarkan model pengukuran akuntansi untuk dapat memberikan pandangan yang lebih konseptual kepada para mahasiswa akuntansi mengenai apa yang hendak dilakukan oleh akuntansi akrual konvensional dalam memenuhi sasaran umum guna melayani kebutuhan para penggunaannya. Hal ini adalah untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran kritis di bidang akuntansi dan perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di dalamnya.

Bagaimana akuntansi diajarkan, apakah sebagai keahlian (seni) ataupun sebagai ilmu, akan mempengaruhi cara pandang terhadap bidang studi ini dan kesiapan para mahasiswa yang memilih akuntansi sebagai jurusan utamanya, hingga nanti pada akhirnya ia akan turut bergabung dalam profesi akuntansi. ¹⁶

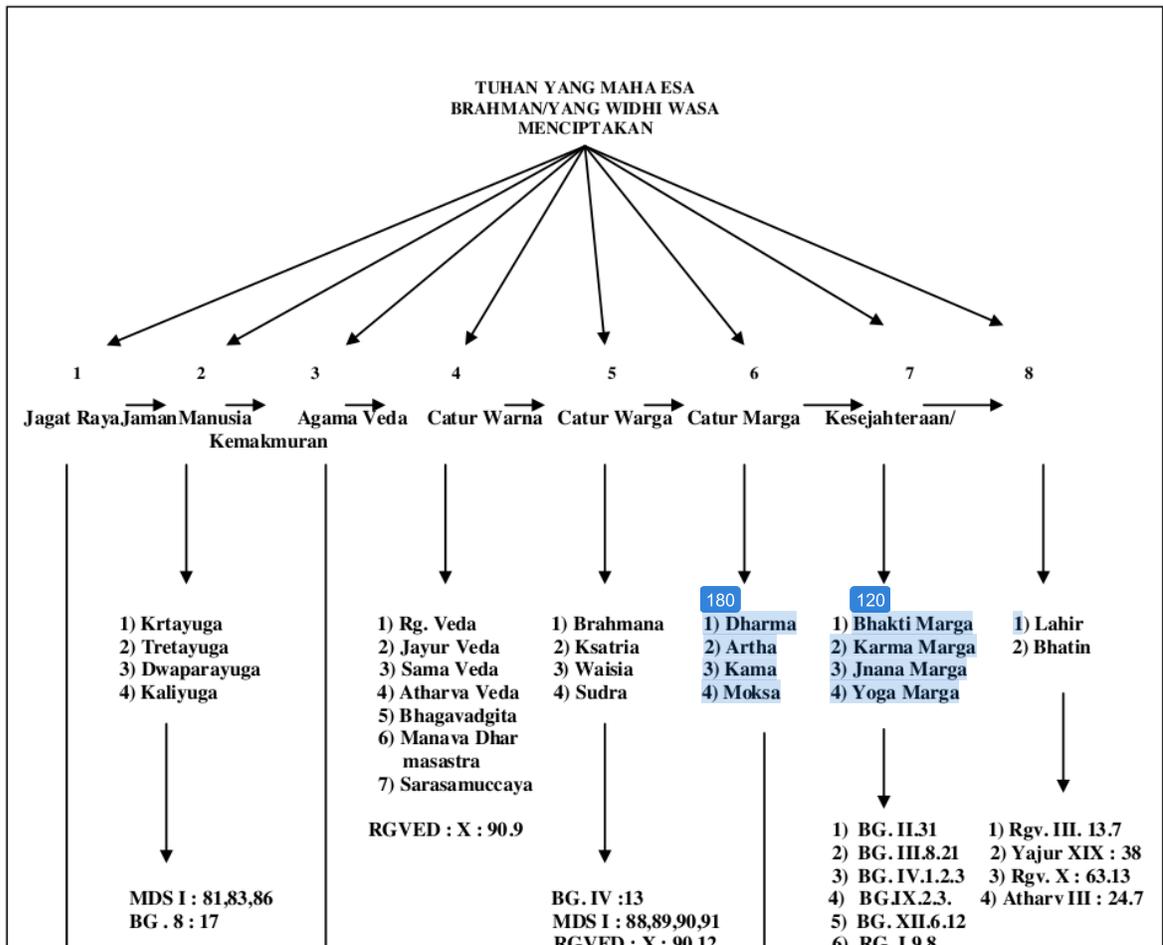
Pada Bagian I di atas telah disinggung bahwa permasalahan akuntansi yang ditemukan dari hasil penelitian para ahli, kemungkinan besar hanya menyangkut perkembangan akuntansi pada zaman Kali-yuga. Veda, secara tersirat telah memberikan petunjuk secara lengkap tentang dapat diselenggarakannya akuntansi sejak Veda diturunkan. Masalah terminology modal (ekuitas), kredit (K) atau kiri dan debet (D) atau kanan, aset fisik(artha) dan aset non fisik (kama) dapat ditelusuri karena tersirat dalam bunyi ayat-ayat Veda.

Berikut ini digali hal yang berkaitan dengan akuntansi dari beberapa ayat Veda, seperti dari Bhagawadgita, Manava Dharmasastra dan Sarasamuccaya. Pembahasannya dimulai dari pembentukan jagat raya, pembagian zaman, keberadaan manusia, Veda sebagai Kitab Suci Umat Hindu, Catur Warna, Catur Warga dan tujuan akhir kehidupan manusia yaitu Moksa atau kesejahteraan lahir dan bathin.

Bersumberkan beberapa ayat Bhagavadgita, Manava Dharmasastra, Sarasamuccaya, Rgveda, dan veda lainnya, disusun sebuah bagan untuk mengilustrasikan hal-hal tersebut di atas, sebagai berikut :

Gambar III.1

CATUR YUGA DAN CATUR WARGA



Berdasarkan data dalam gambar III.1. di atas dapat diuraikan beberapa hal berikut :

2.1) Penciptaan Jagat Raya.

Jagat raya atau alam semesta dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini didukung oleh pernyataan dalam Rgveda I:1.1, yang menyatakan bahwa manusia mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, dalam posisi beliau sebagai pendeta utama alam semesta, yang melakukan kegiatan melalui hukum abadi, yang memelihara dan menghidupi segala yang bersifat ilahi dan cemerlang.

Dalam Rgveda X.124.4 Tuhan Yang Maha Esa menegaskan, bahwa beliau yang menciptakan dan memelihara alam semesta dengan segala isinya, walaupun yang beliau ciptakan tidak mengetahui akan hal itu.

Dijelaskan pula bahwa jagat raya pada awalnya diselimuti kegelapan. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta secara bertahap, dari mahabutha (unsur alam semesta) dan unsur lainnya, sehingga suasana gelap tersebut menjadi lenyap.

Digambarkan pula bahwa alam semesta bagaikan sebuah telur berwarna keemasan, bersinar cemerlang laksana jutaan matahari; dan dari dalam telur itu lahirlah Brahma, sang pencipta, cikal bakal alam semesta dan makhluk-mahluk yang ada (MDS. I : 5, 6, 9). Dengan demikian, alam semesta, semua makhluk dan Brahma merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan kekuasaan **Brahma, telur alam semesta** tersebut dibagi menjadi dua bagian, dan dari dua bagian itu diciptakan langit dan bumi, ditengahnya adalah **vyoma (atmosfera)**, delapan penjuru mata angin dan air mengelilinginya (MDS. I : 12,13).

Tuhan yang Maha Esa disamping sebagai pencipta alam semesta, beliau sebagai pemilik keadilan yang teguh dan juga sebagai **koordinator** dari seluruh unsur yang ada. Atas perintah-Nya seluruh energi kosmis terpasang pada aura yang sangat indah dan mereka dengan sangat cepat datang dan membantu manusia (Rgveda I : 7. 2)

Manusia mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyatakan bahwa dalam setiap bahaya dan kesedihan kami memohon bantuan-Mu. Apapun bentuk panggilanmu itu, semuanya ditujukan kepada-Mu, ya Tuhan Yang Maha Cemerlang. Kami tidak dapat menemukan kata-kata yang pantas untuk menghormatimu (Rgveda I : 7. 7). Dalam Bhagawadgita VII. 6, 30, dipertegas lagi bahwa jagat raya dan seisinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bagi mereka yang mengetahui dan mengakui bahwa Beliau memangku segala aspek alam semesta,

mereka mempunyai jiwa tenang dan tetap memuja Tuhan Yang Maha Esa sampai ajal mereka tiba.

2.2) Zaman (Yuga), Penciptaan Manusia, Caturwarga dan Umur Manusia.

2.2.1) Zaman (Yuga) dan Penciptaan Manusia.

Masalah zaman dan Caturwarga dibahas sekaligus, berhubung kedua unsur tersebut saling berkaitan ditinjau dari sisi kualitas sumber daya manusia.

Manusia penghuni jagat raya ini, bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dijelaskan dalam Mds. Bk. I. 96, bahwa diantara makhluk ciptaanNya, manusialah sebagai makhluk bergerak dan cerdas yang mempunyai kualitas tertinggi.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikaitkan dengan tingkat ketaatannya dalam menjalankan Dharma selama hidupnya sangat dipengaruhi oleh, pada zaman apa mereka hidup.

Pada sisi zaman, seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa terdapat empat jenis zaman yang melingkupi alam semesta ini, yaitu zaman Satya-yuga/Kreta-yuga berjalan selama 1.728.000 tahun, zaman Treta-yuga (1.296.000 tahun), zaman Dwapara-yuga (864.000 tahun) dan zaman Kaliyuga berjalan selama 432.000 tahun (Bg. 8. 17).

Dalam buku Veda, Sabda Suci, oleh Titib 7 : 1996, dinyatakan bahwa perang besar keluarga Bharata (*Mahabharatayuddha*) berlangsung pada tahun 3.138 Sebelum Masehi (Seb.M), yang merupakan masa akhir dari zaman Dwapara-yuga. Keterangan tersebut didasarkan atas prasasti Aihole yang dikeluarkan oleh raja Puleskin II. Demikian pula penobatan raja Parikesit, cucu Arjuna (Pandava) berlangsung pada tanggal 18 Februari 3.102 Sebelum Masehi (Seb.M). Jadi penobatan raja Parikesit berlangsung sekitar 36 tahun setelah Bharatayuda.

Berdasarkan data angka di atas umur jagat raya pada tahun 2104 sudah mencapai 3.893.152 tahun dengan perhitungan sebagai berikut :

93	59
- Satya-yuga/ Kreta-yuga	1.728.000 tahun
- Treta-yuga	1.296.000 tahun
- Dwapara-yuga	864.000 tahun
- Kali-yuga	432.000 tahun
- Masehi	3.138 tahun
	<u>2.014 tahun</u>
Jumlah	<u>3.893.152 tahun</u>

Sampai dengan tahun 2014, zaman Kali-yuga yang berusia 432.000 tahun sudah dijalani sepanjang 5.152 tahun atau 1,19 %. Jadi masih tersisa sepanjang 426.848 tahun atau 98,81 %. Wah sisa waktunya masih sangat panjang.

Pada zaman Kreta-yuga (MDS. I. 81) dinyatakan Dharma berkaki empat, artinya tingkat menjalankan Dharma dalam kehidupan sehari-hari manusia pada umumnya paling sempurna (100 %), di dalamnya meliputi kejujuran, bekerja dengan sungguh-sungguh, rasa pengabdian, loyalitas, solidaritas, tidak suka menyakiti pihak lain termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Pada zaman tersebut kadar Dharma manusia yang tertinggi (100 %).

Bunyi selengkapnya MDSI. 81 sebagai berikut :

“ Pada zaman *Krtayuga* Dharma berkaki empat dan sempurna, demikian pula halnya dengan *satya*(kebenaran); tak ada keuntungan yang akan diperoleh manusia dengan perilaku adharma “

Pada MDS. I. 82, dijelaskan bahwa pada ¹ ketiga zaman lainnya, dengan berkembangnya ketidak adilan, Dharma dipreteli satu persatu dari keempat kakinya dengan merajalelanya kejahatan, kebohongan dan penipuan. Kebajikan yang didapat manusia pada setiap yuga berkurang dengan seperempatnya.

Apabila kata sempurna atau tertinggi dan makna berkaki empat ini diukur dengan angka relative (prosentase) adalah sama dengan 100 %. Hal itu akan sejalan dengan penjelasan berikutnya dimana dinyatakan, bahwa pada setiap zaman berikutnya, kualitas sumber daya manusia diukur dari segi pelaksanaan Dharma dinyatakan masing-masing menurun dengan seperempatnya atau 25 %. Kualitas pelaksanaan Dharma oleh manusia yang paling rendah terjadi pada zaman Kali-yuga, yaitu tinggal hanya 25 % (MDS. I : 81,82,84,86). Apakah betul seperti itu ? Apabila unsur pelaksanaan Dharma menurun, lalu yang mengalami peningkatan unsur yang mana ?. Sudah dapat diperkirakan, bahwa unsur yang meningkat dalam kehidupan manusia adalah keinginan memperoleh “*artha dankama* “, yaitu dalam mengejar materi dan nama atau kemasyuran, meningkat masing-masing dengan 25 % pada setiap zamannya. Pada zaman Kaliyuga ini, unsur keinginan manusia menguasai *arta*(kekayaan dalam bentuk materi/fisik) dan *kama*(kekayaandalam bentuknama atau kemasyuran) mencapai titik puncaknya, yaitu masing-masing 175 %. Secara matematis, peningkatan dengan 75 % keinginan manusia untuk menguasai *artha* dan *kama*dibandingkan dengan zaman *Krtayuga*, adalah sebagai dampak dari menurunnya niat manusia pada umumnya untuk melaksanakan **Dharma** atau berbuat yang benar. Hal ini berdampak pula pada semakin menurunnya minat manusia untuk mencapai *moksa*.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya, perbuatan Adharma, yaitu perbuatan yang keluar dari aturan yang benar, adalah nyata adanya.

Dalam buku Fraud Auditing, Pusdiklat, BPKP, 1997, dikutip sebuah data tentang statistik kecurangan (yang bersumber dari ketidak jujuran) bersumber dari “ US Chamber of Commerce “ tahun 1974 dalam “ Handbook of White Collor Crime “, melaporkan angka-angka kerugian dari berbagai jenis kecurangan, sebagai akibat ketidak jujuran pelaku organisasi, sebagai berikut :

Jenis Kecurangan	Kerugian Setahun (dalam jutaan US \$)	% dari total
(1)	(2)	(3)
1. Kecurangan Bank	0.08	0.19
2. Penyogokan dana lain-lain	3.00	7.18
3. Kecurangan yang berhubungan dengan komputer	0.10	0.23
4. Kecurangan konsumen		
- korban pribadi	5.50	
- korban usaha	3.50	
- korban pemerintah	12.00	
	21.00	50.26

5. Kartu kredit dan cek	1.10	2.64
6. Penggelapan	3.00	7.18
7. Pencurian/penyerobotan	4.00	9.57
8. Menerima kekayaan yang dicuri	3.50	8.37
9. Kecurangan asuransi	2.00	4.79
10. Kecurangan sekuritas & pemalsuan	4.00	9.57
Jumlah	41.78	100

Berdasarkan data angka di atas, mayoritas kecurangan berada pada area konsumen (50, 26 %). Kecurangan pada area konsumen, yang paling tinggi korbannya adalah pemerintah (28,72 %). Kecurangan computer paling kecil proporsinya (hanya 0,23%), karena pada tahun 1974 penggunaan komputer belum meresap keseluruh kegiatan masyarakat dari pada saat ini.

Dalam buku Fraud Auditing tersebut di atas, juga dikutip suatu laporan internal yang dihasilkan oleh sebuah **perusahaan asuransi** tentang kesetiaan tenaga kerja rata-rata diperusahaan komersial dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut :

- 50 % jujur apabila terdapat pengawasan & motivasi pribadi.
- 25 % tidak jujur apabila ada kesempatan
- 25 % jujur sepanjang waktu

Tentang tingkat kejujuran rata-rata tenaga kerja pada perusahaan komersial dituangkan dalam Gambar III. 2 berikut :

Gambar III. 2

50 % Jujur apabila terdapat pengawasan & motivasi pribadi	25 % Tidak jujur apabila ada kesempatan
	25 % Jujur sepanjang waktu

Sejalan dengan penjelasan dalam Manawa Dharmasastra Buku I ayat 81-82, yang menyatakan bahwa dalam zaman Kaliyuga ini sangat sedikit manusia yang menegakkan darma atau menegakkan kejujuran, keikhlasan dalam berbuat. Lebih banyak yang tidak jujur yang diperkirakan mendekati 75 %. Kondisi ini diperkuat dengan data hasil penelitian terhadap 10 jenis kecurangan di Amerika Serikat pada tahun 1974, dimana tidak ditemukan adanya kegiatan yang tidak terlibat dengan korupsi. Masih di Amerika Serikat, penelitian lainnya, yaitu pada perusahaan asuransi, menemukan hanya 25 % dari pegawai asuransi yang benar-benar jujur dalam melakukan tugasnya.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas maka pada zaman Kali-yuga ini unsur perencanaan dan pengawasan terhadap semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia sangat diperlukan. Akuntansi dapat digunakan sebagai sarana pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pada tahap selesainya (akhir) suatu kegiatan yang dilakukan manusia. Dengan demikian pada zaman ini akuntansi sangat perlu dipelajari, dikembangkan dan dilaksanakan dengan landasan kejujuran. Oleh karena akuntansi mempunyai fungsi

setrategis sebagai salah satu alat pengawasan kegiatan manusia baik yang bersifat bisnis maupun yang bersifat non bisnis.

2.2.2). Catur Wargadan Umur Manusia

Dalam menjalani kehidupan di alam ini, agar diperoleh kesejahteraan lahir dan bathin, hukum alam memaksa manusia harus bekerja (Bgv. III. 5). Yang dimaksudkan dengan hukum alam memaksa manusia harus bekerja, paling sedikit, karena manusia dilengkapi dengan rasa lapar. Untuk menghilangkan rasa lapar tidak ada jalan lain maka manusia harus berusaha mencari bahan makanan, demikian pula dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Begitu manusia harus bergerak dan bekerja. Pada Bgv. III. 4 dinyatakan bahwa manusia tidak akan mencapai kebebasan karena diam tidak bekerja, juga ia tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Penegasan yang paling tegas diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tentang kewajiban manusia tidak boleh menghindari kerja artinya harus bekerja, yaitu dibandingkan dengan posisi beliau yang tidak pernah berhenti bekerja sesuai pernyataan beliau “ Jika Aku berhenti bekerja dunia ini akan hancur-lebur dan Aku jadi pencipta keruntuhan memusnahkan semua mahluk “ (Bgv. III. 24).

Sejalan dengan kewajiban manusia harus selalu bekerja dalam rangka memenuhi tuntutan hukum alam, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sebuah tuntunan berupa pedoman yang disebut dengan **caturwarga**, terdiri dari unsur **Dharma, Artha, Kama dan Moksa (Sarasac 1)**. **Caturwarga biasa juga disebut dengan catur marga** dapat digolongkan sebagai **Standar Operating Prosedur (SOP)** yang wajib dipatuhi oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Perbuatan manusia yang selalu dan wajib dialasi Dharma, dimaksudkan bahwa manusia harus selalu berbuat baik dalam mencari **Artha** dan **Kama**, karena dinyatakan bahwa jalan Dharma ini menuntun manusia untuk dapat pergi ke sorga (Sarasac. 14). Dengan **Artha**, dimaksudkan kebutuhan manusia akan hartha benda, yaitu benda-benda yang berwujud fisik, sedangkan dengan **Kama** dimaksudkan kebutuhan manusia yang bersifat non fisik, seperti ilmu pengetahuan (Sarasac. 25). Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan benda-benda yang berbentuk fisik dan non fisik. Benda yang berbentuk fisik seperti : makanan, pakaian, rumah tempat berteduh, alat angkutan, dan lain sebagainya. Disamping itu manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kualitas tertinggi, dalam hidupnya juga memerlukan benda-benda yang bersifat non fisik, seperti : nama baik, pendidikan, pujian, kesenian, kecantikan, dan lain sebagainya. Namun dalam upaya memperoleh barang-barang yang berbentuk fisik dan non fisik tersebut manusia tidak boleh melanggar aturan yang diciptakan oleh Tuhan Yang maha Esa. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, dan sekaligus juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban yang melakukan pekerjaan tersebut. Apabila semua kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dengan hulu kebaikan atau Dharma, maka sipelaku akan memperoleh imbalan berupa kebaikan pula, baik semasih hidup di alam ini maupun setelah meninggal dunia. Dharma diumpamakan sebagai air yang menggenangi tebu, bukan hanya tebu saja yang mendapat air melainkan turut mendapat air rumput, tanaman menjalar lain-lainnya, serta segala tanaman di dekat tanaman tebu tersebut. Demikian orang yang melaksanakan Dharma, akan diperoleh pula Artha, Kama dan Moksa (Sarasac. 20)

Setiap langkah yang diambil dalam kaitan dengan mencari artha dan kama, manusia harus berpatokan kepada **Dharma**. Apabila langkah tersebut dikerjakan secara tertib dan teratur sesuai Dharma, tujuan akhir dalam bentuk **moksa** pasti dapat dicapai.

Dikaitkan dengan **Akuntansi** yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pencatatan dan pelaporan atas **aset** entitas bisnis maupun non bisnis, maka yang menjadi sasaran pencatatan adalah aset dalam bentuk berwujud (fisik) maupun tidak berwujud (non fisik). Aset berwujud seperti kas, bank, persediaan, bangunan gedung kantor dan gudang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang masuk dalam golongan aset tidak berwujud (non fisik) seperti goodwill, franchise, hak cipta, dan sebagainya.

Sesuai ajaran spiritual atau agama, bahwa manusia dalam rangka mendapatkan Artha dan Kama harus berdasarkan Dharma. Dari segi manajemen entitas, bahwa manajemen dalam rangka mengelola kegiatan usahanya, yang berkaitan dengan aset fisik dan non fisik, harus berdasarkan etika bisnis. Berkaitan dengan kewajiban manajemen menerapkan etika bisnis dalam berbisnis, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan dengan tujuan melindungi semua pemangku kepentingan (stakeholder). Undang-undang dimaksud seperti : (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian; (2) Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (3) Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; (4) Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang Yayasan; (5) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (6) Undang-Undang Tentang Persaingan Usaha, dan lain sebagainya.

Dalam menjalani dan mempertahankan kehidupannya, manusia pada umumnya memerlukan **harta**(benda berbentuk fisik) seperti kebutuhan pokok : makanan/minuman, pakaian, rumah, kendaraan sebagai alat transportasi, dsb.nya. Disamping benda berbentuk fisik, manusia juga memerlukan **kama**, benda non fisik (tidak berwujud), seperti : nama baik, kemasyuran, kepintaran, olah seni, dsb.nya.

Tentang umur manusia serta ketahanan fisik manusia terhadap penyakit, serta keberhasilan dalam setiap usaha juga diuraikan dengan jelas dalam (MDS. I : 83), yang menyatakan “ Pada zaman Satya-yuga/Kreta-Yuga, manusia bebas dari penyakit, serba berhasil dalam tujuan, serta hidup 400 tahun lamanya “. Tetapi pada zaman Treta-yuga dan zaman-zaman berikutnya masa hidup manusia berkurang dengan seperempatnya. Pada zaman Kali-yuga unsur **dharm**a dan **moksa** tersisa hanya seperempatnya atau 25 %, sedangkan unsur **Kamadan Moksa** meningkat dengan 3 kali 25 %, sehingga menjadi 175 %. Pada zaman Kaliyuga umur manusia rata-rata tinggal 100 tahun (25 % X 400 tahun).

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas dapat disusun sebuah gambar untuk memudahkan memahaminya sebagai berikut :

Gambar III.3.

**KELOMPOK ZAMAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHIDUPAN
MANUSIA MENURUT VEDA.
BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS KEHIDUPAN MANUSIA DARI SEGI
MORALITAS**

Caturwarga/ Catur Purusartha	KELOMPOK TAHUN/PERIODE			
	93	Satya-yuga/ Krt	Treta-yuga	Dwapara- yuga

	(1.728.000 th.)	(1.296.000 th.)	(864.000 th.)	(432.000 th.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DHARMA	100	75	50	25
ARTHA	100	125	150	175
KAMA	100	125	150	175
MOKSA	100	75	50	25
JUMLAH	400	400	400	400
UMUR MANUSIA	400	300	200	100

Sumber : MDS. I : 81, 83,86; BG. VIII : 17,19; BG. IV : 22,23,32; BG. V : 11, 24,26;

SARASA 1, 14, 15

3. MANUSIA MAHLUK CERDAS TERTINGGI

Dalam Gambar III.1 ditampilkan masalah manusia. Manusia adalah penghuni jagat raya disamping mahluk-mahluk lainnya. Manusia termasuk kelompok mahluk bergerak dan mempunyai kecerdasan dengan kualitas tertinggi.

Dalam Mds. I : 96 dijelaskan bahwa :

“ Diantara mahluk ciptaan Tuhan, mahluk yang bergeraklah yang tertinggi; diantara mahluk yang bergerak, mahluk cerdaslah yang tertinggi; diantara mahluk cerdas, manusialah yang tertinggi; diantara manusia **brahmanalah** yang tertinggi.

Brahmana dinyatakan tertinggi karena mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat yaitu mempelajari dan memahami sepenuhnya hakekat Veda, memperaktekan ajaran Veda dan mengajarkan dan menyebarkan makna Veda kepada tiga warna lainnya, yaitu Ksatria, Waisia dan Sudra. Bahkan, kaum Brahmana juga mempunyai tugas dan fungsi mulia yaitu sebagai peneliti ajaran Veda sehingga ajaran Veda dapat membumi dan dapat dipraktekan serta mempermudah kehidupan para penganutnya (MDS I. 103) Masalah ilmu akuntansi seharusnya digali dari ajaran Veda oleh para brahmana dan konsep akuntansi tersebut dipraktekan oleh kaum Waisia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pedagang dan bidang keuangan (perbankan). Masalah akuntansi tidak hanya dipraktekan dan dikembangkan oleh kaum Waisia, tetapi diperlukan juga oleh golongan Ksatria dan Sudra, sejauh yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan yang ada kaitannya dengan bidang ekonomi dan keuangan.

4. AGAMA VEDA.

Dalam Kata Pengantar buku **RGVEDA I, II, III**, antara lain dinyatakan bahwa ⁵⁸ Veda telah diberikan kepada kita dalam bahasa yang juga bersifat ilahi. Bahasa Veda adalah

Sanskerta Klasik, menyatakan rekaman percakapan yang paling awal. Bahasa *Sanskerta* merupakan *putri tertua* dari ibu kata-kata paling awal, karena enam anggota utama lain dari keluarga bahasa *Irannis, Hellenis, Celtis, Teotonis dan Lettoslavistik* satupun meninggalkan kepastakaan monumental, sebagaimana halnya dengan Veda yang meninggalkan Veda.

Veda bersifat kekal, keasliannya tidak tersentuh oleh perkembangan zaman, dan tetap diucapkan setiap hari oleh rantai generasi tak terputus, yang mengembara bagaikan gelombang besar melalui substansi pikiran yang hidup.

Jean Le Mee mengungkapkan pendapatnya tentang Veda sebagai berikut :

“ Material-material berharga atau tahan lama seperti emas, perak, perunggu, marmar, batu onix atau granit telah dipergunakan oleh orang-orang kuno untuk mengabadikan perolehannya. Namun, tidak demikian halnya dengan orang-orang Arya kuno. Mereka berpaling pada apa yang tampaknya sebagai material yang mudah berubah dan goyah dari semuanya-yaitu kata-kata yang diucapkan-dan dari gelembung-gelembung udara ini membentuk suatu monumen yang lebih dari 30 atau bahkan 40 abad belakangan ini tetap tak tersentuh oleh waktu ataupun unsur-unsur waktu. Karena piramida-piramida telah dikikis oleh angin padang pasir, batu-batu pualam hacur akibat gempa bumi dan emas telah dicuri oleh para perampok, sementara Veda tetap diucapkan setiap hari oleh rantai generasi tak terputus, yang mengembara bagaikan gelombang besar melalui substansi pikiran yang hidup “

Veda itu sendiri adalah rahasia dari Veda. Jean Le Mee selanjutnya menyatakan :

“ Veda disusun oleh mereka dalam bahasa khusus yang dapat dinyatakan secara gembira di abad mendatang. Veda sampai kepada kita melalui tradisi lisan yang sangat teliti, yang secara sadar dirancang untuk mencegah terjadinya suatu distorsi (perubahan bentuk). Bahkan sekarang ini bila kita tak memiliki rekaman tertulis, tetap masih memungkinkan untuk mendapatkan jalan masuk pada Veda seperti apa adanya ketikanaskah-naskah dikumpulkan tiga atau empat ribu tahun yang lalu “.

Berdasarkan pernyataan bahwa naskah-naskah Veda dikumpulkan empat atau lima ribu tahun yang lalu, hal ini dapat diartikan bahwa naskah Veda baru ditulis pada akhir zaman Dvapara-yuga.

Kata-kata ilahi diberikan kepada manusia dalam bentuk empat Veda, dan diturunkan melalui 4 (empat) Rsi (Rgveda X : 90. 9), yaitu :

- (1) Rgveda, melalui Rsi Agni;**
- (2) Jayurveda, melalui Rsi Vayu;**
- (3) Samaveda, melalui Rsi Aditya, dan**
- (4) Atharvaveda, melalui Rsi Angira.**

Veda diyakini sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat diketahui dari pernyataan dalam Yajurveda XXX. 7, yang berbunyi :

*Tasmād yajnāt sarvahuta
rcaḥ sāmāni jajnire
chandāṛṣi jajnire tasmād*

yajus tasmād ajāyata.

“ Dari Tuhan Yang Maha Agung dan kepada-Nya umat manusia mempersembahkan berbagai yadnya dan dari pada-Nya muncul Rgveda dan Samaveda “ (Titib, 20 : 1996).

5. CATUR WARNA

Catur warna sering kali disamakan dengan catur kasta. Pembagian masyarakat menurut prinsip catur warna adalah berdasarkan **profesi, bakat(guna)** atau keahlian atau **kualitas pelayanan** atau **barang-barang dan jasa** yang dibutuhkan dengan **kualitas tertinggi** sehingga memuaskan para pemakainya. Pelayanan yang memberikan kepuasan tertinggi secara sekala dan niskala baik kepada yang melayani dan yang dilayani.

Pada prinsipnya konsep warna berangkat dari prinsip memberikan pelayanan terbaik. Para petani adalah ahli dalam bidang pertanian, menghasilkan hasil pertanian yang terbaik. Para guru adalah ahli dalam mengajarkan suatu bidang ilmu yang benar-benar dikuasainya. Para guru tidak hanya bertugas memberikan ilmu yang bersifat fisik kepada murid-muridnya, juga memberikan contoh akhlak yang baik. Ahli masak, adalah seseorang yang benar-benar ahli dalam bidang masak-memasak jenis makanan tertentu atau beberapa jenis makanan yang digelutinya.

Sedangkan **kasta**, dalam bahasa Inggris dengan ditulis “ cast “, berarti masyarakat. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, “ **kasta** “ adalah golongan masyarakat menurut kedudukannya. Dijelaskan, di masyarakat India terdapat empat kasta, yaitu brahmana, ksatria, waisia dan sudra. Kasta memposisikan masyarakat menjadi terstruktur, sehingga ada yang diposisikan lebih tinggi dan lebih rendah dari yang lainnya. Bahkan menurut system kasta manusia begitu lahir sudah memiliki suatu kasta sesuai dengan kasta orang tuanya. Prinsip warna jauh berbeda dengan kasta. Warna bersifat sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Seorang petani, termasuk dalam warna sudra, dari sisi warna sipetani mempunyai kedudukan sejajar dengan seorang guru besar di perguruan tinggi.

Munculnya terminology warna, adalah karena adanya persembahan para Deva. Yang menjadi persembahan para Deva adalah Purusa. Atas dasar persembahan tersebut, lalu dari mulut para Deva muncul warna Brahmana, dari tangannya muncul warna Ksatria, dari pahanya muncul warna Vaisia dan Sudra lahir dari kakinya (Rgv.

X.90.12).

Dalam Bhg. IV.13 dijelaskan bahwa sistem keempat Warna **diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa** adalah sesuai dengan pembagian **dan kualitas dari perbuatan**.

Dalam Manava Dharmasastra 88 s.d. 91 dijelaskan tugas dan fungsi dari keempat warna tersebut.

Brahmana dinyatakan **lahir dari mulut para Deva**, hal ini bermakna kiasan, memberi petunjuk begitu pentingnya tugas dan fungsi dari kaum Brahmana, karena pada kaum Brahmana terletak tugas dan fungsi sebagai penggali, mengembangkan, memperaktekan, menyebar luaskan ajaran Veda. Apabila dianalogikan dengan tugas dan fungsi dalam sebuah perusahaan, kaum Brahmana mempunyai tugas dan fungsi sebagai bagian Penelitian dan Pengembangan (Research and Developments/R & D) dan juga sebagai **B** **45** an Pemasaran (Marketing) dari ajaran Veda. Kaum Brahmana juga bertugas melaksanakan upacara yajnya **baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat**. Melihat demikian pentingnya tugas kaum Brahmana, seperti menggali, mengembangkan dan memperaktekan ajaran

Veda, maka tugas menggali atau melakukan penelitian masalah akuntansi yang terkandung dalam ajaran Veda adalah menjadi tanggung jawab kaum Brahmana.

Warna Ksatria dinyatakan **lahir dari tangan para Deva**, merupakan suatu kiasan, bahwa para ksatria merupakan manusia pilihan, harus berbadan sehat, cerdas, pandai dan pintar. Pada zaman tersebut, tugas Ksatria sebagai pembela Negara lebih banyak menggunakan tangan kanan dan kiri, seperti menggunakan panah, pedang, tombak, dsb.nya. Hal itu tidak berarti bahwa kaum Ksatria dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sangat penting tersebut tidak menggunakan unsur lainnya seperti pikiran dan akal untuk mengatur siasat pertahanan dan pertempuran.

Selanjut **warna Waisia** dinyatakan **lahir dari paha para Deva**, mungkin dimaksudkan fungsi kaum Waisia sangat penting dalam penopang kehidupan masyarakat manusia, sama pentingnya dengan fungsi paha dalam menopang tubuh manusia. Dari dahulu sampai sekarang fungsi kaum Waisia yang disebut dengan istilah kaum pedagang, industriawan, cerdas pandai adalah sangat penting dalam memajukan sebuah Negara. Tingkat kemajuan yang dicapai oleh kaum Waisia akan berdampak besar terhadap tugas dan fungsi kaum Brahman, Ksatria dan Sudra. Dengan berkembang dan majunya perekonomian sebuah Negara, berarti pendapatan Negara dari unsur pajak dan sumber daya lainnya akan bertambah besar sehingga porsi budget atau anggaran untuk mengembangkan ajaran agama, angkatan perang dan budget untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan menjadi besar pula. Akuntansi berperan membantu kaum Waisia dalam melakukan tugas dan fungsinya selaku pedagang, industriawan dan sebagainya dalam mencatat dan mempertanggung jawabkan aset yang dimiliki dan atau dikelolanya.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa akuntansi secara konsep digali oleh kaum Brahmana dari kasanah Veda dan diperaktekan oleh kaum Waisia. Bahkan akuntansi yang digali oleh kaum Brahmana dari kasanah Veda dapat digunakan dalam semua aspek kehidupan asalkan di dalamnya terkait masalah ekonomi dan keuangan.

Warna Sudra dinyatakan **lahir dari kaki para Deva**, hal ini dimaksudkan tugas dan fungsi warna ini adalah sebagai pekerja atau buruh, yaitu bertugas melayani ketiga warna lainnya. Tanpa adanya warna Sudra ini, tugas dan fungsi dari ketiga Warna lainnya tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Pembagian masyarakat menurut Varna, sampai dengan zaman modern ini tetap berlaku. Kelompok masyarakat yang menekuni bidang kerohanisan atau agama, yang disebut dengan warna Brahmana, masyarakat yang memilih jalan hidup sebagai tentara, polisi yang bertugas membela Negara, disebut dengan warna Ksatria, masyarakat yang memilih jalan hidup sebagai pegawai negeri, dari tingkat yang teratas sampai dengan yang paling bawah, sebagai pedagang, industriawan, cerdas pandai, ilmuwan, disebut dengan warna Waisia, dan yang terakhir yang membantu masyarakat lainnya hanya bermodalkan kekuatan fisik, disebut dengan warna Sudra.

Dalam kaitan dengan ilmu akuntansi, semua golongan Varna terkait dengan bidang akuntansi, sejauh kegiatan yang dilakukan ada kaitannya dengan bidang ekonomi dan keuangan. Semua kegiatan yang dilakukan harus dicatat dengan tertib dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi, dilaporkan dan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada pihak-pihak yang wajib dilapori dan diberikan pertanggungjawabannya.

6. CATUR MARGA.

Catur Marga atau empat jalan kehidupan yang wajib dijalankan oleh manusia Hindu untuk tercapainya kelepasan abadi atau moksa, menyatunya Atman dengan Brahman, terdiri dari **Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga dan Yoga Marga**. “Marga “berarti **jalan** atau **cara**, sedangkan “ **Yoga** “ berarti menghubungkan diri dengan Tuhan (Suhardana, 2010 : 23-24). Keempat marga atau jalan kerja ini merupakan petunjuk bahwa manusia selama hidupnya wajib bekerja. Bekerja merupakan svadharma bagi manusia yang berarti melaksanakan tugas sesuai hukum alam. **Svadharma** adalah **kewajiban material** yang dimiliki seseorang sesuai dengan raganya.

Kewajiban manusia selama hidupnya harus melakukan kerja dijelaskan dalam Bhawavadgita. Bekerja ini merupakan **kewajiban material** bagi manusia dan selama manusia masih hidup tidak boleh berhenti bekerja barang sedetikpun.

Sebagaimana diketahui, **Bhagavad Gita** terdiri dari **18 Bab**, yang masing-masing Bab menguraikan tentang :

Bab I	26	KEGUNDAHAN DAN KERAGUAN ARJUNA
Bab II		YOGA PENGETAHUAN
Bab III		KARMA YOGA
Bab IV		JNANA YOGA ATAU JALAN PENGETAHUAN
Bab V		PELEPASAN YANG SESUNGGUHNYA
Bab VI		DHYANA YOGA
Bab VII		TUHAN DAN ALAM SEMESTA
Bab VIII		JALAN DARI EVOLUSI KOSMIS
Bab IX		YANG MAHA KUASA LEBIH BESAR DARI CIPTAANNYA;
	26	RAHASIA YANG PALING DALAM
Bab X		TUHAN ADALAH SUMBER DARI SEMUANYA; MEMAHAMI
		DIA BERARTI MEMAHAMI SEMUANYA
Bab XI		BENTUK SEMESTA
Bab XII		SEMBAH KEPADA KEPERIBADIAN TUHAN LEBIH BAIK
		DARIPADA SAMADHI KEPADA YANG MUTLAK
Bab XIII	26	YOGA JASMANI YANG DISEBUT MEDAN
Bab XIV		BAPA GAIB DARI SELURUH MAHLUK
Bab XV		POHON KEHIDUPAN
Bab XVI		SIFAT DARI PIKIRAN YANG BERWAWASAN DEWATA DAN
		ASURA
Bab XVII		TRIGUNA DITERAPKAN KEPADA FENOMENA AGAMA
Bab XVIII		KESIMPULAN

Bab-bab yang ayat-ayatnya berkaitan dengan **Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga dan Yoga Marga** adalah (1) Bab II tentang Yoga Pengetahuan, (2) Bab III tentang Karma Yoga, (3) Bab IV tentang Jnana Yoga atau Jalan Pengetahuan, (4) Bab IX Yang Maha Kuasa Lebih Besar dari Ciptaannya (Rahasia Yang Paling Dalam) dan Bab XII tentang Bhakti dan Samadhi.

Dijelaskan bahwa kewajiban kerja yang dilakukan oleh manusia tersebut harus dijalankan sesuai dengan asas-asas **Dharma**. Ketika seseorang telah mencapai pembebasan (Moksa), yaitu bersatunya **Atman** dengan **Parama Atman**, tugas-

tugasnya **tidak lagi bersifat material** melainkan **bersifat rohani**. Masalah kerja yang merupakan Svadharma (kewajiban material) dari manusia dapat diikuti penjelasannya dalam Bagavadgita.

8
Bagavadgita II.31

*Svadharmam api v̄hāvekshya
Na vikampitum arhasi
Dharmyād dhi yuddāch chhreyo nyat
Kastriyasya na vidyate*

“ Lebih daripada itu, sesuai dengan svadharma-mu, engkau tidak usah ragu-ragu. Tidak ada hal yang lebih mulia bagi seorang ksatria selain bertempur sesuai dengan asas Dharma “.

Dalam ayat ini Sri Krisna menjelaskan masalah kerja kepada Arjuna, dimana posisi Arjuna sebagai prajurit Pandawa siap dalam bertempur. Bertempur melawan musuh adalah tugas mulia seorang prajurit. Setelah selesai bertempur dievaluasi hasilnya, yaitu kalah atau menang. Sejak persiapan bertempur, melaksanakan pertempuran dan membuat evaluasi serta laporan hasil pertempuran merupakan **kewajiban material** dari seorang prajurit. Setelah evaluasi dan laporan hasil pertempuran diserahkan dan diterima oleh yang berwenang, dalam hal ini yang menugaskan untuk bertempur, maka tugas dari seorang prajurit tidak lagi bersifat material melainkan **bersifat rohani** atau **bersifat moral**. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam hidup ini pun manusia mempunyai dua kewajiban, yaitu kewajiban material dan kewajiban rohani yaitu sejalan dengan kewajiban Arjuna sebagai seorang prajurit yang siap bertempur dalam medan Kurusetra melawan pasukan Korawa.

Berkenaan dengan **Karma Marga** dan **Jnana Marga**, yaitu kegiatan kerja untuk memperoleh **kekayaan material** (**Karma Marga**) dan **kekayaan non material** dalam bentuk **kemasyhuran, ilmu pengetahuan (Jnana Marga)**, manusia ¹⁹⁴ mohon hal tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dianugrahi **kemasyhuran dan kekayaan yang dapat diperoleh dengan ribuan cara kerja yang jujur**.

Hal ini dijelaskan dalam **Rgv. I. Sukta 9 ayat 8** yang berbunyi sebagai berikut :

Rgveda I. 9. 8

⁵⁷
*Asme dhehi śravo brhad
Dyumnam sahasrasātamam,
Indra tā rathinir iṣ aḥ*

“ Tuhan yang maha cemerlang, anugrahilah kami **kemasyhuran dan kekayaan** yang diperoleh dalam ribuan cara dengan kemampuan dan kegiatan kerja yang jujur “.

Berdasarkan uraian ayat Rgveda di atas bahwa manusia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bentuk dua jenis aset yaitu aset fisik yang disebut dengan kekayaan dan aset non fisik yang disebut dengan kemasyhuran.

Di dalam dunia bisnis, aset fisik terdiri dari benda-benda fisik seperti tanah, bangunan, barang inventaris, dsb.nya. Termasuk dalam kelompok aset adalah semua hak perusahaan, yang tercantum disebelah Debet (D) Neraca, didalamnya termasuk piutang, persediaan, dsb.nya. Sedangkan yang masuk dalam kelompok aset non fisik dalam perusahaan adalah “ *goodwill* “. *Goodwill* dalam sebuah perusahaan dapat terjadi disebabkan oleh adanya kepercayaan dan penghargaan yang diberikan oleh para *stakeolder*(para pihak yang berkepentingan kepada perusahaan) sehingga nilai aset perusahaan menjadi meningkat.

Kekayaan dalam bentuk aset fisik dan kemasyhuran (*goodwill*) dalam bentuk aset non fisik dapat diperoleh dengan berbagai cara, bahkan disebutkan dengan ribuan cara, namun syarat utama dalam memrolehnya harus berdasarkan **dharma** dan **kejujuran**.

Dalam Rgv. I. 10, 7 dipertegas lagi permohonan manusia kepada Tuhan Yang Mahasa Esa dalam rangka memperoleh pengetahuan dan kekayaan, bahwa hanya kepada Tuhanlah permohonan tersebut ditujukan, dan bukan kepada yang lainnya.

Dalam upaya memperoleh kekayaan dalam bentuk kemasyhuran(kekayaan non fisik) dan kekayaan fisik, manusia harus berlandaskan Bahkti Marga atau Bahkti Yoga.

an bhakti ini dilandasi dengan jiwa dan pikiran yang tulus ikhlas yang merupakan cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan cara sujud dan bhakti berdasarkan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan.

Dalam Bhagavadgita XII.6dijelaskan bahwa bagi mereka, yang menghaturkan semua perbuatannya kepada Tuhan Yang maha Esa, cita-cita, persembahan dan samadhinya hanya untuk Tuhan, terhadap mereka telah dinyatakan melakukan Bhakti dan Samadhi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masih dalam kaitan dengan Bhakti Yoga, dijelaskan dalam Bhagavadgita XII.12, tentang kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa dapat dengan (1) pemusatan pikiran, (2) jalan ilmu pengetahuan, dengan (3) meditasi dan terakhir dengan jalan (4) melepaskan ikatan dengan hasil pekerjaan. Dinyatakan, jalan yang mempunyai bobot tertinggi sebagai bhakti kepada Tuhan adalah dengan melepaskan ikatan pahala dengan semua hasil pekerjaan.

Bhagavadgita XII.12:

*śreya hi jñānam abhyāsāḥ
Jāñānād dhayānam visishyate
Dhyānāt karma phala tyāgas
Tyāgāsch chhāntir anantaram*

“ Sungguh lebih baik ilmu pengetahuan dari pada pemusatan pikiran.
Yang lebih baik dari pengetahuan adalah meditasi.
Lebih baik dari meditasi adalah pelepasan semua hasil kegiatan.
Dengan segala pelepasan itu maka akan tercapailah kedamaian “.

Tuhan Yoga Marga atau Raja Marga adalah jalan untuk menghubungkan diri dengan dengan melaksanakan konsentrasi atau pemusatan pikiran, melalui tapa, brata, yoga dan samadhi dengan tujuan tercapainya kebebasan abadi, menyatunya Atman dengan Brahman. Pemusatan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan tapa, brata, yoga dan samadhi dianggap sebagai suatu peraktek untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai keberadaan Tuhan. Jadi tidak cukup dengan jalan membaca Veda sebagai ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, tetapi untuk dapat mengetahui Tuhan harus dilakoni melalui pemusatan pikiran, tapa, brata, yoga dan semadi. Petunjuk tentang Raja Yoga dimuat dalam Bhagavadgita Bab IX yang berjudul : “ Yang Maha Kuasa Lebih Besar Dari Ciptaan-Nya; Rahasia Yang Paling Dalam “. Para Yogi dapat mengetahui dan memahami bahwa Tuhan Yang Maha Esa Lebih Besar Dari Ciptaannya adalah melalui jalan pemusatan pikiran, tapa, brata dan yoga serta semadi. **Krisna** menyatakan kepada **Arjuna**, bahwa **jalan pemusatan pikiran, tapa, brata, yoga dan semadi** untuk dapat **mengerti dan memahami kebesaran Tuhan merupakan jalan yang mudah dipelajari dan dilaksanakan**.

Yoga Marga atau Raja Marga dapat diketahui kebenarannya melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Hal ini dinyatakan dalam **Bhagavadgita IX.2** : “ **Inilah ilmu pengetahuan terbesar, rahasia terbesar alat kesucian tertinggi, mudah dimengerti dengan pengalaman langsung, jalan yang benar mudah dilaksanakan dan kekal abadi** “. **8**

Ilmu pengetahuan suci yang terkandung dalam Veda harus diyakini kebenarannya. Bagi mereka yang meyakini hal itu akan terbebas dari reinkarnasi, atau lahir ke dunia ini secara berulang-ulang. Bagi mereka yang yakin akan keberadaan Tuhan Yang maha Esa, segala usahanya yang menuju kepada kebaikan akan berhasil dengan baik pula. Ungkapan dalam **Bhagavadgita IX. 3** sebagai berikut : “ **mereka yang tidak memiliki kepercayaan pada ilmu pengetahuan dan budi pekerti ini tidak mencapai Aku, wahai Parantapa, kembali ke jalan dunia inkarnasi** “.

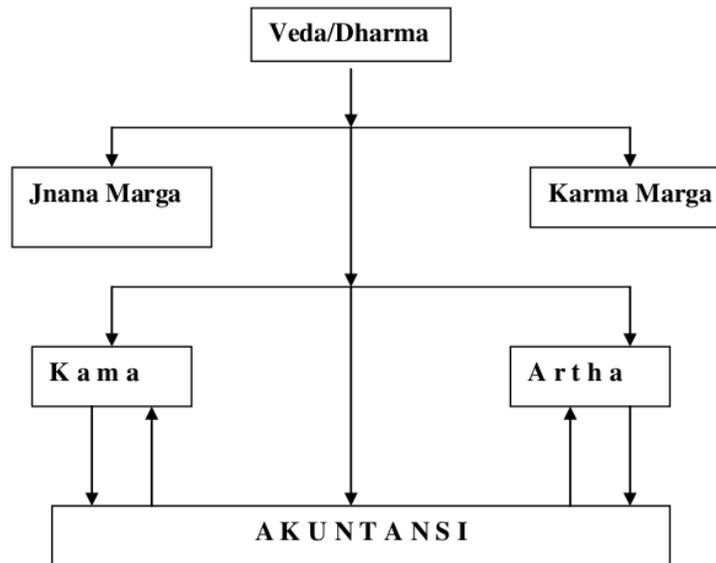
Para yogi yang menyendiri di tempat sepi (di hutan atau dimana saja) berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun melakukan pemusatan pikiran, tapa berata, yoga semadi, kiranya dapat disetarakan dengan para peneliti yang sedang meneliti bidang ilmu pengetahuan tertentu, dengan mengurung diri dalam sebuah tempat dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan dalam usaha untuk menemukan sesuatu yang baru dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia.

Para peneliti ini juga meyakini akan kebenaran ilmu pengetahuan yang sedang ditelitinya, dengan demikian berarti mereka juga meyakini bahwa ilmu pengetahuan yang sedang ditelitinya tersebut berasal dan bersumber dari Tuhan.

Berdasarkan uraian yang berasal dari kutipan beberapa ayat Veda di atas, dapat dirumuskan landasan dari Akuntansi Hindu adalah Veda atau Dharma, menurunkan konsep Jnana Marga dan Karma Marga, dan selanjutnya menurunkan konsep Kama dan Artha. Unsur Kama dan Artha sudah merupakan bagian dari ilmu terapan (ilmu ilir), yang berhubungan dengan kekayaan. Jadi atas kekayaan ini sudah memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan untuk dasar bagi pengelola memberikan pertanggungjawaban kepada para pihak (stakeholder) yang berkepentingan.

Penjelasan yang berhubungan dengan akuntansi tersebut di atas dapat dirumuskan dalam bentuk Gambar berikut ini :

Gambar III.4



7. KESEJAHTERAAN/KEMAKMURAN.

Ilmu pengetahuan Veda yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui para Rsi ribuan tahun yang lalu bertujuan untuk memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani selama hidupnya. Dalam Rgveda dinyatakan, bahwa manusia memohon **ribuan macam kekayaan**, berupa harta benda makanan dan sebagainya, untuk dasar mencapai kesejahteraan dan atau kemakmuran selama hidupnya. Manusia tinggal mengupayakan pengelolaan atas kekayaan tersebut dengan cara sebaik-baiknya agar mendatangkan kesejahteraan bagi dirinya. Masalah tersebut di atas dijelaskan dalam :

119

Rgveda III.13.7

*Nū no rāsva sahasravat
 Tokavat puṣṭ imad vasu
 Dyumad agne suviryaṁ
 Varṣiṣṭ ham anupakṣitam*

“ Semoga Engkau sekarang memberi kami kekayaan ribuan macam bersama dengan keturunan, makanan, harta benda luar biasa, dan dimuliakan dengan kekuatan dan semoga Engkau menjadi

tak terbatas dan tak habis-habisnya dalam berkahmu kepada kami “.

Berhubungan dengan permohonan manusia kepada Tuhan akan makanan yang melimpah dijelaskan dalam Yajurveda.

Yajurveda XIX.38

*Agna āsūmsi pawase
āsuva-ūrjam iṣ am ca naḥ
āre bādhasva duchchunām*

“ Semoga Tuhan Yang maha Esa memberkahi kami dengan makanan dan tenaga “.

Berkaitan dengan permohonan manusia akan kemakmuran dan kebajikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan dalam Rgveda X.63.13.

Rgveda X.63.13

*Ariṣ tah sa marto viśva edhate
Pra prajabhir jāyate dharmṇas pari*

“ Ya, Sang Hyang Surya, umat manusia yang menjalankan kebajikan, dilimpahi kemakmuran dan anak cucu yang baik “.

Selanjutnya dijelaskan bahwa bagi manusia yang mau hidup hemat dan menyimpan kekayaannya dengan baik maka yang bersangkutan akan memperoleh kemakmuran karena kekayaannya yang berlimpah. Masalah ini dijelaskan dalam Atharvaveda III.24.7 sebagai berikut :

Atharvaveda III. 24. 7

*Upohāca samūhaś ca
Ksattārau te prajāpate,
Tav-ihā vahatām sphātīm
Bahuṁ bhūmānam akṣ itam.*

“ Ya, Tuhan Yang Maha Esa, Penguasa Semesta Alam, perolehan dan pelestarian kekayaan adalah rintisan-Mu. Semoga mereka (yang menghemat) mencapai kemakmuran dan berlimpahnya kekayaan yang kekal di sini “.

Tuhan menyatakan bahwa kepada manusia telah diwariskan kekayaan yang tak terkira banyaknya bersamaan dengan kelahirannya. Kepada manusia dituntut untuk membuang naluri-naluri yang kotor dalam mengelola kekayaan tersebut. Membuang naluri yang kotor, mungkin maksudnya adalah menjauhkan diri dari berjudi, minum-minuman keras, kalau sekarang menjauhkan diri dari narkoba, berzina, dsb.nya Masalah ini dinyatakan dalam Atharvaveda VII.115.3 :

Atharvaveda VII. 115. 3

“ Manusia mewarisi kekayaan (naluri) yang tak terkira banyaknya bersamaan dengan kelahirannya. Kita seharusnya membuang naluri-naluri yang kotor. Ya, Tuhan Yang maha Esa, berilah kami naluri-naluri dan kecendrungan yang jernih tanpa noda “.

Berhubungan dengan warisan kekayaan yang melimpah sebagai karunia Tuhan, ditegaskan bahwa kekayaan tersebut diletakkan ditangan kanan manusia dan tangan kirinya berfungsi sebagai manajemen atas kekayaan tersebut, sehingga dapat memberikan hasil sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran manusia tersebut. Masalah tersebut di atas dijelaskan dalam Rgveda X.60.12.

Rgveda X. 60. 12

*Ayaṁ me hasto bhagavān
Ayaṁ me bhagavattaraḥ
Ayaṁ me visvabheṣṣ ajo
Ayaṁ śivabimarśanaḥ.*

“ Ya, Tuhan Yang Maha Esa, satu tangan (kanan) saya memiliki keberuntungan yang bagus dan satu tangan (kiri) yang lain lebih beruntung. Tangan kananku adalah obat untuk semua penyakit dan tangan yang kiri mampu berbuat sama bahkan dengan sentuhan “.

Jadi masalah kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan oleh manusia tergantung kepada manusia itu sendiri, karena Tuhan telah meletakkan kekayaan di tangan kanan, dan tangan kirinya ditugasi untuk mengelola dengan baik kekayaan tersebut. Permasalahan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia harus mau bekerja keras, berhemat, suka menabung, sehingga kekayaan yang dimiliki dapat berlipat ganda, sehingga dapat meningkatkan kemakmurannya pula.

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

- P.3.1. Diperkirakan akuntansi sudah dikenal dan diterapkan dalam masyarakat kita sejak 3.600 tahun **Sebelum Masehi**. Apabila dihubungkan dengan pengelompokkan zaman menurut ajaran Hindu, berarti masyarakat manusia sudah menerapkan akuntansi sejak zaman Kali-yuga. Setujukah Saudara dengan pernyataan di atas dan berikan alasannya.
- P.3.2. Kegiatan tulis-menulis dimasyarakat secara intensif dilakukan menjelang akhir zaman Dvapara-yuga. Termasuk Veda dan Bhagawadgita dikodifikasikan oleh Vedaviyasa pada zaman tersebut. Apa alasan yang mendasarinya.
- P.3.3. Jelaskan hubungan catur warna dengan masalah ekonomi dan akuntansi
- P.3.4. Berilah makna dari bunyi ayat RgvedaI. Sukta 9 ayat 8 seperti diuraikan di atas ditinjau dari segi ekonomi dan akuntansi.
- P.3.5. Buat sebuah metrik berkaitan dengan kelompok zaman, umur manusia dan catur purusa-artha menurut ajaran Hindu.
- P.3.6. Berikanlah komentar ringkas berhubungan dengan metrik yang Saudara buat tersebut.

- P.3.7. Berikan komentar atau pendapat Saudara mengenai bunyi dari Ayat Atharvaveda VII. 115.5. dihubungkan dengan kehidupan manusia.
- P.3.8. Berikan komentar Saudara mengenai bunyi dari ayat Rgveda X. 60. 12 di atas dalam kaitannya dengan pengertian Kanan/Kiri atau Debet dan Kredit dalam akuntansi.
- P.3.9. Di Bali, pedagang barang-barang kesenian tampaknya tidak menjadi masalah menjual sebagai barang kesenian dalam ujud patung atau gambar dari Awetar Hindu atau Budha. Bahkan yang menjual barang-barang yang digolongkan sebagai barang seni tersebut bukan dari umat Hindu atau Budha. Berikan komentar Saudara !
- P.3.10. Dapatkan Saudara menemukan ayat atau beberapa ayat yang mendukung permasalahan pada pertanyaan P.3.9 ?
- P.3.11. Adakah ayat Veda yang mendorong umat Hindu untuk berhemat dengan cara menabung uang atau barang-barang lainnya ?
- P.3.12. Bila umat Hindu yang mempunyai modal cukup lalu mendirikan sebuah badan usaha bidang perbankan, apakah kegiatan yang dilakukan itu ada dasarnya dalam Veda.
- P.3.13. Saudara diminta untuk mencari dan sekaligus mencatat beberapa ayat Veda, Bhagawadgita serta Manawadharmasastra yang bunyi ayat-ayatnya bermakna berhemat dan sisa uangnya disimpan di Bank.
- P.3.14. Berikan komentar Saudara berkaitan dengan bunyi ayat dalam Rgveda III. 13.7 dan Rgveda III. 24.7.
- P.3.15. Adakah kaitan antara pendirian LPD di Bali dengan bunyi beberapa ayat Veda yang dijelaskan di atas. Tolong tunjukkan ayat Veda yang dapat dikatakan sebagai pendukung dari pendirian LPD, selain yang telah dijelaskan di atas.
- P.3.16. Berikan kupasan Saudara tentang makna dari Atharvaveda VII.115.3. Saudara harus mulai dengan menulis bunyi ayat Veda dimaksud.
- P.3.17. Berikan kupasan Saudara tentang makna dari Rgveda X. 60.12. Saudara harus mulai dengan menulis bunyi ayat Veda dimaksud.
- P.3.18. Berikan kupasan Saudara tentang makna dari Rgveda III. 13.7. Saudara harus mulai dengan menulis bunyi ayat Veda dimaksud.
- P.3.19. Menurut Saudara Warna yang manakah yang seharusnya paling bertanggung jawab atas pengembangan ilmu akuntansi sesuai ajaran Veda ? Kenapa demikian.
- P.3.20. Berikan pendapat Saudara tentang fakta dimasyarakat Indonesia saat ini tentang keadaan nyata dari merosotnya pelaksanaan Dharma.

AKUNTANSI HINDU

Yad dhanam yajna silanam devasvam tad vidurbudhah, ayajvanan tu yad vittam asurasvam tad ucyate (Mdv. XI. 20)

Harta milik dari yang melakukan yajna dengan penuh keimanan, orang-orang bijaksana menamakan sebagai harta para dewa, tetapi harta seseorang yang tidak pernah melakukan yajna adalah harta dari Asura (Mdv. XI. 20)

BAB IV

DEBIT (KIRI), KREDIT (KANAN), KEKAYAAN, EKUITAS DAN PERSAMAAN AKUNTANSI

1. PENGANTAR.

Akuntansi adalah sarana utama untuk mengorganisasi dan mengikhtisarkan informasi tentang kegiatan ekonomi. Informasi ini diberikan kepada pengambil keputusan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk menyiapkan laporan ini, para pelaku akuntansi (1) menganalisis, (2) mencatat, (3) mengkuantifikasi, (4) mengakumulasi, (5) mengikhtisar, (6) mengklasifikasi, (7) melaporkan, dan (8) menginterpretasi peristiwa ekonomi serta pengaruh keuangan terhadap organisasi.

Terminologi **Debit (D)** dan **Kredit (K)** serta **Ekuitas (Modal)** digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah-istilah ini akan digali dari sistem akuntansi tradisional dan dari ajaran Veda.

Khusus mengenai sumbernya dari Veda, dalam buku **Matematika Veda, 2008 : ix**, disusun oleh Bharati Krsna Tirthaji Maharaja, antara lain menyatakan bahwa “ kata *Veda* sendiri memiliki arti **urutan (derivative)** yaitu sumber dan gudang yang tiada terbatas dari semua pengetahuan. Urutan (*derivative*) ini akibatnya berarti, menunjukkan dan mengejawantahkan bahwa *Veda* seharusnya mengandung di dalam dirinya semua pengetahuan yang diperlukan oleh kemanusiaan bukan saja hal yang berhubungan dengan “ **rohani “ (dari dunia yang lain)**, akan tetapi tentu juga **bidang keilmuan** yang biasa disebut ilmu murni “ **sekuler “ , “sementara” , “keduniawiaan “**, serta **juga jalan-jalan** yang diperlukan kemanusiaan untuk mencapai semuanya, lengkap dan sukses sempurna di dalam semua arah yang bisa dipikirkan dan tidak ada pembatasan yang mengurangi pengetahuan tersebut di dalam lingkungan apapun, di dalam arah manapun atau di dalam hal apapun “.

Selanjutnya ditegaskan lagi bahwa “ dengan kata lain hal ini memastikan bahwa *Veda* seharusnya **lengkap, sempurna dan sanggup memberikan cahaya sepenuhnya di dalam segala pengetahuan yang ingin ditemukan oleh para pencari “.**

Berlandaskan pada penegasan yang diberikan oleh Bharati Krsna Tirthaji Maharaja di atas, maka penulis berupaya menggali terminologi **Debit (D)** dan **Kredit (K)**, Kekayaan, Modal, Ekuitas yang digunakan oleh sistem akuntansi konvensional saat ini dari khasanah Veda baik dalam bentuk tersirat maupun tersurat.

2. SISTEM TATA BUKU TUNGGAL.

Diperkirakan pembukuan dengan sistem Tata Buku Tunggal (Single Entry Accounting System) yang pertama kali berkembang, yaitu sekitar 3.600 tahun sebelum Masehi (T.M. Tuanakota 2000 : 53). Pencatatan hanya dilakukan terhadap uang kas masuk dan uang kas keluar. Hak dan kewajiban yang timbul yang belum berbentuk kas belum dicatat. Sampai saat ini sistem akuntansi tunggal masih banyak digunakan, khususnya oleh perusahaan-perusahaan kecil. Dengan sistem akuntansi tunggal murni, pada akhir periode akuntansi, Bagian Akuntansi tidak mungkin dapat menyusun laporan keuangan, walaupun hanya berbentuk Neraca dan Daftar Laba/Rugi. Untuk dapat menyusun Neraca dan Daftar Laba/Rugi pada akhir periode akuntansi, maka Bagian Akuntansi harus melakukan penyesuaian atas pos-pos yang mempengaruhi Neraca dan Daftar Laba/Rugi. Pos-pos tersebut dikenal dengan istilah pos-pos transitoris dan antisipasi. Agar dalam menggunakan metode kas dapat disusun laporan keuangan (Neraca dan daftar Laba/Rugi) pada akhir periode akuntansi, maka metode kas harus dilengkapi dengan membuat jurnal-jurnal penyesuaian terhadap pos-pos transitoris dan antisipasi. Lalu metode akuntansi seperti ini dapat disebut metode kas menuju akrual.

Apabila pada akhir tahun buku perusahaan tersebut membuat laporan keuangan, umumnya berbentuk Neraca dan Daftar Laba/Rugi, barulah dibuat penyesuaian-penyesuaian terhadap pengeluaran kas yang sudah pernah dilakukan, tetapi pengeluaran kas tersebut masih mempunyai manfaat untuk beberapa periode berikutnya, sehingga Neraca dan Daftar Laba/Rugi dapat disusun. Tentu dengan cara ini tidak dapat menghasilkan Neraca dan Daftar Laba/Rugi secara tepat, akurat, lengkap dalam nilai dan jumlah, serta dalam waktu yang cepat.

Bahkan sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia, sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan sistem Tata Buku Tunggal, karena Sistem Pembukuan Tunggal Menuju Berpasangan baru dimulai tahun 2005, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Mulai tahun buku 2010, berdasarkan PP. No. 71 tahun 2010, barulah Pemerintah Indonesia menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berasaskan akrual (berbais akrual) atau Sistem Tata Buku Berpasangan.

3. SISTEM TATA BUKU BERPASANGAN

Para peneliti akuntansi menyatakan, bahwa bukti adanya peraktek Akuntansi Berpasangan (Double Entry Accounting System) dimulai dengan ditemukannya tulisan LUCA PACIOLI, yang bertahun 1494. Para peneliti juga memperkirakan bahwa peraktek akuntansi berpasangan telah dilaksanakan oleh masyarakat tertentu lebih awal dari tahun tersebut.

Metode Tata Buku Berpasangan yang ditulis oleh **Luca Pacioli** dalam buku "*Summa de Arithmetica Geometrica, Proportioni et Proportionalita*", dikenal dengan "**Metode Venesia**" atau **Metode Italia**".

Beliau (*Luca Pacioli*) menyatakan ia **bukanlah** sebagai **penemu** dari sistem **Tata Buku Berpasangan**, tetapi menguraikan mengenai apa yang dipraktikkan pada masa itu **di Italia** (Belkaoui, 2006 : 4).

Sejalan dengan penjelasan di atas ada yang menyatakan bahwa Sistem Pembukuan Berpasangan, mungkin telah biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa tertentu jauh sebelum tahun 1494, dimana pendapat ini didukung oleh Sofyan Syafri Harahap dalam buku Teori Akuntansi, 1993 : 31, dengan nada yakin menyatakan bahwa sistem akuntansi berpasangan ditemukan dalam kebudayaan lain yang telah pernah maju menguasai dunia, seperti kebudayaan **Cina, India, Mesopotamia, dan Persia**.

Sistem Akuntansi Akrual yang dijelaskan dalam Buku Arthasastra yang disusun oleh **Kautilya** lebih kurang **400 tahun Sebelum Masehi (Seb.M)** adalah bukti dari benarnya pernyataan Bapak Sofyan Syafri Harahap di atas.

Pada pemerintahan India Belanda, Sistem Akuntansi India dikenal dengan sistem akuntansi Bombai, system akuntansi yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha India.

4. TERMINOLOGI DEBIT (D), KREDIT (K) DAN MODAL (EKUITAS) DAN PERSAMAAN AKUNTANSI DALAM SISTEM AKUNTANSI KONVENSIONAL

Dalam akuntansi, istilah Debet (D) dan Kredit (K) digunakan dalam sistem tata buku berpasangan (double accounting system). Sistem tata buku berpasangan menerapkan asas akrual, artinya semua hak dan kewajiban entitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya. Media untuk melakukan pencatatan dalam system akuntansi berpasangan (double accounting system) adalah jurnal. Setiap akan melakukan pencatatan atas sebuah transaksi keuangan melalui sebuah jurnal. **Bagian akuntansi**, bila menghadapi sebuah transaksi, selalu harus memikirkan pos atau akun apa yang harus di Debit (D) dan akun apa yang harus di Kredit (K) sebagai akun lawannya. Dalam menetapkan pos yang akan di Debet dan atau di Kredit, Bagian Akuntansi harus berpedoman kepada Pedoman Akuntansi serta Bagan Akun (Chart of Account/COA) yang telah ditetapkan dan berlaku untuk entitas yang bersangkutan.

Mengenai pengertian **Debit (D)** dalam Kamus Istilah Akuntansi, Joel G. Siegel, dkk, halaman 127, antara lain menyebutkan “ Sebuah ayat yang terdapat pada **sisi kiri sebuah perkiraan. Dalam sistem pembukuan berpasangan, debit akan meningkatkan aktiva dan pengeluaran, dan menurunkan kewajiban, kekayaan dan pendapatan** “.

Kata **Kredit (K)** diberikan pengertian sebagai “ ayat masukan untuk **sisi kanan sebuah perkiraan**. Sebagai kata kerja, untuk membuat ayat masukan pada sisi kanan sebuah perkiraan. Dengan menggunakan sistem akuntansi berpasangan, kredit akan meningkatkan kewajiban, menambah kemampuan untuk membeli, menambah kekayaan, dan pendapatan dan menurunkan aktiva (aset) dan pengeluaran (biaya) “ (Joel G. Siegel : 118).

Jadi terminology **Debit (D)** sama dengan pencatatan dilakukan disebelah kiri dalam sebuah akun yang berbentuk **T**, sedangkan **Kredit (K)** sama dengan pencatatan dilakukan disebelah kanan akun bentuk **T**.

Jadi peraturan mengenai Debit (D) dan Kredit (K) digunakan dalam pembukuan berpasangan.

Istilah **Debit (D)** dan **Kredit (K)** yang digunakan saat ini dalam **Dobel Akunting** (Tata Buku Berpasangan) berasal dari pembukuan metode **Venesia** yang ditulis oleh **Luca Pacioli** dalam buku **Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita, tahun 1494**.

Istilah **Debit (D)** berasal dari **Adebeo** dan **Kredit (K)** berasal dari **Credito** (Belkaoui, 2006 : 4).

Ditegaskan oleh Luca Pacioli bahwa seluruh pencatatan harus berpasangan. Pacioli mengatakan, jika Anda **membuat seorang kreditor**, maka Anda harus membuat **seorang debitor**.

Dinyatakan, terdapat tiga buku yang digunakan dalam pencatatan pembukuan berpasangan, yaitu : **(1) memorandum; (2) sebuah jurnal ; dan (3) sebuah buku besar**.

Pencatatan harus dibuat sejelas mungkin. Yang harus dicatat adalah : (1) nama pembeli dan penjual barang; (2) harga barang; (3) jenis barang, lengkap dengan berat, ukuran atau hasil pengukuran ; (4) syarat-syarat pembayaran; (5) kapan dilakukan pembayaran (kapan uang diterima atau dikeluarkan); (6) jenis mata uang yang digunakan lengkap dengan nilai tukarnya.

Peraturan atau konvensi Tata Buku Berpasangan ini bila menggunakan bentuk akun **T** untuk akun Neraca, Kewajiban, Kekayaan (Ekuitas) dan Laporan Laba/Rugi, maka gambarnya sebagai berikut.

Gambar peraga akun T seperti dibawah ini.

Gambar 4.1.

Akun Aktiva (Aset)		Akun Kewajiban	
Dr.	Kr.	Dr.	Kr.
Meningkat	Menurun	Menurun	meningkat
+	-	-	+

Saldo akhir

Saldo akhir

Akun Kekayaan (Ekuitas)		Akun Pendapatan	
Dr.	Kr.	Dr.	Kr.
Menurun	Meningkat	-	+
-	+ Saldo akhir		

Akun Biaya	
Dr.	Kr.
+	-

Sumber : Joel G. Siegel, dkk. : 128 , Kamus Istilah Akuntansi (dengan penyesuaian)

Kekayaan/modal (ekuitas) merupakan aktiva (total aset) dikurangi total kewajiban, juga disebut dengan **net worth (kekayaan bersih)**. Dalam perusahaan perorangan, ini merupakan kekayaan pemilik. Dalam perseroan terbatas, merupakan kekayaan pemilik dalam hal ini adalah pemegang saham.

Dalam akun berbetuk T, saldo akhir dari pos-pos ekuitas dicatat disebelah Kredit (K) atau bagian kanan dari akun tersebut.

Berdasarkan rumusan **Debit (D),Kredit (K)** dan pengertian **Modal (Ekuitas)** di atas maka dapat disusun persamaan akuntansi sebagai berikut :

Gambar 4.2.

(1) **Ekuitas (Modal) = Total Aset (Total Aktiva/Kekayaan) – (dikurangi) Total Kewajiban; atau**

(2) **Total Aset (Total Aktiva/Kekayaan) = Total Kewajiban + Ekuitas (Modal)**

5. MODAL ATAU KEKAYAAN (EKUITAS) SERTA TERMINOLOGI DEBET (D) DAN KREDIT (K) DALAM AJARAN HINDU.

5.1. Kekayaan atau Modal Dalam Veda.

Sebagaimana dijelaskan oleh Joel G. Siegel dimuka, bahwa Debit (D) = Kiri, Kredit (K) = Kanan. Kekayaan = Aset, dan Modal = Ekuitas. Terminologi-terminologi yang digunakan oleh sistem akuntansi konvensional yaitu Debit (D) = Kiri, Kredit (K) = Kanan, Kekayaan = Aset, dan Modal = Ekuitas akan digali dari khasanah Veda.

Dalam Buku Veda, Sabda Suci, disusun oleh Titib, 1996 : 521, ditemukan antara lain kutipan ayat-ayat Veda yang menjelaskan mengenai ekonomi yang menguraikan **tentang kekayaan, perpajakan, perdagangan, utang-piutang**. Pada bagian ini diuraikan pula mengenai makna dari kekayaan, kemakmuran, tata cara penggunaan kekayaan, kesejahteraan masyarakat, perdagangan dan perniagaan serta beberapa hal lainnya.

Atharvaveda VII.115.3 memberikan petunjuk bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberikan warisan kekayaan yang tidak terhingga banyaknyakepada manusia bersamaan dengan kelahirannya. Penerima warisan berarti berutang kepada pemberi warisan, dalam hal ini manusia berutang kepada Ida Hyang Widhi Wasa.

Sehubungan dengan diberinya warisan atau utang kekayaan yang tidak terhingga banyaknya tersebut, manusia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan tuntunan akal budi yang sehat, dijauhkan dari pikiran-pikiran kotor dalam mewujudkan dan mengelola kekayaan tersebut.

Bunyi selengkapnya dari ayat tersebut di atas sebagai berikut :

Atharvaveda VII.115.3

*Ekaśataṁ laksmyo martysya
Sakaṁtanvā januso-adhi jātāḥ,
Tāsām pāpiṣṭi hā nir itaḥ pra hiṇmah
śivā asmabhyaṁjātavedo niyaccha.*

21 “ Manusia mewarisi kekayaan (naluri) yang tak terhingga banyaknya bersamaan dengan kelahirannya. Kita seharusnya membuang naluri-naluri yang kotor. Ya, Tuhan Yang Maha Esa, berilah kami naluri-naluri dan kecenderungan jernih tanpa noda “.

Bunyi ayat dalam **Atharvaveda VII. 115. 3** di atas dapat dihubungkan dengan bunyi ayat dalam **Manavadharmasastra I. 96** yang antara lain menyatakan bahwa diantara mahluk cerdas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusialah yang diberikan kecerdasan tertinggi. Kecerdasan tertinggi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia merupakan warisan **kekayaan tidak berwujud (non fisik)** yang tak ternilai harganya. Kekayaan dalam wujud kecerdasan yang tinggi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, berlandaskan naluri yang bersih, untuk memperoleh kekayaan yang bersifat fisik dan non fisik. Dalam mengelola warisan kekayaan yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia harus bekerja keras, dan mohon tuntunan agar diarahkan kejalan yang baik dan benar.

34 Dari ayat Veda tersebut di atas dapat ditarik makna :

- a. 34 Tuhan Yang Maha Esa sangat kasih dan pemurah kepada manusia bahwa Beliau telah memberikan kekayaan (aset) yang berlimpah, terdiri dari berbagai jenis benda tambang yang tersimpan diperut bumi, berbagai jenis

tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis binatang, berbagai jenis ikan di laut, dsb.nya untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidupnya.

- b. Begitu manusia lahir kekayaan (aset) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tersebut sudah tersedia, manusia tinggal mengelola, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Manusia menyadari kelemahannya dalam mengelola kekayaan (aset) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tersebut, oleh karena itu manusia mohon diberikan tuntunan dalam bentuk naluri atau budi pekerti (etika) yang baik, sehingga kekayaan tersebut dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh manusia yang hidup saat itu serta keturunannya. Kekayaan itu juga milik makhluk hidup lainnya, yang sama-sama hidup di bumi ini.
Oleh karena itu manusia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan bimbingan dan petunjuk (**secara nyata/sekala dan niskala/secara tidak nyata**) agar dalam mengelola kekayaan tersebut selalu berangkat dari prinsip budi pekerti yang baik, berlandaskan prinsip *Trikaya Parisuda*, yaitu **berpikir yang benar, berkata yang benar dan berbuat yang benar**.
- d. Sebagai pihak yang menerima warisan kekayaan dan harus mengelola kekayaan tersebut dengan berlandaskan budi pekerti atau etika yang baik dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Negara, sebagai pewaris kekayaan yang paling besar. Aparatur negara harus mengurus kekayaan Negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin, selalu berlandaskan budi pekerti yang baik, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 dengan tepat muruskan hal tersebut, yaitu : “ Bumi dan air serta udara dimiliki Negara, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia “.
Weda telah memberikan petunjuk kepada manusia yang bermakna jauh kedepan tentang kekayaan yang dianugerahkan ini, bahwa kekayaan itu ada di perut bumi, di dalam air dan di udara. Kekayaan itu ada pula di hutan-hutan, di dalam tumbuh-tumbuhan dan di perairan (samudra).

Kekayaan ada di langit dan bumi :

“ Ada kekayaan yang tersembunyi di langit dan di dalam bumi “.
(Rgveda VIII.40.4).

Pernyataan mengenai kekayaan yang tersembunyi di langit, saat ini potensi kekayaan yang dimaksud dalam Weda tersebut sudah dapat diwujudkan secara nyata oleh manusia dengan bantuan teknologi pesawat terbang, satelit, dan sebagainya.

- a) Perusahaan penerbangan milik pemerintah maupun swasta dapat menarik keuntungan dari kekayaan yang tersembunyi di langit tersebut dengan menciptakan rute-rute penerbangan baik dalam negeri maupun ke luar negeri.
- b) Negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat-pesawat rute antar Negara dapat memungut fee dari perusahaan penerbangan yang mengoperasikan pesawat terbang tersebut.

- c) Negara atau swasta dapat mengorbitkan satelit dengan berbagai jenis kegunaannya di langit wilayah Negara tersebut. Berbagai jenis kemampuan dari satelit yang diorbitkan tersebut dapat dijual kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga diperoleh penghasilan.
- d) Perusahaan televisi, telepon, internet, dsb.nya juga memanfaatkan kekayaan yang ada di langit. Dari kegiatan yang dilakukan mereka memperoleh keuntungan yang dibayar oleh para pengguna jasanya.
- e) Perusahaan yang mengkhususkan diri untuk mendidik pilot pesawat terbang juga memperoleh keuntungan dari memanfaatkan kekayaan yang ada di langit.

Untuk kekayaan yang ada di bumi sejak manusia ada di bumi ini telah memanfaatkan kekayaan yang berasal dari bumi, seperti bahan makanan yang diperoleh dari buah-buahan, daun-daunan, dan daging dari berbagai jenis binatang, dsb.nya. Bumi juga dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat bercocok tanam bahan makanan, seperti padi, gandum, jagung, pisang, dsb.nya.

Bahkan sejak lama manusia telah memanfaatkan kekayaan yang ada di bumi dengan masuk ke perut bumi mengambil bahan-bahan tambang yang tersimpan di perut bumi seperti : emas, perak, tembaga, intan, bahan minyak tanah, dan sebagainya.

Kekayaan juga dinyatakan ada di hutan-hutan, di dalam tumbuh-tumbuhan dan diperairan (lautan)

“ Ada kekayaan yang tersembunyi di hutan-hutan, di dalam tumbuh-tumbuhan (hutan) dan di dalam perairan (samudra).
(Rgveda I.59.3).

Dalam mengelola kekayaan Negara harus terbebas dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Bila pejabat Negara setelah melalui proses hukum yang berlaku terbukti melakukan KKN dalam mengelola kekayaan Negara maka wajib dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) Sebagai individu ada kemungkinan mendapat warisan, seperti seorang anak dapat warisan kekayaan dari orang tuanya. Sianak penerima warisan wajib menggunakan warisan tersebut dengan sebaik mungkin yaitu berlandaskan budi pekerti yang baik, berlandaskan Trikatya Parisuda.

Sesuai ajaran Hindu, sianak dianggap berutang kepada orang tuanya. Bila sianak salah menggunakan warisan yang diberikan tentu sipemberi warisan tidak merasa senang, bisa saja sipemberi warisan akan menarik kembali warisan tersebut baik secara nyata ataupun secara halus (niskala)

- sehingga sipenerima warisan tidak dapat merasakan kenikmatan dari warisan yang diterimanya.
- 3) Manajemen perusahaan harus mengelola kekayaan perusahaan dengan berlandaskan budi pekerti yang baik, berdasarkan prinsip **good**

corporate governance. Bagi manajemen, kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola merupakan harta warisan baginya. Oleh karena itu wajib dikelola dengan baik berlandaskan budi pekerti yang baik, berlandaskan **Trikaya Parisuda**.

Dari dahulu dan sampai dengan sekarang, akuntansi dipergunakan sebagai salah satu alat dalam mengelola kekayaan suatu entitas. Dalam menjalankan fungsinya mencatat dan melaporkan kekayaan, akuntansi harus berlandaskan prinsip **Trikaya Parisuda**, karena sangat dilarang membuat catatan atau laporan dengan wajah yang diperbagus atau diperjelek sebagai akibat tidak diterapkannya prinsip Triakaya Parisuda.

Wajah Laporan Keuangan sengaja diperbagus (*window dressing*), umumnya bila manajemen dan atau pemilik ingin mengajukan permintaan pinjaman atau kredit ke bank, agar bank atau kreditur mau dan dapat memberikan kredit lebih besar dari yang seharusnya. Wajah Laporan Keuangan dipercantik dapat pula atas inisiatif manajemen, dengan harapan agar manajemen mendapat pujian dari pemilik dan atau mendapatkan tantiem dan bonus tahunan yang lebih besar.

Sedangkan wajah Laporan Keuangan dibuat lebih jelek dari yang sebenarnya bila entitas berhadapan dengan masalah pajak, dengan tujuan entitas tidak membayar pajak terlalu besar.

5.2. Terminologi Debet (D) dan Kredit (K) Dalam Veda

Selanjutnya, pada ayat Veda yang lain dijelaskan, bahwa kekayaan yang tidak terhitung banyaknya itu oleh Tuhan Yang Maha Esa diletakkan pada kedua tangan manusia, dimulai dengan mengisi tangan kanan = Kredit (K), yang bermakna sebagai modal awal dan menjadi sumber keberuntungan, serta dianalogikan sebagai sumber obat dari segala penyakit. Modal awal tersebut dipindahkan ke tangan kiri, dimana tangan kiri = Debet (D) berfungsi sebagai pengelola dari modal awal tersebut. Modal yang berada ditangan kiri (**Debet**), setelah mendapat sentuhan pengelolaan atau manajemen yang baik (pada tangan kiri), lalu modal tersebut dapat berbuat minimal sama dengan sewaktu berada ditangan kanan. Bahkan diharapkan dapat berbuat lebih baik lagi, dimana modal tersebut dapat beranak pinak, semakin membesar, karena ditambah dengan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, modal yang berada ditangan kiri dianalogikan dengan obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan sentuhan saja. Tangan kiri berfungsi sebagai pengelola aset yang mempunyai kepintaran dan kemampuan luar biasa, karena kreatif, disiplin, efektif dan efisien, sehingga kekayaan yang diletakkan ditangan kiri (**Debet**) selalu bertambah membesar dan kuat.

Bunyi ayat Veda berkaitan dengan uraian di atas adalah sebagai berikut :

Rgveda X.60.12.

*Ayaṁme hasto bhagavān
ayaṁme bhagavattaraḥ .
ayaṁme viśvabheṣ ajo
ayaṁśivabimarśanah*

“ Ya Tuhan Yang Maha Esa, **satu tangan (kanan)** saya memiliki keberuntungan yang bagus dan **satu tangan (kiri)** yang lain lebih beruntung. **Tangan kananku adalah obat untuk semua penyakit dan tangan kiri mampu berbuat sama bahkan (dapat menyembuhkan penyakit) hanya dengan sentuhan** “.

Dalam Atharvaveda VII.115.4 dijelaskan bahwa kekayaan yang diberikan kepada manusia bagaikan sapi-sapi betina yang sedang merumput di padang rumput. Artinya sapi-sapi tersebut apabila dipelihara dengan baik pasti akan berkembang biak dan memberikan kebahagiaan rohani dan kekayaan materi kepada peternaknya.

Bunyi selengkapnya Atharvaveda VII.115.4

*Ktā kanā vyākaraṁ
khile ga viṣ ṭ hitā iva,
ramantaṁ puṇya lakṣ mīḥ
yā pāpīs tā animasam*

“ Kami membeda-bedakan kekayaan itu, sebagaimana orang membuat perbedaan antara sapi-sapi betina yang ada di padang rumput. **Semoga kekayaan yang menguntungkan ada bersama kita dan hendaknya kekayaan yang tak menguntungkan menjauh** dari kami “.

⁶³ Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia ⁴⁷ hendaknya dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kekayaan diibaratkan roda-roda sebuah kereta, selalu bergulir dari seorang kepada orang lainnya. Uang yang dimiliki hendaknya didaya gunakan untuk kemajuan perusahaan (*artha kśadhyaning artha*). Bila kekayaan atau modal telah berkembang, hasil dari pengembangan tersebut hendaknya beberapa bagian disumbangkan kepada orang-orang miskin.

Ayat Veda yang menguraikan hal-hal seperti di atas adalah :

Rgveda X. 117. 5

*Prṇiyād id nādhmānāya tavyān,
drāghiyāṁsam anu paśyeta panthām.
o hi vartante rathyeva cakrā-
anyam anyam up tiṣ ṭ hanta rāyah.*

⁴⁷ “ Orang yang bermurah hati harus memberi sesuatu dalam bentuk derma (uang) kepada orang miskin. Dia haruslah melihat jalan kebajikan yang menguntungkan itu. Kekayaan berputar bagaikan roda-roda sebuah kereta dan bergulir dari seseorang kepada orang lain “.

Berdasarkan bunyi 4 (empat) ayat Veda tersebut di atas dapat dirangkum makna sebagai berikut :

- 1) Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekayaan (ekuitas) dalam bentuk **naluri** kepada semua manusia dalam jumlah yang tidak terhingga.
- 2) Kekayaan (ekuitas) yang diberikan tersebut dalam bentuk barang tidak berwujud (disebut naluri) yang sangat mudah berkembang biak, dianalogikan

dengan sapi-sapi betina yang hidup di padang rumput, badannya gemuk dan sehat serta mudah beranak pinak.

- 3) Kekayaan tersebut pertama diletakkan di tangan kanan dan tangan kanan ini sekaligus merupakan simbol keberuntungan.
 - 4) Kekayaan yang ada ditangan kanan berfungsi sebagai obat dari semua penyakit.
 - 5) Tangan kiri bertugas membantu tangan kanan dalam mengelola kekayaan atau obat tersebut, sehingga mampu berbuat sama dengan tangan kanan, bahkan obat yang diletakkan di tangan kiri dapat berbuat dan berfungsi lebih hebat lagi, karena dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan sentuhan saja.
 - 6) Kekayaan yang dimiliki manusia harus diputar sehingga bergulir (bagaikan roda-roda sebuah kereta) dari satu tangan ke tangan manusia lainnya.
- Dinyatakan, bahwa pemutaran kekayaan yang efektif dan efisien adalah melalui kegiatan dalam bentuk perusahaan (bisnis).

Hal ini ditegaskan lagi ⁴⁷ dalam Rgveda I.24.5 yang berbunyi :

Mūrdhānamrāya ārabhe

“ Kami memperoleh uang sehingga kami bisa mengembangkan beberapa perusahaan”.

- 7) Hasil dari optimalisasi atas kekayaan dalam bentuk laba, selain untuk kepentingan pemilik, pengelola dan karyawan, beberapa bagiannya harus disumbangkan kepada orang-orang miskin serta masyarakat lingkungan kerja perusahaan.

lembih Saat ini, dalam ⁴⁶ UU No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (PT), pasal 66 ayat (2 c) mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan atau disebut pula kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan adanya peraturan perundangan saat ini yang mengatur mengenai pembagian laba perusahaan, Veda ternyata sudah merumuskan hal tersebut awal yaitu ribuan tahun sebelum Masehi.

tersebut Berdasarkan 7 (tujuh) ilustrasi makna yang tersirat dalam ⁸¹ at-ayat Veda di atas, maka diurai benang merahnya dan dikaitkan dengan prinsip-akuntansi yang berlaku umum, yaitu :

- 1) Kekayaan (ekuitas) yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan diletakkan di tangan kanan, dan dikelola oleh tangan kiri agar dapat berkembang biak.
Kekayaan yang berada ditangan kanan berfungsi sebagai kekuatan untuk menyelesaikan semua kewajiban yang dimiliki perusahaan (entitas). Atas dasar pengertian tersebut maka kekayaan yang berada ditangan kanan dianalogikan dengan obat untuk semua penyakit.
- 2) Sebagai tempat mengembangbiakkan kekayaan yang tepat atau paling efektif dan efisien adalah menanamkan dalam berbagai bentuk usaha.
- 3) Konsep tangan kanan dan tangan kiri ini dapat diartikan dalam peraktek akuntansi menggunakan bentuk akun T (T account).
- 4) Pencatatan transaksi ke dalam akun T, berarti harus didahului dengan proses jurnal. Pada saat Bagian Pembukuan menyusun jurnal, harus jelas terlebih

dahulu pos (K). pos apa yang akan di Debit (D) atau diletakkan di tangan kiri, dan juga sebagai lawannya yang akan diletakkan ditangan kanan atau di Kredit (K).

5) Dengan digunakannya istilah Kanan (Kredit) dan kiri (Debit) hal ini berarti Veda secara konseptual menerapkan system tata buku berpasangan (*double accounting system*) dan bukan tata buku tunggal atau tata buku berbasis kas.

6) Dengan diterapkannya sistem tata buku berpasangan (*double accounting system*), berarti Veda mendorong diterapkannya basis akrual, artinya pencatatan sudah mulai dilakukan pada saat timbulnya hak dan kewajiban bagi entitas.

7) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan harus dibuat oleh manajemen secara tertib dan teratur paling sedikitnya setahun sekali, minimal dalam bentuk Neraca dan Daftar Laba rugi. Laporan pertanggungjawaban manajemen juga harus meliputi laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Seperti dijelaskan dalam rangkuman dari ayat-ayat Veda di atas, bahwa siklus akuntansi menurut Veda dimulai dari tersedianya kekayaan atau modal atau ekuitas yang diletakkan ditangan kanan atau sisi Kredit (K) dari akun T.

Selanjutnya dikelola oleh tangan kiri atau sisi Debit dari akun T. Modal/kekayaan yang diwariskan tersebut dapat dalam bentuk kas atau dalam bentuk barang, maka pada saat diserahkan kekayaan tersebut, bagi yang menerima akan membuat catatan harian yang disebut jurnal sebagai berikut :

Jurnal 1.

(Dr). Kas	4 Rp. XX
(Dr). Barang Persediaan	Rp. XX
(Kr). Modal/Ekuitas	Rp. XX

Dengan jurnal seperti tersebut di atas, maka persamaan akuntansi awal menjadi :
Aset (Aktiva)= Modal/Ekuitas

Jurnal dan persamaan akuntansi di atas bila diperagakan dalam bentuk akun T menjadi sebagai berikut :

Akun Ekuitas/Modal		Akun Aset/Aktiva	
Dr. Menurun	Kr. (Meningkat)	Dr. (Meningkat)	Kr.
-	+	+	-
Saldo akhir	Saldo akhir	Saldo akhir	Saldo akhir

Dalam periode berjalan, dimisalkan perusahaan mendapat utang dari pihak lain dalam bentuk pinjaman uang tunai dan membeli barang dengan kredit, masing-masing seharga Rp. XXX, maka dibuat jurnal :

(Dr) Kas	Rp. XXX
(Dr) Persediaan (Aset/Aktiva)	Rp. XXX
(Kr) Utang (Kewajiban)	Rp. XXX

Setelah adanya jurnal tersebut di atas maka persamaan akuntansinya menjadi :

$$\text{Ekuitas/Modal} = \text{Aset/Aktiva} - \text{Kewajiban}$$

Jurnal dan persamaan akuntansi di atas bila diperagakan dalam bentuk akun T menjadi sebagai berikut :

Akun Ekuitas/Modal		Akun Aset/Aktiva		Akun Kewajiban	
Dr.Kr.	Dr.	Kr.	Dr.	Kr.	
-		+	+	-	-
		+			

Diagram showing T-accounts with arrows indicating debits and credits between them. An arrow points from the credit side of the first account to the debit side of the second. Another arrow points from the credit side of the second account to the debit side of the third. A long arrow points from the credit side of the third account to the debit side of the fourth.

6. TATACARA MENGEMBANGKAN KEKAYAAN/MODAL.

Ada beberapa petunjuk penting yang diberikan oleh Veda yang patut diikuti dalam upaya mengembangkan kekayaan(ekuitas) yang telah dimiliki :

- 1) Menempatkan modal (ekuitas) tersebut dalam perusahaan.
- 2) Harus rajin bekerja, tidak boleh bermalas-malas, tidak boleh mengulur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

Hal ini dijelaskan dalam *Mahābhārata Udyogaparva 33.78* :

*Saddoṣ aḥ puruṣ eṇ eha hātavya bhūtimicchatā
Nidrā tandrā bhayaṁ khrodhaṁ ālasyaṁ dirgasūtrata.*

54

Orang yang menginginkan kesejahteraan di dunia ini, dia harus meninggalkan enam jenis sifat-sifat yang tidak baik yaitu : **suka tidur, malas, takut, marah, tidak bersemangat, dan selalu mengulur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.**

- 3) Harus mau berhemat, bertindak secara efektif dan efisien dan menyimpan kekayaan ditempat yang aman.

Hal ini dijelaskan dalam ayat Veda berikut ini :

Atharvaveda XIX. 8.2.

Yogaṁpra padye kṣ maṁca

“ Semoga kami memperoleh uang dan melestarikannya (menghematnya) “

Rgveda VII. 86.8

Śaṁnaḥ kśeme śam u yoge no astu

“ Hendaknyalah perolehan (kekayaan) dan menyimpannya ditempat yang aman “.

Tentu yang dimaksud dengan menyimpan uang ditempat yang aman adalah di Bank yang mempunyai reputasi yang baik.

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

- P. 4. 1 Sistem akuntansi diperkirakan sudah dikenal dan diterapkan oleh manusia sejak ribuan tahun Sebelum Masehi. Bagaimana dari segi pandangan ajaran Hindu berkenaan dengan pernyataan ini. Jelaskan pendapat Saudara !
- P. 4. 2. Dikenal 2 jenis sistem pembukuan, yaitu system tunggal dan system berpasangan. Sistem mana yang lebih dahulu diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan zamannya. Dan kenapa masyarakat pada periode tersebut menggunakan system tersebut
- P. 4. 3. Dengan system tata buku tunggal dapatkan entitas menyusun laporan keuangan yang dapat menggambarkan hak dan kewajiban serta keuntungan dan kerugian entitas. Jelaskan pandangan Saudara.
- P. 4. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan system kas menuju akrual ?
- P. 4. 5. Jelaskan makna dari terminology Debet (D) dan Kredit (K)!
- P. 4. 6. Dapatkan terminology Debet (D) dan Kredit (K) diganti dengan istilah yang lainnya ? Bila dapat atau tidak, jelaskan alasannya ?
- P. 4. 7. Dalam single entry apakah digunakan istilah Debet dan Kredit. Jelaskan !
- P. 4. 8. Secara konsep, akuntansi Hindu menganut single entry atau double entry. Jelaskan pendapat Saudara.
- P. 4. 9. Jelaskan bagaimana cara manusia mengembangkan kekayaan yang diwariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran Veda.
- P.4. 10. Menurut Veda kekayaan yang diwariskan kepada manusia apakah hanya kekayaan yang bersifat non fisik saja. Jelaskan.
- P. 4. 11. Sebutkan secara singkat ajaran dalam Veda yang mengajarkan kepada manusia agar selalu berbuat efektif dan efisien dalam bekerja, baik sebagai manusia biasa apalagi sebagai pengusaha.
- P. 4. 12. Apakah Veda sudah memberikan petunjuk tentang keharusan manusia menyimpan kekayaannya dalam sebuah lembaga yang kredibel (sebuah Bank). Jelaskan.
- P. 4. 13 Coba Saudara berikan ulasan berkaitan dengan bunyi sloka Udoyogaparva 33.78 dikaitkan dengan manajemen asset dari sebuah entitas ?
- P.4. 14 Hendaknya Saudara berikan penjelasan maksud dari mantra Atharva Veda VII. 15.4 dikaitkan dengan manajemen kekayaan sebuah entitas. Jawaban Sdr. dimulai dengan mengutip bunyi ayat Veda dimaksud.
- P.4.15. Berikan komentar Saudara berkaitan dengan bunyi dari ayat Atharvaveda XIX.8.2. Komentar yang Saudara berikan harus dimulai dengan mengutip bunyi ayat Veda dimaksud.

- P.4.16. Konsep akuntansi menurut Pacioli tahun 1494 apakah sejalan dengan konsep akuntansi Hindu. Apabila sama, berikan pembuktiannya dengan menunjuk ayat Veda.
- P.4.17. Akuntansi Hindu yang dikembangkan oleh Canakya (Kautilya) berlangsung pada zaman apa. Merunut dari penjelasan Kautilya, apakah akuntansi juga sudah berkembang pada zaman-zaman sebelumnya. BERikan komentar Saudara.
- P.4.18. Berikan komentar Saudara berkaitan dengan bunyi dari ayat Rgveda VII.86.8. Komentar yang Saudara berikan harus dimulai dengan mengutip bunyi ayat Veda dimaksud
- P.4.19. Berikan komentar Saudara berkaitan dengan bunyi dari ayat Rgveda I.24.5. Komentar yang Saudara berikan harus dimulai dengan mengutip bunyi ayat Veda dimaksud.
- P.4.20. Berikan komentar Saudara berkaitan dengan bunyi dari ayat Rgveda X.117.5. Komentar yang Saudara berikan harus dimulai dengan mengutip bunyi ayat Veda dimaksud.
- P.4.21. Saudara kaitkan bunyi ayat Rgveda X. 117. 5 dengan Undang-Undang Amnesti Pajak yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, tahun 2016, dan sedang digencarkan pemahamannya kepada masyarakat Indonesia. Apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran Hindu.

AKUNTANSI HINDU

⁸
Sukhadukhe same kritva labhalabhau jayajayau tato yudhaya yujyasva nai vam papam avapsyasi (Bg. II. 38)

Dengan menganggap suka dan duka, laba dan rugi, menang dan kalah, sama kemudian terus maju bertempur engkau tiada melakukan dosa (Bg. II. 38).

BAB V

PERIODE AKUNTANSI

1. ALAM SEMESTA BERPUSATKAN BUMI ATAU BERPUSATKAN MATAHARI

175

Berikut ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan timbulnya istilah tahun, bulan dan musim, yang digali dari ajaran Veda dan sumber-sumber lainnya.

Sejak zaman purba manusia ingin mengetahui masalah astronomi yang benar. Dikatakan, pada zaman purba orang berpendapat bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang dilangit beredar mengelilingi bumi.

Seorang ahli astronomi bernama Claudius Ptolemaeus, hidup antara 100 – 178 Masehi, mengatakan bahwa bumi diam, sedang seluruh benda-benda langit, yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang beredar mengelilingi bumi. Bumi sebagai pusat alam semesta (susunan geometris = berpusatkan bumi). Nicolaus Copernicus (1473-1543) menentang teori geometris Claudius Ptolemaeus dan menyatakan bahwa bumi adalah salah satu planet juga, yang bersama-sama dengan planet lainnya beredar mengelilingi matahari sebagai pusat alam semesta. Teori Copernicus menganut susunan heliosentris atau berpusatkan matahari (Suparta Ardana 2007 : 1).

Diketahui pula bahwa pergerakan bumi ada dua macam dan pergerakan bulan tiga macam, yaitu :

Pergerakan bumi :

- 1) Pergerakan bumi berputar pada sumbunya, disebut rotasi, yang sekali perputaran lamanya satu hari (24 jam).
- 2) Pergerakan bumi beredar mengelilingi matahari sambil berputar pada sumbunya sendiri, disebut revolusi, yang sekali beredar sempurna lamanya satu tahun, 365,25 hari pergerakan bulan :
 - 1) Bulan berputar pada sumbunya dengan amat lambat. Satu putaran penuh lamanya satu bulan.
 - 2) Sementara berputar pada sumbunya, bulan juga beredar mengelilingi bumi. Sekali peredaran lamanya 1 bulan atau 29,52 hari, yaitu waktu yang diperlukan bulan mengedari bumi sejak bulan baru sampai bulan baru berikutnya.
 - 3) Sementara berputar pada sumbunya sambil beredar mengelilingi bumi, bulan bersama-sama bumi juga mengelilingi matahari.

2. TAHUN MASEHI

31

Tahun umum atau tahun Masehi yang saat ini berlaku secara internasional berasal dari tahun Romawi. Mula-mulanya tahun Romawi terdiri dari 10 bulan, yaitu :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) Martius | 6) Sextilis |
| 2) Aprilis | 7) September |
| 3) Majus | 8) October |
| 4) Junius | 9) November |
| 5) Quintilis | 10) December |

Dalam buku Kalender 200 Tahun (Suparta Ardana, 2007 : 2), antara lain dijelaskan bahwa pada tahun 46 Seb.M, Julius Caesar sebagai penguasa Romawi, dengan bantuan Sosiogenes ahli astronomi dari Alexandria, mengadakan perubahan atau perbaikan atas susunan bulan dan hari dalam setahunnya. Ditetapkan umur satu tahun rata-rata 315,25 hari, dan terbagi atas 12 bulan. Sebagai penghormatan atas jasa Julius Caesar, bulan kelima yaitu Quintilis diganti namanya dengan bulan Julius. Bulan Januarius sebagai bulan pertama. Sejak 46 Seb.M, tahun Masehi disebut dengan tahun Julian.

Pada 15 Oktober 1.582, Paus Gregorius XIII melakukan beberapa perubahan lagi atas tahun Julian. Tahun Julian diganti namanya dengan tahun Gregorian, yang sekarang secara umum dikenal dengan tahun Masehi

Susunan bulan-tahun Julian, berubah menjadi tahun Gregorian, berikut dengan perubahan penetapan hari untuk tiap bulannya, sebagai berikut :

1) Januarius/Januari	: 31 hari	7) Julius/Juli	: 31 hari
2) Februarius/Februari	: 28/29 hari	8) Sextilis/Agustus	: 31 hari
3) Martius/Maret	: 31 hari	9) September/September	: 30 hr.
4) Aprilis/April	: 30 hari	10) October/Oktober	: 31 hr.
5) Majus/Mei	: 31 hari	11) November/November	: 30 hr.
6) Junius/Juni	: 30 hari	12) December/Desember	: 31 hr.

3. TAHUN DALAM VEDA

3.1. Bumi Dianalogikan Sebagai Ibu dan Matahari Sebagai Ayah.

Selanjutnya penggalian tentang tahun dan bulan serta umur dari masing- masing bulan dilakukan melalui beberapa ayat Veda dan sumber lainnya yang berkaitan dengan ajaran Hindu.

Hasil kajian ahli astronomi sebelum bangsa Romawi yang disebut dengan zaman purba, menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah bumi, sedangkan ahli astronomi zaman Romawi menyatakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta.

Darisegi ajaran Veda, matahari dinyatakan sebagai sumber kehidupan atau sebagai sumber air, oleh karena itu bumi melakukan upacara suci memohon kepada matahari agar diberikan air dalam bentuk air hujan. Dengan bumi diberikan air hujan oleh matahari, maka bumi menjadi subur sehingga dapat mengembangbiakan semua kehidupan di bumi. Dalam Veda juga dijelaskan bahwa bumi sebagai ibu dan matahari sebagai ayah. Seorang ayah harus memberikan kesuburan kepada seorang ibu, agar ibu dapat mengembangbiakkan segala yang ada di bumi. Penjelasan ini ditemukan dalam Rgveda.

Adapun uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

RgvedaI. 64. 8

44
*Mātā pitaram rta ā babhāja
 Dhity agre manasā sam hi jagme,
 Sā bibhatsur garbharasā nividdhā
 Namasvanta id upavākam iyuh.*

Ibu (bumi) memuja ayah (matahari) dengan upacara suci demi untuk sang air, tetapi ia telah mengantisipasi (keinginan) dalam pikirannya; dimana, berkeinginan akan keturunan, ia ditembus oleh embun penyubur dan (semua) penuh harapan akan kelimpahan, menukar kata-kata (dari ucapan selamat).

3.2. Bumi Mengitari Matahari

Veda secara jelas memberi petunjuk bahwa bumilah yang mengitari matahari. Matahari diistilahkan dengan surga atau ayah dan bumi dianalogikan dengan ibu. Hal ini sama maknanya dengan **matahari sebagai pusat alam semesta.**

Satu tahun dinyatakan sama dengan duabelas bulan, atau disebut dengan dua belas jari-jari dari matahari, yang berputar mengelilingi surga. Bumi mengelilingi matahari dalam setahun sebanyak 12 kali, demikian berulang secara konsisten. Satu tahun sama dengan 360 siang hari dan 360 malam hari, sehingga jumlahnya menjadi 720 siang dan malam hari. Informasi ini ditemukan dalam Rgveda.

RgvedaI. ⁸⁵ 164. 11 :

*dvādaśāraṁ nahi taj jarāya
varvarti cakram pari dyām rtasya,
ā putrā agne mithunāso atra
sapta śatāni viṁśatis ca tastuḥ*

Roda dengan duabelas jari-jari dari (matahari) sejatinya berputar mengelilingi surga, dan tak pernah (cendrung) untuk merosot; 720 anak-anak dalam pasangan, wahai matahari, bertempat tinggal disana.

Ditegaskan pula, bahwa kegiatan bumi mengelilingi matahari tidak ada kecendrungan untuk merosot atau berkurang, apalagi akan berhenti.

Pernyataan bahwa surga atau matahari adalah orang tua dan bahkan sebagai pusat dari bumi, dan bumi tetap dinyatakan sebagai ibu, ditemukan pula pada Rgveda.

Rgveda I.164.33

*dyaus me pitā janitā nābhi tatra
bandhur me māta prthivi mahiyam,
uttānayoś camvor yonir antar
atrā pitā duhitur garbham ādhāt.*

Surga (atau matahari) adalah orang tua dan keturunan,
Pusat (dari bumi) adalah kerabat kami; bumi yang luas
Adalah ibuku. Diantara dua jelabir terletak rahim. Disini
Ayah menanamkan benih (dari keadaan subur) dari sang putri,
yaitu fajar. (Ayah= matahari; ibu= bumi; kerabat pusat bumi;
putri= fajar; benih=hujan).

3.3. Satu Tahun Matahari Sama Dengan 12 Bulan, 360 Hari, Dengan Tiga Musim

Mengenai adanya tiga musim, yaitu **panas, hujan dan dingin**, 12 bulan dalam setahun serta 360 hari untuk tahun matahari, dijelaskan dalam Rgveda.

Rgveda I.164.48.

*Dvādaśa pradhayaś cakram ekam
Triṇi nabhyāni kau tac ciketa
Tasmint sākam trisatā na śankavo
Pritāḥ ś aṣ ṭ ir na calācalāsaḥ*

Lingkaran luar (dari lengkung busur) adalah dua belas;

Rodanya satu; poros (sumbu) ada tiga; tetapi siapakah yang mengetahuinya? Di dalamnya terkumpul 360 (jari-jari), yang sebagaimana adanya, dapat bergerak dan tak dapat bergerak.
(Roda= tahun; lingkaran luar=12 bulan; poros=3ganda musim, panas, hujan dan dingin; jari-jari = 360 dari tahun solar.

Berdasarkan penjelasan dalam ayat-ayat Rgveda tersebut di atas berarti secara konsep agama Hindu mengikuti tahun matahari, yaitu matahari sebagai pusat alam semesta.

4. TAHUNSAKA

Literatur yang menjelaskan mengenai nama tahun dan bulan-bulan yang mengikutinya, sebelum berlakunya tahun Saka, belum ditemukan. Sesuai sejarah, tahun Saka dimulai pada hari Soma/Senin Wage Wuku Tambir, tanggal 1 bulan Waisakha tahun 1 Saka, bertepatan dengan tanggal 22 Maret 79 Masehi. Dalam buku Kalender 200 Tahun, oleh (Suparta Ardana, 2007 : 4), bahwa tahun pertama Saka, merupakan peringatan awal pemerintahan dari Raja Kanista I, seorang raja India dari keturunan raja-raja Kusana dari suku Saka.

Di Nusantara, tahun Saka dipergunakan dalam kehidupan masyarakat sejak masuknya agama Hindu, dengan berdirinya kerajaan Hindu tertua di Kutai Kalimantan Timur, sekitar tahun 400 Masehi.

Dapat dipastikan bahwa kerajaan Hindu tertua ini dalam perhitungan tahun, bulan (sasih), dan hari menggunakan tahun Saka.

Satu tahun Saka terdiri dari 12 (duabelas) Sasih (bulan). Pada Tabel 5.1. berikut ini disajikan urutan nama bulan Saka dan umurnya, serta dibandingkan dengan nama bulan Tahun Masehi, seperti pada Tabel 5.1. berikut :

Tabel V.1.

**Nama Bulan Dan Umur Tahun Saka
Perbandingan Dengan Bulan Tahun Masehi**

Bulan/Sasih Tahun Saka	Disetarakan Dengan Bulan Masehi	Umur Tiap Bulan Menurut Tahun Saka
(4)	(2)	(3)
1. Kasa (Srawana)	Juli-Agustus	30/29 hari
2. Karo (Bhadrapada))	Agustus -September	29/30 hari
3. Katiga (Aswina/Asuji)	September - Oktober	30,29 hari
4. Kapat (Kartika)	Oktober - Nopember	29/30 hari
5. Kalima (Margasirsa)	Nopember -Desember	30/29 jhari
6. Kanem (Pausya)	Desember - Januari	29/30 hari
7. Kapitu (Magha)	Januari - Februari	30/29 hari
8. Kwolu (Phalguna)	Februari - Maret	29/30 hari
9. Kasanga (Caitra)	Maret - April	30/29 hari
10. Kadasa (Waisakha)	April - Mei	29/30 hari
11. Destha (Jyestha)	Mei - Juni	30/29 hari
12. Sadha (Asadha)	Juni - Juli	29/30 hari

Sumber : Suparta Ardana, 2007 : 5

Dijelaskan lebih lanjut oleh Suparta Ardana, bahwa walaupun Sasih Kasa (rawana) atau sesuai bulan tahun Masehi - Juli/Agustus, merupakan bulan yang pertama, akan tetapi tahun baru Saka jatuh pada tanggal 1 Sasih Kadasa (Waisakha). Bagi Masyarakat Hindu di Bali tanggal 1 Sasih Kadasa merupakan Hari Raya Nyepi.

Berdasarkan umur dari masing-masing bulan seperti terlihat dalam table di atas, berarti tahun Saka menganut lunar system atau tahun candra/bulan, dengan umur dalam setahun 354/355 hari. Untuk menyesuaikan dengan umur tahun matahari/surya yang berjumlah 365/366, maka pada saat-saat tertentu dilakukan penyesuaian dengan penyisipan bulan yang disebut *nampih sasih*.

5. PERIODE AKUNTANSI

5.1. Pengertian Periode Akuntansi

Periode akuntansi adalah lingkaran waktu atau masa dari suatu kegiatan akuntansi keuangan. Lingkaran waktu akuntansi lazimnya selama satu tahun atau 12 bulan, dimulai dari bulan Januari s.d. Desember, bila mengikuti tahun takwim atau tahun matahari. Tetapi dapat juga periode akuntansi **tidak dimulai** dari bulan **Januari dan berakhir pada bulan** selain bulan **Desember**.

Periode akuntansi ini diperkirakan awalnya diperlukan dan dilakukan oleh pemerintah kerajaan dan pemerintahan sejenisnya zaman dahulu, yaitu dalam hubungannya dengan pemungutan pajak-pajak guna mengisi kas Negara. Perusahaan atau entitas yang berdiri pada sebuah Negara, lazimnya dapat mengikuti periode akuntansi yang ditetapkan pemerintah atau periode akuntansi yang berbeda.

Seperti halnya tahun anggaran pemerintah Republik Indonesia yang dimulai sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (REPELITA I) 1 April 1969 s.d. 31 Maret 1974, tidak lagi mengikuti tahun takwim. Tahun pertama dari REPELITA I dimulai 1 April 1969 dan berakhir 31 Maret 1970. Setiap tahunnya, tahun anggaran dimulai 1 April s.d. 31 Maret tahun berikutnya. Berkaitan dengan berubahnya tahun anggaran pemerintah pada saat itu, tahun anggaran beberapa perusahaan di Indonesia tetap dapat menganut periode akuntansi sesuai dengan tahun takwim, namun dalam menghitung kewajiban perpajakan wajib mengikuti tahun buku pemerintah.

Setelah lengsernya pemerintahan ORDE BARU, yang dipimpin presiden Soekarno, tahun anggaran juga berubah kembali menjadi tahun takwim, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintah dan entitas swasta dilakukan per 31 Desember tahun yang bersangkutan.

5.2. Periode Akuntansi Dalam Arthasastra.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kata Pengantar Arthasastra, bahwa Arthasastra memuat masalah politik tata Negara, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Dalam masalah tahun dan kalender, Arthasastra menggunakan 2 (dua) jenis tahun, yaitu tahun matahari dan tahun bulan. Hal ini dijelaskan dalam Arthasastra, L.N. Rangarajan :729/730, tentang penanggalan (calendar). Dijelaskan, hari-hari pada tahun matahari (solar day) lebih panjang 1/60

dari pada hari-hari tahun bulan (lunar day). Setiap dua bulan waktu matahari akan berkurang 1 hari dibandingkan dengan hari tahun bulan (lunar day). Untuk solar day dimana bumi mengitari matahari, lamanya ditetapkan sebesar $30 \frac{1}{2}$ hari atau dibulatkan 30 hari. Jumlah hari dalam setahun 360 hari. Sedangkan untuk lunar day $29 \frac{1}{2}$ hari dalam sebulannya. Beberapa jenis istilah yang digunakan dalam kaitan dengan bulan dan banyaknya hari dan malam dalam bulan yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam Arthashastra, antara lain sebagai berikut :

Pengertian Umum	Istilah (Pengertian) Dalam Arthashastra
15 hari (siang dan malam)	<i>Sukla, bakula</i>
2 kali setengah bulan (2 fortnights)	Satu bulan Penggolongan bulan yang bersifat khusus : 1). Hari kerja = 30 hari siang dan Malam 2). Bulan sesuai perputaran matahari = $30 \frac{1}{2}$ hari siang dan 30 malam 3). Bulan sesuai perputaran bulan = $29 \frac{1}{2}$ dan 30 malam. 4). Bulan <i>Sidereal</i> = 27 hari siang dan malam. 5). Hari kerja untuk pasukan infanteri 32 hari siang dan malam. 6). Hari kerja untuk pasukan Kavaleri = 35 hari siang dan Malam 7). Hari kerja untuk pasukan berkuda = 40 hari siang dan malam
2 bulan	1 musim (season)
	<u>Dakshinayana :</u> <u>Varsa</u> (rainy = musim hujan) – Sravana (Juli/Agustus) Praushtapada = (Agustus/September)

	Sharat (autum) = Asuayuja = (September/Oktober) Kartika (Oktober/November) Hemanta(winter) – Marghasirsha (November/Desember) Pausha (Desember/Januari)
	<u>Uttarayana:</u> Sisira (frosty) = musim dingin Magha = Januari/Februari= Phalguna = Februari/Maret Vasantha (spring = musim semi) Caitra (Maret/April) Vaishaka (April/Mei) Grishma (summer = musim panas – Jyestamulya (Mei/Juni) Ashada (Juni/Juli)
3 musim	<u>1 ayana</u>
2 ayanas	<u>1 tahun</u>
5 tahun	<u>1 yuga</u>

Sejalan dengan penjelasan dalam ayat Veda di atas, sejauh berhubungan dengan masalah tahun, bulan dan hari, adalah menganut tahun matahari (solar system), dengan jumlah hari 360 dalam setahun. Namun demikian diberikan juga perbandingan umur bulan menurut lunar system, yaitu sekitar 29 hari. Antara umur/hari-hari dalam solar system dan lunar system dapat saling menyesuaikan. Arthasastra sebagai buku pedoman mengatur pemerintahan pada zaman tersebut juga menganut solar system. Dengan demikian masyarakat India penganut Veda

mematuhi dan melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Veda. Hal ini berarti pimpinan demikian pula masyarakat India dalam menjalankan kehidupannya menganut tahun matahari (solar system).

Sebagai indikasi bahwa masyarakat India menganut tahun matahari adalah nama-nama bulan dikelompokkan menurut keberadaan matahari yaitu di atas katulistiwa, berarti matahari menuju keutara yang disebut dengan “**uttarayana**“, sedangkan pada saat matahari berada disebelah selatan katulistiwa disebut dengan “**dhaksinayana**“.

Pada zaman berkembangnya agama Hindu di Indonesia, yaitu sejak tahun 400 s.d. 1400 Masehi, dinyatakan bahwa kerajaan-kerajaan Hindu tersebut mer¹⁰⁶nakan tahun Saka. Tahun Saka ini bahkan sampai saat ini masih tetap lestari digunakan oleh masyarakat beragama Hindu di Bali.

Nama-nama bulan menurut tahun Saka ternyata sama dengan yang ditulis dalam buku Arthashastra. Hal ini berarti bahwa raja Saka dengan tahun Sakanya tersebut hanya meneruskan dan menyebar luaskan nama-nama bulan yang sudah tertulis dalam buku Arthashastra.

Berikut ini sebuah perbandingan nama-nama bulan menurut **Tahun Saka** dan menurut **Arthashastra** serta menurut Tahun Masehi.

Tabel V.2.

Perbandingan Nama-Nama Bulan Menurut Tahun Saka, Menurut Arthashastra Serta Menurut Tahun Masehi

Bulan/Sasih Sesuai Tahun Saka	Bulan Menurut Arthashastra	Disetarakan Dengan Bulan Masehi	Bulan Masehi	Umur Tiap bulan Menurut Tahun Saka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sasih Kasa (Srawana)	Srawana	Juli-Agustus	Juli	4/29 hari
2. Sasih Karo (Bhadrapada)	Praushtapada	Agustus -September	Agustus	4/30 hari
3. Sasih Katiga (Aswina/Asuji)	Asuayuja	September - Oktober	September	4/29 hari
4. Sasih Kapat (Kartika)	Kartika	Oktober - Nopember	Oktober	29/30 hari
5. Sasih Kalima (Margasirsa)	Marghasirsha	Nopember -Desember	Nopember	6/29 jhari
6. Sasih Kanem (Pausya)	Pausha	Desember - Januari	Desember	29/30 hari
7. Sasih Kapitu (Magha)	Magha	Januari - Februari	Januari	4/29 hari
8. Sasih Kwolu (Phalguna)	Phalguna	Februari - Maret	Februari	4/30 hari
9. Sasih Kasanga (Caitra)	Caitra	Maret - April	Maret	4/29 hari
10. Sasih Kadasa (Waisakha)	Vaishaka	April - Mei	April	4/30 hari
11. Destha (Jyestha)	Jyestamulya	Mei - Juni	Mei	30/29 hari
12. Sadha (Asadha)	Ashada	Juni - Juli	Juni	29/30 hari

Sumber : Suparta Ardana (2007 : 5) dan Arthashastra, L.N. Rangarajan (1992 : 729/730)

Kalender yang digunakan Kautilya dalam menjalankan pemerintahan kerajaan adalah berdasarkan lunar system atau tahun berdasarkan peredaran bulan. Lunar system ini digunakan untuk tahun kerja pemerintahan dan juga yang berkaitan dengan masalah Anggaran Negara, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Hal ini diketahui dari adanya pernyataan tahun kerja pemerintahan adalah 354 hari dalam setahun (Arthashastra, Bk. II, Bab VII. 6, Astana, Made, dkk, 2003 : 96). Masih berkaitan dengan tahun kerja pemerintahan berpedoman kepada system lunar, maka periode akuntansi pemerintahan juga berdasarkan system tersebut. Dinyatakan, akhir dari periode akuntansi pemerintahan adalah pada **hari purnama bulan Asada atau bulan Juni**, dengan hari panjang (30 hari) maupun pendek (29 hari) (Arthashastra, BK. II.6, Astana Made, dkk, 2003). Berpedoman pada pernyataan tersebut dapat diperkirakan periode akuntansi menurut Arthashastra dimulai dari **Sasih Kasa (Srawana), bulan Juli/Agustus** dan berakhir pada **Sasih 172 sadha, bulan Juni/Juli** tahun berikutnya. Atau bila disederhanakan adalah mulai **1 Juli dan**

berakhir 30 Juni tahun berikutnya. Jumlah bulan dari satu tahun anggaran adalah 12 bulan.

Sejalan dengan berakhirnya tahun anggaran pada bulan purnama Asadha (purnama bulan Juni), maka pemerintah menugaskan para **Akuntan Negara** untuk melakukan pemeriksaan pada hari tersebut terhadap uang kas dan barang-barang lainnya yang dikuasai dan dikelola oleh masing-masing pejabat perbendaharaan negara.

Dijelaskan, bahwa pada bulan purnama Asadha tersebut semua pejabat perbendaharaan daerah datang ke Kantor Pusat Audit dengan membawa buku catatan uang kas yang disegel disertai dengan saldo uang kas yang disimpan dalam tempat yang disegel pula.

Para akuntan memeriksa buku catatan dan uang atau barang lainnya yang dibawa oleh para bendaharawan, dengan cara memberikan tanda/ciri tertentu (audit tick mark) bahwa catatan dan uang atau barang yang ada sudah dicek sebagaimana mestinya.

Ditegaskan pula bahwa selama para akuntan melakukan pemeriksaan tidak boleh melakukan pembicaraan atau persekongkolan. Setelah buku kas dan uang atau barang diperiksa oleh para Akuntan Negara, maka para bendaharawan diminta untuk segera menyetorkan uang atau barangnya ke kantor perbendaharaan pusat. Baik para akuntan pemeriksa maupun bendahara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dikenakan sanksi denda atau jenis hukuman lainnya sesuai dengan bobot kesalahannya (Arthasastra, Bk. II. Bab VII. 16, 17, 18, 22, Astana Made, 2003)

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

- P.5.1. Jelaskan pendapat ahli astronomi Claudius Ptolomaeus yang hidup antara tahun 100 -178 Masehi tentang keberadaan matahari, bumi dan bulan.
- P.5.2. Jelaskan pendapat ahli astronomi lainnya, yaitu Nicolaus Copernicus yang hidup antara tahun 1.453 – 1.473 tentang posisi matahari, bumi dan bulan.
- P.5.3. Dimana letak perbedaan pendapat dari kedua ahli astronomi tersebut tentang keberadaan matahari, bumi dan bulan.
- P.5.4. Menurut Saudara, kira-kira apa yang menyebabkan kedua ahli tersebut berbeda pendapat tentang keberadaan matahari, bumi dan bulan.

- P.5.5. Raja Romawi bernama Julius Caesar, hidup pada 46 Seb.M (Sebelum Masehi) menetapkan umur dalam setahun 12 bulan, dari yang sebelumnya 10 bulan. Sebutkan nama-nama bulannya.
- P.5.6. Tahun yang kita gunakan sekarang disebut dengan tahun Masehi, yang sebelumnya disebut dengan tahun Gregorian. Sebutkan nama tokoh yang berkaitan dengan tahun Gregorian dimaksud. Jelaskan juga kedudukan dari tokoh tersebut.
- P.5.7. Dalam Rgveda I. 64.8 dijelaskan bahwa matahari sebagai bapak dan bumi sebagai ibu. Coba Saudara berikan penjelasan tentang makna dari bunyi ayat tersebut.
- P.5.8. Matahari dianalogikan sebagai bapak dan juga sebagai surga, sedangkan bumi sebagai ibu, menurut Saudara apakah maksud dari analogi atau simbol ini ?
- P.5.9. Apakah Veda memberikan petunjuk mengenai jumlah hari dalam setahun dan jumlah bulan dalam setahun, serta jumlah hari dalam setiap bulannya secara jelas ?

Jawaban Saudara dapat ya atau tidak. Sebutkan ayat Veda lengkap dengan bunyinya yang melandasi jawaban Saudara !.

- P.5.10. Sesuai petunjuk Veda, umat Hindu mengikuti tahun matahari atau tahun menurut peredaran bulan.
- P.5.11. Apabila merunut kepada tahun Hindu, umat Hindu di Bali dan bahkan umat Hindu Indonesia mengikuti tahun Saka dalam melaksanakan ajaran agama Hindu. Jelaskan kapan sebenarnya dimulai tahun Saka tersebut. Sebutkan nama tokoh yang berkaitan dengan tahun Saka tersebut.
- P.5.12. Tahun Saka menganut 12 bulan. Sebutkan nama-nama bulan tahun Saka tersebut dan dilengkapi dengan umurnya.
- P.5.13. Apakah akuntansi Hindu mengenal periode akuntansi sebagaimana periode akuntansi yang berlaku saat ini ? Sebutkan bulan mulai dan bulan berakhirnya periode akuntansi yang berkaku di India pada zaman Arthasastra.
- P.5.14. Berapa lama periode akuntansi yang ditetapkan oleh Kautilya, dan dimulai pada bulan apa ? Kira-kira apa alasannya Kautilya menetapkan periode akuntansi dimulai pada bulan tersebut.
- P.5.15. Pada zaman Kautilya, kegiatan pemeriksaan atau audit sudah dilakukan sebagaimana audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada saat ini. Menurut Saudara faktor apa yang mendasari masalah audit dirasakan begitu penting oleh Kautilya ?
- P.5.16. Dijelaskan bahwa para Bendahara membawa buku catatan keuangan dan barang yang dikelonya, dan diserahkan kepada pemeriksa untuk diperiksa. Bagaimana pandangan Saudara mengenai pernyataan tersebut dilihat dari segi zamannya ?
- P.5.17. Dijelaskan pula bahwa Bendahara dan Pemeriksa tidak boleh berbicara satu dengan lainnya. Jelaskan apa makna dari ungkapan tersebut.
- P.5.18. Tahun, bulan, hari yang digunakan oleh para akuntan dan para praktisi akuntansi saat ini bersumber dari para ahli akuntansi Eropa atau dari Asia, seperti Cina dan India. Jelaskan pandangan Saudara.
- P.5.19. Buku-buku akuntansi kontemporer hampir tidak ada yang mengulas tentang asal usul akuntansi yang bersumber dari Veda dan atau ajaran Hindu lainnya. Pada hal Veda banyak sekali menguraikan mengenai ekonomi, akuntansi, perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Uraian tersebut dapat ditemukan dalam Rg.veda, Ajur veda, Atharvaveda, Sama Veda, Arthasastra, Manavadharmasastra, dsb.nya.

Bagaimana pandangan Saudara mengenai kondisi tersebut. Jelaskan secara ringkas.

- P.5.20. Jelaskan makna dari bunyi Rgveda I.164.48 dikaitkan dengan tahun, bulan, dan Hari, pada kalender yang berlaku sekarang ini. Sebelum Sdr. menjelaskan kutip dulu bunyi ayat Rgveda dimaksud.

AKUNTANSI HINDU

8
Karmanaah sukritasya huh, sattvikam nirmalam phalam, rajasa tu phalam dukkham, ajnanam
tamasah phalam (Bg. XIV. 16)

Hasil perbuatan sattvika dikatakan kebajikan yang suci nirmala sedangkan hasil dari rajasa
adalah duka dan hasil dari tamasa adalah ketidaktahuan (Bg. XIV. 16)

BAB VI

PENGGUNAAN BAHASA, HURUF, ANGKA, DAN ALAT UKUR MONETER SERTA ALAT UKUR LAINNYA

1. PENGANTAR

Akuntansi merupakan cabang ilmu manajemen. Pengetahuan ini agar dapat digunakan dan memberikan manfaat kepada pemakainya harus menggunakan alat bantu atau perantara lain seperti bahasa, huruf dan angka dan satuan mata uang. Disamping itu diperlukan alat ukur seperti : takaran, ukuran dan timbangan. Disamping alat bantu yang disebutkan di atas, akuntansi juga memerlukan alat bantu lainnya yaitu alat untuk menuliskan data akuntansi yang dimaksud, seperti pena dan tinta. Alat bantu lainnya sebagai tempat menuliskan data akuntansi yang ada, yang paling sederhana seperti daun-daunan, kulit kayu, kulit binatang dan terakhir dalam dunia modern adalah kertas dan tinta. Akuntansi berguna untuk membantu mencatat suatu transaksi yang telah terjadi dan terakhir mengukur kekayaan atau aset yang dimiliki oleh entitas tersebut. Tanpa sarana-sarana pembantu dalam bentuk daun-daunan, kulit kayu, kulit binatang, kertas, tinta, huruf, angka, takaran, ukuran dan timbangan, system akuntansi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini diuraikan secara singkat mengenai keberadaan dari masing-masing alat bantu system akuntansi yang telah ada pada zaman Arthasastra.

2. PENGGUNAAN BAHASA, HURUF DAN ANGKA

Seperti diketahui bahasa yang digunakan untuk mencatat dan menjelaskan serta menyebar luaskan Veda adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ditulis dengan huruf Devanagari. Abjad bahasa **Sanskerta** disebut dengan **Varnamala**, terdiri dari **48 aksara**. Aksara-aksara tersebut terbagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu 15 kelompok vocal, dan 33 kelompok konsonan (Surada, 2007 :1). Bahasa Sanskerta juga dilengkapi dengan angka dimulai dari 0 sampai dengan 9 (Surada, 2007 : 9). Bentuk angka bahasa Sanskerta seperti ini tidak banyak berbeda dengan angka arab yang digunakan secara luas saat ini.

Ilustrasi perbandingan antara angka menurut huruf **Devanagari** dan angka **arab**, sebagai berikut :

१	२	३	४	५	६	७	८	९	०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Contoh penggunaannya

१२ ३	२४ ६	३९ ८	४७ ९	५८ ९	६९ ७	२०० ५	२०० ६	५७ ९	३५ ४
123	246	398	479	589	697	2005	2006	579	354

Sumber : Surada, Made, 2006 : 9)

Dalam Buku Matematika Veda, yang disusun oleh Jagadguru Swami Sri Bharati Krsna Tirthaji Maharaja (2008 : xv), ditemukan penjelasan yang sangat menarik, bahwa angka 0 (no) ditemukan oleh ahli matematika Hindu. Pernyataan tersebut konon diberikan oleh ahli matematika yang bernama Prof. GP Halstead dalam buku berjudul *On The Foundation and Technique of Arithmetic*.

Selanjutnya dalam buku Matematika Veda, halaman xv, ditemukan lagi penjelasan yang cukup menarik, yaitu notasi Hindu (angka Hindu) dibawa ke semenanjung Arabia pada 770 M oleh seorang sarjana Hindu bernama **KANKA** dari Ujjain. Beliau diundang ke istana raja di Bahdad. Pada waktu itu rajanya bernama Abassid Khalif Al- Mansur. Selama di Bahdad, KANKA mengajarkan astronomi dan matematika Hindu kepada para sarjana Arab. Dengan bantuan KANKA, para sarjana Arab menterjemahkan astronomi dan matematika Hindu ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya dijelaskan bahwa astronomi dan matematika Hindu secara perlahan bergerak menuju Mesir, dan pada akhirnya masuk ke Eropa pada abad ke 11. Orang Eropa mengatakannya notasi Arab, karena mereka menerimanya dari orang Arab. Akan tetapi orang Arab sendiri, baik di Timur maupun di Barat, semuanya memberi nama bilangan Hindu (*al-Arqaan-al Hindu*).

Berdasarkan data dalam bentuk bahasa, huruf dan angka Sanskerta di atas sudah dapat dipastikan bahwa akuntansi pada zaman Arthasastra juga menggunakan semua sarana tersebut, sehingga dapat berkembang sebagai perantara dan alat bantu pada bidang ekonomi dan keuangan baik pada sektor pemerintahan dan dunia bisnis.

Sebagai bukti bahwa kebiasaan tulis menulis dimasyarakat sudah berkembang sedemikian majunya, diketahui dari penjelasan pada beberapa ayat dalam buku Arthasastra, terjemahan Made Astana, dkk, yang menyatakan para pejabat wajib membuat catatan tertulis berkaitan dengan obyek yang menjadi lingkup tanggungjawabnya, baik berkaitan dengan fisik aset maupun rencana anggaran penerimaan dan pengeluarannya (Arthasastra Bk. II. Bab. 2.11 & Bk. II. Bab 7. 3).

Selanjutnya dijelaskan pentingnya dokumen sebagai alat bukti pertanggungjawaban manajemen dalam melaksanakan tugasnya, dan sebagai bukti pendukung bila dilakukan audit oleh para akuntan sebagai auditor pemerintah, maupun sebagai bukti pendukung dalam menyelesaikan suatu perkara (Arthasastra Bk.II. Bab 10.38, 44, 45 & Bk. III. Bab 1. 15, 16).

Sejalan dengan sudah demikian majunya dalam bidang sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh setiap tingkatan manajemen pemerintahan maka kegiatan **audit**, **pemeriksaan** dan **pengecekan** secara periodik dan atau sewaktu-waktu atas hasil kerja tiap manajemen juga sudah dilakukan. Kegiatan audit ini dilakukan oleh para **Samkhyayaka (akuntan)** sebagai **auditor pemerintah kerajaan**, untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajemen sudah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga terhindar dari kemungkinan kecurangan.

Pernyataan atas perlunya dilakukan audit, pemeriksaan dan pengecekan yang harus dilaksanakan oleh para **akuntan** kerajaan paling sedikitnya ditemukan pada lima ayat dalam Arthasastra, yaitu pada Bk. II. Bab 7. ayat 22, 30, 31, 32, 33. Buku II, Bab 7, adalah bagian yang secara khusus mengatur tentang Sistem Pencatatan dan Pelaporan serta Tata Cara Pengawasan dan atau Audit.

Berkaitan dengan masalah pemeriksaan/pengecekan dan audit atas hasil kerja pegawai kerajaan yang dilakukan oleh para akuntan, ternyata kata **kuntan (Samkhyayaka)** ditemukan paling sedikitnya sebanyak 6 (enam) kali dalam ayat-ayat Arthasastra. Ayat-ayat dalam Arthasastra yang **merujuk kataakuntan** adalah Bk. II. Bab 1.7, Bk. II, Bab 7 : 16, 22, 34 & Bk. II. Bab 9 : 28,30

Jadi profesi akuntan pada zaman Arthasastra telah berkembang dan diterima oleh masyarakat penggunaanya dengan baik.

Dalam buku Arthasastra, oleh L.N. Rangarajan, 1992 : 183-184 ditemukan penjelasan tentang persyaratan pengangkatan seorang Sekretaris Raja dan Penasehat Raja yaitu orang yang bersangkutan **92**us menguasai semua peraturan yang dikeluarkan oleh raja. Yang bersangkutan juga **harus dapat membaca dan menulis dengan baik dan lancar** serta mengetahui semua peraturan yang dikeluarkan oleh raja, dan dapat menuliskan pengumuman yang dikeluarkan oleh raja dengan tepat. Penjelasan sebagai berikut :

5

“ A person fit to be appointed as the Royal Scribe shall have the same qualifications as those for a Royal Councillor. He shall have a (thorough) knowledge of all conventions, be quick in composition and have good handwriting. He shall also be able (clearly) documents and edicts. The scribe shall listen attentively to the kings instruction and write them down precisely “.

“ Seseorang cocok diangkat sebagai Sekretaris Raja harus memiliki kualifikasi yang sama dengan Penasehat Raja. Ia harus menguasai semua peraturan dan dapat dengan cepat dalam menyusun redaksi peraturan dan juga dapat menulisnya dengan baik. Ia juga harus dapat mendokumentasikan perintah (maklumat) raja dengan baik. Sekretaris Raja, harus mendengarkan perintah raja dengan baik, dan harus menuangkannya dalam bentuk tertulis dengan tepat “.

3. ALAT UKUR MONETER (SATUAN MATA UANG)

Sebagai alat tukar menukar dalam negeri digunakan satuan mata uang disebut “ **Pana** “. Mata uang ini terbuat dari logam yang diproduksi oleh pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak mudah rusak. Mata uang **pana** mempunyai pecahan-pecahan sehingga dapat dengan mudah dipergunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi. Pecahan mata uang pana adalah : $\frac{1}{2}$ pana, $\frac{1}{4}$ pana, $\frac{1}{8}$ pana, $\frac{1}{16}$ pana, dan seterusnya. Jenis mata uang lainnya yang juga digunakan adalah “ **mashaka** “, “ **kakani** “. Namun sebagai induk mata uangnya adalah **pana**.

Semua transaksi keuangan sektor pemerintahan dan bisnis harus diukur dengan satuan **pana**.

Hal ini berarti digunakan mata uang tunggal untuk semua transaksi dalam masyarakat, termasuk dalam pelaporan keuangan pemerintah dan sector swasta.

Dalam Arthasastra ditemukan penjelasan bahwa mata uang **pana** dicetak oleh pemerintah dan digunakan secara luas oleh masyarakat dalam melakukan transaksi perorangan, pemerintahan dan bisnis.

1). Tentang pencetakan mata uang uraiannya ditemukan dalam Arthashastra Bk. II, Bab 12. 24, berbunyi sebagai berikut :

“ Kepala Percetakan Uang (Laksanadhyaksa) hendaknya mencetak uang perak dengan seperempat tembaga (dan) mengandung campuran pengeras satu *masa* (dalam berat) dari salah satu yang berikut : besi, timah, dan antimony, untuk mata uang satu *pana*, setengah *pana*, seperempat *pana*, seperdelapan *pana*. Untuk mata uang tembaga dengan mengandung campuran seperempat, (dari mata uang) satu *masaka*, setengah *masaka*, satu *kakani*, dan setengah *kakani*”.

2). Setelah uang dicetak, sebelum boleh diedarkan, maka harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Pemeriksa Mata Uang (Rupadarsaka). Petugas ini sekaligus bertugas menentukan nilai dari mata uang tersebut sebelum dapat digunakan untuk transaksi perdagangan dan penerimaan Perbendaharaan.

Penjelasan tentang hal tersebut dapat ditemukan dalam Arthashastra Bk. II, Bab 12. 25, sebagai berikut :

“ Pemeriksa Mata Uang (*Rupadarsaka*) hendaknya menentukan nilai *pana*, untuk perdagangan dan untuk penerimaan dalam perbendaharaan”

3). Yang menarik adalah Raja telah membuat aturan mengenai upah, komisi dari pembuatan mata uang, biaya pemeriksaan (control kualitas) (merupakan biaya standar) serta menentukan sanksi bagi anggota masyarakat yang memproduksi mata uang.

Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam Arthashastra Bk. II, Bab 12. 26, sebagai berikut :

“ Ia (Raja) hendaknya juga menentukan upah pembuatan mata uang sebanyak delapan persen, komisi lima persen, upah pemeriksaan seperdelapan persen. Denda dua puluh lima *pana* untuk mereka yang memproduksi, membeli, menjual dan memeriksakan uang ditempat lain “.

4. UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN WAKTU

Akuntansi dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana lainnya, seperti telah dijelaskan dimuka yaitu adanya huruf, angka dan mata uang. Alat bantu yang tidak kalah penting lainnya adalah ukuran, takaran,

timbangan dan waktu. Ukuran memberikan petunjuk tentang panjang, lebar, jarak suatu tempat dengan tempat lainnya. Takaran berhubungan dengan masalah isi dari suatu alat seperti drum, kaleng, kolam, dam, dan sebagainya. Timbangan memberikan kepastian tentang berat dari suatu barang yang ditimbang. Waktu, adalah menentukan kepastian tentang waktu siang, malam, jam, hari, minggu, bulan dan tahun.

Dalam buku Arthasastra, oleh L.N. Rangarajan, 1992, pada lampiran (Appendix) 1, dijelaskan secara panjang lebar tentang ukuran, takaran, timbangan dan waktu yang telah diformulasikan oleh Kautilya, lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dinyatakan oleh Rangarajan, bahwa sangat mengejutkan, tingkat sentralisasi pemerintahan kerajaan Kautilya yang demikian luas dengan diterapkannya standarisasi dari ukuran, takaran, timbangan dan waktu yang berlaku untuk seluruh wilayah kerajaan, lebih kurang 2000 tahun yang lalu.

Berikut ini dijelaskan secara singkat ukuran, takaran, timbangan dan waktu yang digunakan oleh Kautilya, sebagai berikut :

4. 1). Ukuran Panjang

Dasar ukuran panjang yang digunakan bernama "*angula*". Bagian (subdivision) dari *angula* disebut dengan "*anu*". *Angula* sebagai satuan ukuran panjang disamakan dengan 19 mm. Satu *angula* sama dengan 32,768 *anus*.

Selanjutnya dijelaskan bahwa *angula* sebagai ukuran panjang mempunyai kelipatan (*multiples of the angula*), seperti :

4 *angulas* = 1 *dharnurgraha* = 3 in = 7.5 cm

8 *angulas* = 1 *dharnurmusthi* = 6 I = 14 cm

12 *angulas* = 1 *vitasi* = 9 in = 23 cm.

2 *vitastis* = 1 *aratni* = 18 in = 45 cm

4 *aratnis* = 1 *danda* = 6 ft = 180 cm

Selanjutnya dijelaskan mengenai ukuran panjang untuk jarak jauh, yaitu :

10 *dandas* = 1 *rajju* = 60 ft = 18.25 m

2 *rajjus* = 1 *paridesa* = 120 ft = 36.5 m

2000 *dhanus* = 1 *goruta/krosa* = 4000 yds = 3.66 km

4 *gorutas* = 1 *yojana* = 9 miles = 15 km.

Ukuran panjang/jarak yang bersifat khusus :

Ditetapkan pula jenis-jenis ukuran panjang atau jarak yang digunakan secara khusus, seperti jarak untuk pasukan dalam pertempuran, penelitian untuk menentukan luasnya padang rumput, penelitian untuk menentukan luasnya hutan, dsb.nya:

Sama, sala, *pariraya* = 26.5 cm = digunakan untuk mengukur jarak dalam pertempuran.

Hasta = 52.5 cm = digunakan untuk mengukur jarak pada saat melakukan survey padang rumput, survey hutan.

Kisku = 80 cm = ukuran ini digunakan oleh tukang gergaji kayu.

Ukuran panjang yang bersifat khusus ini masih banyak lagi, seperti ukuran untuk atap rumah, jalan, tembok kota, tempat panah dalam areal pertempuran.

4.2). Ukuran Empat Persegi (Square Measures)

Ukuran empat persegi ada beberapa jenis yaitu :

1 nivartana = 3000 m²

3 rajjus = 0.3 ha.

1 bahu = 3425 m²

32 dandas = 0.35 ha.

4.3). Ukuran Untuk Daya Muat/Isi (Measures of Capacity)

Terdapat empat jenis ukuran berat dan ukuran isi untuk kondisi yang berbeda, yang berlaku pada saat itu yaitu :

- 1). Ukuran isi untuk penerimaan perbendaharaan kerajaan dengan standar 100 %
- 2). Ukuran isi untuk kegiatan perdagangan 6.25 % dibawah ketentuan yang pertama (standar pemerintah), sebesar yaitu 93.75 %
- 3). Ukuran untuk kegiatan pembayaran oleh pemerintah kerajaan 12.5 % dibawah standar perbendaharaan kerajaan, yaitu 87.5 %.
- 4). Pengeluaran-pengeluaran untuk istana kerajaan 18.75 % dibawah standar perbendaharaan kerajaan, yaitu 81.5 %.

Sebagai standar untuk ukuran berat dan isi digunakan “ *drona* “. Satu *drona*=200 *palas dari masha* kacang-kacangan (200 *palas of masha beans*).

4.4). Persyaratan Khusus Untuk Timbangan Minyak dan Ghee.

Untuk benda-benda cair seperti anggur, minyak dari bunga-bunga, sari buah, buah-buahan yang telah dikupas, arang dan kapur ditentukan seperempat tambahannya dari timbangan standar (normal).

Timbangan untuk :

Ghee = 21 kudubas = 1 ghatika.
4 ghatika = 1 varaka

Minyak (Oil) = 16 kudubas = 1 gphantika
4 gphantikas = 1 varaka.

4.5). Ukuran Berat Untuk Mas.

Ukuran berat untuk mas, perak dan permata ditetapkan sebagai berikut :

Keterangan	Emas (Gold)	Perak (Silver)	Intan (Diamonds)
10 <i>masha beans</i>	1 mashaka	-	-

Or 5 <i>gunja</i> berries			
88 white mustard seeds	-	1 mashaka	-
20 rais grapes	-	-	dharana
16 mashakas	1 suvarna or 1 karsha	1 dharana	-
4 karshas	1 pala	-	-

Dharana dan mashaka digunakan sebagai alat ukur/timbangan bagi emas, perak dan batu permata (precious stone).

4.6). Alat Pengukur Berat.

Kautilya memperkenalkan dua jenis alat pengukur berat, yaitu timbangan dengan dua panci dan timbangan bergerak dengan bahan baja. Scala dari kedua timbangan tersebut tidak jauh berbeda dengan timbangan pada zaman modern ini.

Tula – timbangan dengan dua skala dengan sebuah tongkat penunjuk keseimbangan.

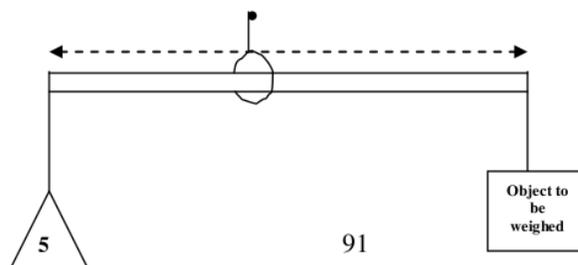
Digunakan untuk barang-barang yang beratnya sampai dengan 10 *palas*.

Gambaran dari bentuk dan penggunaan dari timbangan tersebut adalah sebagai berikut :

Nomor/Number	Berat dari balo dalam <i>palas</i> /Weight of beam in <i>palas</i>	Panjang = length.
1	1	6 ang = 4 ½ in = 11.5cm
2	2	14 ang = 10 ½ in = 27 cm
3	3	22 ang = 16 ½ in = 42 cm 5 And so on, + 8 <i>angulas</i> , or 6 in, or 15 cm each step.
10	10	78 ang = 58 ½ in = 150 cm.

Samavritta – merupakan timbangan dengan titik pikul dibuat dari baja, dengan berat barang yang ditimbang dari ¼ *pala* sampai dengan 200 *palas*.

Lawan beratnya adalah 5 *palas* diletakkan pada sisi lainnya. Gambar dari alat kur dimaksud sebagai berikut :



Timbangan untuk mengukur berat yang tidak digunakan untuk menimbang batu permata adalah *samavritta*. Dasar ukuran yang digunakan adalah *palas*. Satu *pala* = 1 ¼ oz atau 35 grams.

Penjabaran dari alat ukur *dharana*, *pala*, *tula* dan *bhara* adalah sebagai berikut :

10 dharanas	= 1 pala	= 1 ¼ oz	= 35 grams
100 palas	= 1 tula	= 7 ¾ lbs	= 3.5 kilos
20 tulas	= 1 bhara	= 154 lbs	= 70 kilos.

4.7). Ukuran Waktu

Kautilya menetapkan sebagai dasar satuan waktu adalah *nalika*.

Nalika dibagi lagi dalam beberapasub, terdiri dari dari : sekon, menit dan jam.

Rinciannya sebagai berikut :

	5 tuta	=	6/100ths of a second
2 tutas	= 1 lava	=	12/100ths of a second
2 lvas	= 1 nimesha	=	24/100ths of a second
5 nimesha	= 1 Kashta	=	1.2 seconds
30 kashtas	= 1 kala	=	36 seconds
40 kalas	= 1 nalika	=	24 minutes
2 nalikas	= 1 muhurta	=	48 minutes
15 muhurtas	= 1 hari siang dan 1 malam	=	12 jam

Pada bulan *Asadha* (bulan Juni) tidak adabayangan pada tengah harinya.

4.8). Penanggalan (Kalender)

Rincian dari hari-hari kalender antara lain sebagai berikut :

15 siang dan malam = *Sukla* 15 harian atau (*sukla fortnight*)
Bakula 15 harian atau (*Bakula fortnight*)

2 kali lima belas harian = 1 bulan
 1) Hari kerja = 30 hari siang dan 1 malam
 2) Bulan menurut peredaran matahari = 30 ½ hari siang dan 30 malam.

- 3) Bulan menurut peredaran bulan = 29 ½ hari siang dan 30 malam.
 - 4) Hari kerja untuk invantri = 32 hari siang dan malam
 - 5) Hari kerja untuk kavalri = 35 hari siang dan malam.
 - 6) Hari kerja untuk pasukan gajah = 40 hari siang dan malam.
- 2 bulan = satu musim

= *dakshinayana*

Varsha (musim hujan) – *Sravana*

(Juli/Agustus) dan *Praushtapada*
(Agustus/September).

Sharat (*autumn*) – *Asvayuja*

(September/Oktober) dan

Kartika (Oktober/November)

Hemanta (winter) – *Marghasirsha*

(November/Desember dan

Pausha (Desember/Januari)

= **Uttarayana**

Sisira (*frosty*)- *Magha* (Januari/Februari) dan

Phalguna (Februari/Maret)

Vasantha (*spring*)- *Caitra* (Maret/April) dan

Vaisahaka (April/Mei)

Grishma (*summer*)- *Jyeshthamulya* (Mei/Juni)

dan *Ashada* (Juni/Juli)

3 musim

= 1 *ayana*

2 *ayan*as

= 1 *tahun*

5 *tahun*

= 1 *yuga*.

4.9). Penyesuaian Atas Penanggalan.

Penanggalan/kalender, dapat menggunakan dua metode yaitu berdasarkan peredaran matahari dan atau peredaran bulan. Kalender menggunakan peredaran matahari umurnya lebih panjang 1/60 dibandingkan menggunakan peredaran bulan. Artinya setiap dua bulan ada kehilangan satu hari, bila kalender matahari menuju kalender peredaran bulan.

Dengan sudah adanya huruf, angka, bahasa, ukuran, takaran dan timbangan sebagai sarana pendukung dapat diterapkannya akuntansi dalam masyarakat, baik pada sector pemerintahan dan sector bisnis, berarti masalah akuntansi yang dijelaskan dalam buku Athasastra adalah nyata dan benar. Dengan demikian tidak diragukan lagi kebenarannya.

PERTANYAAN UNTUK BAHAN DISKUSI

- P.6.1. Ilmu akuntansi agar dapat diterapkan dan memberikan manfaat kepada manusia maka memerlukan alat bantu untuk mengembangkan. Alat bantu tersebut antara lain bahasa, angka dan huruf, takaran dan timbangan. Bahasa dan huruf apakah yang digunakan pada zaman Arthashastra ?
- P.6.2. Tulis angka 1 s.d. 9 dari huruf Devanagari, dan sandingkan dengan angka Arab (bila Sdr. bisa menyandingkannya).
- P.6.3. Angka nol konon ditemukan oleh ahli matematika dan astronomi Hindu. Ternyata penemuan tersebut sangat besar artinya bagi perkembangan ilmu dan teknologi. Sebutkan nama ahli yang memberikan pernyataan tersebut.
- P.6.4. Angka Arab yang digunakan oleh masyarakat dunia saat ini sebetulnya merupakan notasi Hindu. Kenapa menjadi begitu jauh melenceng penyebutannya ?
- P.6.5. Siapakah nama ahli matematika Hindu yang mengajarkan Matematika dan menerjemahkan buku-buku astronomi di kerajaan Bahdad ? Siapa nama raja di kerajaan Bahdad pada saat itu.
- P.6.6. Pada tahun berapa notasi Hindu masuk kesemenanjung Arabia ? Apa makna dari diundangnya ahli astronomi dan matematika Veda pada tahun tersebut oleh raja Bahdad ditinjau dari segi perkembangan ilmu dan teknologi ke dua kerajaan ?. Berikan komentar Saudara secukupnya !.
- P.6.7. Pada tahun berapa notasi Hindu menyebar ke benua Eropa ?
- P.6.8. Apakah bangsa Arab mengakui notasi Hindu sebagai notasi Arab ? Siapa yang menyebar luaskan notasi Hindu sebagai notasi Arab ? Kenapa demikian ?
- P.6.9. Dalam Arthashastra, Kautilya menjelaskan betapa pentingnya sebuah dokumen sebagai alat bukti pertanggung jawaban atas suatu kegiatan. Sebutkan syarat-syarat dari sebuah dokumen sejauh saudara ketahui.
- P.6.10. Menurut Kautilya, bahwa sebuah dokumen pertanggung jawaban kegiatan juga harus diaudit ?. Kenapa dokumen harus diaudit ?
- P.6.11. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Raja ?. Persyaratan teknis seorang Sekretaris Raja disamakan dengan jabatan apa dalam kerajaan.
- P.6.12. Sebutkan nama mata uang yang digunakan pada zaman Kautilya. Buat rincian dari pecahan mata uang tersebut.
- P.6.13. Dalam sistem perekonomian kerajaan sesuai Arthashastra menerapkan sistem mata uang tunggal atau majemuk. Coba Sdr. jelaskan alasan Kautilya memilih system mata uang dimaksud.
- P.6.14. Mata uang harus dicetak oleh percetakan Negara. Sebelum uang diedarkan ke masyarakat harus diperiksa oleh pejabat pemeriksa mata uang. Kenapa harus demikian ketat aturannya. Saat ini, Negara kita, apakah menganut cara yang pernah diterapkan oleh Kautilya tentang percetakan dan pengawasan terhadap mata uang ?
- P.6.15. Pada zaman Kautilya/Canakya, apakah pihak swasta boleh mencetak mata uang ? Apabila pihak swasta mencetak mata uang apakah dibiarkan saja atau dikenakan sanksi ?.
- P.6.16. Apakah Kautilya telah menetapkan ukuran panjang, jarak, berat dan waktu Sebutkan nama dari tiap jenis ukuran tersebut.
- P.6.17. Masalah penanggalan juga sudah diatur oleh Kautilya. Apa manfaat penanggalan bagi akuntansi ?
- P.6.18. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Kautilya apakah system desentralisasi atau sentralisasi, mengingat demikian luas wilayah yang harus diaturnya ? Apakah Kautilya berhasil dalam menjalankan system pemerintahannya ?.

- P.6.19. Pada zaman Arthashastra, sistem pencatatan dan pelaporan dalam bidang keuangan kerajaan sudah berjalan demikian baik, sehingga akuntabilitas atas pengelolaan keuangan kerajaan sudah sangat terbuka. Fungsi audit, yang dilaksanakan oleh para akuntan profesional juga sudah berjalan dengan baik. Sebutkan sumber informasi berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas !.
- P.6.20. Dalam membuat mata uang, pihak pemerintah telah membuat standar biaya untuk mata uang yang dicetaknya. Sebutkan berapa besar unsure biaya bahan baku, upah langsung pembuatan mata uang, komisi dan upah pemeriksaan mata uang.
- P.6.21. Dalam membuat mata uang, yang cocok apakah perusahaan pencetak mata uang menggunakan metode *job order costing* atau metode proses *costing*. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.6.22. Satuan mata uang yang digunakan disebut dengan “Pana “. Mata uang “Pana “, dipecah ke dalam $\frac{1}{2}$ pana, $\frac{1}{4}$ pana, $\frac{1}{8}$ pana dan $\frac{1}{16}$ pana. Jelaskan maksud dari dipecah-pecahnya nilai mata uang pana tersebut.
- P.6.23. Jelaskan manfaat kalender (penanggalan) bagi penerapan akuntansi ?.

AKUNTANSI HINDU

44

Endra Sanasim Rayim Sajitvanam Sadasaham, Varsistham Utaye Bhara (Rgv. I. 8. 1)

31

Wahai Tuhan yang maha cemerlang , semoga Engkau memberkahi kami dengan kekayaan spiritual yang kekal dan yang akan menghantar kami menuju kemenangan dan kekuasaan serta melindungi kami dari kekuatan jahat (Rgv. I. 8. 1)

BAB VII

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI DALAM AKUNTANSI HINDU

1. PRINSIP AKUNTANSI KAS DAN PRINSIP AKUNTANSI AKRUAL

Berikut ini diuraikan mengenai tatacara pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta penyelesaian transaksi dalam suatu entitas binsis dan non binsis dikaitkan dengan pengertian Hukum Karma Pala dalam ajaran Agama Hindu.

Sesuai ajaran Hindu bahwa manusia serta semua makhluk yang ada di alam semesta ini, dalam hidupnya terikat dengan hukum kerja. Hukum kerja dalam ajaran Hindudisebut dengan “ **hukum karma** “.

Sri Krisna, dalam Bhagawadgita Bab 3 tentang Karma Yoga, antara lain menjelaskan, bahwa seseorang harus mewujudkan tugas dan fungsinya dengan bekerja sesuai dengan keakhlian serta jabatan yang dimilikinya. Bahkan secara umum, seseorang tidak dapat memelihara badan jasmaninya tanpa melalui bekerja (Bg. 3. 8).

Setiap pekerjaan yang dilakukan akan memberikan hasil atau dampak kepada yang melakukan pekerjaan tersebut.

Mengingat demikian pentingnya arti perbuatan(karma) yang dilakukan oleh manusia, sejak pagi bangun tidur sampai dengan tidur lagi di malam hari, maka dipandang perlu waktu melakukan **Puja Trisandya**, menyampaikan permohonan ampun kepada Ida Hyang Widhi Wasa yang berkaitan dengan kelemahan manusia, yang di dalamnya termasuk **kelemahan** dalam **perbuatan**. Permohonan ampun tersebut dimuat dalam **Puja Trisandya** bait 4, dalam buku Doa Sehari-Hari Menurut Hindu, diterbitkan oleh Kanwil Kementrian Agama Propinsi, Bali, 2011, bunyi selengkapnya sebagai berikut :

“ Om Papo ham papakarmaham
Papatma papasambhavah
Trahi mam pundarikaksa
Sabahyabhayantarah sucih “.

Terjemahan :

Om hamba ini papa, perbuatan hamba papa, diri hamba papa, kelahiran hamba papa, lindungilah hamba, Saghyang Widi, Sucikanlah jiwa dan raga hamba “.

Suatu entitas bisnis atau non binsis, dalam operasionalaya, pasti melakukan kegiatan (pekerjaan) untuk mendapatkan hasil dan juga mengeluarkan biaya guna mendukung kelangsungan hidup entitas tersebut.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang berdampak keuangan, harus dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi.

Dalam sistem akuntansi, untuk melakukan pencatatan suatu transaksi ke dalam akuntansi harus melalui prinsip “ **pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan** “ (PSAK- 1. 11 : 2007).

Disamping **empat prinsip** tersebut, akuntansi juga dilengkapi dengan prinsip pokok yang harus dianut, yaitu **prinsip kas dan prinsip akrual**. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada dasarnya menganut **prinsip akrual**.

Prinsip kas diterapkan terhadap transaksi yang bersifat keuangan, baik yang bersifat hak maupun kewajiban, yaitu baru dilakukan pengakuan, pengukuran dan pencatatan apabila hak dan kewajiban tersebut telah **direalisasikan dalam bentuk kas** (dalam bentuk uang tunai dan bentuk lainnya yang dapat disetarakan dengan kas). Hal ini berarti, metode kas menganut fakta, bahwa hasil suatu kegiatan, misalnya berupa hak entitas benar-benar telah diterima pembayarannya dari pihak lain dalam bentuk kas. Kas yang diterima ini langsung dapat digunakan oleh pihak yang berhak menerimanya, guna memutar roda entitas.

Prinsip akrual, menekankan pada semua hak dan kewajiban harus **diakui dandicatat pada saat terjadinya**, bukan pada saat diterima atau dibayar dengan kas.

Pentingnya prinsip akrual adalah agar data-data dalam laporan keuangan yang disusun manajemen dapat dibandingkan antar periode akuntansinya. Laporan keuangan sejatinya menggambarkan sebab dan akibat dari tindakan manajemen selama satu periode akuntansi dalam memimpin perusahaan. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan itu dianggap ditutup (seperti dimatikan), sehingga setiap akhir tahun timbul istilah **tahun tutup buku**. Pada tahun berikutnya, perusahaan dihidupkan lagi. Demikian berjalan secara berkesinambungan. Jadi, pada semua kegiatan usaha, baik yang mencari laba maupun tidak mencari laba juga berlangsung **prinsip hukum karma dan reinkarnasi**. Hukum Karma adalah hukum sebab-akibat dari perbuatan. Akibat dari kepemimpinan manajemen itulah yang menentukan apakah perusahaan itu untuk landasan berjalan pada periode berikutnya membawa kondisi yang lebih baik, kurang baik, atau memang benar-benar harus ditutup.

Dalam Rg. Veda I. 21. 6, dijelaskan bahwa **Tuhan Yang Maha Esapaling mengetahui sifat perbuatan dan menentukan akibat dari perbuatan (karma) yang dilakukan oleh manusia**.

Dalam **Yajurveda**,

Adhyaya 40. 2, antara lain dijelaskan bahwa, dalam kehidupan ini manusia dikendalikan oleh karmanya, tidak oleh yang lain, dan karma tidak dapat dibagi-bagi.

Sejatinya, **hukum karma** menganut **asas akrual**, karena perbuatan manusia periode berjalan, hasilnya belum tentu diterima pada periode perbuatan dilakukan. Perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan piutang ataupun utang bagi yang melakukan.

Perbuatan yang pernah dilakukan pada masa kelahiran-kelahiran sebelumnya, baik mengenai sifat, kualitas dan besarnya dapat diperbandingkan dengan hasil yang dinikmati oleh manusia yang bersangkutan pada kelahirannya yang sekarang.

Masalah manusia mengalami **kelahiran kembali (reinkarnasi)** setelah kematiannya, sumber hukumnya dapat ditemukan dalam **Rgveda X.18.3**, yang antara lain menjelaskan bahwa “ **Yang hidup berasal dari yang mati** “.

Tujuan dilahirkan kembali (reinkarnasi) adalah untuk memberikan kesempatan untuk bersekolah (menempuh pendidikan) guna meningkatkan kualitas kehidupannya yang sekarang maupun kehidupannya dimasa yang akan datang.

Dengan memahami bekerjanya hukum karma, yang bekerja tanpa salah, bekerja secara lurus, dapat mengendalikan perbuatan manusia selama hidupnya.

Betapa mulianya manfaat pendidikan, dijelaskan dalam Rgveda X.32.7, sebagai berikut :

“ Orang yang tidak mengenal suatu tempat bertanya kepada orang yang mengetahuinya; ia meneruskan perjalanan dibimbing oleh orang yang tahu; inilah manfaat pendidikan; ia menemukan jalan yang lurus “.

Berdasarkan **Hukum Karma (hukum sebab-akibat)**, jarak waktu antara perbuatan (kegiatan) yang dilakukan dan hasilnya diterima, terdapat 3 jenis hukum karma, yaitu : **(1)Pararabda Karma; (2)Sancita Karma, dan (3)KriyamanaKarma.**

(1) Pararabdakarma, perbuatan yang dilakukan dalam kehidupannya sekarang, hasilnya dapat langsung diterima dalam siklus kehidupan sekarang.

Bila berpedoman pada siklus akuntansi, selama 12 bulan, maka hasil perbuatan atau suatu transaksi akuntansi, dapat diakui sebagai transaksi kas (kontan), bila penerimaan kas atau pengeluaran kas terjadi dalam 30 hari, sejak transaksi dimulai. Kas yang diterima melewati 30 hari, sudah masuk dalam prinsip akrual. Hasil kegiatan yang diterima dalam bentuk kas, atau dibayar dalam bentuk kas, dapat langsung dimanfaatkan dan atau dirasakan oleh pihak yang melakukan perbuatan.

Dalam kaitan dengan **Pararabda Karma**, prinsip basis kas dapat berlangsung selama manusia masih hidup, tergantung dari jenis, kelompok perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri selama hidupnya.

Berikut diberikan ilustrasi mengenai perbuatan yang berhubungan dengan **Prarabda Karma** :

- (1.1) Seorang pekerja proyek bekerja berdasarkan kontrak. Menerima upah mingguan, yaitu setelah akhir minggu setelah hasil pekerjaannya diperiksa oleh pengawas proyek. Apabila pengawas proyek menyatakan hasil pekerjaannya sudah sesuai, maka upahnya dibayar.
- (1.2) Seorang pegawai honorer disebuah kantor perusahaan swasta, menerima honor pada setiap akhir bulan. Setelah Bagian Personalia mengecek daftar hadir dan tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai tersebut ternyata semuanya lengkap, maka honorinya dibayar.
- (1.3) Seseorang dengan pekerjaan sebagai penjunjung barang di pasar, menerima upah langsung dari pelanggannya apabila barang yang dibawanya sampai ditempat tujuan baik.

Bila ditinjau dari prinsip akrual, dikaitkan dengan siklus kehidupan (umur) manusia pada zaman Kaliyuga rata-rata 100 tahun (sejak lahir), maka hasil perbuatannya (karmanya) itu diterima dalam siklus kehidupan antara 100 tahun tersebut.

Hasil perbuatan yang diterima dalam masa hidupnya sekarang (misalnya hidup 100 tahun), dapat berasal dari **Pararabda Karma**, dan **Cancita Karma** melalui **Kriyamana Karma**.

(2) **Sancita Karma**, perbuatan yang dilakukan dalam kehidupannya sekarang, hasilnya baru diterima dalam kehidupan (kelahiran) yang akan datang.

Dalam kaitan dengan jenis hukum karma ini, suatu perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan piutang atau utang, yang hasilnya baru akan diterima dimasa yang akan datang, demikian pula kewajibannya baru akan dilunasi dimasa yang akan datang.

Berikut diberikan ilustrasi mengenai perbuatan yang berhubungan dengan **Prarabda Karma** :

- (2.1) Seseorang rajin donor darah, misalnya samapi 60 kali menjelang unurnya 60 tahun. Setelah umur 60 tahun pendonor tidak boleh donor lagi, karena aliran darahnya sudah melambat. Pendonor, sebenarnya tidak tahu siapa yang menggunakan darah yang didonorkannya selama ini. Donor darahnya murni bersifat social.
- (2.2) Seseorang suka berdonasi barang atau uang, walaupun jumlahnya tidak besar, melalui yayasan-yayasan social. Donasinya murni bersifat social.
- (2.3) Beberapa orang pegawai honorer disebuah kantor perusahaan swasta, menerima honor pada setiap akhir bulan. Setelah Bagian Personalia mengecek daftar hadir dan tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai tersebut ternyata semuanya lengkap, maka honorinya seharusnya dibayar sesuai dengan bunyi kontrak. Tetapi honorinya dibayar lebih kecil dari yang seharusnya, dengan alasan yang tidak jelas.
- (2.4) Seorang pemimpin beberapa proyek pemerintah menerima hadiah dari pemborong pelaksana proyek yang uangnya sekitar 2 (dua) milyar rupiah. Berupa uang tunai ditransfer kesebuah bank sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Sisanya dalam bentuk barang fisik seperti rumah mewah, mobil mewah, dsb.nya. Sampai dengan ia selesai menjabat sebagai pimpinan proyek tidak tercium perbuatannya menerima fee proyek tersebut. Pada saat itu KPK belum terbentuk.

- (2.5) Sekelompok perampok jalanan terdiri dari beberapa orang suka merampok truk yang membawa barang-barang elektronik. Pada suatu sore kelompok perampok ini terdiri dari 5 orang merampok sebuah truk yang mengangkut barang-barang elektronik. Truk ini dicegat oleh Polisi yang sedang bertugas di wilayah tersebut. Para perampok panic, berlarian mepompat dari atas truk untuk menyelamatkan diri. Dua orang yang melompat tergilas oleh ban truk dan meninggal ditempt kejadian. Tiga orang lainnya terjatuh dan babak belur dan ditahan Polisi sambil menunggu proses hukum untuk yang bersangkutan.

(3) **Kriyamana Karma**, maksudnya perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya, hasilnya baru diterima pada kehidupan yang sekarang.

Prinsip akrual akan mencatat semua hak dan kewajiban dengan teliti dan akurat, sehingga dapat terhindar dari kemungkinan kesalahan pembebanan kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menanggungnya.

Suatu ilustrasi untuk **Kriyamana Karma (hasil perbuatan)** memang sangat sulit diberikan, karena masalah ini berkaitan langsung dengan pihak yang menerima hasil karma tersebut. Setelah orang itu besar, dan bila yang bersangkutan memahami bekerjanya hukum karma, baru bisa merasakan hasil perbuatan yang diterimanya. Yang bersangkutan harus bertanya kenapa ia dilahirkan dikeluarga seperti itu, misalnya dilahirkan pada keluarga kaya, atau dilahirkan di keluarga miskin. Tempat kelahiran itu digunakan untuk memperbaiki karma sehingga bisa lebih baik lagi.

Terori karma yang berkaitan dengan *Sancita karma* dan *Kriyamana karma*, adalah sejalan dengan *prinsip akrual* dalam akuntansi.

Sedangkan *Pararabda karma* sejalan dengan *prinsip kas* dalam akuntansi.

Berikut ini gambaran dalam bentuk bagan (Bagan VII.1) tentang *Pararabda karma*, *Sancita karma*, dan *Kriyamana karma* dikaitkan dengan prinsip *Pengakuan*, *Pengukuran*, *Penyajian*, *pengungkapan* serta prinsip kas dan prinsip *akrual*.

Bagan VII.1

Prinsip Hukum Karma (Hukum Perbuatan dan Hasil Perbuatan)	Prinsip Perlakuan Akuntansi				Prinsip Kas & Akrual	
	Pengakuan	Pengukuran	Penyajian	Pengungkapan	Kas (Dalam 30 hari untuk sistem akuntansi kontemporer) dan (100 tahun umur manusia	Akrual

					zaman Kaliyuga)	
<p>(1) Pararabda karma</p> <p>Perbuatan sekarang, hasilnya diterima dalam kehidupan sekarang. Dimulai sejak lahir sampai dengan meninggal. Umur manusia dalam zaman kaliyuga, kurang lebih 100 tahun</p> <p>117</p>	→	→	→	→	→	
<p>(2) Sancita Karma</p> <p>Perbuatan yang dilakukan dalam siklus kehidupan sekarang, hasilnya baru akan diterima pada kehidupan yang akan datang. Umur manusia dalam zaman Kaliyuga lebih kurang 100 tahun</p>	→	→	→	→		→
<p>(3) Kriyamana Karma</p> <p>1 Perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya, hasilnya baru diterima oleh yang berbuat pada kehidupan sekarang. Pada zaman kaliyuga umur manusia kurang lebih 100 tahun</p>	→	→	→	→	←	

2. PENYUSUNAN NERACADANDAFTAR LABA-RUGI

Hukum karma menganut prinsip kehidupan semua makhluk dijagat raya ini berjalan secara terus menerus (going concern). Badan fisiknya dapat berubah, disebabkan oleh kerusakan teknis dari fisik tersebut, namun roh yang sudah pernah menghidupinya tidak pernah berubah, berjalan terus mencari fisik yang baru berdasarkan karma yang pernah dibuat selama masa kehidupan yang telah pernah dijalani.

Akuntansi juga menganut prinsip **going concern**, yang artinya entitas bisnis dan non bisnis didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, artinya harus berjalan secara terus menerus.

Berdasarkan prinsip *Karma Pala*, dengan tiga unsurnya, yaitu *Pararabda karma*, *Sancita karma* serta *Kriyamana karma*, dijadikan landasan untuk menyusun **Neraca**

dan **Daftar Laba Rugi Kehidupan** periodik bagi semua mahluk dijagat raya ini. Baik pencatatan secara individu (parsial) maupun secara gabungan.

Rasanya sangat sulit dibayangkan berapa besar program computer yang digunakan untuk mencatat masing-masing perbuatan semua mahluk yang ada di alam semesta ini. Dengan berdasarkan *prinsip kas* dan *prinsip akrual* dalam akuntansi, tujuan akhirnya adalah untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban manajemen secara periodik, yaitu minimal dalam waktu setahun sekali, yang disebut dengan **laporan keuangan**.

Neraca dan Daftar Rugi-Laba, dapat dijadikan dasar dalam menentukan benar tidaknya keberadaan suatu transaksi dan atau kelompok transaksi, dalam menghadapi suatu gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam Manava Dharmasastra Buku VII. 44, dinyatakan bahwa Raja dalam kedudukannya sebagai penegak kebenaran, dalam memutuskan perkara utang-piutang, harus dengan teliti dan saksama menelusuri terjadinya utang-piutang tersebut. Dalam ayat 44 tersebut, raja diilustrasikan sebagai seorang pemburu, membuntuti menjangkan yang luka (terkena panah), melalui tetesan darahnya. Sebelum memutuskan perkara, Raja akan mencari dimana letak kebenaran utang-piutang tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada.

Rgveda X.10.12 memberikan petunjuk, bahwa kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa diletakkan ditangan kanan dan juga ditangan kiri manusia.

Tangan kanan, sama dengan sisi Debet (D), dan tangan kiri, sama dengan sisi Kredit (K)

Manusia juga harus dapat membeda-bedakan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki tersebut, baik yang teletak disisi Debet (D) maupun yang teletak disisi Kredit (K), (Atharvaveda VII.115.4)

Petunjuk dalam ayat-ayat Veda tersebut di atas dijadikan dasar dalam penyusunan sebuah Neraca, yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi Debet (kiri), tempat mencatat semua hak entitas, dan sisi kredit (kanan) tempat mencatat semua kewajiban dan kekayaan bersih (ekuitas) entitas.

Selanjutnya ayat-ayat Veda yang berhubungan dengan perdagangan, mendorong warna Vaisya untuk melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta

para pedagang harus memperoleh keuntungan. Untuk pedagang yang sudah besar (kaya), diminta fokus pada jenis bisnis tertentu.

Yajurveda XXX.5, memberi petunjuk bahwa “ Golongan Vaisya hendaknya melakukan kegiatan perdagangan “.

Atharvaveda III.15.1, memberi petunjuk bahwa pengusaha besar (kaya), harus **fokus** pada bisnis tertentu.

Atharvaveda III.15.4, para pengusaha memohon agar barang-barang yang dibeli dan dijual memberikan keuntungan.

Atharvaveda III.15.5, para pengusaha memohon kepada Hyang Widhi, semoga modal yang ditanam menguntungkan dan bukan merugikan.

Masih banyak ayat-ayat Veda yang berkaitan dengan perdagangan, yang pada intinya para pedagang memohon keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Keuntungan yang diperoleh tersebut harus berlandaskan pada Dharma.

Berlandaskan pada bunyi ayat-ayat Veda tersebut, maka dapat disusun Daftar **Laba Rugi**, untuk mengetahui perkembangan **Laba-Rugi** dari usaha yang dilakukan oleh para pengusaha,

Laporan keuangan pokok dalam akuntansi, pada awalnya adalah **Neraca** dan **Daftar Laba Rugi**.

Saat ini, untuk memenuhi tuntutan transparansi atau keterbukaan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajemen entitas, maka manajemen wajib menyusun laporan keuangan entitas yang dipimpinnya dengan 5 (lima) unsur, yaitu : (1) Neraca; (2) Daftar Laba rugi; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Perubahan Ekuitas/Modal); dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam kaitan dengan hukum karma, mungkin juga, laporan kehidupan untuk setiap mahluk yang dibuat oleh pemangku kebijakan untuk itu, sejak awal sudah dengan 5 (lima) unsur, seperti yang diwajibkan untuk laporan keuangan entitas bisnis dan non bisnis di alam nyata ini. Mungkin unsur yang berbeda adalah masalah alat ukur atau nilainya.

Berikut ini (Bagan VII.2), digambarkan Neraca dan Daftar Laba Rugi, baik sesuai versi Hukum Karma dan versi Akuntansi Kontemporer.

Bagan VII.2

NERACADAFTAR LABA-RUGI

D		K		D		K	
Kas	Kewajiban/ Utang				
Kas	(.....)			Pendapatan	Biaya
Piutang						

Modal awal	Laba/Rugi
Laba/Rugi		
		Sisa Laba	
		Tahun lalu
_____	_____	_____	_____
.....
_____	_____	_____	_____

40

Penjelasan atas Pos-Pos Neraca dan Laba Rugi :

Penjelasan berikut ini berkenaan dengan pengertian hukum karma, meliputi : Pararabda karma, Sancita karma dan Kriyamana karma serta dikaitkan dengan system kas dan system akrual dalam system akuntansi kontemporer.

NERACA

Sisi Debet (D)

- 1) **Kas**, menunjukkan sisa baik atau kurang baik dari hasil perbuatan (karma) yang diterima saat ini, yang bersumber dari perbuatan yang dilakukan pada periode kehidupan yang sedang dijalani (saat ini pula) (**prinsip kas**). Kas positif = hasil perbuatan baik; Kas negative = hasil perbuatan tidak baik.
- 2) **Piutang**, hasil perbuatan yang belum dapat dinikmati pada saat ini, baik berasal dari perbuatan periode kehidupan saat ini maupun yang berasal dari perbuatan dimasa- masa kehidupan sebelumnya (**prinsip akrual**)

Sisi Kredit (K)

- 3) **Utang/Kewajiban**, berasal dari perbuatan pihak lain kepada pihak yang Menerima hasil perbuatan pihak lain tersebut, yang sampai dengan periode kehidupannya yang sekarang belum sempat diselesaikan (prinsip akrual)
- 4) **Modal awal**, berasal dari pemberian **Hyang Widhi (Brahman)** kepada manusia pada saat yang bersangkutan dilahirkan. Hal ini sesuai dengan **21**ksud ayat Atharvaveda VII.115.3, yang antara lain menyatakan bahwa manusia mewarisi kekayaan yang tak terhingga banyaknya, bersamaan dengan kelahirannya.

Ditambah lagi dengan penjelasan dalam Rgveda X.60.12, yang menyatakan bahwa Hyang Widhi Wasa meletakkan keberuntungan (kekayaan) yang sangat bagus pada tangan kanan manusia. Kekayaan yang diletakan ditangan kanan itu merupakan obat untuk semua penyakit. Maksudnya, kekayaan itu sebagai obat untuk semua penyakit, adalah :

(1) untuk modal awal dalam berusaha, dan

(2) juga untuk menanggulangi (menutup) bila terjadi kerugian.

Dijelaskan pula, bahwa oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia dilengkapi dengan tangan kiri, yang mempunyai kedudukan lebih beruntung (lebih baik dari tangan kanan). Maksud dari tangan kiri lebih baik dari tangan kanan adalah dalam mengelola warisan kekayaan, karena tangan kiri berfungsi sebagai manajer investasi. Kekayaan terletak ditangan kanan, berarti dalam neraca yang berbentuk T, kekayaan terletak disebelah Kredit (K). Kekayaan yang disebelah kredit itu harus dikelola dengan baik oleh manajer investasi agar dapat memberikan hasil yang maksimal, dan manajer investasi meletakkan kekayaan yang telah diinvestasikan disebelah kiri atau Debet (D) Neraca. Dengan kekayaan diinvestasikan dengan baik, maka akan memberikan hasil yang maksimal, sehingga dapat berfungsi lebih baik dibandingkan dengan tidak diinvestasikan. Dengan hasil investasinya saja diharapkan sudah dapat membantu menutup bila perusahaan mengalami kerugian. Itulah sebabnya dianalogikan dengan dapat menyembuhkan penyakit cukup dengan sentuhan saja.

DAFTAR LABA-RUGI

Sisi Kredit (K)

1) Pendapatan

Pendapatan positif, berasal dari karma baik. Pendapatan negative, berasal dari karma tidak baik.

Sisi Debet (D)

2) Biaya

Semua pengorbanan yang diperlukan dalam rangka melakukan karma

baik maupun karma yang tidak baik. Pengertian pengorbanan dalam kaitan ini adalah yang sudah dapat diakui sebagai biaya. Dalam hal ini mengikuti prinsip kas atau prinsip akrual.

3) Laba/Rugi

Bila pendapatan lebih besar dari biaya, maka menimbulkan laba. Bila Pendapatan Lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, menimbulkan rugi.

3. PRINSIP PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi menggunakan beberapa prinsip untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang dibuat oleh Manajemen dapat menggambarkan keadaan yang wajar dari operasi entitas yang dipimpinya. Cukup banyak prinsip akuntansi yang harus dipatuhi dalam penerapan akuntansi, diantaranya adalah **Prinsip Perlakukan**

Akuntansi, yang terdiri dari **4 (empat) unsur**, yaitu : **(1) pengakuan;** **(2) Pengukuran;** **(3) penyajian;** dan **(4) Pengungkapan**. Tujuan utama pembuatan sebuah laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi ringkas secara terstruktur dari posisi keuangan entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya para pihak yang berada diluar perusahaan.

Agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dapat dipercaya oleh pihak penggunanya, maka laporan keuangan tersebut dalam menyusunnya harus berlandaskan pada Standar Akuntansi yang berlaku pada saat itu.

Untuk di Indonesia, saat ini terdapat 4 (empat) Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara umum, yaitu :

- 1) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Yang Berlaku Umum, atau lazim juga disebut dengan SAK-Besar. SAK ini diterbitkan terakhir oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2012. SAK ini memang sangat tebal/besar, terdiri dari 68 (enampuluh delapan) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). SAK ini wajib digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menghimpun dana publik signifikan atau perusahaan yang gopublic atau menjual saham dan atau obligasi di pasar dal.
- 2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2010 dan dinyatakan mulai berlaku tahun 2010. SAK ini dimaksudkan digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM).
- 3) Standar Akuntansi Keuangan Syariah, dimaksudkan sebagai payung akuntansi untuk semua jenis usaha yang berlandaskan pada Syariah.
- 4) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diterbitkan terakhir dengan menerapkan asas akrual berdasarkan PP No. 71/2010. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAP) sebelumnya berdasarkan PP No. 24 tahun 2005, menggunakan asas kas menuju akrual.

Berkenaan dengan prinsip akuntansi yang harus dipatuhi, semua Standar Akuntansi Keuangan mengatur beberapa prinsip umum yang lazim dianut dalam melakukan pencatatan (pembukuan) suatu transaksi keuangan. Salah satu prinsip yang dikenal dengan **Prinsip Perlakukan Akuntansi** seperti dijelaskan di atas, dengan tujuan untuk menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Perlakukan Akuntansi memuat 4 (empat) unsur prinsip akuntansi yang harus dipatuhi, sebagai berikut :

- (1) pengakuan (*recognition*):

- (2) pengukuran (*measurement*);
- (3) penyajian (*presentation*) dan
- (4) pengungkapan (*disclosure*)

Berikut ini diuraikan secara ringkas maksud dari masing-masing prinsip akuntansi tersebut dan selanjutnya dikaitkan dengan pokok-pokok prinsip akuntansi menurut ajaran Hindu.

3.1. Prinsip Pengakuan (*Recognition*).

Prinsip pengakuan, mengatur tentang proses pembentukan suatu pos, akun atau unsur yang memenuhi definisi serta kriteria pengakuan, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam lembaga/entitas.

Proses pembentukan suatu pos, akun atau unsur haruslah berdasarkan ketentuan umum dan hukum yang berlaku, didukung oleh bukti-bukti ekstern dan intern yang kuat. Entitas tidak boleh mengakui hak atau kewajiban yang belum terjadi dan atau tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

Manfaat ekonomi yang diharapkan akan mengalir dari atau ke dalam entitas haruslah yang baik dan sah, sesuai ketentuan yang berlaku atau berdasarkan Dharma atau hukum, bukan berdasarkan kecurangan atau Adharma.

Prinsip pengakuan misalnya untuk kas, berlaku ketentuan :

- a. Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh entitas.
- b. Kas dan setara kas diakui berkurang pada saat digunakan oleh entitas.
- c. Kas dan setara kas diakui berkurang pada saat dicadangkan untuk tujuan tertentu.

Pada saat sejumlah kas dicadangkan untuk tujuan tertentu, seperti untuk membayar hutang, membeli aset tetap, maka fungsi sejumlah kas tersebut berubah menjadi tidak likuid lagi.

Dalam Arthashastra Buku II. bab 5. ayat 10 & 11 ditemukan penjelasan yang berkaitan dengan pengakuan uang tunai (kas) sebagai berikut :

Ayat 10, Bendaharawan hendaknya hanya menerima uang yang sah yang telah disahkan oleh *Rupadarsaka*, yaitu pejabat pemeriksa mata uang.

Ayat 11, bila Bendaharawan menerima uang palsu, uang palsu tersebut harus dikurangkan (dipotong) dari jumlah uang yang diterima.

Prinsip pengakuan untuk piutang dagang dan piutang lainnya dirumuskan sebagai berikut :

1) Piutang dagang :

- a. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal yakni telah didukung dengan dokumen penetapan piutang, seperti faktur penjualan, surat pernyataan utang dari pelanggan, dokumen piutang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, dan telah disetujui oleh pembeli dan penjual.

- 70
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi jual-beli tersebut akan mengalir ke dalam entitas.
 - c. Tingkat penyelesaian dari transaksi penjualan tersebut pada pada akhir periode akuntansi dapat diukur dengan andal.
 - d. Beban yang mungkin terjadi untuk menyelesaikan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

2) **Piutang usaha lainnya** diakui pada saat jasa telah diberikan kepada penerima.

3) **Piutang lainnya** diakui pada saat timbulnya hak tagih kepada pihak yang berutang.

Konsep akuntansi Hindu menekankan pada **pengakuan atas suatu pos**, akun dan atau unsur haruslah berdasarkan kebenaran atau bukti yang sah, tidak boleh dilandasi oleh kecurangan. Masalah ini secara jelas d⁵⁰gkapkan dalam Atharvaveda Bk. 12, Adhyaya 1. ayat 63, antara lain menyatakan “**bahwa manusia memohon kepada Ibu Pertiwi (Tuhan Yang Maha Esa) agar dianugrahi kekayaan dan kemakmuran yang bersih dan suci.**

Selanjutnya dalam Yajurveda, Adhyaya XV ayat 48 dijelaskan bahwa manusia selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa kekayaan yang mulia/bersih, bukan yang kotor.

Bunyi selengkapnya Yajurveda, Adhyaya XV. ayat 48, sebagai berikut :
Yajurveda XV.48

“ *Dyumattamam yrayim dah* “

“ Ya Tuhan Yang Maha Esa , berkatilah kami dengan kekayaan yang mulia “.

Veda memberikan petunjuk bahwa bagi mereka yang merencanakan dan atau melakukan sesuatu yang jahat dan tidak baik, entah ia pelaku utama atau orang yang membantunya, akan mendapat sanksi berupa berbagai penyakit dan atau kematian. Pernyataan tersebut tertuang dalam Atharvaveda Bk. 12, Sukta 2, ayat 2.

Atharvaveda 12.2.2.

“ *Aghasamsaduh samsabhyam karenanukarena ca, yaksmam ca sarvam teneto mrtyum ca nirajamasi* “.

“ Orang yang merencanakan sesuatu yang jahat dan tidak baik, entah ia pelaku utama atau orang yang membantunya, akan mendapat sanksi berbagai penyakit dan atau kematian “.

Berkaitan dengan petunjuk Veda dalam berusaha atau berbisnis harus berdasarkan kejujuran atau Dharma maka kondisi tersebut berhubungan erat dengan alat-alat bukti yang dibuat untuk mendukung kegiatan yang dilakukan. Apabila suatu kegiatan yang akan dilakukan dilandasi dengan ketidakjujuran, maka bukti-bukti yang mendukung kegiatan tersebut juga akan dibuat sesuai dengan rencana pelakunya.

Dengan demikian betapa pentingnya arti suatu alat bukti yang dibuat dengan jujur, dalam mendukung suatu kegiatan ekonomi, hal ini telah dianut dan diterapkan dalam ajaran akuntansi Hindu. Alat bukti tersebut semakin tinggi nilainya apabila suatu kasus ekonomi masuk dalam proses pengadilan. Kelengkapan dan kesahan alat bukti merupakan dasar bagi hakim dalam membuat keputusan.

Petunjuk ini dapat diketahui dari Manava Dharmasastra Buku VIII tentang Hukum Sipil dan Pidana, paragraph 44 dan 47, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 44, “ Sebagai seorang pemburu membuntuti menjangan yang luka melalui tetesan darahnya, demikianlah halnya hakim akan mencari dimana letak kebenaran dengan **mempertimbangkan bukti-buktinya** “.

Ayat 47, “ Bila seseorang penghutang mengajukan tuntutan kepada raja (pemerintah), untuk memperoleh kembali uangnya dari siberhutang, hendaknya penghutang dapat membuktikan haknya kepada yang berhutang “.

Selanjutnya, Arthasastra sebagai salah satu sumber hukum ekonomi dan akuntansi Hindu, juga telah menetapkan **prinsip pengakuan** secara jelasterhadap suatu transaksi yang selanjutnya akan mempengaruhi pos, unsur atau akun dalam system pelaporannya. Prinsip pengakuan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah :

- (a) penerimaan uang,
- (b) barang persediaan,
- (c) hasil pertambangan,
- (d) pekerjaan irigasi,
- (e) tanah untuk hutan,
- (f) pendapatan sekarang,
- (g) piutang (penghasilan yang masih terbuka),
- (h) jenis penerimaan,

- (i) pengeluaran,
- (j) saldo.

Penjelasan lebih rinci tentang penerapan prinsip pengakuan dalam Arthasastra, antara lain sebagai berikut :

- (a) bendaharawan (kosadhyaksa=pengelola perbendaharaan) hanya boleh menerima uang yang telah disahkan oleh Rupadarsaka (Pemeriksa Mata Uang). Bilamana ditemukan uang palsu, maka uang palsu tersebut harus dipotongkan dari uang yang

- diterima. Kepada orang yang menyerahkan uang palsu dikenakan denda (Arthasastra Bk II. Bab 5 ayat 10 -11-12)
- (b) Bendahara barang hanya boleh menerima barang yang baru dengan takaran penuh (seperti jagung) (Arthasastra Bk. II. Bab 5 : 13)
 - (c) Yang dimaksud dengan hasil pertambangan terdiri dari emas, perak, berlian, batu permata, mutiara, koral, kerang besar, berbagai jenis logam, garam, bijih-bijih dari bumi, batu karang, dan cairan-cairan dari bumi (Arthasastra Bk II. Bab 6 : 4).
 - (d) Yang masuk dalam kelompok pekerjaan irigasi adalah kebun bunga, kebun buah-buahan, kebun sayur, ladang tanaman basah (Arthasastra Bk. II Bab 6 : 5).
 - (e) Tanah untuk hutan (buatan) adalah tanah untuk peternakan (hewan), taman tempat kijang, hutan yang diambil hasilnya, hutan tempat memelihara gajah (Arthasastra 24. II. Bab 6 : 6).
 - (f) Apa yang masuk dari hari ke hari adalah pendapatan sekarang (Vartamana) (Arthasastra Bk II. Bab 6. 18).
 - (g) Piutang pendapatan adalah apa yang termasuk tahun lalu atau yang dialihkan dari kegiatan lain, adalah penghasilan yang masih terbuka (Paryushita) (Arthasastra Bk 24 Bab 6. : 19)
 - (h) Penerimaan terdiri dari 3 jenis, yaitu penerimaan sekarang, penerimaan yang masih terbuka (piutang penerimaan) dan yang berasal dari sumber-sumber lainnya (Arthasastra Bk. II. Bab 6 : 17).
 - (i) Apa yang dikeluarkan dari hari-kehari adalah pengeluaran kini (Nitya) (Arthasastra 95 II. Bab 6 : 24).
 - (j) Apa yang tersisa setelah perhitungan penghasilan dan pengeluaran dari jumlah pokok penerimaan adalah Saldo (Nivi). Saldo ini diterima dan disimpan (oleh Bendaharawan (Arthasastra Bk. II. Bab 6 : 27)

80

3.2. Prinsip Pengukuran (*Measurement*)

Adalah suatu proses penetapan nilai atau jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur ke dalam laporan (keuangan), seperti ke dalam Neraca dan Daftar Laba Rugi.

16 salnya penerapan prinsip pengukuran untuk kas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal
- b. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

Prinsip pengukuran untuk piutang sebagai berikut :

- 1 a. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas piutang, antara 30 :
 - (1) kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pembayaran.

(3) Kualitas diragukan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan ke dua tidak dilakukan pelunasan.

(4) Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Untuk piutang perusahaan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, piutang dikelompokkan sebagai macet apabila piutang tersebut telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

(5) Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebagai berikut :

189

Tabel Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kualifikasi Piutang	% Penyisihan Piutang
(1)	(2)
1. Lancar	0,5 %
2. Kurang lancar	10 %
3. Diragukan	50 %
4. Macet	100 %

(6) Penyisihan piutang tidak tertagih tidak menggugurkan kewajiban entitas memproses penagihan piutang.

(7) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima, pemberian potongan, dan dihapuskan.

(8) Piutang tak tertagih dihapusbukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(9) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka penerimaannya diakui sebagai pendapatan lainnya.

Dalam kaitan dengan prinsip pengukuran, yang pada intinya berkaitan dengan prinsip pengakuan, Arthasastra mengkaitkannya dengan sanksi yang harus dikenakan kepada pihak yang melakukan kesalahan dalam melakukan pengukuran dan atau pencatatan.

Pada dasarnya Arthasastra menerapkan prinsip pengukuran berdasarkan **nilai historis**, yaitu nilai yang tertuang dalam dokumen atau catatan lain yang sah. Informasi mengenai prinsip pengukuran yang terdapat dalam Arthasastra terlihat dari butir-butir berikut ini :

(1) pencatatan ke dalam pos, akun, rekening harus dilakukan secara berurutan,

serta sesuai dengan data yang ada dalam dokumen pembukuan. Bila terjadi kesalahan dalam pencatatan, apalagi sampai terjadi pencatatan 2 kali, dikenakan denda 12 pana (Arthasastra Bk. II. Bab 7 : 35)

(2) Bendaharawan tidak boleh salah menulis saldo kas atau saldo persediaan. Bila terjadi kesalahan penulisan, dendanya dua kali lipat. Dan bila terjadi kesalahan penulisan, serta sisa uang atau barangnya ditelan (dikorupsi), dendanya 8 kali lipat (Arthasastra Bk. II Bab 7 : 36-37).

Denda yang dikenakan kepada pelaku kesalahan atau kejahatan atau korupsi

sangat pantatis, yaitu harus mengembalikan 8 kali lipat. Hal ini berarti berlaku prinsip memiskinkan para koruptor, atau mereka dikenakan hukuman mati.

3.3. Prinsip Penyajian(Presentation).

4 Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, yang selanjutnya disebut dengan “ Laporan Keuangan “, agar dapat diperbandingkan, baik dengan laporan keuangan lembaga itu sendiri periode sebelumnya, maupun dengan laporan keuangan lembaga lainnya.

Prinsip penyajian yang berlaku umum seperti :

1) 15 Kas

Kas dan setara kas merupakan pos/akun yang paling likuid (lancar) dan **lazim disajikan** dalam urutan pertama unsur aset dalam neraca.

2) 15 Piutang

- a. piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- b. piutang dagang, piutang usaha lain²ya, dan piutang lainnya (piutang pegawai, dsb.nya) disajikan dalam pos yang terpisah.
- c. piutang disajikan sejumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah diku²ngi dengan **Penyisihan PiutangTak Tertagih**.
- d. piutang disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Piutang yang **jatuh tempo** lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

Arthasastra menganut prinsip penyajian yang sama dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) saat ini, antara lain dengan cara menetapkan nama pos, akun atau perkiraan dalam laporan periodik yang dibuat oleh para pemegang perbendaharaan negara. Dengan demikian, persyaratan laporan dapat diperbandingkan dengan laporan periode sebelumnya untuk kegiatan yang sama dapat dipenuhi.

Dalam Buku Arthasastra, L.N. Rangarajan, Pinguin Book, India, 1992 : 246-247, ditemukan penjelasan mengenai **jenis-jenis akun** yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan **sisi penerimaan, sisi pengeluaran** dan **saldo**. Ketiga kelompok kegiatan ditempatkan secara terpisah, sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu. Dalam menyusunnya dapat dilakukan secara tabelaris maupun dalam bentuk T. Tampaknya Kautilya memperkenalkan penyusunan pembukuannya dalam bentuk tabelaris, yaitu memanjang kekanan. Dengan bentuk ini pembaca laporan yang pemahaman akutansinya kurang memadai dengan mudah dapat memahaminya. Bentuk kolom-kolom dari sisi pendapatan, Pengeluaran dan saldo sebagai berikut :

Sisi Pendapatan(Income Side)

Nama-nama pos yang harus dicantumkan dalam laporan pendapatan adalah :

- (1) nama tempat
- (2) periode akuntansi
- (3) tanggal dan waktu penerimaan
- (4) nama buku besar

- (5) pengelompokan berdasarkan tahun berjalan atau periode sebelumnya.
- (6) jumlah yang diterima
- (7) nama yang membayar
- (8) Yang memerintahkan/yang menyetujui.
- (9) diterima oleh
- (10) dicatat oleh.

Sisi Pengeluaran (Expenditures Side)

Nama-nama pos yang harus dicantumkan dalam laporan pengeluaran :

- (1) nama tempat
- (2) periode akuntansi
- (3) tanggal dan waktu pembayaran
- (4) nama buku besar
- (5) rekening lawan pada sisi penerimaan
- (6) peristiwa/kejadian (occasion)
- (7) alasan pembayaran dilakukan (what was paid)
- (8) jumlah yang dibayarkan
- (9) tujuan pembayaran
- (10) pihak yang menyetujui pembayaran
- (12) diserahkan oleh
- (13) diterima oleh

Kolom Saldo (Balance Columns)

Laporan saldo yang dibuat secara periodik memuat kolom-kolom sebagai berikut :

- (1) nama tempat
- (2) tanggal dan waktu
- (3) nama buku besar
- (4) penerimaan yang masih terbuka (dues left outstanding)
- (5) saldo yang diserahkan ke bendaharawan (form in which balance received into the treasury)
- (6) Kualitas (quality)
- (7) jumlah yang diterima
- (8) rincian tempat penyimpanan
- (9) diserahkan kepada (nama pejabat perbendaharaan)

3.4. Prinsip Pengungkapan (disclosure)

1 Prinsip pengungkapan mewajibkan Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah laporan keuangan secara keseluruhan, maka pengungkapannya harus meliputi (1) kebijakan akuntansi yang dianut; dan (2) penjelasan atas pos-pos neraca dan laba Rugi.

Pada bagian kebijakan akuntansi yang dianut, harus memuat penjelasan seperti :

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan apakah menggunakan SAK Yang Berlaku Umum (PABU), SAK-ETAP, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan SAK Syariah. Perlu dijelaskan tingkat ketaatannya dalam menerapkan SAK dimaksud.
- b. Harus disebutkan juga pedoman akuntansi yang lainnya yang berlaku secara spesifik bagi entitas yang bersangkutan, misalnya untuk BPR selain menggunakan SAK-ETAP, harus berpedoman pula pada Pedoman Akuntansi BPR tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Untuk Badan Layanan Umum (BLU) seperti Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berlaku pedoman akuntansi bagi BLU.
- c. Dasar penyusunan pos-pos laporan keuangan apakah menggunakan nilai historis atau menggunakan sistem penilaian yang lain.
- d. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung atau tidak langsung.
- e. dan sebagainya.

Pada penjelasan pos-pos Neraca dan Laba-Rugi, memuat antara lain :

153 Piutang :

- a. rincian jenis dan jumlah piutang
- b. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
- c. jumlah penyisihan piutang yang dibentuk
- d. timbulnya piutang macet dan piutang tak tertagih sehingga merugikan perusahaan.
- e. tatacara penanganan piutang macet dan piutang tak tertagih.

192 Laba-Rugi :

- a. rincian jenis dan jumlah pendapatan
- b. estimasi pendapatan yang belum dapat diakui pada akhir periode pelaporan, seperti piutang jaminan perusahaan yang belum ditagih, dsb.nya.
- c. rincian jenis dan jumlah biaya
- d. estimasi biaya yang belum dapat diakui pada akhir periode akuntansi, seperti klaim dari pelanggan atas adanya kecacatan produk yang telah terjual.

Masalah pengungkapan, Arthasastra juga telah memberikan informasi secara lengkap dimulai sejak pengakuan atas suatu pos, akun atau unsur laporan

keuangan, pengukuran atau pencantuman nilai atas suatu pos atau akun, penjelasan atas pos atau akun dalam laporan keuangan.

Contoh penjelasan/pengungkapan atas suatu pos yang diwajibkan dalam Arthasastra seperti :

Pendapatan :

Bentuk penjelasan yang diperlukan berhubungan dengan akun pendapatan dirumuskan dalam Arthasastra, Bk. II. Bab 6. 13-19 (Made Astana, dkk),

antara lain sebagai berikut :

- (1) harus dijelaskan rencana pendapatan tahun yang bersangkutan
- (2) pendapatan yang diterima pada tahun berjalan yang berasal dari rencana penerimaan pendapatan tahun berjalan.
- (3) penerimaan pendapatan yang berasal dari sisa pendapatan tahun sebelumnya yang belum tertagih.
- (4) pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lainnya, diluar yang direncanakan.
- (5) pendapatan yang berasal dari pengalihan suatu kegiatan, atau karena adanya anggaran pengeluaran yang tersisa atau lebih.

Pengeluaran :

Oleh karena itu prinsip pengungkapan, yaitu memberikan penjelasan atas pos, akun dalam laporan keuangan telah dilakukan oleh Arthasastra.

4. PENERAPAN BEBERAPA PRINSIP AKUNTANSI LAINNYA.

Berikut ini akan ditinjau beberapa prinsip akuntansi lainnya, seperti prinsip (1) Kas; (2) (Akrual); (3) Taat Asas (Konsistensi); (4) Substansi Mengungguli Bentuk; (5) Kontinuitas Usaha/Going Concern.

4.1 Prinsip Kas (Cash Basis).

Suatu metode yang mengakui pemasukan apabila kas diterima dan mengakui pengeluaran apabila kas dibayarkan (Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Akuntansi, 1994 : 79).

Pada dasarnya Arthasastra menganut prinsip akrual, bukan prinsip kas.

Namun demikian Arthasastra memberikan pengertian, yang juga bermakna sebagai penjelasan (disclosure) tentang kas. Dalam Arthasastra Bk. II. Bab 5. ayat 10, 11,12, dijelaskan mengenai kas, yaitu kas adalah uang tunai yang dikuasai oleh Bendaharawan (*Kosadhyaksa*). Uang tersebut harus sudah mendapat pengesahan dari Pemeriksa Mata Uang (*Rupadarsaka*). Apabila diantara uang yang diterima (disimpan) tersebut terdapat/ditemukan uang palsu, maka uang palsu tersebut harus dikeluarkan dan dipisahkan dari jumlah uang yang baik dan sah.

Apabila Bendaharawan mau menerima dan menyimpan uang palsu, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi yang keras, yaitu dapat dikenakan hukuman mati, terutama bila terbukti dengan menyimpan uang palsu tersebut dengan maksud menutupi tindakan korupsi (Arthasastra Bk. II. Bab 5.17).

4.2 Prinsip Akrual (Accrual Basis).

Penjelasan dalam Arthasastra yang memuat beberapa prinsip, prosedur dan

teknik pencatatan dan pelaporan merupakan pedoman akuntansi yang dipergunakan sebagai alat untuk mengelola keuangan Pemerintah Kerajaan Maghada zaman itu, salah satunya adalah “ Prinsip Akrual “.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Juni 2012, hal. 4, dimaknai dengan Dasar Akrual adalah “ **pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan**”.

Dalam Arthasastra, khususnya pada Buku II, Bab 6, penjelasan dari beberapa ayat yang ada bermakna diterapkannya prinsip akuntansi akrual adalah cukup jelas. Uraian system akuntansi yang bermakna ditetapkannya prinsip akrual adalah ditemukannya ungkapan yang berbunyi “ inilah penghasilan yang masih terbuka “ (Arthasastra Bk. II Bab 6.16). Penghasilan yang masih terbuka, maksudnya sama dengan piutang pendapatan. Dalam akuntansi, terminologi terbuka digunakan untuk akun riil, akun yang selalu menunjukkan saldo positif atau Debet dan akun riil merupakan akun neraca. Istilah akun riil dan atau akun nominal hanya ada bila dalam pembukuan digunakan prinsip akrual. Disamping itu ditemukan pula ayat yang menjelaskan tentang adanya perkiraan (akun) pendapatan berupa tagihan, akun biaya (pengeluaran) serta saldo dari masing-masing akun (Arthasastra Bk. II. Bab 6.13).

4.3. Prinsip Taat Asas (Konsistensi)

Pencatatan dalam buku-buku atau akun-akun yang telah ditentukan harus dilakukan tiap hari. Tidak boleh ada penundaan. Hal ini disebabkan semua

³⁹ Bendaharawan pengelola uang diwajibkan membuat laporan secara harian, lima harian, dua minggu bulanan, empat bulanan dan tahunan. Semua

Benharawan harus menaati ketentuan tersebut, bila mereka tidak menaati dikenakan sanksi yang berat (Arthasastra Bk. II. Bab 7 ayat 30). Laporan yang dibuat oleh para bendaharawan tersebut diperiksa oleh para akuntan kerajaan. Tujuan dari penerapan prinsip taat asas adalah agar laporan yang dibuat dapat diperbandingkan, yaitu untuk satu entitas, agar laporannya dapat diperbandingkan antar periodenya, dan juga untuk entitas yang sama atau serupa dapat pula diperbandingkan perkembangan dan jenis-jenis kegiatannya.

4.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (Substants over Form)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK Juni 2012 : 6) memberikan penjelasan yang cukup tentang Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk. Penekanannya adalah pada penyajian yang jujur atas suatu transaksi serta peristiwa dalam laporan keuangan.

Jika suatu transaksi serta ²⁸ peristiwa dimaksudkan untuk disajikan dengan jujur dalam laporan keuangan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk

hukumnya. Misalnya, suatu entitas mungkin menjual suatu aset kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga secara dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak pembelinya. Namun demikian, terdapat persetujuan yang memastikan bahwa entitas dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam keadaan seperti ini, pelaporan penjualan menjadi tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat. Sebagai contoh substansi mengungguli bentuk adalah dalam hal **sewa beli modal (capital leasing)**. Capital leasing, sesuai kontraknya bukan jual beli putus, tetapi dalam kontrak ada persyaratan bahwa penyewa pada akhir kontrak dapat memilih untuk membeli asset tersebut. Walaupun belum merupakan jual beli putus, namun sipenyewa secara substansi dan realitas ekonomi telah menikmati hasil dari asset tersebut, sehingga dapat dicatat sebagai asset milik perusahaan, apalagi pada akhir kontrak pembeli memutuskan untuk membeli asset tersebut. Berkenaan dengan prinsip substansi mengungguli bentuk, dikaitkan dengan bunyi ayat-ayat dalam Arthashastra, maka ditemukan beberapa ayat yang mewajibkan raja memberikan hadiah kepada para pihak yang berjasa kepada kerajaan, atau menghukum mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Penyerahan hadiah kepada mereka-mereka yang dianggap berhak belum tentu disertai dengan dokumen yang lengkap, demikian pula halnya dengan penjatuhan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran belum tentu terdokumentasikan dengan lengkap pula. Walaupun tidak terdokumentasikan dengan lengkap, bukan berarti kewenangan raja menjadi tidak dapat dilaksanakan. Ilustrasi dari beberapa kewenangan raja tersebut di atas sebagai berikut :

- 1). Ia (raja) hendaknya menghendahkan (tanah) kepada pendeta, guru, penasehat dan Brahmana ahli Veda. Hadiah yang diberikan tersebut bebas pajak dan dapat diwariskan.
Hadiah juga diberikan kepada **kepala departemen, akuntan, para Gopa, Sthanika**, Pelatih Gajah, **Dokter**, Pelatih Kuda, dan kurir.
Hadiah yang diberikan oleh raja ini tidak boleh dijual atau digadaikan (dihipotikkan) (Arthashastra, Bk. II, Bab 1. 7)
- 2). Ia (raja) hendaknya mengambil ladang dari mereka yang tidak menggarapnya dan memberikannya kepada orang lain yang mau mengerjakan (Arthashastra, Bk. II, Bab 1. 10)
- 3). Raja hendaknya membebaskan dari pajak suatu daerah yang dirusak

oleh tentara musuh atau binatang penghuni hutan, atau penduduknya terkena penyakit atau epidami.
Raja melarang penduduknya untuk berolah raga dengan biaya mahal (Arthashastra Bk II, Bab 1. 36)
Tidak ditemukan petunjuk mengenai jenis olah raga dengan biaya Mahal yang dilarang oleh raja. Dewasa ini, jenis olah raga yang dikategorikan berbiaya mahal antara lain bermain golf.

4.5. Prinsip Kontinuitas Usaha (Going Concern).

Penggunaan prinsip ini dimaknai dengan entitas yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan demikian tersedia waktu untuk menyelesaikan usaha, melakukan kontrak-kontrak dan perjanjian dagang lainnya.

Prinsip usaha yang dianut oleh Arthasastra adalah kontinuitas usaha (going concern), hal ini dikuatkan oleh adanya pernyataan bahwa Bendahara Negara harus mengetahui tentang penerimaan dari luar dan dari dalam bahkan **setelah seratus tahun**, sehingga bila ditanya, ia tidak ragu mengenai jumlah penerimaan, pengeluaran, saldo uang yang ada (Arthasastra, Bk. II, Bab 5. ayat 22)

Pernyataan di atas sebagai ciri Kautilnya dalam menyusun konsep usahanya adalah usaha yang berkelanjutan dengan batas waktu yang tidak terbatas. Dalam Arthasastra ditekankan bahwa semua dokumen keuangan harus disimpan selama kurang lebih 100 tahun, dan dari dokumen tersebut, bila dilakukan pemeriksaan, masih dapat diketahui kegiatan perusahaan pada 100 tahun sebelumnya.

5. PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

5.1). Pembentukan atau Pendirian Perusahaan

Pemerintah kerajaan dan juga pihak swasta dapat mendirikan suatu badan usaha atau badan-badan sejenis lainnya untuk kepentingan bisnis maupun non bisnis.

Pemerintah kerajaan mendirikan beberapa badan atau jenis usaha seperti badan yang mengurus pelabuhan laut, mengurus padang rumput untuk gembala ternak, kebun bunga, kebun buah-buahan, kebun sayur, hutan untuk memelihara gajah, taman tempat memelihara kijang (Arthasastra, Buku II, bab 6, ayat 5 & 6). Dibentuk juga badan usaha bidang pertambangan, seperti tambang emas, perak, berlian, batu permata, dan bijih-bijih dari perut bumi. Badan usaha ini sekaligus mengolah hasil tambang tersebut menjadi barang jadi yang dapat meningkatkan nilai tambah, dan selanjutnya diberi kewenangan untuk menjualnya (Arthasastra, Buku II, bab 12 ayat 1, 18, 19). Disamping itu dibentuk pula Badan Usaha dibidang hasil laut seperti budidaya mutiara, kerang besar (Arthasastra, Buku II, bab 6, ayat 4).

Khusus untuk hutan milik pemerintah, pemeliharaan, pengawasan serta pemanfaatannya diatur oleh Direktur Hasil Hutan. Semua hasil hutan harus diolah

sendiri agar memberikan nilai tambah yang maksimal, yaitu dengan dibangunnya pabrik-pabrik pengolah hasil hutan (Arthasastra Buku II, bab 17, ayat 2)

Pendirian Badan Usaha milik pemerintah maupun milik swasta harus mengikuti semua ketentuan formal atau berdasarkan hukum yang berlaku, dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara umum. **Modal** atau kekayaan yang masuk dalam kelompok **Ekuitas** yang ditempatkan dalam Badan Usaha tersebut harus dicatat dengan tepat supaya dapat dianggap sah menurut hukum (Arthasastra Buku III, bab 1, ayat 15). Apabila terjadi kasus hukum, dokumen pendirian perusahaan yang terakhir yang dianggap sah. Perjanjian tertulis antara para pihak juga dijadikan dasar untuk menentukan sah dan tidak sahnya suatu transaksi (Arthasastra Buku III, bab 1 ayat 16).

Prinsip akuntansi benar-benar ditegakkan dalam menjalankan suatu usaha, baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta. Penegakan hukum yang berlaku secara umum pun dilaksanakan tanpa pilih kasih. Penegakan hukum tanpa tebang pilih dapat diikuti dari sebuah pernyataan, yang menyatakan bahwa “ ketertiban dalam dunia ini hanya dapat dijaga dengan baik apabila pemerintah menjalankan hukum dengan adil, kepada warga negara yang bersalah, kepada musuh-musuh pemerintah dan kepada putra dan keluarga raja “ (Arthashastra Buku III, ayat 41, 42).

5.2. Pembubaran Perusahaan.

Dalam Arthashastra Buku II, bab 6, ditemukan penjelasan bahwa kegiatan yang bersifat non bisnis dan usaha bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dapat dibubarkan apabila sudah tidak memberikan manfaat seperti yang direncanakan. Perusahaan yang terus-menerus mengalami kerugian juga dapat dibubarkan. Perusahaan yang terus merugi, Arthashastra menyebut dengan **perusahaan sakit**, harus dihentikan usahanya.

Apabila dari pembubaran suatu kegiatan atau usaha diperoleh kelebihan dana, maka kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada yang memberikan dana tersebut (Arthashastra, Buku II, Bab 6, ayat 21).

Dalam dunia modern saat ini, semua jenis usaha yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bilamana tidak diperlukan lagi, atau terus-menerus merugi dapat dibubarkan. Dari segi hukum positif, pembubaran atas kegiatan atau usaha yang pendiriannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pembubarannya juga harus berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga mengatur dari sisi akuntansi tentang prosedur akuntansi yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya. Ketentuan dimaksud dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 58 (Revisi 2003), tentang OPERASI DALAM PENGHENTIAN. PSAK No. 58 ini dimuat dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK), per 1 September 2007, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Berikut ini diberikan sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “ Operasi Dalam penghentian.

Dalam paragraph 03, butir a dijelaskan antara lain :

Operasi dalam penghentian didasari atas suatu rencana tertentu, yaitu :

- 56
- (1) dilepas secara keseluruhan, misalnya dengan menjual komponen perusahaan tersebut dalam suatu transaksi tunggal, dengan pemisahan usaha (demerger) atau pengalihan kepemilikan komponen perusahaan ke pihak lain;
 - (2) dilepas sebagian demi sebagian kepemilikan komponen perusahaan kepada pihak lain.
 - (3) diakhiri operasinya dengan meninggalkan kegiatan usaha.

Dalam Arthashastra, yang dimaksud dengan Penghentian Operasi Perusahaan adalah diakhirinya operasi perusahaan dengan meninggalkan kegiatan usahanya dilandasi berbagai alasan, seperti tujuan pendirian perusahaan sudah tercapai atau perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus.

51

Komponen Laporan Keuangan sektor finansial yang lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2012, tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraph 11, terdiri dari :

23

- 1) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi komprehensif
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas,
- 5) Catatan atas laporan keuangan
- 6) Laporan posisi keuangan pada awal periode dalam bentuk komparatif, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menghimpun dana publik signifikan, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), dianjurkan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Mei 2009 dan dinyatakan berlaku sejak tahun 2010.

Ketentuan-ketentuan pada Bab dan atau paragraph SAK-ETAP ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang berlaku bagi perusahaan yang menghimpun dana publik signifikan, antara lain berkaitan dengan masalah perlakuan akuntansi atas aset keuangan, yang diatur dalam PSAK 50, 55 dan 60.

Yang termasuk dalam kelompok aset keuangan sebagaimana dijelaskan pada lampiran PSAK 50 (PA04) adalah :

1

- (a) piutang dagang dan utang dagang
- (b) wesel tagih dan wesel bayar
- (c) pinjaman diberikan dan pinjaman diterima; dan
- (d) piutang obligasi dan utang obligasi.

166

Komponen laporan keuangan menurut SAK-ETAP tidak jauh berbeda dengan SAK yang berlaku bagi perusahaan yang publik atau perusahaan yang

menghimpun dana publik signifikan. Masalah komponen laporan keuangan lengkap SAK-ETAP merumuskannya dalam Bab 3.12 sebagai berikut :

1

- a. Neraca
- b. Laporan Laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan :
 - (i) seluruh perubahan dalam ekuitas)
 - (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik.
- d. Laporan arus kas; dan

e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Laporan keuangan juga merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada yang bersangkutan.

Agar tujuan umum laporan keuangan (PSAK 1.10, 2012) sebagai sarana tanggungjawaban manajemen dapat dicapai, maka laporan tersebut harus menyajikan informasi mengenai kegiatan entitas, meliputi :

- 1) Asset;
- 2) Liabilitas;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- 5) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan
- 6) Arus kas.

Berkenaan dengan prinsip akuntansi yang harus dipatuhi, semua Standar Akuntansi Keuangan mengatur beberapa prinsip umum yang lazim dianut dalam melakukan pencatatan (pembukuan) suatu transaksi keuangan. Salah satu prinsip yang dikenal dengan **Prinsip Perlakuan Akuntansi** seperti dijelaskan di atas, dengan tujuan untuk menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

PERTANYAAN UNTUK BAHAN DISKUSI

P. 7.1. Jelaskan yang dimaksud dengan prinsip kas dalam sistem akuntansi kontemporer.

P. 7.2. Jelaskan pengertian prinsip akuntansi akrual dalam sistem akuntansi kontemporer.

P. 7.3. Agama Hindu percaya akan hukum karma, yang merupakan salah satu landasan bagi penganut ajaran Hindu. Sebutkan 3 jenis unsure dari hukum karma tersebut.

P.7.4 Jelaskan makna dari Pararabda Karma, dan kaitannya dengan konsep kas atau konsep akrual dalam system akuntansi kontemporer.

P.7.5. Jelaskan makna dari Sancita Karma, dan bagaimana akitannya dengan kosnep kas atau konsep akrual dalam system akuntansi kontemporer.

- P.7.6. Jelaskan makna dari Kriyamana Karma, dan bagaimana kaitannya dengan konsep kas dan akrual dalam system akuntansi kontemporer.
- P.7.7. Harap Saudara gambarkan dalam sebuah bagan agar tampak dengan jelas hubungan antara Pararabda Karma, Sancita Karma dan Kriyamana Karma dengan prinsip kas dan akrual dalam system akuntansi kontemporer.
- P.7.8. Apakah hukum karma memerlukan pengakuan dari manusia. Jika ada sekelompok manusia di jagat raya ini tidak mengakui adanya hukum karma itu, apakah kepada yang bersangkutan berlaku hukum karma itu. Jelaskan pendapat Saudara dari sisi ajaran Hindu.
- P.7.9. Bila ada ajaran agama yang tidak mengakui adanya hukum karma, apakah hukum karma tetap berlaku bagi penganut ajaran tersebut. Jelaskan pendapat Saudara ditinjau dari ajaran Hindu.
- P.7.10. Jelaskan apakah prinsip pengakuan juga diterapkan dalam akuntansi Hindu.
- P.7.11. Tunjukkan ayat-ayat Weda yang Saudara ketahui berkaitan dengan prinsip Pengakuan dalam akuntansi.
- P.7.12. Jelaskan pengertian dari unsur perlakuan akuntansi berikut :
- 1) Pengakuan
 - 2) Pengukuran
 - 3) Penyajian, dan
 - 4) Pengungkapan.
- P.7.13. Dalam pelaksanaannya, apakah hukum karma juga menerapkan atau tidak menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Jelaskan pendapat Sasudara.
- P.7.14. Dalam sistem akuntansi kontemporer dikenal prinsip taat asas. Apakah makna dari prinsip taat asas tersebut. Dalam akuntansi Hindu apakah juga diterapkan prinsip taat asas dimaksud.
Tunjukkan ayat dalam Veda atau dalam buku-buku lainnya serta dalam Arthasastra yang secara spesifik berarti telah menganut prinsip taat asas dimaksud.
- P.7.15. Dalam sistem akuntansi kontemporer dikenal prinsip going concern (keberlanjutan usaha). Apakah makna dari prinsip going concern tersebut. Dalam akuntansi Hindu apakah juga diterapkan prinsip going concern tersebut.
Tunjukkan ayat dalam Veda atau dalam buku-buku lainnya serta dalam Arthasastra yang secara spesifik berarti telah menganut prinsip going concern dimaksud.
- P.7.16. Dalam sistem akuntansi Hindu dikenal prinsip pendirian usaha. Apakah makna dari prinsip pendirian usaha tersebut. Dalam akuntansi kontemporer apakah juga diterapkan prinsip pendirian usaha tersebut.
Tunjukkan ayat dalam Veda atau dalam buku-buku lainnya serta dalam Arthasastra yang secara spesifik berarti telah menganut prinsip pendirian usaha dimaksud.
- P.7.17. Dalam sistem akuntansi Hindu dikenal prinsip pembubaran usaha. Apakah makna dari prinsip pembubaran usaha tersebut. Dalam akuntansi kontemporer apakah juga diterapkan prinsip pembubaran usaha tersebut.
Tunjukkan ayat dalam Veda atau dalam buku-buku lainnya serta dalam Arthasastra yang secara spesifik berarti telah menganut prinsip pembubaran usaha dimaksud.
- P.7.18. Dalam Arthasastra antara lain dinyatakan bahwa dokumen keuangan yang dibuat oleh Bendaharawan harus dapat dijadikan sebagai alat bukti sampai dengan 100 tahun. Jelaskan makna dari pernyataan dimaksud.
- P.7.19. Jelaskan ketentuan kewajiban penyimpanan bukti berdasarkan peraturan berikut :
- 1) Hukum Perdata/Hukum Dagang
 - 2) Undang-Undang Perpajakan
 - 3) Undang-Undang Akuntan Publik No. 5 tahun 2011

- P.7.20. Dalam system akuntansi kontemporer dikenal adanya prinsip akuntansi “ substansi mengungguli bentuk/ substance over form “. Jelaskan makna dari prinsip tersebut. Apakah dalam akuntansi Hindu juga diterapkan prinsip substansi mengungguli bentuk itu.
- P.7.21. Jelaskan landasan (filosofi) dari penyusunan Neraca menurut Veda.
- P.7.22. Jelaskan kenapa kekayaan pertama kali diletakkan ditangan kanan, bukan ditangan kiri menurut Veda. Apakah fungsi tangan kiri menurut Veda ?
- P.7.23. Jelaskan landasan (filosofi) dari penyusunan Daftar Laba Rugi menurut Veda.
- P.7.24. Daftar Neraca dan daftar Laba-Rugi dapat disusun menurut model T dan model stafel. Menurut Sdr. yang manakah yang lebih baik. Jelaskan jawaban Saudara.

AKUNTANSI HINDU

³⁷ Matrasparsas tu kaunteya sitoshna sukha-dukha-dah agamapayino nityas tams titikshasva bharata (Bg. II. 14)

Wahai putra Kunti, suka dan duka muncul untuk sementara dan hilang sesudah beberapa waktu, bagaikan mulai dan berakhirnya musim dingin dan musim panas. Hal-hal itu timbul dari penglihatan indria, dan seseorang harus belajar cara mentolerir hal-hal itu tanpa goyah, wahai putra keluarga Bharata (Bg. II. 14)

BAB VIII

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH SESUAI ARTHASASTRA

1. SUSUNAN PEMERINTAHAN KERAJAAN MAGADA (INDIA), PERIODE 321 – 296 SEBELUM MASEHI

Susunan pemerintahan kerajaan Magadha, India, pada masa Kautilya (Canakya) mengabdikan dirinya pada kerajaan tersebut, sudah sangat maju, karena pada struktur pemerintahan kerajaan ternyata raja dibantu oleh 33 (tiga puluh tiga) departemen yang dipimpin oleh seorang menteri.

Dapat dibandingkan dengan susunan departemen pada Pemerintah Republik Indonesia saat ini, Juli 2014, menjelang akhir dari pemerintahan Presiden Bambang Yudoyono, periode ke II, yang disebut dengan **Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (periode 2009 – 2014)**, dengan jumlah Menteri sebanyak 34, di dalamnya termasuk 3 (tiga) Menteri Koordinator Bidang, yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas dari beberapa kementerian tertentu, dan 1 (satu) Menteri Sekretaris Negara. Disamping itu diangkat pula 4 (empat) Pejabat Tinggi Setingkat Menteri. Jumlah kementerian pada Pemerintah Republik Indonesia per Juli 2014 akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Dalam buku Arthashastra, oleh L.N. Rangarajan, 1992, Bab VII.i, 275-276), disebutkan jumlah Departemen dalam pemerintahan kerajaan Magadha sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Departemen. Pimpinan Departemen disebut dengan “ **Adhyaksha** “ atau **Menteri**.

Departemen-Departemen yang dirancang dan dibentuk oleh Kautilya, disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan pada zamannya. Bila dibandingkan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini jenis-jenis Departemen yang dibentuk oleh Kautilya terbilang sudah sangat modern.

Masalah penetapan banyaknya departemen dengan menterinya, banyaknya penasehat raja yang diperlukan oleh kerajaan, ditemukan dialog antara Kautilya dengan beberapa penasehat raja lainnya mengenai penentuan hal tersebut di atas. Penasehat raja lainnya seperti penganut “ Brhaspati “, mengatakan memerlukan 16 penasehat, “ Usana “ mengatakan memerlukan 20 penasehat, dan “ Manu “ mengatakan 12 penasehat.

Sedangkan menurut Kautilya jumlah departemen dan penasehat raja dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kapasitas dari masing-masing pejabat yang diberi jabatan tersebut (Arthashastra, R.P. Kangle, Bk. I, Bab 15, par. 47-50).

Hal ini berarti Kautilya berpegang kepada prinsip kebutuhan dan kapasitas atau kemampuan dari para pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan tersebut.

Beberapa Departemen yang dibentuk oleh Kautilya, ternyata masih dibutuhkan dan berlaku sampai saat ini, khususnya untuk Indonesia, seperti Departemen Keuangan, yang disebut dengan Menteri Pengawasan Perbendaharaan (Kosashadhyaksha), Departemen Pertambangan, disebut dengan Menteri Pengawasan Pertambangan (Khanyadhyaksha), Kementerian Agama, disebut dengan Menteri Urusan Candi (Devatadhyaksha).

Dibentuk pula Departemen Pengendalian Pertambangan dan Metalurgi (Akaradhyaksha), mungkin dengan pertimbangan bahwa hasil pertambangan dan pengolahan hasil pertambangan mempunyai peran penting bagi Negara, seperti untuk membuat

perlengkapan pertahanan Negara (sejata), alat-alat pertanian, alat-alat perhubungan darat dan laut, dan sebagainya.

Dalam urusan perekonomian, peran Negara sangat penting dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa untuk masyarakatnya, maka dibentuk kementerian urusan Perusahaan Negara (Panyadhyaksha). Usaha-usaha sektor swasta juga dibina dan dilindungi agar tetap berkembang, berjalan bersama-sama dengan perusahaan Negara memajukan perekonomian masyarakatnya. Untuk mengawasi dan mengendalikan usaha-usaha sektor swasta, pemerintah membentuk Kementerian Urusan Perdagangan Privat (Samsthadhyaksa)

Nama-nama Departemen yang ada seperti tercatat dalam tabel berikut :

Tabel VIII.1

**Daftar Nama-Nama Departemen / Kementrian
Pada Kerajaan Magadha, India, 300 Tahun Sebelum Masehi**

No. Urut	N a m a D e p a r t e m e n		
	Bahasa Sansekerta	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
1	Nagavanadhyaksha	Chief Elephant Forester	Menteri Urusan Gajah Rimba.
2	Kosashadhyaksha	Chief Superintendent of the Treasury	Menteri Pengawasan Perbendaharaan
3	Akaradhyaksha	Chief Controller of Mining and Metallurgy	Menteri Pengendalian Pertambangan dan Metalurgi
4	Lohadhyaksha	Chief Superintendent of Metals	Menteri Pengawasan Barang Logam
5	Lakshanadhyaksha	Chief Master of the Mint	Menteri Urusan Percetakan Uang Logam
6	Khanyadhyaksha	Chief Superintendent of the Mines	Menteri Pengawasan Pertambangan
7	Lavanadhyaksha	Chief Salt Commissioner	Menteri Urusan Pergaraman
8	Suvarnadhyaksha	Chief Superintendent of Precious Metals dan Jewellry	Menteri Pengawasan Logam Mulia dan Perhiasan
9	Koshtagaradhyaksha	Chief Superintendent of Warehouses	Menteri Urusan Pergudangan
10	Panyadhyaksha	Chief Controller of State Trading	Menteri Urusan Perusahaan Negara
11	Kupyadhyaksha	Chief Superintendent of Forest Produce.	Menteri Pengawasan Produksi Hasil Hutan
12	Ayudhagaradhyaksha	Chief of Ordnance	Menteri Urusan Alat Perang
13	Pauthavadhyaksha	Chief Controller of Weights and Measures	Menteri Pengawasan Ukuran dan Timbangan
14	Manadhyaksha	Chief Surveyor and Timekeeper	Menteri Urusan Ukuran dan Penjaga Waktu
15	Sulkadhyaksha	Chief Controller of Customs	Menteri Pengawasan Bea

		and Octroi	dan Cukai
16	Sutradhyaksha	Chief Textile Commissioner	Menteri Urusan Sandang (Tekstil)
17	Sitadhyaksha	Chief Superintendent of Crown Lands	Menteri Pengawasan Tanah Negara (Kerajaan)
18	Suradhyaksha	Chief Controller of Alcoholic Beverages	Menteri Pengawasan Minuman Beralkohol
19	5 Sunadhyaksha	Chief Protector of Animals and Controller of Animal Slaughter	Menteri Pencegahan (keluar masuk) Hewan dan Pengawasan Pemotongan Hewan
20	5 Ganikadhyaksha	Chief Controller of Entertainers (Courtesans, Brothels, Prostitutes and other Entertainers)	Menteri Pengawasan Hiburan (Pelacuran, Germo, pelacur dan jenis hiburan lainnya)
21	Navadhyaksha	Chief Controller of Shipping	Menteri Urusan Pengawasan Perkapalan
22	Pattanadhyaksha	Chief Controller of Ports and Harbours	Menteri Pengawasan Pelabuhan dan Kesahbandaran
23	Go-adhyaksha	Chief Superintendent of Crown Herds	Menteri Pengawasan Gembala Ternak Kerajaan
24	Asvadhyaksha	Chief Commander of Cavalry	Menteri Komando (Urusan) Kavaleri
25	Hasthyadhyaksha	Chief Commander of Elephant Corps	Menteri Komando (Urusan) Pasukan Gajah
26	Rathadyaksha	Chief Commander of Chariot Corps	Menteri Komando (Urusan) Kereta Pertempuran
27	Patthyadhyaksha	Chief Commander of Infantry	Menteri Komando (Urusan) Infanteri
28	Mudradhyaksha	Chief Passport Officer	Menteri Urusan Paspor.
29	Vivatadhyaksha	Chief Controller of Pasture Lands	Menteri Pengawasan Perjalanan (Darat).
30	Dhyutadhyaksha	Chief Controller of Gambling	Menteri Pengawasan Perjudian
31	Samsthadhyaksha	Chief Controller of Private Trade	Menteri Urusan Perdagangan Privat (Suwasta)
32	Bandanagradyaksha	Chief Superintendent of Jails	Menteri Urusan Pengawasan Penjara
33	Devatadhyaksha	Chief Superintendent of Temples	Menteri Urusan Candi (Tempat Ibadah)

Sumber : L.N. Rangarajan, The Arthasastra, 1992, VII.i, 275-276.

Selanjutnya, 33 (tiga puluh tiga) Departemen yang ada dikelompokkan sesuai jenis tugas dan fungsinya menjadi 8 (delapan) Bidang, yaitu :

1) Bidang Pertahanan Negara (6 Kementrian = 18,19%)

1.1) Menteri Komando Infanteri (27)

- 1.2) Menteri Komando Kavaleri (24)
- 1.3) Menteri Urusan Kereta Pertempuran (26)
- 1.4) Menteri Komando Pasukan Gajah (25)
- 1.5) Menteri Urusan Alat Perang (12)
- 1.6) Menteri Urusan Gajah Rimba (1)
Menteri Urusan Gajah Rimba, bertugas menyediakan gajah-gajah bagi
Kementrian Komando Pasukan Gajah.

2) Bidang Keuangan (2 Kementrian = 6,06%)

- 2.1) Menteri Pengawasan Perbendaharaan (2)
- 2.2) Menteri Urusan Pergudangan (gudang uang & barang) (9)

3) Bidang Pertanian, Kehutanan dan Gudang Sandang dan Pangan (4 Kementrian = 12,12%)

- 3.1) Menteri Pengawasan Tanah Negara (Kerajaan) (17)
- 3.2) Menteri Pengawasan Produksi Hasil Hutan (11)
- 3.3) Menteri Urusan Gembala Ternak Kerajaan (Peternakan) (23)
- 3.4) Menteri Urusan Pencegahan Keluar Masuk dan Pematangan Hewan (19).

4) Bidang Perindustrian (7 Kementrian = 21,21%)

- 4.1) Menteri Urusan Sandang (Bidang Pertekstilan) (16)
- 4.2) Menteri Pengawasan Pertambangan dan Metalurgi (3)
- 4.3) Menteri Pengawasan Barang Logam (4)
- 4.4) Menteri Urusan Percetakan Uang Negara (5)
- 4.5) Menteri Pengawasan Pertambangan (6)
- 4.6) Menteri Urusan Pergaraman (7)
- 4.7) Menteri Urusan Logam Mulia dan Perhiasan (8)

5) Bidang Perdagangan dan Transfortasi (7 Kementrian = 21,21%)

- 5.1) Menteri Urusan Perusahaan Negara (10)
- 5.2) Menteri Urusan Perusahaan Privat (Suwasta) (31)
- 5.3) Menteri Pengawasan Ukuran dan Timbangan (13)
- 5.4) Menteri Urusan Pengawasan Perkapalan (21)
- 5.5) Menteri Pengawasan Pelabuhan dan Kesyahbandaran (22)
- 5.6) Menteri Pengawasan Bea dan Cukai (15)
- 5.7) Menteri Urusan Ukuran dan Penjaga Waktu (14)

6) Bidang Pengawan Hiburan (3 Kementrian = 9,09%)

- 6.1) Menteri Pengawasan Tempat Hiburan, Germa, Pelacuran (20)
- 6.2) Menteri Pengawasan Minuman Berhalkohol (18)

6.3) Menteri Pengawasan Perjudian (30)

7) Bidang Perjalanan (2 Kementrian = 6,06 %)

7.1) Menteri Pengawasan Perjalanan (29)

7.2) Menteri Urusan Paspor (28)

8) Bidang Lainnya (2 Kementrian = 6,06%)

1) Menteri Pengawasan Urusan Penjara (32)

2) Menteri Urusan Candi dan Tempat Ibadah (33)

Uraian mengenai tanggung jawab, tugas dan fungsi dari masing-masing Departemen dan organisasi yang ada dibawah Departemen dijelaskan dalam buku Arthasastra, Rangarajan, 1992, Bab VII.ii

Dijelaskan pula tentang gaji menteri (adhyaksha) berkisar antara 1000, 4000 dan 12.000 pana pertahun. Penentuan besarnya gaji menteri ini berdasarkan pertimbangan berat ringannya tugas-tugas yang diemban oleh menteri yang bersangkutan. Gaji menteri bidang perindustrian 12.000 pana per tahun, dan gaji menteri bidang pertanian, kehutanan 4000 pana pertahun.

2. SUSUNAN DEPARTEMEN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA, PERIODE 2009-2014.

Sebagai pembanding, berikut ini disajikan susunan Departemen dalam Pemerintah Republik Indonesia, Periode 2009-2014 dikenal dengan sebutan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, terdiri dari :

1) J. 42) atan Menteri Koordinator sebanyak 3 buah, yaitu :

(1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

(3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2) Menteri Sekretaris Negaradan Menteri yang memimpin Departemen, sebanyak 31 buah, terinci sebagai berikut :

(1) Menteri Sektaris Negara

(2) Menteri Dalam Negeri

(3) Menteri Luar Negeri

(4) Menteri Pertahanan

(5) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(6) Menteri Keuangan

(7) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(8) Menteri Perindustrian

(9) Menteri Perdagangan

(10) Menteri Pertanian

(11) Menteri Kehutanan

(12) Menteri Perhubungan

(13) Menteri Kelautan dan Perikanan

(14) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(15) Menteri Pekerjaan Umum

(16) Menteri Kesehatan

Birokrasi

- 12 (17) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- (18) Menteri Sosial
- (19) Menteri Agama
- (20) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- (21) Menteri Komunikasi dan Informatika
- (22) Menteri Riset dan Teknologi
- (23) Menteri Koperasi dan Usaha Usaha Kecil dan Menengah
- (24) Menteri Lingkungan Hidup
- (25) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (26) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
- (27) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
- (28) Menteri 12 perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (29) Menteri Badan Usaha Milik Negara
- (30) Menteri Perumahan Rakyat
- (31) Menteri Pemuda dan Olahraga

Jabatan Setingkat Menteri sebanyak 4 buah, sebagai berikut :

- 12 (1) Jaksa Agung
- (2) Panglima Tentara Nasional Indonesia
- (3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Berdasarkan data jabatan Kementerian tersebut di atas, pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, terdapat 38 jabatan Kementerian, yaitu : 3 Jabatan Menteri Koordinator, 31 Jabatan Menteri memimpin Departemen dan 4 Jabatan setingkat menteri.

Berdasarkan data Kementerian pada Kerajaan Mangada, India, yang terjadi sekitar **2414 tahun yang lalu**, dengan jumlah Kementerian sebanyak **33 buah**, didalamnya tidak terdapat istilah Menteri 97rdinator dan Jabatan Setingkat Menteri sebagaimana jabatan Menteri yang ada pada Kabinet Bersatu Jilid II, Republik Indonesia, periode 2009-2014, dengan jumlah **Kementerian sebanyak 38 buah**. Jadi terdapat perbedaan sebanyak 5 Kementerian pada Kabinet Bersatu Jilid II, Republik Indonesia.

Yang cukup menarik, pada zaman Kerajaan Mangadha, yang berlangsung kurang lebih sekitar 2.400 tahun yang lalu, Kementerian-Kementerian yang dibentuk

sebagian besar Kementerian yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah sudah berkembang dengan pesat, sehingga dipandang perlu dibentuk **Kementerian** yang mengurus **Perusahaan Swasta** dan **Perusahaan Negara**. Hal ini berarti pada zaman tersebut Pemerintah Kerajaan sangat menaruh perhatian kepada sektor ekonomi, dengan tujuan agar dapat mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya.

Disamping memperhatikan kesejahteraan ekonomi rakyatnya, pemerintah kerajaan juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan rohani rakyatnya, hal ini terbukti dengan adanya "*Devatadhyaksha*" (**Kementerian Urusan Candi/Tempat Ibadah**).

Kegiatan yang dilakukan oleh kerajaan dalam menggerakkan roda perekonomian **sektor Suasta** dan **sektor Negara**, adalah sejalan dengan prinsip yang dianut oleh kerajaan, sebagaimana tertuang dalam The Kautilya Arthashastra (Buku I Bab 19, ayat 34 & 35 (Astana, Made, Penterjemah) yang berbunyi sebagai berikut :

Buku I, Bab 19, Paragraf 34

Pada kebahagiaan rakyatnya letak kebahagiaan raja, dan apa yang bermanfaat bagi rakyatnya juga bermanfaat bagi dirinya sendiri (raja). Apa yang berharga bagi dirinya sendiri (raja), belum tentu bermanfaat bagi Negara, tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya adalah bermanfaat bagi dirinya (raja).

Buku I, Bab 19, Paragraf 35

Oleh karena itu, raja hendaknya selalu aktif memajukan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai akar kesejahteraan adalah melakukan kegiatan (bekerja), dan bila tidak melakukan kegiatan (bekerja) akan menimbulkan malapetaka (kemiskinan).

3. SEKILAS MENGENAI BRAHMANA KAUTILYA

Kerajaan Magadha, dengan rajanya Chandragupta adalah tempat Kautilya mengabdikan jabatan sebagai Menteri dan merangkap sebagai penasihat dari raja Chandragupta. Sesuai penjelasan buku The Kautilya, Arthashastra, 1992, disusun oleh L.N. Rangarajan, halaman 4-6, bahwa Kerajaan Magadha sebelum diambil alih oleh raja Chandragupta dipimpin oleh seorang raja bernama Dhana-Nanda yang kaya raya. Namun demikian raja ini kasar, arogan dan pelit. Raja Dhana-Nanda, dengan kekuatannya bahkan dapat mengalahkan serangan dari raja Alexander, berarti kerajaan ini dari sisi pertahanan sangat kuat.

Dijelaskan bahwa Kautilya merupakan seorang Brahmin yang berasal dari daerah Kerala, sangat sederhana, penampilannya tidak menarik. Ada juga yang menyatakan bahwa Kautilya merupakan seorang Brahmin yang berasal dari India Utara. Kautilya merupakan sarjana bidang filosofi lulusan **Universitas Negeri Taxila**. Beliau datang ke Pataliputra, yang merupakan pusat kerajaan Dhana-Nanda untuk mengikuti sayembara bidang filosofi. Yang menjadi pemenang dalam sayembara tersebut adalah Kautilya. Namun sayang, Kautilya diusir oleh raja pada saat beliau sedang makan dengan alasan sang Bhagawan berpenampilan kumuh dan cacat fisik. Dengan sikap raja Dhana-Nanda yang kasar tersebut, maka Brahmin Kautilya menjadi tersinggung dan marah, dan selanjutnya merencanakan akan melakukan perlawanan terhadap Dhana-Nanda. Kautilya bekerjasama dengan Chandragupta untuk menggulingkan raja Dhana-Nanda, dan akhirnya berhasil.

4. SISTEM PELAPORAN KEUANGAN KERAJAAN MAGADA

4.1. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Kerajaan Magadha (India), Periode 321-296 Sebelum Masehi

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kerajaan Magadha adalah kerajaan yang kaya raya dibawah kepemimpinan raja Dhana-Nanda yang angkuh, sombong dan pelit. Setelah rajanya digantikan oleh Chandragupta dengan Kautilya sebagai Menteri dan penasihat raja, maka struktur pemerintahannya ditata dan sektor-sektor ekonominya

didorong dihidupkan dan dikembangkan. Dari 3 Kementrian yang ada, diantaranya 23 Kementrian atau 70 % berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi rakyat. Sistem pencatatan dan pelaporan kekayaan Negara ditata oleh Kautilya. Beliau sangat memahami tentang pengertian dan prinsip-prinsip pelaporan yang baik dalam suatu organisasi apalagi dalam organisasi yang besar, yaitu organisasi Kerajaan. Hubungan antara atasan dengan bawahan atau pimpinan dan staf, serta antara unit kerja yang satu dengan yang lain dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien, jika diatur melalui system komunikasi yang baik dengan visi yang sama.

Salah satu alat komunikasi yang baik adalah dengan penyampaian informasi melalui pelaporan. Komunikasi antara berbagai fihak dalam organisasi dapat dilakukan dengan laporan tertulis dan atau tidak tertulis. Untuk menyampaikan informasi formal, laporan bentuk tertulis adalah hal yang paling umum. Sedangkan informasi informal lebih sering dilakukan secara tidak tertulis (lisan).

Pencatatan penerimaan, pengeluaran dan saldo keuangan kerajaan ke dalam kolom-kolom **Buku Tabelaris** yang dicanangkan oleh **Kautilya** seperti diuraikan berikut ini telah mencerminkan system pengendalian intern yang sangat baik, karena telah menyajikan informasi penting seperti dipersyaratkan oleh suatu pengendalian intern yang baik, yaitu harus dapat menjelaskan 6 (enam) hal berikut ini :

- a. Apa yang telah terjadi (*What*)
- b. Dimana tempat kejadiannya (*Where*)
- c. Bilamana peristiwa itu terjadi (*When*)
- d. Mengapa hal tersebut terjadi (*Why*)
- e. Siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut (*Who*)
- f. Bagaimana hal tersebut terjadi (*How*)

Laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi tertulis dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau dari bawahan kepada atasan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan secara tertib dan teratur atas kekayaan milik kerajaan Maghadha telah dilakukan oleh Kautilya.

4.2. Pencatatan Akun (Rekening) Bentuk Tabelaris

Dalam Arthasastra yang ditulis oleh L.N. Rangarajan, 1992, Bab V.iii, 246-247, dijelaskan mengenai pencatatan akun-akun Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo dalam bentuk **Buku Tabelaris**.

Penerimaan yang sebenarnya dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok akun :

(i) Pendapatan periode berjalan (current income); (ii) Pendapatan dari periode sebelumnya (transferred income) dan (iii) Pendapatan lain-lainnya (miscellaneous income)

Pendapatan periode berjalan, terdiri dari penerimaan yang jatuh tempo dan dibayar pada tahun yang sama.

Pendapatan dari periode sebelumnya, adalah pendapatan yang pada periode sebelumnya masih terbuka (piutang pendapatan) dan pembayarannya baru diterima dalam periode berjalan.

Pendapatan lain-lain, terdiri dari :

- (i) penerimaan atas piutang yang telah dihapuskan, denda yang dibayar oleh pegawai pemerintah, pendapatan yang tidak terduga berasal dari pembayaran tambahan (surcharge), kompensasi yang berasal dari kerugian dan kerusakan, sumbangan, barang rampasan (confiscated

- property), barang tanpa pemilik (intestate property) dan harta karun (treasure trove)
- (ii) penghematan atas pos-pos pengeluaran, penghematan dari anggaran angkatan perang, penghematan dari pengerjaan proyek-proyek pemerintah, dengan perbandingan anggaran awalnya dengan realisasinya.
 - (iii) Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan : kenaikan harga komoditas pada saat dijual, keuntungan yang timbul karena kenaikan ukuran dan timbangan pada saat dijual.

Pengeluaran yang sebenarnya, harus tampak dari budget dan akun pengeluaran seperti berikut :

- (i) anggaran pengeluaran harian (budgeted day-to-day expenditure)
- (ii) pengeluaran harian yang tidak dianggarkan (unbudgeted day-to-day expenditure)
- (iii) anggaran periodic (14 hari, bulanan, atau tahunan)

Merupakan sisa bersih pendapatan, adalah semua pendapatan dikurangi dengan semua pengeluaran yang membebani pendapatan tersebut.

Melihat dari bentuk formulir yang digunakan untuk mencatat penerimaan, pengeluaran dan saldo dari masing-masing-masing akun yang digunakan, tampak jelas bahwa bentuk buku yang digunakan adalah **tabelaris**, yaitu memanjang kesisi kanan, dan kegiatan yang dicatat berhubungan dengan anggaran Negara (kerajaan), menggunakan media 3 buku tabelaris, sebagai berikut :

- 1) Buku Tabelaris Sisi Pendapatan;
- 2) Buku Tabelaris Sisi Pengeluaran, dan
- 3) Buku Tabelaris Sisi Saldo.

Bentuk dari masing-masing Buku Tabelaris tersebut di atas digambarkan dalam Tabel VIII.9, VIII. 10, dan VIII.11, berikut ini :

Tabel VIII.9

Buku Tabelaris Sisi Pendapatan (Income Side)

Place	Period of	Date and	Head of	Classificati	Quantity	Name of	By who	Receiv	Recorded
-------	-----------	----------	---------	--------------	----------	---------	--------	--------	----------

(Tempat)	Accounting (Periode Akuntansi)	Time of Receipt (Tanggal dan Waktu Penerimaan)	Account (No. / nama Akun)	on current year or outstanding dues (Klasifikasi tahun ini atau sisa tahun lalu)	Received (Jumlah yang diterima)	payer (Nama yang membayar)	order (Siapa yang memerintahkan)	ed by (Diterima oleh)	by (Dicatat oleh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Buku Tabelaris Pendapatan memuat 10 kolom, dengan rincian sebagai berikut :

1). Tempat.

Menyebutkan nama tempat dari mana penerimaan itu diperoleh. Cara pencatatan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan mengontrol penerimaan dari masing-masing daerah yang diwajibkan melakukan pemungutan penerimaan Negara. Misalnya penerimaan berasal dari Daerah/Kecamatan A, B, C dsb.nya.

2). Periode Akuntansi.

Penjelasan mengenai periode penerimaan, seperti dari 79 Januari s.d. Juni atau Juli s.d. Desember.

3). Tanggal dan Waktu Penerimaan

Pencatatan atas tanggal dan waktu penerimaan tujuannya adalah untuk mempertajam dari sisi pengawasan. Yang dimaksud dengan waktu disini adalah jam/pukul penerimaan dilakukan.

Para pengawas mungkin melakukan konfirmasi kepada para pihak yang melakukan penyetoran penerimaan. Apabila mereka menulis tanggal dan jam dengan tidak benar akan segera ketahuan, dan dikenakan sanksi. Tujuan utamanya untuk memperkecil peraktek lapping, dsb.nya.

4). Nomor Akun.

Diberikan petunjuk bahwa penerimaan harus dikelompokkan dalam beberapa akun. Dijelaskan **jenis akun** penerimaan terdiri dari :

- (1) harga pokok (**harga pokok penjualan**)
- (2) bagian bagi hasil dari pemerintah (*bhaga*)
- (1) pajak transaksi (PPN/*Vyaji*)
- (4) pajak monopoli
- (5) pajak yang sifatnya tetap (*fixed taxes*)
- (6) harga pokok produksi (*manufacturing charges*)
- (7) denda dan sanksi lainnya (*fine and finalties*)

Tersedianya 7 (ujuh) jenis akun penerimaan tersebut di atas dapat dipergunakan untuk pencatat transaksi penerimaan pendapatan kegiatan sektor pemerintahan maupun sektor swasta, karena pihak pemerintah pada zaman Kautilya sudah menggerakkan pabrik-pabrik sehingga untuk barang-barang yang diproduksi perlu dihitung harga pokoknya, baik harga pokok produksinya dan harga pokok penjualannya.

5). Klasifikasi Penerimaan dari Tahun Sekarang atau dari Periode Sebelumnya.

Nama akunnnya cukup jelas, tujuannya untuk dapat memisahkan penerimaan berasal dari periode berjalan atau dari piutang penerimaan (tunggalan) tahun-tahun sebelumnya.

- 6). **Jumlah Yang Diterima**
Menyebutkan besarnya jumlah yang diterima.
- 7). **Nama Yang Membayar**
Harus dicatat nama yang melakukan pembayaran. Disini dicatat nama kolektor dan atau daerah/wilayah pembayar.
- 8). **Siapa yang Memerintahkan Pembayaran (otorisasi pembayaran)**
Harus disebutkan nama orang/pejabat yang memerintahkan melakukan pembayaran.
- 9). **Diterima Oleh**
Harus dicatat nama orang/pejabat/pegawai yang menerima uang tersebut.
- 10). **Dicatat Oleh**
Harus disebutkan nama orang/pegawai yang mencatat penerimaan tersebut.

Tabel VIII.10

Buku Tabelaris Sisi Pengeluaran (Expenditure Side)

Place (tempat)	Period of Accounting (Periode akuntansi)	Date and time of payment (Tgl. Dan waktu pembayaran)	Head of Expenditure (No. Akun Pengeluaran)	Count value received (Lawangan anggaran penerimaan)	Occasion (alasan/ yang mengemukakan)	What was paid (tujuan pembayarannya)	Amount paid (jumlah yang dibayarkan)	For what use (Untuk keperluan apa)	Authority ordering payment (pejabat yang berwenang mengesahkan pembayaran)	Withdrawn from store (Penarikan dari Kas/gudang)	Delivered by (Dikirimkan oleh/dengan)	Received by (Diterima oleh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Terdapat **13 kolom** dalam **Buku Tabelaris Sisi Pengeluaran**, dengan isi kolom sebagai berikut :

- 1). **Tempat**
Menyebutkan nama tempat dimana pengeluaran itu dilakukan. Cara pencatatan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan mengontrol pengeluaran dari masing-masing daerah yang memperoleh jatah anggaran pembiayaan. Misalnya pengeluaran dilakukan oleh Daerah atau Kecamatan A, B, C dsb.nya.
- 2). **Periode Akuntansi**
Dicatat periode akuntansi pada saat dilakukan pengeluaran, seperti periode **Januari s.d Juni dan Juli s.d. Desember.**
- 3). **Tanggal dan Waktu Pembayaran**

anggaran Pencatatan yang tepat tanggal dan waktu pembayaran atas pengeluaran yang dilakukan tujuannya adalah untuk mempertajam unsur pengawasan, sehingga pejabat atau pegawai yang mendapat tugas mengeluarkan anggaran hati-hati dalam menuliskan kedua hal tersebut. Prosedur pencatatan pengeluaran seperti ini tentu dilengkapi dengan prosedur konfirmasi terhadap penerima pembayaran, guna mengetahui kebenaran tanggal dan waktu pencatatannya.

4). **Nomor atau Judul Akun Pengeluaran.**

Sisi pengeluaran (debit side) harus diklasifikasikan lagi sesuai dengan **Buku Besar (Major Head)** ke dalam **11 Major Head**, sebagai berikut :

- (1) Persembahan kepada Tuhan dan Leluhur (biaya upacara keagamaan) dan biaya sumbangan.
- (2). Biaya istana (pengeluaran raja, permaisuri dan tokoh-tokoh masyarakat)
- (3). Biaya administrasi pemerintahan
- (4). Biaya untuk kepentingan politik luar negeri.
- (5). Biaya pemeliharaan lumbung (gudang bahan makanan), perlengkapan perang, dan pergudangan untuk hasil hutan dan produksi olahan hasil hutan.
- (6). Biaya produksi
- (7). Biaya tenaga kerja
- (8). Biaya pertahanan (dipisahkan kedalam 4 sub akun= ⁵ with separate subheads for each of the four wings).
- (9). Biaya pemeliharaan peternakan.
- (10). Biaya pemeliharaan cagar alam
- (11). Biaya pemeliharaan hutan untuk kayu bakar dan kayu-kayu untuk makanan ternak

5). **Lawan Anggaran Penerimaan.**

Setiap merancang anggaran pengeluaran harus ditentukan lebih dahulu sumber anggaran penerimaannya. Maka pada kolom ini harus ditulis akun lawan sebagai sumber penerimaannya, baik nama akun dan jumlahnya.

6). **Alasan Diperlukan Pengeluaran Anggaran Tersebut**

Setiap merancang anggaran pengeluaran harus dilengkapi dengan alasan mengapa anggaran tersebut harus dibuat dan disediakan.

7). **Tujuan Pembayaran.**

Pembayaran yang dilakukan melalui anggaran negara biasanya menggunakan angsuran atau termin. Dalam hal ini harus disebutkan tujuan pembayaran tersebut antara lain menyebutkan termin pembayaran dan penjelasan lainnya.

8). **Jumlah yang dibayarkan**

Harus ditulis dengan jelas besarnya jumlah yang dibayar. Penulisan jumlah tersebut harus sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen sumbernya, seperti faktur, kwitansi dsb.nya.

9). **Pembayaran Dilakukan Untuk Apa (Penjelasan Tujuan Dilakukan Pembayaran)**

Yang ditulis pada kolom ini adalah penjelasan atau penegasan atas pengeluaran yang dilakukan untuk membayar kegiatan apa.

10). **Pejabat Yang Berwenang Memerintahkan/Mengesahkan Pembayaran**

Harus disebutkan nama lengkap pejabat yang berwenang memerintahkan melakukan pembayaran.

Lazimnya dibuktikan dengan nama lengkap, jabatan, tanda tangan dan stempel nama instansi.

- 11). **Pengambilan Dari Kas atau Gudang.**
Harus dibuat catatan yang jelas yang menyatakan dari sumber mana pengeluaran tersebut diambil atau dikeluarkan.
- 12). **Dikirimkan Dengan** 164
Pada zaman Kautilya mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dibuat dari logam, dengan pecahan yang telah ditentukan sehingga memudahkan digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakatnya. Bila jumlah uang yang diserahkan dalam jumlah yang besar, tentu memerlukan alat angkutan untuk mengirimkan ketempat tujuan.
- 13). **Diterima Oleh.**
Pada kolom ini harus dicatat nama yang menerima uang tersebut agar memudahkan menelusuri apabila terjadi masalah dikemudian hari. Fungsi dari catatan ini adalah sebagai alat pengawasan.

Tabel VIII.11

Buku Tabelaris Sisi Kolom Saldo (Piutang) = (Balances Columns)

Place (tempat)	Date and time (tgl. dan waktu)	Head of account (No. Akun Induk = buku besar)	Dues left outstanding (hak yang masih terbuka=dicatat sebelah kiri)	5 Form in which balance received into the treasury (Surat/daftar isian yang menyatakan jumlah yang masih harus diterima oleh perbendaharaan)	Quantity (satuan)	Amount Received (jumlah yang harus diterima)	Detail of Container (Rincian dari isinya)	Dilevered to (name of treasury official) (Menunjuk nama pejabat keuangan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Buku Tabelaris untuk menctat **Saldo** terdiri dari 9 kolom dengan rincian sebagai berikut :

- 1). **Tempat**
Harus menyebutkan nama tempat dimana saldo (piutang) tersebut berada.
- 2). **Tanggal dan Waktu**

Pada kolom ini harus dicatat tanggal dan waktu rencana penerimaan atas saldo (piutang) penerimaan yang ada.

3). **Nomor Akun Induk**

Di kolom ini dicatat **nomor dan nama akun induk (Buku Besar)** yang berkaitan dengan penerimaan tersebut.

4). **Hak Yang Masih Terbuka (Piutang Pendapatan)**

Catat nama dan jenis piutang pendapatan yang masih harus diterima.

5). **Surat/Daftar Isian Yang Menyatakan Jumlah Yang Masih Harus Diterima Oleh Perbendaharaan.**

Pada kolom ini harus dicatat nomor dan tanggal Daftar Isian berhubungan dengan piutang pendapatan tersebut.

6). **Kuantitas (jumlah)**

Pada kolom ini dicatat jumlah keping **Pana/Rupiah** atau **dalam bentuk barang** yang masih harus diterima

7). **Jumlah Yang harus Diterima**

Pada kolom ini dicatat jumlah uang atau barang yang masih harus diterima

8). **Daftar Rincian Jenis Penerimaan**

Rincian isi dari peti/kotak uang atau kotak barang.

9). **Menunjuk Nama Pejabat Keuangan Yang Berwenang**

Disebutkan nama pejabat (bendahara) yang bertugas menerima/diserahi uang atau barang.

Cukup menarik, sebagai ciri telah diterapkannya **basis akrual** adalah dimulai dari **Laporan Pendapatan, pada kolom 5 (lihat Tabel VIII.9)** dinyatakan **pendapatan yang diperoleh berasal dari piutang pendapatan tahun sebelumnya, dan pendapatan yang berasal dari tahun berjalan. Pendapatan yang berasal dari tahun sebelumnya,** berarti telah menerapkan **asas akrual**, karena piutang pendapatan merupakan hak Negara telah dicatat dengan baik, sehingga dengan mudah dapat ditelusuri ketika pihak yang berutang melakukan pembayaran atau memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, dalam **Laporan Saldo (Balances Columns), kolom 4 (lihat Tabel VIII.11)**, dinyatakan harus dicatat **disebelah kiri (Debet) Hak Yang Masih Terbuka. Hak yang Masih Terbuka =Piutang.**

Dengan demikian Laporan Sisi Pendapatan (**lihat Tabel VIII.9**) sudah sejalan dengan Laporan Saldo (Balances Columns) (**lihat Tabel VIII.11**), mengingat kedua Buku Tabelaris ini telah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu saling mengontrol.

5. PENGGUNAAN BUKU-BUKU TABELARIS PENDAPATAN, PENGELUARANDAN SALDO

Buku Tabelaris sebetulnya tidak terbatas hanya pada **Buku Tabelaris Pendapatan, Pengeluaran dan Saldo seperti yang digambarkan pada Tabel VIII.2., VIII.3, dan VIII.4 di atas.**

Masing-masing Buku Tabelaris tersebut dapat dibuat dan dikembangkan untuk masing-masing akun (item), sesuai jenis-jenis informasi yang bersifat spesifik yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Jenis topik yang ingin ditampilkan dalam Buku Tabelaris, yang sekaligus berfungsi sebagai alat pengawasan, mempengaruhi jumlah kolom yang harus disediakan dalam sebuah buku tabelaris yang dibuat. Berikut ini diberikan contoh pengembangan dari **Buku Tabelaris** sebagai berikut :

Buku Tabelaris Saldo, dapat dipecah lagi ke dalam :

- 1) Buku Tabelaris Saldo Uang Kas
- 2) Buku Tabelaris Saldo Barang-Barang Dagangan
- 3) Buku Tabelaris Saldo Alat Tulis Kantor
- 4) Buku Tabelaris Saldo Piutang Dagang
- 5) Buku Tabelaris Saldo Utang Dagang
- 6) Buku Tabelaris Saldo Utang Lain-Lain
- 7) Buku Tabelaris Saldo Aset Tetap

Buku Tabelaris Pendapatan, dapat dipecah se¹⁶² dengan jenis-jenis pendapatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kerajaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan, seperti :

- 1) Buku Tabelaris Harga Pokok Penjualan
- 2) Buku Tabelaris Bagian Dari Pemerintah (*Bhaga*)
- 3) Buku Tabelaris Pajak Transaksi (PPN /*Vyaji*)
- 4) Pajak Monopoli
- 5) Pajak Yang Bersifat Tetap (*Fixed Taxes*)
- 6) Harga Pokok Produksi(*manufacturing charges*)
- 7) Denda dan Sanksi Lainnya (*fine and finalities*)

Buku Tabelaris Pengeluaran dapat dipecah menurut jenis-jenis pengeluaran, antara lain sebagai berikut :

- 1) Persembahan kepada Tuhan dan Leluhur (biaya upacara keagamaan dan biaya sumbangan)
- 2) Biaya istana (pengeluaran raja, permaisuri dan tokoh-tokoh masyarakat)
- 3) Biaya administrasi pemerintahan
- 4) Biaya untuk kepentingan politik luar negeri
- 5) Biaya pemeliharaan lumbung (gudang bahan makanan), perlengkapan perang, dan pergudangan untuk hasil hutan dan produksi olahan hasil hutan.
- 6) Biaya produksi
- 7) Biaya tenaga kerja
- 8) Biaya pertahanan (dipisahkan ke dalam 4 sub akun)
- 9) Biaya pemeliharaan peternakan
- 10) Biaya pemeliharaan cagar alam
- 11) Biaya pemeliharaan hutan untuk kayu bakar, dan kayu-kayu (tumbuhan) untuk makanan ternak.

5.1 Pencatatan Transaksi Ke Dalam Buku-Buku Tabelaris.

Agar diperoleh gambaran dari penggunaan **Buku-Buku Tabelaris Pendapatan, Pengeluaran dan Saldo**, berikut diberikan beberapa contoh transaksi untuk periode **31 Desember 2009 s.d. 31 Januari 2010**, sebagai berikut :

Contoh transaksi :

1. Pada 31 Desember 2009.

1.1. Dilakukan pemeriksaan fisik Kas secara serentak di beberapa tempat penyimpanan uang dengan hasil sebagai berikut :

- 1). Kas di brankas AD, jumlah peti 3, jumlah keping 3.000, nilai Pana 3.500.000. Nama pemegang kas AU, pemeriksa kas UD & UF, pemeriksa peti dan keping AR & AF, pengawas pemeriksaan kas AW, pencatat dalam Buku Kas AG.
- 2). Kas di brankas AC, jumlah peti 2, jumlah keping 2.000, nilai Pana 2.750.000. Nama pemegang kas AR, pemeriksa kas UT & UGF, pemeriksa peti dan keping ATR & ATF, pengawas pemeriksaan kas ACW, pencatat dalam Buku Kas ACG.
- 3). Kas di brankas AB, jumlah peti 1, jumlah keping 1.110, nilai pana 2.850.00 Nama pemegang kas AU, pemeriksa kas UXD & UAF, pemeriksa Peti dan keping AAR & AAF, pengawas pemeriksaan kas ACW, pencatat dalam Buku Kas AUG.
- 4). Kas di brankas ABG, jumlah peti 1, jumlah keping 1.000. nilai pana 1.050.000. Nama pemegang kas ATU, pemeriksa kas UWD & UTF, pemeriksa peti dan keping ADR & AKF, pengawas pemeriksaan kas APW, pencatat dalam Buku Kas AMG.

1.2. Kolom-kolom dalam Buku Kas Tabelaris untuk mencatat saldo kas hasil pemeriksaan fisik kas ditetapkan sebagai berikut :

- a) tempat; b) periode akuntansi; c) tanggal dan waktu; d) akun induk (buku besar); e) jumlah peti; f) jumlah keping; g) amount (jumlah); h) pemeriksa kas (minimal 2 orang); i) penghitung peti & keeping (minimal 2 orang); (j) pencatat di buku kas

2. **Tanggal 2 Januari 2010 :**

1) terdapat saldo tagihan Pajak Tanah dan Hutan sebesar **Pana 1.525.000.000,-** di Kecamatan A. Petugas Bendaharawan yang berwenang menyelesaikannyabernama **Rudi**. Saldo tagihan berdasarkan Surat Tagihan Nomor : 0100/12/2009, tgl. 2 Desember 2009, pukul 08. Buku Besar Induk Penerimaan “ Pajak Monopoli “. Satuan (kuantitas) 15.000 peti, rincian isi peti 3.500.000 keping uang logam.

2) terdapat tagihan penjualan tekstil dari pabrik AU di kota AC, pabrik milik pemerintah, dijual kepada pemerintah daerah AA dengan harga jual **Pana1.000.000.000,-** dan harga pokok **Pana500.000.000,-** Buku Besar Induk Penerimaan “ **Bagian Pemerintah** “ sebesar **Pana 300.000.000,-**. Pejabat Bendaharawan yang berwenang menyelesaikan bernama **Paidi**. Dasar penagihan Surat Tagihan Nomor : 0900/12/2009, tgl. 5 Desember 2009, pukul 10, sebesar **Pana 30.000.000,-** Satuan (kuantitas) 104 ¼ peti, terdiri dari 1000.000 keping uang logam

3) terdapat tagihan Penjualan Hasil Kebun Bunga, Taman Indah (AC) di kota WZ, milik pemerintah, dijual kepada Departemen AW sebesar **Pana 97.500.000,-** Surat Tagihan No. 12/12/2009, tg. 10 Desember 2009, pukul 10. Harga pokok produksi **Pana 350.000.000,-** “ **Bagian pemerintah** “, **Pana 45.000.000,-** Bendaharawan yang berwenang menyelesaikan bernama **Zainum**. Satuan (kuantitas) 315 peti, rincian isi peti 315.000 keping uang logam.

3. **Tanggal 4 Januari 2010**

Diterima pembayaran tunai sebesar Pana 850.000.000,-, penerimaan periode Januari 2010, untuk Akun Induk Penerimaan “ **Pajak Transaksi / PPN**”. Tanggal penerimaan 4 Januari 2010, pukul 12. Nama pembayar Toko **Suwarti**, Kecamatan XZ, Kabupaten AW. Otorisator penerimaan **Sdr. Baidun**. Penerima pembayaran **Tukiran**, dan yang melakukan pencatatan **Budiman**.

4. **Tanggal 5 Januari 2010**

Dilakukan pembayaran tunai melalui Kas Bendahara Negara sebesar **Pana 800.000,-** akun **Buku Besar** untuk **Biaya Istana**, untuk **pengadaan pakaian menteri tahap I**, khusus **pakaian sidang menteri kerajaan**, tempat **Istana Kerajaan**, pengeluaran untuk tahun 2010, tanggal pengeluaran 5 Januari 2010, pukul 08,00, lawan penerimaan Bagian Bagi Hasil Untuk Pemerintah (*Bhaga*), yang menyetujui Pengeluaran Bagian Rumah Tangga Kerajaan bernama **Bhuwana**, uangnya dikirimkan dengan kereta yang ditarik 2 (dua) ekor kuda, pengiriman uang dilakukan oleh Bagian Transfortasi bernama **Whisnu**, dan yang menerima uang sebelum dikirimkan bernama **Brahma**.

5. **Tanggal 8 Januari 2010**

Diterima pembayaran tunai sebesar Pana 1.200.000.000,-, penerimaan periode Januari 2010,- untuk Akun Induk Penerimaan “ Denda dan Sanksi Lainnya”. Tanggal penerimaan 6 Januari 2010, pukul 11. Nama pembayar Toko **Budiana**, Kecamatan XWZ, Kabupaten BW. Otorisator penerimaan **Sdr. Baidun**. Penerima pembayaran **Tukiran**, dan yang melakukan pencatatan **Budiman**.

6. **Tanggal 10 Januari 2010**

Dilakukan pembayaran melalui Kas Bendahara Negara sebesar **Pana 750.000.000,-** Akun **Buku Besar** untuk **Biaya Administrasi Pemerintahan**, untuk **pengadaan Bahan makanan raja dan keluarganya tahap I**, pengeluaran untuk tahun 2010, tanggal pengeluaran 5 Januari 2010, pukul 10, lawan penerimaan **Pajak Monopoli** yang menyetujui Pengeluaran Bagian Rumah Tangga Kerajaan, bernama **Bhuwana**, uangnya dikirimkan dengan satu kereta yang ditarik 2 (dua) ekor kuda, pengiriman uang dilakukan oleh Bagian Transfortasi bernama **Whisnu**, dan yang menerima uang sebelum dikirimkan bernama **Brahma**.

7. **Tanggal 15 Januari 2010.**

Diterima pembayaran tunai sebesar **Pana 1.525.000.000,-**, penerimaan periode Januari 2010, untuk Akun Induk Penerimaan “ **Pajak Monopoli** ”. Tanggal penerimaan 15 Januari 2010, pukul 11. Nama pembayar 15 Toko Penjual Emas dan Perak, Kecamatan XZ, Kabupaten XW (daftar toko mas terlampir). Otorisator penerimaan **Sdr. Baidun**. Penerima pembayaran **Tukiran**, dan yang melakukan pencatatan **Budiman**.

8. **Tanggal 20 Januari 2010**

Dilakukan pembayaran melalui Kas Bendahara Negara sebesar **Pana 950.000.000**, untuk **membangun gedung kantor Menteri Urusan Penjara**, Akun **Buku Besar** untuk **Biaya Administrasi Pemerintahan**, pengeluaran untuk tahun 2010, tanggal pengeluaran 20 Januari 2010, pukul 11, lawan penerimaan **Pajak Tetap**, yang menyetujui **Pengeluaran Bagian Rumah Tangga Kerajaan**,

Bhuwana, uangnya dikirimkan dengan satu kereta yang ditarik 2 (dua) ekor kuda, pengiriman uang dilakukan oleh Bagian Transfortasi bernama **Whisnu**, dan yang menerima uang sebelum dikirimkan bernama **Briguwana**. Tempat pembangunandalam lingkungan **Ibu Kota**

9. Tanggal 22 Januari 2010

Diterima pembayaran atas saldo tagihan Pajak Tanah dan Hutan sebesar **Pana 900.000.000,-** di Kecamatan A, Kabupaten ABD, Petugas Bendaharawan yang berwenang menyelesaikannya bernama **Rudi**. Saldo tagihan berdasarkan Surat Tagihan Nomor : 0100/12/2009, tgl. 2 Desember 2009, diterima pukul 09, oleh **Pitu**, dan dicatat oleh **Budiman AG**. Buku Besar Induk Penerimaan “ Pajak Monopoli “. Satuan (kuantitas) 15.000 peti, rincian isi peti 3.500.000 keping uang logam.

10. Tanggal 24 Januari 2010

Diterima pembayaran dari tagihan Penjualan Hasil Kebun Bunga, Taman Indah (AC) di kota WZ, milik pemerintah, dijual kepada Departemen AW sebesar **Pana 97.500.000,-** Surat Tagihan No. 12/12/2009, tg. 10 Desember 2009, diterima pukul 10 oleh **Putra**, dicatat oleh **Budiman AG**. Harga pokok produksi **Pana 350.000.000,-** "Bagian pemerintah“, **Pana 45.000.000,-** Bendaharawan yang berwenang menyelesaikan bernama **Zainum**. Satuan (kuantitas) 315 peti, rincian isi peti 315.000 keping uang logam

11. Tanggal 25 Januari 2010

Diterima pembayaran tunai sebesar **Pana 1.525.000.000,-**, penerimaan periode Januari 2010, untuk Akun Induk Penerimaan “ **Pajak Monopoli** “. Tanggal penerimaan 25 Januari 2010. Nama pembayar 15 Toko Penjual Emas dan Perak, Kecamatan UGD Kabupaten WAK (daftar toko emas dan perak terlampir). Otorisator penerimaan **Sdr. Paijo**. Penerima pembayaran **Paidin**, dan yang melakukan pencatatan **Budiman AD**.

12. Tanggal 27 Januari 2010

Dilakukan pembayaran melalui Kas Bendahara Negara sebesar **Pana 1.300.000.000**, untuk **menanggulangi bencana banjir sungai Gangga, Yamuna dan Irawadi, Buku Besar** untuk **Biaya Administrasi Pemerintahan**, pengeluaran untuk tahun 2010, tanggal pengeluaran 20 Januari 2010, pukul 11, lawan penerimaan **Pajak Tetap**, yang **menyetujui Pengeluaran Bagian Rumah Tangga Kerajaan, Bhuwana**, uangnya dikirimkan dengan satu kereta yang ditarik 2 (dua) ekor kuda, pengiriman uang dilakukan oleh Bagian Transfortasi bernama **Whisnu**, dan yang menerima uang sebelum dikirimkan bernama **Briguwana**. Tempat tersebar di Kabupaten A, C, dan D.

13. Tanggal 27 Januari 2010.

Diterima pinjaman dari kerajaan **Karachi** sebesar **Pana 750.000.000,00** penerimaan periode Januari 2010, dengan Akun Induk “ **Pinjaman** “. Pinjaman atas persetujuan raja. Diterima pukul 10 oleh **SDR**, dicatat oleh **Budiman**. Bendahara yang berwenang menyelesaikan MSC. Jumlah peti 7.500, jumlah keping 35.000 keping.

14. Tanggal 28 Januari 2010

Dilakukan pembayaran melalui Kas Bendahara Negara sebesar **Pana 749.000.000, untuk menambah modal perusahaan Negara AXZ** untuk penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara, pengeluaran untuk tahun 2010, tanggal pengeluaran 28 Januari 2010, pukul 11, lawan penerimaan **Penerimaan Pinjaman Luar Negeri, yang menyetujui Pengeluaran Bagian Rumah Tangga Kerajaan, Bhuwana**, uangnya dikirimkan dengan satu kereta yang ditarik 2 (dua) ekor kuda, pengiriman uang dilakukan oleh Bagian Transfortasi bernama **Whisnu**, dan yang menerima uang sebelum dikirimkan bernama **Briguwana**. Tempat tersebar di Kabupaten A.

Pencatatan rangkaian kejadian di atas ke dalam Buku-Buku Tabelaris, sebagai berikut :

Pencatatan ke dalam Buku Tabelaris Pemeriksaan Kas

Tabel VIII.12

BUKU TABELARIS PEMERIKSAAN FISIK KAS

PER : 31 DESEMBER 2009

Tempat	Periode Akuntansi	Tanggal & Waktu	Akun Induk	Kasir/ Benda hara	Jumlah Peti	Jumlah Keping	Nilai/ Jumlah	Pemeriksa Kas	Pengawas Pemeriks aan Kas	Penghitung peti & keeping	Pencatat di buku kas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
AD	2009	31-12-009	Kas	AU	3	3.000	3.500.000	UD & UF	AW	AR & AF	AG
AC	2009	31-12-009	Kas	AR	2	2.000	2.750.000	UT & UGF	ACW	ATR & ATF	ACG
AB	2009	31-12-009	Kas	AX	1	1.110	2.850.000	UXD & UAF	ACW	AAR & AAF	AUG
AB G	2009	31-12-009	Kas	ATU	1	1.000	1.050.000	UWD & UTF	ATU	ADR & AKF	AMG
Total Saldo					7	7.100	10.150.000	-	-	-	-

Tabel VIII.13

BUKU TABELARIS SISI KOLOM SALDO (PIUTANG) = BALANCES COLOMNS)

PERIODE : 31 DESEMBER 2009

Place (tempat)	Date and time (tgl. Dan waktu)	Head of account (No. Akun Induk =	Dues left outstanding (hak	Form in which balance received into the treasury	Quantity (satuan)	Amount Received (jumlah yang harus diterima)	Detail of Container (Rincian dari isinya)	Dilevered to (name of treasury

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		buku besar)	yang masih terbuka= dicatat sebelah kiri)	(Surat/daftar isian yang menyatakan jumlah yang masih harus diterima oleh perbendaharaan)				official) (Menunjuk nama pejabat keuangan)
Kec. A	2-2-2009 Pk. 08.00	Pajak Monopoli	ya	0100/12/9200 2-12-2009	15.000 peti	1.525.000.000.	3.500.000 keping	Rudi
KotaAB	5-12-2009 Pk. 10.00	Bagian Pemerintahan	ya	09/00/12/2009 5-12-2009	3000 peti	300.000.000	700.000 keping	Paidi
Kota WZ	10-12-2009 Pk.10.00	Bagian Pemerintahan	ya	12/12/2009 10-12-2009	315 peti	45.000.000	315.000 keping	Zainum
Total Piutang						1.870.000.000		

Tabel VIII.14

BUKU TABELARIS SISI PENDAPATAN (INCOME SIDE)

PERIODE : 1 S.D. 31 JANUARI 2010

Place (Tempat)	Period of Accounting (Periode Akuntansi)	Date and Time of Receipt (Tanggal dan Waktu Penerimaan)	Head of Account (No. / nama Akun)	Classification current year or outstanding dues (Klasifikasi tahun ini atau sisa tahun lalu)	Quantity Received (Jumlah yang diterima)	Name or payer (Nama yang membayar)	By who order (Siapa yang memerintahkan)	Received by (Diterima oleh)	Recorded by (Dicatat oleh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kab AW	Jan.2010	4-1-2010 Pk.12.00	Pajak transaksi (PPN)	Tahun 2010	850.000.000	Toko Suwarti, dkk	Sdr. Baidun	Sdr. Tukiran	Budiman
Kab. BW	Jan.2010	8-1-2010 Pk. 11.00	Denda dan Sanksi	Tahun 2010	750.000.000	Toko Budiana, dkk	Budiana	Tukiran	Budiman
Kab. WAK	Jan. 2010	15-1-2010 Pk. 11	Pajak Monopoli	Tahun 2010	900.000.000	Toko Mas	Sdr. Paijo	Paidin	Budiman AD
Kab. ABD	Jan. 2010	22-1-2010 Pk.09	Pajak Monopoli	Tahun 2009	525.000.000	Pajak Tanah & Hutan	Sdr. Rudi	Pitu	Budiman AD
Kota WZ	Jan. 2010	24-1-2010 Pk. 10	Bagian Pemerintah	Tahun 2009	45.000.000	Hasil Kebun Bunga	Zainum	Putra	Budiman AD
Karachi	Jan. 2010	27-1-2010	Pinjaman	Tahun	750.000.000	Bendaha	Raja	SDR.	Budiman

		Pk. 10	Pemerintah/Penerimaan Pembiayaan	2010	0	ra Pemerintah Karachi			
Total Penerimaan	-	-	-	-	3.820.000.000	-	-	-	-
Penerimaan Pendapatan	-	-	-	-	3.070.000.000	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	750.000.000	-	-	-	-

Tabel VIII.15

BUKU TABELARIS SISI PENGELUARAN (EXPENDITURE SIDE)

PERIODE : 1 S.D. 31 JANUARI 2010

Place (tempat)	Period of Accounting (Periode akuntansi)	Date and time of payment (Tgl. Dan waktu pembayaran)	Head of Expenditure (No. Akun Pengeluaran)	Counter value received (Lawan anggaran penerima)	Occasion (alasan/ yang memerlukan)	What was paid (tujuan pembayaran)	Amount paid (jumlah yang dibayarkan)	For what use (Untuk keperluan apa)	Authority ordering payment (pejabat yang berwenang mengesahkan pembayaran)	Withdrawn from store (Penarikan dari Kas/gudang)	Delivered by (Dikirimkan oleh/dengan)	Received by (Diterima oleh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Istana	Tahun 2010	5-1-2010, Pk. 08.00	Biaya istana	Bagian Pemerintah (<i>Bhaga</i>)	Pakaian Sidang Menteri Kerajaan	Bahan & ongkos jahit	800.000	Biaya istana	Bhuwana (Bag. RT. Kerajaan)	Bendahara Umum	Whisnu	Brahma
Istana	Tahun 2010	10-1-2010 Pk. 10.00	Biaya administrasi pemerintahan	Pajak Monopoli	Makanan & keluarga	Bahan makanan dan sebagainya	750.000	Biaya administrasi pemerintahan	Bhuwana (Bag. RT. Kerajaan)	Bendahara Umum	Whisnu	Brahma
Lingkungan Ibu Kota	Tahun 2010	20-1-2010 Pk. 11.00	Biaya administrasi pemerintahan	Pajak Tetap	Membangun Gedung kantor Menteri Urusan Penjara	Bahan-bahan dan upah tukang	950.000	Biaya administrasi pemerintahan (gedung penjara)	Bhuwana (Bag. RT. Kerajaan)	Bendahara Umum	Whisnu	Brahma

Administrasi Pemerintahan	Tahun 2010	27-1-2010 Pk.11	Biaya Administrasi Pemerintahan	Pajak Tetap	Menggunakan Bencana Alam	Bahan makaman . pakian, pembangunan rumah darurat	1.300.000.000	Biaya Administrasi pemerintahan (penanggulangan banjir)	Bhuwana (Bag. RT. Kerajaan)	Bendahara Umum	Whisnu	Brahma
Perusahaan Negara AXZ	Tahun 2010	28-1-2010 Pk. 10	Penyertaan Modal Pemerintah	Pinjaman Luar negeri	Pena mba han Modal Perusa haan	Pena mba han Modal Perusa haan	749.000.000	Penam bahan Modal Perusa haan	Raja	Bendahara Umum	Whisnu	Brahma
Total Penge luaran	-	-	-	-	-	-	3.749.800.000	-	-	-	-	-
Penge luaran Pemb iayaa n							749.000.000					
Belanja							3.000.800.000					

5.2. Posisi Kas, Piutang Pendapatan per 31 Januari 2010

5.3.

5.2.1 Posisi Kas

Saldo Kas awal bulan (pemeriksaan kas
31 Desember 2009.....Pana 10.150.000

Penerimaan Kas periode 1 Januari s.d.
31 Januari 2010Pana 3.820.800.000

Jumlah KasPana 3.830.950.000

Pengeluaran Kas periode 1 Januari s.d.
31 Januari 2010(Pana 3.749.800.000)

Saldo Kas per 31 Januari 2010 **Pana 81.150.000**

5.2.2. Pemeriksaan Fisik Kas.

Pada tiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan fisik kas. Hasil pemeriksaan fisik kas dituangkan dalam Buku Tabelaris Pemeriksaan Fisik Kas dalam 12 kolom, seperti terlihat pada **Tabel VIII.12** di atas.

Dari hasil pemeriksaan fisik kas per 31 Januari 2010 sebesar **Pana 80.350.000**, diketahui tersimpan pada beberapa Bendahara/Kasir sebagai berikut :

terinci

- 1). Kas di brandkas AD, jumlah peti 200, jumlah keping 200.300, nilai **Pana 18.500.000**. Nama pemegang kas AU, pemeriksa kas

- UD & UF, pemeriksa peti dan keping AR & AF,
 pengawas pemeriksaan kas AW, pencatat dalam Buku Kas
 AG.
- 2). Kas di brankas AC, jumlah peti 300, jumlah keping 300.500,
 nilai **Pana** 38.500.000. Nama pemegang kas AR, pemeriksa
 kas UT & UGF, pemeriksa peti dan keping ATR & ATF,
 pengawas pemeriksaan kas ACW, pencatat
 dalam Buku Kas ACG.
- 3). Kas di brankas AB, jumlah peti 100, jumlah keping 200.100,
 nilai **pana** 11.350.000. Nama pemegang kas AU, pemeriksa
 kas UXD & UAF, pemeriksa Peti dan keping AAR & AAF,
 pengawas pemeriksaan kas ACW, pencatat dalam
 Buku Kas AUG.
- 4). Kas di brankas ABG, jumlah peti 50, jumlah keping 51.000.
 nilai **pana** 6.050.000. Nama pemegang kas ATU, pemeriksa
 kas UWD & UTF, pemeriksa peti dan keping ADR & AKF, pengawas
 pemeriksaan kas APW, pencatat dalam Buku Kas
 AMG.
- 5). Kas di brankas AGB, jumlah peti 48, jumlah keping 59.500.
 nilai **pana** 5.950.000. Nama pemegang kas TUA, pemeriksa
 kas WD & UTP, pemeriksa peti dan keping AGR & AKF,
 pengawas pemeriksaan kas APU, pencatat dalam
 Buku Kas AGG.

Buku Tabelaris Pemeriksaan Fisik Kas Per 31 Januari 2010 tersaji dalam
 Tabel VIII.16 berikut ini.

Tabel VIII.16

BUKU TABELARIS PEMERIKSAAN FISIK KAS

PER : 31 DESEMBER 2010

Tem pa t	Perid e Akun tansi	Tanggal & Waktu	Akun Induk	Kasir/ Bend ahara	Jumla h Peti	Jumlah Keping	Nilai/ Jumlah	Peme riksa Kas	Pengaw as Pemerik saan Kas	Penghitun g peti & keping	Pencatat di buku kas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A D	2009	31-1- 2010	Kas	AU	200	200.300	18.500.000	UD & UF	AW	AR & AF	AG
A C	2009	31-1- 2010	Kas	AR	300	300.500	38.500.000	UT & UGF	ACW	ATR & ATF	ACG
A B	2009	31-2- 2010	Kas	AX	100	200.100	11.350.000	UXD & UAF	ACW	AAR & AAF	AUG

- Kira-kira apa alasannya sampai Kautilya membentuk sebuah Departemen secara khusus mengurus tentang produksi, tata niaga garam tersebut.
- P.8.9. Coba teliti apakah Kautilya membentuk sebuah Departemen Kehakiman. Bila ada atau tidak ada Departemen tersebut, kira-kira apa alasannya Departemen dimaksud tidak dibentuk atau perlu dibentuk.
- P.8.10. Dalam kelompok Departemen sudah ada Departemen yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas pembuatan paspor. Apakah makna dari pembentukan Departemen dimaksud. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.8.11. Pada periode-periode berikutnya banyak para Rsi yang datang ke Nusantara untuk mengajarkan Veda, seperti Rsi Bradah, Rsi Kuturan, dsb.nya. Apakah beliau-beliau itu datang ke Nusantara dilengkapi dengan paspor. Kira-kira pemerintah kerajaan yang ada di Nusantara sudah mengenal paspor dimaksud.
- P.8.12. Pada zaman Arthashastra perdagangan luar negeri sudah berkembang dengan pesat. Coba Saudara berikan prinsip-prinsip dasar yang mendukung pernyataan tersebut.
- P.8.13. Sebutkan beberapa ayat Veda yang memberikan petunjuk bahwa bagi penganut ajaran Veda, berdagang, baik berdagang dalam negeri dan luar negeri itu tidak dilarang bahkan dianjurkan (didorong) . Tunjukkan ayat-ayat veda tersebut lengkap dengan bunyinya (cukup dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia).
- P.8.14. Dalam Buku Kas Tabelaris Pendapatan, terdapat pos harga pokok produksi. Apakah pada zaman tersebut industri sudah maju, sehingga pemerintah perlu membuat akun khusus untuk hal tersebut. Jelaskan pendapat Asaudara.
- P.8.15. Dari segi akuntansi, bagaimana Saudara memaknai kolom-kolom yang ada dalam Buku Kas Tabelaris versi Arthashastra tersebut.
- P.8.16. Dalam setiap organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan fungsi-fungsi. Sebutkan jenis-jenis fungsi yang ada pada setiap organisasi.
- P.8.17. Jelaskan yang dimaksud dengan fungsi otorisasi dan fungsi penyimpanan dan berikan contohnya masing-masing 3 buah.
- P.8.18. Jelaskan yang dimaksud dengan penggabungan fungsi diagonal, dan berikan contohnya masing-masing 3 buah.
- P.8.19. Sistem pencatatan akuntansi menggunakan model T saat ini apakah ada kaitannya dengan system akuntansi Tabelaris yang diterapkan oleh Kautilya. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.8.20. Saudara sebagai pimpinan auditor kerajaan, lakukanlah pengecekan terhadap adanya selisih kas pana 800.000 tersebut. Serta jelaskan factor-faktor penyebabnya.

AKUNTANSI HINDU

57
Yad vidav-⁵⁷indra yat sthire yat parsane parabhrtam vasu sparham tad a bhara (Rgveda VIII. 45.41)

49
⁴⁹Ya Tuhan Yang Maha Esa, semoga Engkau melimpahkan kekayaan ya⁴⁹ patut diterima oleh kami, yang tersimpan di penguungan dan lain-lain, atau tersembunyi di bawah tanah, atau terbenam di samudra yang tidak dapat diukur (Rgveda VIII. 45.41)

BAB IX

SISTEM AKUNTANSI PERUSAHAAN PABRIK

1. PENGANTAR.

Pada pembukaan Bab ini dikutip petunjuk yang diberikan oleh Rgveda VIII.4.41 tentang kekayaan negara yang tersimpan dipegunungan, tersimpan dibawah tanah, tersimpan di samudra yang kuantitas dan kualitasnya tidak dapat diukur.

Untuk dapat mewujudkan kekayaan yang tersimpan dibawah tanah dan dibawah samudra tersebut menjadi nyata sehingga dapat memberikan kemakmuran kepada rakyat Negara yang bersangkutan hanyalah dengan melalui industri atau pabrik-pabrik berteknologi tinggi.

Umat penganut Vedawajib mengembangkan industri untuk memperoleh kemakmuran dalam menunjang kehidupannya di dunia ini.

Masalah masyarakat wajib mengembangkan idustri berteknonologi tinggi, dalam mengolah bahan-bahan tambang, dsb.nya, hal ini diberikan petunjuk dalam **RgvedaI. 31. 8** yang menyatakan bahwa manusia harus memohon anugrah kepada Ida Hyang Widhi agar diberkati dalam upaya mengembangkan industri (pabrik-pabrik) dalam rangka mencapai kemakmuran.

2. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN AKRUAL SESUAI ARTHASASTRA

Sistem Akuntansi Keuangan Akrual yang diterapkan oleh **KAULTIYA** adalah untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan pemerintah kerajaan atau disebut dengan Sisten Akuntansi Pemerintahan.

Namun demikian sistem akuntansi ini sekaligus dapat digunakan untuk mengelola kegiatan keuangan sektor bisnis.

Dasar-dasar akuntansi yang diletakkan sudah kuat, yaitu **asas akrual**, seperti telah diterapkan dalam **pencatatan untuk semua hak yang akan menjadi penerimaan Negara** dicatat pada sisi penerimaan **di sebelah Kiri (Debet)** dan **pengeluaran atau kewajiban Negara yang sudah terjadi dicatat sebelah Kanan (Kredit)**.

Disamping itu sudah ditetapkan dan diterapkan **nama atau kode pos atau kode akun** untuk setiap **pokok hak** serta **kewajiban, penerimaan atau pengeluaran**.

Telah diterapkannya asas akuntansi akrual, serta telah diterapkannya akuntansi pabrik dengan baik penjelasannya dapat ditemukan dalam The Arthasastra, Rangarajan, 1992 : 246-247, sebagai berikut :

“ on the receipt side, the revenue shall be classified according to the major Head of Account : cost price, share (*bhaga*), transaction tax (*vyaji*), monopoly taxes, fixed taxes, manufacturing charges, fines and penalties. On the debit side, expenditure shall be classified according to the mayor Heads as given below :

- 1) Worship (of gods and ancestor), and charitable expences.
- 2) The Place (expenditure of the King, Quenns, Princess etc)
- 3) Administration
- 4) Foreign Affairs
- 5) maintenance of granary, ordnance depots and warehouses for commodities and forest produce (under separate subheads)

- 6) Manufacturing expenses
- 7) Labour charges
- 8) Defence (with separate subhead for each of the four wings)
- 9) Cattle (and pastures)
- 10) Forest and game sanctuaries
- 11) Consumable like (firewood and fodder)

Pada sisi penerimaan (sisi Kredit) pada laporan aktivitas (laba-rugi), pendapatan harus dikelompokkan berdasarkan kelompok Akun Buku Besar, yaitu : (1) harga pokok; (2) keuntungan (bhaga)= bagian yang menjadi hak pemerintah (kerajaan); (3) pajak penjualan (*vyaji*); (4) pajak monopoli; (5) pajak tetap (*fixed taxes*);(6) beban biaya produksi; (7) sanksi dan denda.

Pada sisi Debit (sisi pengeluaran), pengeluaran harus dikelompokkan (dilasifikasikan) berdasarkan kelompok Akun Buku Besar Biaya (pengeluaran), seperti berikut :

- 1) Biaya Pemujaan (kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Leluhur) dan sumbangan keagamaan.
- 2) Biaya istana (pengeluaran untuk Raja, Ratu dan para Pangeran, dan lainnya)
- 3) Biaya Administrasi (untuk Kerajaan/Pemerintahan)
- 4) Biaya untuk urusan/hubungan luar negeri
- 5) Biaya pemeliharaan gudang/lumbung untuk :
(1) bahan makanan; (2) persenjataan alteleri; (3) barang-barang dagangan dan barang-barang hasil hutan (dibuat dalam sub akun tersendiri)
- 6) Biaya untuk memproduksi barang
- 7) Biaya pekerja/buruh (sebagai upah langsung)
- 8) Biaya angkatan perang (biaya pertahanan), dibuat sub akun untuk tiap satuan dari empat satuan yang ada)
- 9) Peternakan (tanah untuk penggembalaan ternak)
- 10) Hutan dan hutan cagar alam atau hutan lindung.
- 11) Berbagai jenis bahan makan, kayu bakar dan makanan ternak.

3. AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI BIAYA PADA ZAMAN ARTHASASTRA

Proses akuntansi keuangan dimulai dari tersedianya dokumen sumber dan pendukung, dilanjutkan dengan pencatatan dalam, peringkasan, pelaporan dilanjutkan dengan penganalisaan jurnal, penggolongan data keuangan dari suatu organisasi atau entitas (Arthasastra Bk II, Bab 4. 10).

Penyimpanan data akuntansi dengan bukti-buktinya pendukungnya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang (lama) yaitu paling sedikit selama 100 tahun (Arthasastra BK II, Bab 5. 22).

Penyimpanan dokumen akuntansi (pembukuan) selama 100 tahun, disesuaikan dengan umur manus⁷³ pada zaman Kaliyuga rata-rata 100 tahun.

Selanjutnya akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu serta m³³ berikan penafsiran terhadap data biaya tersebut.

Proses akuntansi biaya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen perusahaan. Oleh karena itu akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen.

4. **AKUNTANSI PERUSAHAAN PABRIK DALAM VEDA**

Permasalahan bahwa umat penganut Vedawajib mengembangkan industri untuk memperoleh kemakmuran dalam kehidupannya di dunia ini.

Masalah ini diberikan petunjuk dalam RgvedaI. 31. 8 yang menyatakan bahwa manusia harus memohon anugrah kepada Ida Hyang Widhi agar diberkati dalam upaya mengembangkan industri (pabrik-pabrik) dalam rangka mencapai kemakmuran.

Akuntansi biaya untuk tujuan penentuan harga pokok produksi barang atau jasa merupakan bagian dari sistem akuntansi industri/pabrik

Tujuan pokok dari akuntansi biaya untuk tujuan produksi barang/jasa adalah :

- a. penentuan biaya produksi suatu produk atau jasa
- b. pengendalian atas biaya produksi
- c. dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan.

Unsur-unsur biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah yang telah terjadi dimasa yang lalu atau biaya historis.

Akuntansi biaya untuk menentukan biaya produksi suatu produk/jasa disamping untuk memenuhi kebutuhan manajemen, juga untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu akuntansi biaya dalam posisinya untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan, maka akuntansi biaya harus tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam hal menentukan kos produk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manajemen, maka manajemen dapat menggunakan pendekatan akuntansi manajemen, yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Akuntansi biaya dapat berfungsi sebagai pengendalian biaya, apabila manajemen terlebih dahulu telah menentukan besaran biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan suatu produk atau jasa. Bila biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah produk/jasa telah ditetapkan lebih dahulu, maka akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran unsur-unsur biaya produksi yang sesungguhnya tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan.

Fungsi akuntansi biaya selanjutnya adalah melakukan analisis penyimpangan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang direncanakan, dan menyajikan informasi mengenai penyebab dari selisih yang terjadi. Berdasarkan data penyebab penyimpangan tersebut manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pada proses produksi selanjutnya.

Arthashastra yang disusun Kautilya telah merumuskan dan menerapkan ketiga pokok tujuan dari penentuan harga pokok produksi sebagai standar akuntansi perusahaan pabrik.

Hal tersebut dijelaskan dalam beberapa bab dalam Arthashastra Buku II tentang Kegiatan Para Kepala Departemen, yang bertugas mengelola pabrik. Bab-bab dimaksud adalah :

Bab 12 Direktur Tambang dan Pabrik Hasil-Hasil Tambang

Bab 13 & 14 Direktur Emas dan Pabrik Emas

Bab 17 Direktur Hasil Hutan dan Pabrik Hasil Hutan

Bab 18 Direktur Persenjataan

Bab 23 Direktur Benang dan Pabrik Tekstil

Bab 24 Direktur Pertanian

Bab 25 Direktur Pengawas Minuman Keras

Bab 33 Direktur Kereta

5. UNSUR-UNSUR BIAYA PRODUKSI DALAM ARTHASASTRA

Yang dimaksud dengan perusahaan pabrik (industri) adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi untuk siap dijual. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi diperlukan bantuan alat-alat produksi, berupa mesin-mesin dari yang sederhana sampai dengan yang mutakhir. Dalam Arthasastra Bk. II, Bab 18, paragraf 1 dijelaskan bahwa **Direktor Persejataan** bertugas membuat mesin-mesin untuk berperang, dan mesin-mesin tersebut harus dibuat oleh para ahli dibidangnya. Hal itu menunjukkan bahwa pada zaman tersebut industri sudah berkembang.

Sebagai unsur biaya produksinya dijelaskan terdiri dari :

- 1). Bahan baku
- 2). Upah langsung
- 3). Biaya overhead pabrik.

Jenis persediaan yang dimiliki oleh perusahaan (pabrik) terdiri dari :

- 1). Bahan baku
- 2). Bahan penolong
- 3). Bahan setengah jadi
- 4). Bahan jadi (siap dijual)

Pada jaman Arthasastra telah berkembang pengolahan sampai menjadi barang jadi bahan-bahan yang berasal dari hasil tambang dan juga bahan dari serat dan kapas menjadi barang jadi berupa hasil tenun dan tekstil.

Untuk menghasilkan barang/bahan tambang maka diperlukan ahli bidang pertambangan (**sulbasastra**), sedangkan untuk mengolah hasil tambang diperlukan **ahli metalurgi (bhumiparik sastra)**.

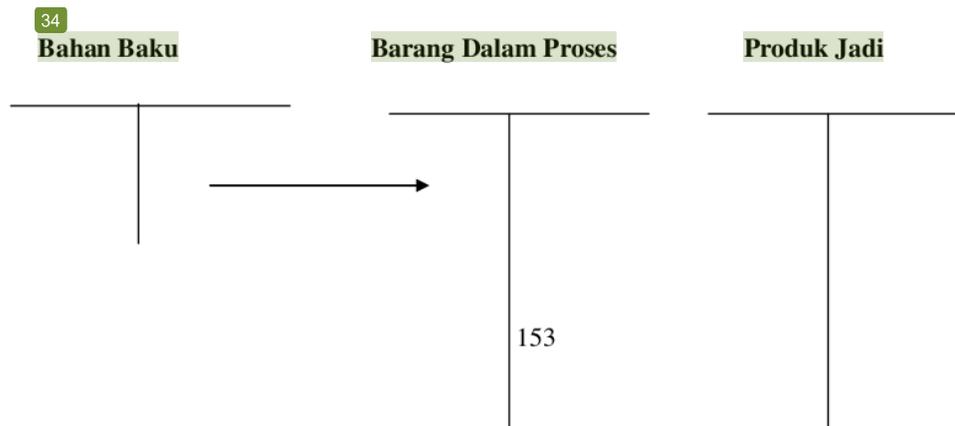
Jenis industri telah berkembang pada zaman tersebut antara lain :

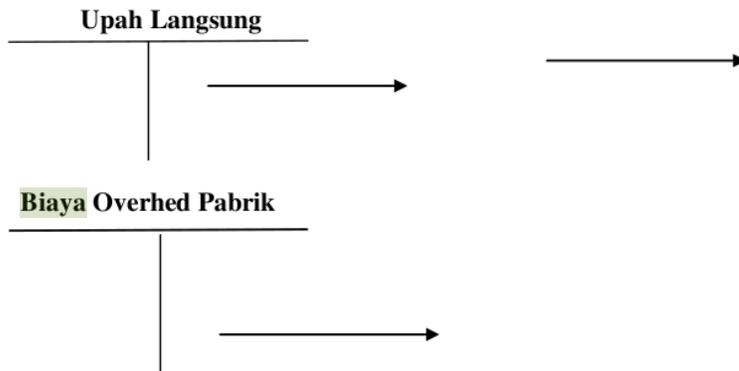
- 1) pengolahan bahan-bahan yang berasal dari emas dan perak;
- 2) pembuatan persenjataan untuk perang
- 3) pembuatan alat-alat pertanian dan perkebunan;
- 4) pengolahan bahan-bahan untuk perhiasan;
- 5) tekstil;

Sistem akuntansi akrual yang dikembangkan oleh Kautilya dapat mendukung akuntansi untuk perusahaan industri.

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur biaya pokok produksi dan jenis-jenis persediaan yang dimiliki, berikut ini dapat diberikan gambaran tentang akuntansi proses produksi sehingga diperoleh sebuah harga pokok produksi sebagai berikut :

Gambar IX.1
Jenis-Jenis Akun Yang Terkait
Dalam Proses Penyusunan Harga Pokok Produksi.





6. BIAYA STANDAR DAN TARIF BIAYA MENURUT ARTHASASTRA

Arthasastra telah menetapkan biaya standard dan tariff biaya untuk jenis-jenis barang yang diproduksi.

Juga dibuat ketentuan siapa yang harus mengerjakan barang tersebut agar diperoleh kualitas yang terbaik. Pengawas yang bertugas mengawasi proses produksi tersebut juga ditetapkan, sehingga jelas pejabat yang bertanggungjawab yang proses produksi tersebut. Karena bagi pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dikenakan sanksi.

Gambar IX.2.

Pihak Yang Bertanggung Jawab, Jenis Kegiatan, Standar Tarif.

Pihak yang bertanggung jawab	Jenis Kegiatan	Standard dan Tarif yang ditentukan	Petunjuk dalam Arthasastra.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kepala Percetakan uang (laksana)	Mencetak mata uang perak & tembaga	- mata uang perak dengan seperempat tembaga	Bk II, Bab 12 : 24, 26.

Dhyaksha)		<ul style="list-style-type: none"> - campuran timah dan antimony untuk mata uang 1 pana, ½ pana, ¼ & 1/8 pana. - mata uang tembaga dengan ¼ capuran untuk 1 masaka, ½ masaka, 1 kakani dan ½ kakani. - upah pembuatan mata uang 8 %, komisi 5 %, upah pemeriksaan 1/8 %. 	
2. Direktur emas dan pabrik pengolahan emas dan bahan lainnya.	Mengolah emas dan manik-manik.	<ul style="list-style-type: none"> - Para tukang emas selama mengerjakan emas, manik-manik, melapis dan menyepuh perhiasan emas, masuk dan keluar dari tempat kerja setelah pakaian, tangan dan bagian tubuh diperiksa. - Setelah jam kerja, semua alat kerja dan pekerjaan yang belum terselesaikan harus ditinggalkan ditempat kerja tersebut. - Dalam pekerjaan pemasangan , para tukang harus memakai 1/5 bagian untuk pemasangan pada dasar dan 1/10 sebagai pemasangan samping. - Dalam pekerjaan pelapisan emas, tukang emas harus melapisi sebuah bnda dari tembaga dengan jumlah emas yang sama. 	Bk II, Bab 13 : 33, 34. 41, 44
3. Direktur Persenjataan	Membuat senjata untk. berperang, baju perang, dan perlengkapan perang prajurit.	<ul style="list-style-type: none"> - Yang membuat peralatan perang adalah para tukang dan seniman dalam peralatan perang; - Dipersiapkan terlebih dahulu mesin-mesin pembuat senjata perang; - Barang-barang yang diproduksi berdasarkan pesanan (atas perintah raja); - Ditetapan jumlah hari kerja, jumlah waktu pengerjaan produk dan 	Bk.II. 18 : 1, 11,20.

		<p>gaji dari tiap pekerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - setelah produk selesai dikerjakan harus disimpan di tempat yang cocok. - Senjata yang berfungsi untuk memotong, menembus, menyerang, harus dibuat dari besi, tulang atau kayu. 	
4. Standardisasi Timbangan dan ukuran.	Mendirikan pabrik-pabrik pembuat timbangan dan ukuran	<ul style="list-style-type: none"> - Timbangan hendaknya dibuat dari besi atau dari batu dari Magadha atau dari bukit Makala. - Timbangan tidak boleh bertambah berat yang dipengaruhi oleh air, dan berubah karena penggosokan, atau berkurang berat oleh panas. 	Bk II. 19:10
5. Direktur benang dan tekstil	Menenun benang wol, serat kulit kayu, katun, sutera, nami dan lenan,	<ul style="list-style-type: none"> - pekerjaan menenun harus dikerjakan oleh para janda, wanita cacat, para ibu yang menganggur, ds. - Pekerjaan menenun harus dikerjakan oleh pekerja terampil, sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi. - Produksi berdasarkan pesanan. 	Bk. II. 23 : 2, 7
6. Direktur Kereta	Membuat kereta puri (kereta istana), kereta pesta, kereta perang, kereta perjalanan, kereta berbaris memasuki kota musuh, kereta latihan.	<ul style="list-style-type: none"> - pembuatan semua kereta berdasarkan pesanan (job order). - Pembuat kereta dan pemesan kereta harus menetapkan jenis dan ukuran kereta yang akan dibuat - Pembuat kereta perang harus tahu mengenai penggunaan busur panah, ds.nya, sekaligus menetapkan seluruh biaya pesanan per jenis kereta yang dipesan. 	Bk. II, 33 : 2, 3, 4, 5.
7. Direktur Penjara	Membuat barang-barang dari benang	-	Bk. IV, 1 : 1, 2, 3, 4,

	sampai menjadi barang jadi. Yang mengerjakan pekerjaan ini penghuni penjara dibawah pengawasan Direktur penjara dan stafnya,		
--	---	--	--

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI :

P.9.01. Sebuah Negara mempunyai kekayaan yang tersimpan di laut, di gunung-gunung, di dalam api, dsb,nya sebagai bahan tambang yang perlu diolah melalui industri modern. Hal tersebut dijelaskan dalam Rgveda VIII.4.41. Yang berkaitan dengan kewajiban pengembangan industri modern oleh masyarakat penganut Veda dijelaskan dalam Rgvedal. 31. 8.

Diminta :

- a) Sdr. baca Ramayana, apakah pada zaman Ramayana sudah diterapkan prinsip industri modern. Tunjukan Bab dan halaman yang memberi petunjuk mengenai hal tersebut.
- b) Sdr. baca Baratayuda, apakah pada zaman Bratayuda sudah diterapkan prinsip industri modern. Tunjukan Bab dan halaman yang memberi petunjuk mengenai hal tersebut.

P.9.02. Jelaskan yang dimaksud dengan harga pokok penuh, serta berikan ilustrasinya dalam sebuah contoh, sehingga menjadi jelas maksudnya.

P.9.03. Jelaskan yang dimaksud dengan harga pokok pesanan. Berikan ilustrasinya sehingga menjadi jelas maksudnya.

P.9.04. Jelaskan yang dimaksud dengan harga pokok proses.

P.9.05. Jelaskan perbedaan antara harga pokok pesanan dengan harga pokok proses.

P.9.06. Sebutkan 5 (lima) Departemen yang ada kaitannya dengan industri.

P.9.07. Saudara baca dalam buku Arthasastra 3 (tiga) Departemen yang ada hubungannya dengan industri dan selanjutnya berikan komentar mengenai kegiatan Departemen tersebut.

P.9.08. Jelaskan standar tariff yang ditetapkan untuk pembuatan mata uang.

P.9.09. Jelaskan departemen mana yang diberi tanggung jawab untuk mencetak mata uang.

P.9.10. Apakah mencetak mata uang menjadi monopoli departemen pencetak uang milik pemerintah. Jelaskan jawaban Saudara.

P.9.11. Apakah pihak swasta boleh mencetak mata uang ?. Jelaskan pendapat Saudara.

P.9.12. Jelaskan tugas dan fungsi dari Direktur Kereta. Berikan penjelasan tentang tariff yang berlaku pada Direktur Kereta.

P.9.13. Jelaskan tugas dan fungsi dari Direktur Penjara. Berikan penjelasan tentang tariff Yang berlaku pada Direktur Penjara.

P.9.14. Jelaskan yang dimaksud dengan akuntansi keuangan, dan berikan contohnya agar menjadi jelas makdsunya.

P.9.15. Jelaskan, akuntansi pabrik masuk kelompok akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Jelaskan pendapat Saudara

P.9.16. Jelaskan perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Agar jelas perbedaannya tuangkan dalam sebuah bagan.

P.9.17. Saat ini, setiap Negara berusaha dapat mencetak mata uangnya sendiri, dan tugas mencetak mata uang tersebut diserahkan kepada perusahaan Negara.

Dalam mencetak mata uang ini yang lebih tepat diterapkan harga pokok pesanan atau harga pokok proses ? Jelaskan pendapat Saudara.

P.9.18. Sesuai petunjuk dalam Arthasastra bahwa pada zamannya industri sudah berkembang dengan baik, terutama industri tekstil.

Jelaskan pendapat Saudara, pada industri tekstil, yang lebih tepat penerapannya apakah harga pokok proses atau harga pokok pesanan.

P.9.19. Kira-kira apa alasan yang mendasarinya bahwa pada zaman Athasastra sudah dirasa begitu penting mengembangkan ukuran, takaran dan timbangan. Jelaskan pendapat Saudara.

P.9.20. Apakah pada zaman sekarang ukuran, takaran, dan timbangan masih diperlukan dalam semua peraktek kehidupan. Jelaskan pendapat Saudara.

7. CONTOH KASUS PERCETAKAN MATA UANG

Pemerintah Kerajaan memesan untuk mencetak 5.000.000 keping uang logam dengan satuan 1 *pana*. Berat per pana 20 geram. Bahan baku utama terdiri dari perak dan bahan pengeras dari besi dan timah, serta bahan pemutih. Bahan baku utama dari perak 11/16 (68,75%), bahan pengeras dari besi dan timah ¼ (25%) dan bahan pemutih 1/6 (6,25%).

Bahan baku yang dibeli oleh perusahaan Percetakan Uang Negara adalah :

- 68.800 kg perak @ 30 *pana* per kg
- 25.020 kg besi bercampur timah @ 10 *pana* per kg
- 6.260 kg bahan pemutih @ 5 *pana* per kg
- 1.250 khg bahan lainnya @ 3 *pana*

Semua bahan-bahan tersebut disimpan di gudang pabrik

- Upah pembuatan (produksi) 8% dari nilai dan jumlah mata uang yang dicetak
- Pajak penjualan 5% dari jumlah mata uang yang dicetak
- Upah pemeriksaan 1/8% dari jumlah mata uang yang dicetak
- Biaya sertifikasi 1/8% dari jumlah mata uang yang dicetak

Dari catatan Bagian Akuntansi Pabrik diperoleh data sebagai berikut :

- Pemakaian bahan dari perak 68.755 kg
- Pemakaian bahan besi bercampur timah 25.003 kg
- Pemakaian bahan pemutih 6.250 kg

Dari catatan di Bagian Akuntansi untuk pembuatan mata uang tersebut diperoleh data sebagai berikut :

- Upah pembuatan (upah langsung) mata uang sebesar 125.000 *pana*
- Beban gaji manajemen puncak 30.000 *pana*
- Penyusutan gedung-gedung 30.000 *pana*
- Penyusutan gedung pabrik dan inventaris pabrik 22.000 *pana*
- Penyusutan emplasemen 10.000 *pana*
- Penyusutan inventaris lainnya 5.000 *pana*
- Biaya pembersihan pabrik 15.000 *pana*
- Bahan penolong 1000 kg X 3 *pana* = 3.000 *pana*
- Pengeluaran biaya lainnya 20.000 *pana*

Bedasarkan data di atas hitunglah :

- 1) Bahan baku yang seharusnya dibebankan ke harga pokok produksi, dalam kuantitas dan nilainya.
- 2) Tagihan yang dibebankan kepada pemerintah kerajaan atas pemesanan 5.000.000 keping uang satuan *pana*.
- 3) Hitunglah nilai instrinsik uang per *pana*.
- 4) perhitungkan harga pokok produksi pembuatan 5.000.000 keping uang satuan *pana*.
- 5) Selisih biaya produksi baik menguntungkan atau merugikan dalam pembuatan mata uang tersebut di atas.

PEMECAHAN KASUS

- 1) Bahan baku yang dibebankan ke harga pokok produksi dalam kuantitas dan nilainya sbb :

- Bahan dari perak untuk 5.000.000 keping *pana*
 $5.000.000 \times 20 \text{ gr} \times 68,75\% = 68.750.000 \text{ gr} = 68.750 \text{ kg}$
Nilai : 68.750 kg X 30 *pana* = 2.062.500 *pana*
- Bahan dari besi bercampur timah :
 $5.000.000 \times 20 \text{ gr} \times 25\% = 25.000.000 \text{ gr} = 25.000 \text{ kg}$
Nilainya = 25.000 X 10 *pana* = 250.000 *pana*
- Bahan pemutih :
 $5.000.000 \times 20 \text{ gr} \times 6,25\% = 6.250.000 \text{ gr} = 6.250 \text{ kg}$
Nilainya = 6.250 kg X 5 *pana* = 31.250 *pana*
Jumlah nilainya dalam *pana* = 2.343.750 *pana*

2) Jumlah tagihan yang dibebankan kepada pemerintah kerajaan sebagai pemesan 5.000.000 keping uang *pana* sebagai berikut :

- Biaya bahan baku	= 2.343.750 <i>pana</i>
- biaya bahan penolong 1000 X 3 <i>pana</i>	= 3.000 <i>pana</i>
- Biaya produksi 8% X 5.000.000 <i>pana</i>	= 400.000 <i>pana</i>
- Pajak penjualan (PPN) 5% X 5.000.000 <i>pana</i>	= 250.000 <i>pana</i>
- Upah pemeriksaan 1/8% X 5.000.000 <i>pana</i>	= 6.250 <i>pana</i>
- Biaya sertifikasi 1/8% X 5.000.000 <i>pana</i>	= 6.250 <i>pana</i>
- Total tagihan kepada kerajaan	<u>= 3.009.250 <i>pana</i></u>

3) Nilai intrinsik per *pana* adalah sebesar tagihan kepada pemerintah kerajaan dibagi dengan jumlah mata uang yang dicetak :
 $3.009.250 : 5.000.000 = 0,60185$, dibulatkan = **0,60 *pana***

4) Perhitungan harga pokok produksi menurut pabrik mencetak mata uang :

- Bahan baku yang digunakan:		
- bahan dari perak 68.755 kg @ 30 <i>pana</i>		2.062.650 <i>pana</i>
- bahan besi bercampur timah 25.003 @ 10 <i>pana</i>		250.030 <i>pana</i>
- bahan pemutih 6.250 kg @ 5 <i>pana</i>		<u>31.250 <i>pana</i></u>
Total biaya bahan baku		2.343.930 <i>pana</i>
- Upah langsung		<u>125.000 <i>pana</i></u>
biaya bahan baku + upah langsung		<u>2.468.930 <i>pana</i></u>
- Biaya Overhead Pabrik :		
- Beban gaji management puncak	30.000 <i>pana</i>	
- Beban gaji personil pabrik	25.000 <i>pana</i>	
- Penyusutan gedung-gedung	<u>30.000 <i>pana</i></u>	<u>85.000 <i>pana</i></u>
Sub total		2.553.930 <i>pana</i>
Jumlah pemindahan (sub total)		2.553.930 <i>pana</i>
- Penyusutan gedung pabrik & inventaris pabrik	22.000 <i>pana</i>	
- penyusutan emplasemen	10.000 <i>pana</i>	
- penyusutan inventaris lainnya	5.000 <i>pana</i>	
- Biaya pembersihan pabrik	15.000 <i>pana</i>	
- Bahan penolong	3.000 <i>pana</i>	
- Pengeluaran biaya lainnya	<u>20.000 <i>pana</i></u>	<u>75.000 <i>pana</i></u>
Total biaya produksi untuk 5.000.000 keping <i>pana</i>		<u>2.628.930 <i>pana</i></u>

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI :

P.9.01. Sebuah Negara mempunyai kekayaan yang tersimpan di laut, di gunung-gunung, di dalam api, dsb,nya sebagai bahan tambang yang perlu diolah melalui industri modern. Hal tersebut dijelaskan dalam Rgveda VIII.4.41. Yang berkaitan dengan kewajiban pengembangan industri modern oleh masyarakat penganut Veda dijelaskan dalam Rgveda I.31.8.
 Diminta :

- a) Sdr. baca Ramayana, apakah pada zaman Ramayana sudah diterapkan prinsip industri modern. Tunjukkan Bab dan halaman yang memberi petunjuk mengenai hal tersebut.
 - b) Sdr. baca Bratayuda, apakah pada zaman Bratayuda sudah diterapkan prinsip industri modern. Tunjukkan Bab dan halaman yang memberi petunjuk mengenai hal tersebut.
- P.9.02. Jelaskan yang dimaksud dengan harga pokok penuh, serta berikan ilustrasinya dalam sebuah contoh, sehingga menjadi jelas maksudnya.
- P.9.03. Jelaskan yang dimaksud dengan harga pokok pesanan. Berikan ilustrasinya sehingga menjadi jelas maksudnya.
- P.9.04. Jelaskan yang dimaksud dengan harga pokok proses
- P.9.05. Jelaskan perbedaan antara harga pokok pesanan dengan harga pokok proses
- P.9.06. Sebutkan 5 (lima) Departemen yang ada kaitannya dengan industri.
- P.9.07. Saudara baca dalam buku Arthasastra 3 (tiga) Departemen yang ada hubungannya dengan industri dan selanjutnya berikan komentar mengenai kegiatan Departemen tersebut.
- P.9.08. Jelaskan standar tarif yang ditetapkan untuk pembuatan mata uang.
- p.9.09. Jelaskan Departemen mana yang diberi tanggung jawab untuk mencetak mata uang.
- P.9.10. Apakah mencetak mata uang menjadi monopoli departemen pencetak uang milik pemerintah. Jelaskan jawaban Saudara.
- P.9.11. Apakah pihak swasta boleh mencetak mata uang ?. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.9.12. Jelaskan tugas dan fungsi dari Direktur Kereta. Berikan penjelasan tentang tariff yang berlaku pada Direktur Kereta.
- P.9.13. Jelaskan tugas dan fungsi dari Direktur Penjara. Berikan penjelasan tentang tariff Yang berlaku pada Direktur Penjara.
- P.9.14. Jelaskan yang dimaksud dengan akuntansi keuangan, dan berikan contohnya agar menjadi jelas maksudnya.
- P.9.15. Jelaskan, akuntansi pabrik masuk kelompok akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Jelaskan pendapat Saudara
- P.9.16. Jelaskan perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Agar jelas perbedaannya tuangkan dalam sebuah bagan.
- P.9.17. Saat ini, setiap Negara berusaha dapat mencetak mata uangnya sendiri, dan tugas mencetak mata uang tersebut diserahkan kepada perusahaan Negara. Dalam mencetak mata uang ini yang lebih tepat diterapkan harga pokok pesanan atau harga pokok proses ? Jelaskan pendapat Saudara.
- P.9.18. Sesuai petunjuk dalam Arthasastra bahwa pada zamannya industri sudah berkembang dengan baik, terutama industri tekstil. Jelaskan pendapat Saudara, pada industri tekstil, yang lebih tepat penerapannya apakah harga pokok proses atau harga pokok pesanan.
- P.9.19. Kira-kira apa alasan yang mendasarinya bahwa pada zaman Athasastra sudah dirasa begitu penting mengembangkan ukuran, takaran dan timbangan. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.9.20. Apakah pada zaman sekarang ukuran, takaran, dan timbangan masih diperlukan dalam semua peraktek kehidupan. Jelaskan pendapat Saudara.

AKUNTANSI HINDU

44

Madhyandinasya savanasya dhanah purolasam indra krsveha carum pra yat stoat jarita
turnyartha vrsayamana upa girbhir itte (Rgv. III. 52. 5)

Wahai pemimpin maha mulia, semoga Engkau menikmati jagung bakar dan kue serta mentega
lezat lainnya, dari upacara api tengah hari, bila para pemuja-Mu yang kuat dan cemburu buru-
buru memuja-Mu dan memuliakan-Mu dengan doa dan pujian (Rgv. III. 52.5).

BAB X

**SUMBER EKONOMI, SUMBER PENDAPATAN NEGARA
BUKAN PAJAK, SERTA
JENIS-JENIS PAJAK DALAM AJARAN HINDU.**

**1. PETUNJUK TENTANG SUMBER-SUMBER EKONOMI DAN SUMBER
PENDAPATAN SEBUAH NEGARA.**

Sumber-sumber ekonomi dan sumber pendapatan sebuah Negara cukup jelas dipaparkan dalam teks Veda, Manava Dharmasastra dan Arthasastra. Berikut ini ini diuraikan beberapa topik yang berkaitan dengan masalah tersebut seperti pendapatan berasal dari **Sumber Daya Alam (SDA), Harta Benda Yang Pemiliknnya Menghilang, Harta karun, Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.**

**1.1. Sumber Ekonomi dan Sumber Pendapatan Berasal Dari Sumber
Daya Alam.**

Untuk dapat mengurus pemerintahan dengan baik dan menjadikan rakyatnya berkehidupan makmur, sejahtera dan adil, maka pemimpin pemerintah memerlukan uang untuk membiayai kegiatannya tersebut. Uang-uang yang dikumpulkan oleh pemerintah, apakah oleh pemerintahan berbentuk **Kerajaan**, berbentuk **Republik** dan sebagainya disebut dengan penerimaan Negara atau pendapatan Negara.

Pemerintah perlu mengetahui sumber-sumber ekonomi yang ada pada wilayah pemerintah tersebut, yang dapat dijadikan tempat menggali penerimaan Negara. Sumber ekonomi yang ada tersebut harus diolah dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah sendiri atau bersama-sama dengan rakyatnya. Sumber ekonomi yang diolah langsung oleh pemerintah dalam bentuk perusahaan disebut dengan perusahaan pemerintah atau perusahaan Negara. Sedangkan sumber ekonomi yang diolah langsung oleh masyarakat disebut dengan perusahaan swasta.

Veda memberikan petunjuk tentang sumber ekonomi yang berasal dari **sumber daya alam (SDA)** yang dapat dikuasai oleh Negara yang dapat dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyatnya, dalam bentuk (1) hutan-hutan; (2) sungai-sungai; (3) langit; (4) tanaman-tanaman (untuk perkebunan); (5) gunung-gunung; (6) perairan (laut/samudra); (7) bumi, dan (8) api. Tentang jenis sumber ekonomi yang berasal dari Sumber Daya Alam tersebut di atas penjelasannya dapat ditemukan pada ayat-ayat Veda dibawah ini.

- 1). ⁴⁸ Hutan-hutan belantara dan sungai-sungai sebagai sumber ekonomi dan juga sebagai sumber pendapatan Negara.

Rgveda III. 51. 5

“ Rayim raksanti jirajo vanani “

“ Hutan-hutan belantara dan sungai-sungai merupakan sumber ekonomi dan sumber pendapatan (Negara).

Hutan-hutan belantara menghasilkan berbagai jenis kayu-kayuan yang dapat digunakan untuk bahan-bahan bangunan, bahan baku industri perkayuan, bahan obat-obatan, dsb.nya, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Sungai-sungai dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi antar daerah, menghasilkan berbagai jenis ikan, batu-batuan dan pasir untuk pembangunan.

- 2). Hutan-hutan dan tumbuh-tumbuhan (perkebunan) serta perairan (lautan) sebagai sumber ekonomi dan sumber pendapatan Negara.

Rgveda I. 59.3.

“ Ya parvatesu-osadhisu-apsu “

“ Terdapat kekayaan yang tersembunyi di hutan-hutan, di dalam tumbuh-tumbuhan dan dalam perairan (lautan) “.

Penjelasan yang terdapat dalam Rgveda I. 59.3, diperjelas lagi dalam Rgveda III. 51.5 yaitu berkenaan dengan kekayaan yang tersembunyi di hutan-hutan, di dalam tumbuh-tumbuhan ditambah dengan kekayaan yang tersimpan di perairan.

Yang dimaksud dengan kekayaan yang tersimpan di dalam tumbuh-tumbuhan, adalah kekayaan yang diberikan oleh tanaman perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan coklat, kopi, kelapa, karet, teh dan sebagainya.

Indonesia saat ini memiliki tanaman perkebunan yang sangat luas yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, baik yang berstatus perkebunan milik Negara maupun milik swasta. Kekayaan yang tersimpan di perairan, yaitu kekayaan yang terdapat di perairan laut dangkal utamanya berbagai jenis ikan, bahan untuk

membuat garam, bahan tambang, perairan atau laut sebagai sarana transportasi, sarana penghubung satu tempat dengan tempat lainnya, dsb.nya.

- 3). Gunung-gunung menyimpan kekayaan dan sumber pendapatan secara tersembunyi dan dinyatakan tidak bisa habis.

RgvedaI. 130. 3

“ Guha nidhim-parivitam asmani-anante “

“ Terdapat kekayaan dan sumber pendapatan yang tersimpan di gunung-gunung dan tidak dapat habis “.

- 4). Pada Langit dan bumi tersimpan kekayaan dan sumber pendapatan “.

Rgveda VIII. 40. 4

“ Iyam dyauh prathivi mahi-upasthe bibhrto vasu “.

“ Terdapat kekayaan yang tersembunyi dilangit dan di dalam perut bumi “.

Veda ternyata telah memberikan petunjuk bahwa manusia akan memperoleh kekayaan dan pendapatan yang bersumber dari langit. Langit atau angkasa saat ini sudah dikapling-kapling oleh Negara-Negara maju dengan menempatkan satelitnya diangkasa yang mengorbit sepanjang waktu. Negara yang belum punya satelit dapat menyewa kemampuan dari satelit tersebut antara lain untuk memancarkan gambar TV, untuk telepon, dan sebagainya. Langit juga dimanfaatkan untuk sarana transportasi udara oleh semua Negara di dunia ini, baik untuk bisnis maupun untuk keperluan lainnya.

Kekayaan yang tersimpan dalam perut bumi terdiri dari berbagai jenis benda tambang, seperti batubara, emas, perak, timah, uranium, minyak tanah, dsb.nya.

- 5). Ada kekayaan yang tersimpan di dalam api.
Yang dimaksud dengan kekayaan di dalam api adalah kekayaan pada gunung-gunung berapi dalam bentuk pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik, air panas untuk pengobatan dan pariwisata alam, dan manfaat lainnya. Hal ini dinyatakan dalam :

RgvedaI. 59. 3.

“ Vaisvanare dadhire-agna vasuni “

“ Ada kekayaan dan sumber pendapatan di dalam api “.

1.2. Sumber Ekonomi dan Sumber Pendapatan Berasal dari Harta Yang Pemiliknya Menghilang Serta Harta Karun

Pemilik Harta Menghilang

Sumber ekonomi dan sumber pendapatan Negara dapat berasal dari harta benda yang pemiliknya⁹ hilang, pemerintah dapat menyita sebagai milik Negara, asalkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah disimpan oleh Negara pihak yang mengaku atau merasa sebagai pemiliknya tidak melakukan penuntutan. Lewat dari waktu tersebut barang tersebut menjadi milik Negara. Masalah ini dijelaskan dalam Manava Dharmasastra Buku VIII. 30,

“ Bagi harta benda yang pemiliknya hilang, Pemerintah akan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun. Dalam jangka waktu 3 tahun pemiliknya dapat menuntutnya, tetapi bila lewat dari jangka waktu tersebut, Pemerintah menyitanya untuk Negara “.

Hasil Tambang

Sumber ekonomi pendapatan Negara dapat pula berasal dari benda-benda tambang, yang menurut **Manava Dharmasastra** disebut sebagai harta karun yang tersembunyi dibawah tanah, dan harta karun lainnya. Untuk harta karun yang tertimbun dibawah tanah dalam bentuk logam-logam dan dalam bentuk barang lainnya, pemerintah berhak atasnya sebesar 50 % atau setengahnya.

Bagi yang menemukan harta karun tersebut berhak 1/6 bagian atau sekitar 16,50 %, dan 33,50 % untuk biaya operasional merealisasikan penemuan harta tersebut, sisanya sebesar 50 % untuk kas Negara. Masalah ini dijelaskan dalam Manava Dharmasastra Buku VIII. 38 & 39.

“ Bila pemerintah mempunyai harta karun yang tersembunyi dibawah tanah, hendaknya ia menyerahkan seperenam bagian kepada brahmana dan meletakkannya setengah bagian lainnya ke kas Berbendaharaan Negara “. (MDV VIII.38)

Selanjutnya MDV VIII.39 menjelaskan “ Raja (pemerintah) memperoleh setengah bagian dari harta karun yang tersembunyi dan logam-logam yang diperoleh dari dalam bumi dengan alasan karena pemerintah memberi perlindungan dan karenanya ia menjadi pemiliknya “.

1.3. Sumber Ekonomi Dan Pendapatan Dari ³⁸Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Sumber ekonomi pemerintah tidak hanya berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) tetapi juga berasal dari hasil perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

Profesi *Vaisia* adalah berbisnis atau melakukan perdagangan (Yajurveda XXX. 5), dengan melakukan pembelian dan penjualan barang-barang dengan memperoleh keuntungan. Perdagangan ini dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri baik melalui rute laut maupun rute darat. Hal ini berarti dengan sistem perdagangan impor dan ekspor. Berjualan dengan tujuan memperoleh keuntungan, bukan menderita kerugian. Hal ini dijelaskan dalam Atharvaveda III.15. 4, yaitu “semoga dengan usaha pembelian dan penjualan barang-barang diperoleh keuntungan”.

Para pedagang juga diingatkan agar selalu bertindak hemat, tidak boleh boros dalam menggunakan penghasilannya, agar usahanya dapat berjalan ajeg (going concern).

Untuk hal ini diungkapkan dalam Atharvaveda XIX. 8. 2, dengan penjelasan “semoga para pedagang memperoleh keuntungan dan menggunakan keuntungan tersebut dengan hemat”

Dalam dunia bisnis masalah utang-piutang tampaknya sudah lazim sejak zaman Veda, khususnya sejak zaman Rgveda.

Para pedagang pada zaman Rgveda berharap mempunyai utang sekecil mungkin, cukup berbeda dengan para pedagang pada zaman Kaliyuga ini, umumnya selalu mengejar utang dari bank atau sumber lainnya, sehingga banyak muncul kredit macet. Secara filosofis, utang menurut Atharvaveda VI. 117.3 dibagi dalam tiga golongan yaitu :

- (1) utang di dunia ini;
- (2) utang di dunia lain, dan
- (3) utang di dunia berikutnya.

Diperkirakan maksud yang tersirat dari 3 jenis utang tersebut adalah utang karma, utang yang timbul dari hasil perbuatan, bahwa jenis utang yang pertama akan berdampak pada jenis utang yang kedua dan seterusnya berdampak pada utang yang ketiga. Oleh karena itu para pedagang diingatkan harus berhati-hati dalam bertindak (mengambil utang), agar tidak berdampak buruk terhadap ketiga jenis kehidupannya. Dengan melakukan perdagangan luar negeri dengan sistem ekspor dan impor, para pedagang dalam hal ini *Varna Vaisia*, diharapkan membawa kekayaan masuk ke Barathavarsa (India) dalam bentuk keuntungan dari negeri-negeri seberang daratan maupun lautan (Rgveda I. 148. 3 & 167. 2). Perdagangan luar negeri juga dilakukan dengan mengarungi samudra satu dengan samudra yang lainnya, tidak terbatas hanya pada Negara tetangga yang dekat saja. Hal ini dijelaskan dalam Rgveda VII. 6. 7, dengan penjelasan “Kekayaan (modal) dan keuntungan harus diperoleh dengan berdagang mengarungi berbagai samudra (samudra ini dan samudra itu)”

2. DASAR HUKUM PERPAJAKAN DALAM VEDA

Sumber pendapatan Negara yang paling besar diharapkan dari pajak, disamping sumber pendapatan lainnya.

Untuk mengisi kas Negara, Pemerintah berhak memungut pajak dari penghasilan yang diperoleh oleh warganegaraanya.

- 2.1. Hal ini dijelaskan dalam **Rgveda VII. 6. 5** yang berbunyi :
“ Pemerintah dengan kekuasaannya berhak menarik pajak dari warganegaraanya “.
- 2.2. Orang-orang kaya atau perusahaan yang kaya yaitu perusahaan yang memperoleh keuntungan wajib hukumnya membayar derma untuk kepentingan bersama atau untuk membantu orang miskin (Rgveda X.117.5). Membayar derma disini maksudnya tidak lain adalah membayar pajak kepada Negara dan atau Pemerintah dan juga menyiapkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan **tanggung jawab social dan lingkungan (corporate social responsibility/CSR)**.
Jadi masalah kewajiban penduduk sebagai perorangan yang mempunyai penghasilan dan atau kaya untuk membayar pajak dan atau sumbangan, serta perusahaan (entitas) yang memperoleh keuntungan wajib hukumnya membayar pajak dan juga menyisihkan keuntungannya untuk tanggung jawab social dan lingkungan sudah dimuat dengan jelas dan ajaran Veda.
- 2.3. Penarikan pajak ini harus berdasarkan peraturan perundangan yang dibuat dan disetujui oleh wakil-wakil rakyatnya dan raja sendiri, agar terdapat kepastian hukum bagi pemerintah, bagi rakyatnya dan **160**i pemungut pajak sendiri.
Penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundangan, hal ini dijelaskan pada **Manava Dharmasastra Buku VII. 128**, yang menyatakan bahwa Raja harus menetapkan kewajiban pajak bagi rakyatnya berdasarkan peraturan, sehingga Raja (Pemerintah) dan Petugas Pajak mempunyai pedoman yang jelas dalam memungut pajak.
- 2.4. Dalam Atharvaveda VI. 116. 2, dijelaskan bahwa yang pertama kali memperkenalkan system perpajakan adalah Yama, putra Visvasvat.
- 2.5. Pemerintah sebuah Negara dinyatakan mempunyai kewenangan untuk menarik berbagai jenis pajak dari warga negaranya (Atharvaveda III. 4. 3).
- 2.6. Dinyatakan pula dalam Atharvaveda III. 4. 7, bahwa setiap Negara mempunyai cara-cara yang berbeda dalam mengenakan pajak kepada warga negaranya.

3. JENIS-JENIS PAJAK DAN TARIF PAJAK.

4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak tidak langsung, karena tidak dikenakan secara langsung kepada Wajib Pajak.

Dalam **Manava Dharmasastra** ditemukan petunjuk tentang pengaturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dijelaskan bahwa Pemerintah dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya untuk pengenaan pajak atas penjualan dan pembelian bahan makanan, rempah-rempah, barang jadi, serta Pemerintah harus menetapkan Wajib Pajaknya (WP.nya). Untuk tujuan pengenaan pajak atas

barang-barang tersebut, maka pemerintah harus menetapkan nilai beli dan nilai jual, ongkos angkut atas barang-barang yang akan dikenakan pajak dimaksud. Penjelasan tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut ditemukan pada Manawadharmasastra (MDS VII. 127), berbunyi sebagai berikut :

“ Dengan mempertimbangkan sebaik-baiknya harga beli dan harga jual, panjang jalan yang dilalui (maksudnya ongkos angkut), terhadap harga bahan makanan dan rempah-rempah, harga barang jadi, setelah itu Raja menetapkan Wajib Pajak nya (WP) “.

Dalam buku Arthasastra, Rangarajan, V.ii. 227 ditemukan istilah “ *Vyaji* “ atau “ *transaction tax* “, atau **pajak penjualan**. Prosentase tarif PPN berkisar antara 5 s.d. 20 %. Besarnya tariff PPN tersebut tergantung kepada jenis barang-barang yang diperjualbelikan. Dijelaskan pula bahwa jenis pajak tersebut sangat penting bagi pemerintah.

Ditetakankan pula bahwa sumber dana utama untuk mendanai pembangunan dengan tujuan memakmurkan rakyat adalah dari **pajak** (Arthasastra, Rangarajan, VII.i.223) Berikut ini diberikan gambaran mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut pada zaman Arthasastra, seperti terlihat pada Tabel X.1 berikut ini.

Tabel X.1.

Jenis-jenis Pajak Dan Tarif Pajak

No. Urut	Obyek Pajak & Obyek Lainnya	Berbagai Pembebanan Atas Obyek Pajak					Catatan
		Bagian Untuk Pemerintah	Biaya Operasional/Biaya Produksi	Bag. Yg. Mengerjakan/Menemukan	Pajak Penghasilan (PPh)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan pajak Penjualan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
1	1) Seper-limapuluh bagian atas Penambahan hasil ternak dan emas	--	--	--	2 %	--	MDS, Bk .VII. 130
	2) seper-delapan, seper-enam atau seper-duabelas Atas Hasil tumbuh-tumbuhan	--	--	--	12.50 %	--	
		--	--	--	16.50 %	--	
2	Seper-enam bagian atas pohon kayu, daging, madu, mentega, wangi-wangian, daun obat-obatan, esen, penyedap makan, bunga-bunga, akar-akaran dan	--	--	--	16.50 %	--	MDS, Bk. VII. 131, 132.

	buah-buahan, daun-dunan, pohon-pohonan, pot, rumput, barang-barang dari tebu, kulit, bejana tanah, barang-barang dari batu						
3	Raja memperoleh setengah bagian dari harta karun yang tersembunyi dan logam-logam yang diperoleh dari dalam bumi, dengan alasan karena Raja memberi perlindungan dan karena ia menguasai bumi.	50 %	50 %	--	--	--	MDS. Bk. VIII. 39.
4	Bila Pemerintah mempunyai harta karun dibawah tanah (benda tambang), hendaknya ia menyerahkan seper-enam bagiannya kepada Brahmana (akhli penemunya) dan meletakkannya setengah bagian lainnya ke kas Bendahara Negara.	50 %	33.50 %	16.50 %	--	--	MDS. Bk. VIII. 38
5	Milik seorang yang tidak ada keturunan	100 %	--	--	--	--	Artha, Bk. II, Bab 6, ayat 21
6	Saldo anggaran dari pembubaran pasukan perang, saldo dari pembubaran perusahaan Pemerintah merupakan pengemblian dari anggaran	100 %	--	--	--	--	1) Artha, Bk. II, Bab 6 ayat 20 2) Artha Bk. II, Bab 15. 10
7.	Garam Impor hendaknya membayar pajak seper-enam bagian.	--	83.50 %	--	16.50	--	Artha, BK. II, Bab 12 ayat 29
8.	Batu biru (beryl), dengan warna teratai biru, dst, pjualannya	--	83.50 %	--	16.50 %	--	Artha, BK. II, Bab 12 ayat 30

	diizinkan bila pajaknya sudah dibayar, ditambah dengan 5 % biaya tambahan, biaya pemeriksaan dan biaya produksi						
9.	Untuk barang masuk dari luar (barang impor), pajaknya seperlima harga	--	--	--	20 % (barang impor)	--	Artha, Bk. II. Bab 22 ayat 3
10.	Ksauma, dukula, benang sutra, baju perang, kulit binatang, gading, dsb.nya, pajaknya seper-sepuluh atau seper-limabelas bagiannya	--	--	--	10 % atau 6.50 %	--	Artha, Bk. II, Bab 22 ayat 6
11.	Pakaian, kulit binatang berkaki empat, benang, katun, parfum, obat, kayu, bamboo, kulit kayu, barang dari kulit dan dari tanah, gandum, lemak, gula, garang, anggur, makanan yang sudah dimasak, pajak seperduapuluh atau seper duapuluh lima bagian	--	--	--	% atau 4 %	--	Artha, Bk. II, Bab 22 ayat 7
12.	Penjual barang yang tidak dibuat oleh Negara harus membayar pajak sebanyak 5 (lima) %. Barang-barang tersebut yaitu sura, medaka, arista, madhu, sari buah asam dan minuman keras yang asam	--	--	--	5 %	--	Artha, Bk. II, Bab 25. ayat 39.
13	1/6 pajak atas sewa tanah (the 1/6 th share from leased lands)	--	--	--	16.50	--	Artha, L.N. Rangarajan, VII.ii, hal. 281
14	Pajak atas pembelian dan penjualan barang (transaction tax/pajak transaksi) = vyaḥi	--	--	--	--	5 s.d. 9 %	Artha, LN. Rangarajan, V.ii, hal. 227 & 233
15	Pajak Pertambahan Nilai/PPN (value	--	--	--	--	20 %	Artha, LN. Rangarajan,

added tax) 20 % untuk barang- barang ekspor						V.ii. hal. 232
---	--	--	--	--	--	-------------------

4. SUMBER PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan pada Bab Vii Buku Arthashastra, LN. Rangarajan. Pada Bab ini dijelaskan pula bahwa petunjuk mengenai sumber-sumber penerimaan Negara, Kautilya meletakkannya secara tersebar pada Buku II Arthashastra, yang menguraikan tentang Tugas dan Fungsi Para Kepala Departemen.

Terdapat 13 (tiga belas) jenis sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dirangkum pada Tabel X.2 berikut ini.

Tabel X.2
Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No. Urut	Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
	Bahasa Sanskerta	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Sumber Arthashastra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	DURGAM	From the fortified town	Berasal dari kota yang dibentengi	2.62
1	<i>Danda</i>	Fine	denda	2.21.1-2, 23, 31. 2.22.3-8 throughout
2	<i>Pautavan</i>	Charges regarding standar weights and measures	Beban yang dikenakan berkenaan dengan standar berat, ukuran dan takaran	2.19.36-42
3	<i>Nagarika</i>	Revenue collected by the Governor-General of the city	Pendapatan yang dipungut oleh Gubernur (pemerintah) sebuah kota	2.36
4	<i>Lakshanadhyaksha</i>	Revenue Collected by the Chief Master of the Mint	Pendapatan yang dipungut oleh pencetak mata uang.	2.12.24
5	<i>Mudradhyaksha</i>	Fees Collected by Chief passport officer	Pendapatan yang dipungut oleh Bagian Paspor	2.34.1
6	<i>Sura</i>	Revenue Collected by the Chief Controller of Alcohol beverages	Pendapatan yang dipungut oleh pimpinan pengawas minuman beralkohol	2.25.1-2, 39, 40
7	<i>Suna</i>	Revenue Collected by the Chief Controller of Animal Slaughter	Pendapatan yang dikumpulkan oleh kepala pengawas hewan potong	2.26.3

8	<i>Sutram</i>	Revenue Collected by the Chief Commissioner Textile	Penerimaan yang dikumpulkan oleh komisioner tekstil	2.23
9	<i>Tailam</i>	Oil (sales of)	Penerimaan dari penjualan minyak	--
10	<i>Gritam</i>	Ghee (sales of)	Penerimaan dari penjualan Ghee	2.29.5-7, 30, 41.
11	<i>Kshara</i>	Sugar (sales of)	Penerimaan dari penjualan gula	--
12	<i>Sauvarnika</i>	Revenue from Chief Superintendent of Precious Metals and Jewellery	Penerimaan dari pengawas Logam berharga dan dan perhiasan	2.14
13	<i>Panyasamstha</i>	Revenue from trade and marketing	Penerimaan dari kegiatan perdagangan dan pemasaran	2.16
14	<i>Vesya</i>	Revenue from Controller of Entertainers and Courtesans	Penerimaan dari tempat hiburan dan pelacuran	2.17
15	<i>Dyutham</i>	Revenue collected by Chief Controller of Betting and Gambling	Penerimaan yang dipungut oleh kepala pengawas taruhan (togel,dsb.) dan judi (ayam, dsb.)	3.20.10
16	<i>Vastukam</i>	Revenue from real estate transactions	Penerimaan dari transaksi (jual-beli) barang tak bergerak (asset tetap)	3.8; 3.9
17	<i>Karushilpigana</i>	Revenue from artisans and craftsmen	Penerimaan dari tukang kayu dan tukang ukir	--
18	<i>Devatadhyaksha</i>	Revenue from Controller of Temples and Holy Places	Penerimaan dari candi-candi dan tempat suci	5.2.38
19	<i>Dwarabahirika</i>	Octroi and similar levies at the city gates and from foreigners	Bea masuk dan biaya lainnya yang dikenakan di pintu masuk kota dan bea masuk untuk pendatang.	2.22.8; 2.4.32
II	RASHTRAM	From the countryside	Berasal dari daerah luar kota	2.6.3
1	<i>Sita</i>	Revenue from crown lands	Penerimaan dari tanah milik negara	2.24.16-18
2	<i>Bhaga</i>	Production Share; lease rent	Bagi hasil produksi; pendapatan dari sewa	2.15.3
3	<i>Bali</i>	Special levies	Pungutan khusus lainnya	5.2.
4	<i>Kara</i>	Taxes	Pajak-pajak	--
5	<i>vanik</i>	Revenue from merchants	Penerimaan dari para pedagang	--
6	<i>Nadipala</i>	Revenue from river guards	Penerimaan dari penjaga sungai	--
7	<i>Tara</i>	Ferry charges	Penerimaan (beban/bea) penyeberangan	2.28.21,25

8	<i>Nava</i>	Boat and shipping	Penerimaan dari pengiriman barang	2.28. 2-5, 11
9	<i>Patthanam</i>	Port dues	Iuran pelabuhan	2.28.7
10	<i>Vivitam</i>	Revenue from pasture	Pendapatan dari padang rumput (tempat penggembalaan)	2.34.12
11	<i>5artani</i>	Road cess	Pajak jalan	2.21.24
12	<i>Rajju</i>	Revenue from lan survey		--
13	<i>Chorarajju</i>	Recovery from thieves in unpoliced lands		--
III	<i>KHANI</i>	From mines	Berasal dari benda tambang	2.6.4
1	<i>Suvarna</i>	Gold	Emas	
2	<i>Rajata</i>	Silver	Perak	
3	<i>Vajra</i>	Diamonds	Intan/berlian	
4	<i>Mani</i>	Gems	Permata asli	
5	<i>Mukta</i>	Pearls	Mutiara	
6	<i>Pravala</i>	Corrals	Areal yang dipagari tempat menggembalakan ternak	
7	<i>Sankha</i>	Conch	Kulit kerang besar	
8	<i>Loha</i>	Metals	Logam	
9	<i>Lavana</i>	Salt	Garam	
10	<i>Bhumiprasta- a-rasa Ghatava-khani</i>	Other ores and minerals	Bijih besi dan hasil tambang lainnya	
IV	<i>VANA</i>	From Forests	Berasal dari hutan	2.6.6
1	<i>Pasuvana</i>	Deer forest	Rusa hutan	
2	<i>Mrigavana</i>	Game forest	Hutan tempat perburuan	
3	<i>Dravyavana</i>	Productive forest	Hutan produktif	
4	<i>Hastivana</i>	Elephant forest	Gajah hutan	
V	<i>RAJA</i>	From animal husbandry	Berasal dari binatang peliharaan (binatang dternakan)	2.6.7
1	<i>Go</i>	Cows	Sapi	
2	<i>Mahisha</i>	Buffaloes	Kerbau	
3	<i>Ajavika</i>	Goats	Domba/kambing	
4	<i>Kharoshta</i>	Camels	Onta	
5	<i>Asva</i>	Horses	Kuda	
6	<i>Asvatara</i>	Mules	Bagal	
VI	<i>SETU</i>	From Irrigation works	Berasal dari hasil pertanian	2.6.5
1	<i>Pushpa</i>	Fowers	Bunga-bunga	
2	<i>Phala</i>	Fruits	Buah-buahan	
3	<i>Vatshanda-</i>	Vegetable garden	Kebun sayur	

	<i>kedara</i>			
4	<i>Mulavapa</i>	Root crops	Akar rumput-rumputan	
VII	VANIKPATH A	From trade	Berasal dari perdagangan	2.6.8
1	<i>Sthalapatha</i>	Land routes	Jalan darat (rute darat)	
2	<i>Varipatha</i>	Water routes	Jalan laut (rute laut)	
VIII	AYAMUKHA M	From form of accounting; Head of Income	Berasal Dari Bagian Akuntansi; Pusat Akuntansi Penerimaan	2.6.10
1	<i>Mulya</i>	Cost price	Harga pokok	2.12.35
2	<i>Bhaga</i>	Share	Keuntungan/Pembagian laba	--
3	<i>Parigha</i>	Monopoly taxes	Pajak monopoli	2.12.35
4	<i>Kliptham</i>	Fixed charges	Beban tetap (Biaya overhead)	2.28.2
5	<i>Rupikam</i>	Manufacturing charges	Biaya Produksi	2.12.26
6	<i>athyaya</i>	Fines and finalties	Denda dan pelanggaran terhadap ketentuan	--
7	<i>Vyaji</i>	Tansaction tax	Pajak transaksi (transaksi jual-beli= Pajak Penjualan)	2.6.22; 2.7.2; 2.12.26,35, 36; 2.15.11; 2.16.10
IX	VYAYAPRAT HYAYA	Saving from expenditure	Penghematan atas pengeluaran	2.6.21 and 2.15.10
1	<i>Vikshepa</i>	Saving due to demobilization of part of the army	Penghematan biaya dari pembubaran bagian pasukan tempur	--
X	---	From the Chief Superintendent of Warehouse	Berasal dari Kepala Pengawas Pergudangan	2.15.1-11
1	<i>Sita</i>	Revenue from Crown lands	Penerimaan berasal dari tanah-tanah pemerintah	
2	<i>Krayima</i>	Chas transactions (including interest received in kind)	Transaksi kas (termasuk penerimaan bunga dalam bentuk barang/natura)	
3	<i>Privartika</i>	Barter	Barang ditukar dengan barang	

4	<i>Pramityaka</i>	Borrowed	Pinjaman	
5	<i>Samhanika</i>	Labour in lieu of taxes	Bekerja sebagai pengganti berhutang pajak	
6	<i>Anyajatha</i>	Unforeseen income	Penerimaan tidak terduga	
7	<i>Vyayaprathyaya</i>	Saving from expenditures	Penghematan atas pengeluaran (selisih efisiensi)	
7	<i>Upasthanam</i>	Changes in stock	Perubahan dari persediaan	
8	<i>Prajitam</i>	Receipt of outstanding arrears already written off	Penerimaan berasal dari tunggakan (piutang) yang sudah dihapus	
9	--	Miscellaneous income	Pendapatan lain-lain	2.6.20
10	<i>Nastha-prasmatham</i>	Recovery of debt and dues earlier written off	Piutang yang kembali menjadi sehat yang sebelumnya sudah dihapuskan	
11	<i>Vyadhitantar-arambha</i>	Works abandoned completion	Pekerjaan yang semula terbengkalai sekarang diselesaikan. (penyelesaian atas pekerjaan yang terbengkalai)	
12	<i>Arambhasesha</i>	Economies made in annual investment compared to original budget estimate	Penghematan pengeluaran atas investasi tahunan dibandingkan dengan rencana anggarannya	
	<i>Rashtram</i>	--	--	2.15.3
13	<i>Pindakara</i>	Taxes paid in kind by whole villages	Pembayaran pajak dalam bentuk natura oleh semua penduduk	
14	<i>Shadbhaga</i>	1/6 th share	Bagiannya 16.50 %	
15	<i>Senabhaktham</i>	Contributions from people for maintenance of the army	Sumbangan masyarakat untuk pemeliharaan angkatan perang.	
16	<i>Bali</i>	Special levies	Pajak khusus	
17	<i>Kara</i>	Taxes (generally paid in cash)	Pajak dibayar dengan uang kas (tunai)	
18	<i>Utsangha</i>	Presents from the people on festive occasions	Sumbangan dari masyarakat pada hari-hari raya	
19	<i>Parsvam</i>	Surcharge	Beban tambahan	
20	<i>Parihnikam</i>	Compensatory payments	Pembayaran ganti rugi (kompensasi)	
21	<i>Aupayanikam</i>	Gift to the king		
22	<i>Kaushteyakam</i>	Income from water reservoirs, parks	Penghasilan dari waduk-waduk dan taman-taman	
23	--	From revenue collection by the Chancellor	Penerimaan yang berasal dari Kedutaan (wakil pemerintah di luar negeri)	

24	⁵ <i>Ayudhiyam</i>	Supply of soldiers in lieu of tax	Bekal untuk prajurit (tentara) berasal dari pajak.	
25	<i>Ayukthadanda</i>	Fines paid by government servants	Denda yang dibayar oleh pegawai pemerintah	
26	<i>Parvam</i>	Surcharge	Beban tambahan	
27	<i>Parihinikam</i>	Compensatory payments	Pembayaran ganti rugi	
28	<i>Aupayanikam</i>	Gift to the king	Hadiah kepada raja	
29	<i>Damara-gatakasvam</i>	Confiscated property	Pengambilalihan asset tetap (asset tetap yang disita)	
30	<i>Aputrakam</i>	Intestate property	Harta warisan yang tidak ada pemiliknya	
31	<i>Nidhi</i>	Treasure trove	Harta karun	
XI	PRATIKARA	Taxes collected in kind	Pajak yang dipungut dalam bentuk barang	2.35.1
1	<i>Dhanya</i>	Grains	Padi-padian	
2	<i>Pasu Hiranya</i>	Cattle Gold	Ternak kencana (kuda kencana)	
3	<i>Kupya</i>	Forest produce	Hasil hutan	
--	--	From		2.25.12
4	<i>Vishti</i>	Labour	Buruh	
5	<i>Sulka</i>	Road cess	Pajak jalan	
6	<i>Ativahikam</i>	Escort charges	Biaya/beban pengawalan	
7	<i>Gulma</i>	Dues payable at military stations	Biaya yang harus dibayar pada pos militer	
8	<i>Tradeya</i>	Ferry charges	Pajak penyeberangan	
9	<i>Bhaga</i>	Share	Bagian/bunga	
10	<i>Bhakttha</i>	Subsistence allowance	Biaya penyambung hidup	
--	--	From Chief Controller of Mining		2.12.35,36
11	<i>Mulya</i>	Cost price	Harga pokok	
12	<i>Bhaga</i>	Share	Keuntungan/Bagian keuntungan	
13	<i>Vyaji</i>	Transaction tax	Pajak penjualan	
14	<i>Parigham</i>	Monopoly tax	Pajak monopoli	
15	<i>Athyaya</i>	Fines and finalities	Denda dan biaya penutupan	
16	<i>Sulka</i>	Customs duty/Octroi	Cukai	
17	<i>Vaidharana</i>	Countervailing duty	Beban/denda atas Kewajiban yang tidak dipenuhi	
18	<i>Danda</i>	Punishment	Hukuman	
19	Rupam	Inspection fee	Biaya inspeksi (pengawasan dengan melihat langsung ketempat yang memerlukan pengawasan)	

20	Rupikam	Manufacturing Charge	Biaya monitoring	
--	--	From		2.35.8 And 2.35.3
--		Taxes Exemptions	Pembebasan Pajak	
21	<i>Karada & Bhoga</i>	Taxes Exemptions	Pembebasan Pajak	2.35.3
22	<i>Aakarada & Parihara</i>	Taxes Exemptions	Pembebasan Pajak	2.35.8
XII	5	CONFISCATION	Dilakukan Penyitaan	3.9.17
1	<i>Ubhaya-paroktam</i>	Disputed landed property, all claims over which have been rejected by village elders	Kisruh kepemilikan atas tanah, semua pihak merasa memiliki, namun ditolak oleh tetua desa	3.9.17
2	<i>Pranashta-swamikam</i>	Landed property whose owner has disappeared	Aset tetap tanah yang keberadaan pemiliknya tidak diketahui	3.9.17
3	<i>Parokta</i>	Fines for loss of suit	Denda atas menghilangkan pakain seragam	3.1.20,21,31
XIII	--	Miscellaneous	Bermacam-macam (lain-lain)	
1	--	Revenue from salt	Pendapatan dari garam	2.12.28
2	--	Poll-tax	Pajak atas kolam	2.6.2
3	--	Tax on liquor not manufactured by the state	Pajak atas minuman keras yang tidak diproduksi oleh pemerintah	2.25.39
4	<i>Vaidharanam</i>	State monopoly product (e.g. liquor)	Brang yang diproduksi oleh Negara secara monopoli (misalnya minuman keras)	2.12.31
5	--	Confiscation for non-cultivation	Penyitaan atas barang-barang yang belum diolah	2.1.12
6	--	Excess of sale price over	Harga jual yang lebih tinggi dari seharusnya	2.21.9; 3.9.5.
7	--	5 Called-out price at customs post or in sale of buildings	Harga barang yang ditetapkan di kantor bea cukai atau bea dalam penjualan gedung-gedung	2.21.9; 3.9.5.
8	-	Differen 5 between (larger) amount proved in court and actual amount claimed by plaintiff	Perbedaan dari jumlah yang lebih besar yang disetujui oleh pengadilan dibandingkan dengan jumlah yang dituntut penggugat.	3.1.42

5. CONTOH KASUS PENERIMAAN NEGARA BERSUMBER DARI PAJAK

Kasus

Pada tanggal 31 Desember 2014 pada Kabupaten Badung terdapat pendapatan **Pajak** tahun 2014 yang belum diterima pembayarannya seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

1) Akun Saldo Berkolom, per 31 Desember 2014

No. urut	Jenis Barang & Prosentase Pajak	No. Akun Buku Besar	Jenis Pajak	Nilai Pajak Terutang	Catatan/ Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pajak penjualan madu (16,50%)	31.1	PPN	35.000.000	Gede Bagus/ Kecam Kuta Selatan
2	Pajak penjualan hasil hutan (8 %)	31.2	PPh.	253.000.000	Gede Bagus/ Kecam Mengwi
3	Pajak atas penambahan nilai emas (5%)	31.3	PPN	25.000.000	Gede Bagus/ Kecam Mengwi
4	Pajak atas impor garam (16,50 %)	31.4	PPh.	165.000.000	Gede Bagus/ Kecam Abiansamal
5	Pajak atas pakaian (4 %)	31.5	PPh	175.000.000	Gede Bagus/ Kecam Kuta Utara

2) Pada bulan Januari 2015 data penerimaan pajak Kabupaten Badung tercatat sebagai berikut :

- 2.1.) Tgl. 02-01-2015 penerimaan Pajak Penjualan (PPN) madu (16,50%) Rp.20.000.000,00 berasal dari sisa PPN tahun lalu yang belum tertagih. No. Akun 31.1, dengan penanggungjawab Gede Bagus. Tempat Kecamatan Kuta Selatan. Nama yang membayar AA, nama yang menerima BB, dan yang mencatat CC
- 2.2) Tgl. 03-01-2015 penerimaan Pajak atas penambahan nilai ternak (PPh) (12,50%) yang dimiliki petani sebesar Rp.125.000.000,00 murni penerimaan Januari 2015. No. Akun 31.6. dengan penanggungjawab Made Oka. Tempat kecamatan Kuta Selatan. Total penerimaan Rp. 275.000.000,00. Nama yang membayar AB, nama yang menerima AC dan yang mencatat CC
- 2.3) Tgl. 04-01-2015 penerimaan pajak atas penjualan obat-obatan

- (PPh) (16,50%) sebesar Rp.175.000.000,00, murni penerimaan Januari 2015. No. Akun 31.7. dengan penanggungjawab Made Oka. Tempat kecamatan Kuta Selatan. Total penerimaan Rp. 250.000.000,00. Nama yang membayar DA, nama yang menerima DB, dan nama yang mencatat CC.
- 2.4) Tgl. 05-01-2015 penerimaan pajak atas penjualan penyedap makanan (PPh) (16,50%) sebesar Rp.165.000.000,00 murni penerimaan Januari 2015. No. Akun 31.8. dengan penanggungjawab Made Oka. Tempat kecamatan Kuta Utara. Total penerimaan Rp. 300.000.000,00. Nama yang membayar CA, nama yang menerima CB, dan nama yang mencatat CC.
- 2.5) Tgl. 10-01-2015 penerimaan pajak atas penjualan hasil hutan (PPN) (12,50%) sebesar Rp.135.000.000,00 murni penerimaan Januari 2015. No. Akun 31.9. dengan penanggungjawab Made Adi. Tempat kecamatan Kuta Utara. Nama yang membayar CA, nama yang menerima CB, dan nama yang mencatat CC.
- 2.6) Tgl. 11-01-2015 penerimaan pajak atas penjualan hasil hutan (PPN) (12,50%) sebesar Rp.135.000.000,00 murni penerimaan dari sisa tahun 2014. No. Akun 31.2. dengan penanggungjawab Made Oka. Tempat kecamatan Mengwi. Nama yang membayar CA, nama yang menerima CB, dan nama yang mencatat CC.
- 2.7) Tgl. 15-01-2015 penerimaan pajak atas impor garam (PPh) (16,50%) sebesar Rp.135.000.000,00 penerimaan atas sisa penerimaan tahun 2014. No. Akun 31.4., dengan penanggungjawab Gede Bagus. Tempat Kecamatan Abiansemal. Nama yang membayar DA, nama yang menerima DB, dan nama yang mencatat CC.
- 2.8) Tgl. 17-01-2015 penerimaan pajak atas pakaian (PPh) (4%) sebesar Rp.150.000.000,00 penerimaan atas sisa penerimaan tahun 2014. No. Akun 31.5., dengan penanggungjawab Gede Bagus. Tempat kecamatan Kuta Utara. Nama yang membayar DA, nama yang menerima DB, dan nama yang mencatat CC.
- 2.9) Tgl. 20-01-2015 penerimaan pajak atas pakaian (PPh) (4%) sebesar Rp.170.000.000,00 murni penerimaan tahun 2015. No. Akun 31.10, dengan penanggungjawab Gede Bagus. Tempat kecamatan Kuta Utara. Total Penerimaan Rp. 250.000.000,00 Nama yang membayar DA, nama yang menerima DB, dan nama yang mencatat CC
- 2.10) Tgl. 27-01-2015 penerimaan pajak atas barang-barang dari batu (PPh) (4%) sebesar Rp.150.000.000,00 penerimaan untuk tahun 2015 No. Akun 31.11., dengan penanggungjawab Gede Bagus. Total penerimaan Rp. 250.000.000. Tempat kecamatan Kuta Selatan. Nama yang membayar DA, nama yang menerima DB, dan nama yang mencatat CC

Pemecahan Kasus

Berdasarkan data di atas, maka yang pertama perlu dibuat adalah :

- 1) catatan mengenai penerimaan (income side),

2) catatan tentang saldo penerimaan (balance coloms).

1) Catatan tentang penerimaan (income side) adalah sebagai berikut :

Catatan Penerimaan (Income Side), Januari 2015

Tgl.	Tempat	Periode Akuntansi	No. Akun Induk	Klasifikasi tahun berjalan/sisa tahun lalu	Jumlah Diterima	Nama Yang Membayar	Nama Yang Memerintahkan membayar (otorisator)	Diterima Oleh	Dicatat oleh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02/01/2015	Kec. Kuta Selatan	2015	31.1	2014	20.000.000	AA	Gede Bagus	BB	CC
03/01/2015	Kec. Kuta Selatan	2015	31.6	2015	125.000.000	AB	Made Oka	AC	CC
04/01/2015	Kec. Kuta Selatan	2015	31.7	2015	175.000.000	DA	Made Oka	DB	CC
05/01/2015	Kec. Kuta Utara	2015	31.8	2015	165.000.000	CA	Made Oka	CB	CC
10/01/2015	Kec. Kuta Utara	2015	31.9	2015	135.000.000	CA	Made Adi	CB	CC
11/01/2015	Kec. Mengwi	2015	31.2	2014	135.000.000	CA	Gede Bagus	CB	CC
15/01/2015	Kec. Abianse mal	2015	31.4	2014	135.000.000	DA	Gede Bagus	DB	CC
17/01/2015	Kec. Kuta Utara	2015	31.5	204	150.000.000	DA	Gede Bagus	DB	CC
20/01/2015	Kec. Kuta Utara	2015	31.10	2015	170.000.000	DA	Gede Bagus	DB	CC
25/01/2015	Ke. Kuta Selatan	2015	31.11	2015	150.000.000	DA	Gede Bagus	DB	CC
Jumlah penerimaan Januari 2015					1.210.000.000	--	--	--	--

2) Saldo penerimaan yang belum tertagih per 31 Januari 2015 dan dituangkan dalam sebuah daftar berkolom sebagai berikut :

Catatan Saldo Berkolom

No urt	Tempat	Jenis Barang & Prosentase Pajak	No. Akun	Tahun Pajak Terutang	Jenis Pajak	Nilai Pajak Terutang	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Kec. Kuta Selatan	Pajak Penjualan Madu, 16,50%	31.1	2014	PPN	15.000.000	Gede Bagus
2	Kec. Kuta Selatan	Penambahan Nilai ternak, 12,50 %	31.6	2015	PPh	150.000.000	Gede Bagus
3	Kec. Kuta Selatan	Pajak penjualan obat-obatan, 6,50%	31.7	2015	PPh	75.000.000	Made Oka
4	Kec. Kuta Utara	Penjualan penyedap makan, 16,50%	31.8	2015	PPh	135.000.000	Made Oka
5	Kec. Mengwi	Penjualan hasil hutan, 16,50%	31.2	2014	PPh	118.000.000	Made Oka
6	Kec. Abiansemal	Penerimaan Impor garam, 16,50%	31.4	2014	PPh	30.000.000	Gede Bagus
7	Kec. Kuta Utara	Penerimaan dari penjualan pakaian, 4%	31.5	2014	PPh	25.000.000	Gede Bagus
8	Kec. Mengwi	Pajak atas penambahan nilai mas, 5%	31.3	2014	PPh	25.000.000	Gede Bagus
9	Kec. Kuta Utara	Penerimaan Pajak atas pakaian, 4%	31.10	2015	PPh	80.000.000	Grfr Bagus
10	Kec. Kuta Selatan	Penerimaan pajak atas barang-barang dari batu, 4%	31.11	2015	PPh	100.000.000	Gede Bagus
Total penerimaan pajak yang belum tertagih						728.000.000	

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

P.10.01. Sumber ekonomi yang menjadi sumber pendapatan bagi Negara sebagaimana di⁴⁸utkan dalam “**Rgveda III. 51. 5**” Rayim raksanti jirajo vanani “
 “ Hutan-hutan belantara dan sungai-sungai merupakan sumber ekonomi dan sumber pendapatan (Negara) “
 Jelaskan makna dari uraian di atas.

P.10.02. Rgveda VIII. 40. 4.

“ Iyam dyauh prathivi mahi-upasthe bibhrto vasu “.

“ Terdapat kekayaan yang tersembunyi dilangit dan di dalam perut bumi “.

Saudara diminta untuk memberikan penjelasan secukupnya tentang makna dari bunyi Rg VIII.40.4 tersebut.

P.10.03. **Rgveda I. 59. 3.**

“ Vaisvanare dadhire-agna vasuni “

“ Ada kekayaan dan sumber pendapatan di dalam api “.

Saudara diminta untuk memberikan penjelasan secukupnya tentang makna dari bunyi Rg I.59.3 tersebut.

P.10.04. **Rgveda I. 130. 3**

“ Guha nidhim-parivitam asmani-anante “

“ Terdapat kekayaan dan sumber pendapatan yang tersimpan di gunung-gunung dan tidak dapat habis “ .

Saudara diminta untuk memberikan penjelasan secukupnya tentang makna dari bunyi Rg I.130.3 tersebut.

P.10.05. Umat Hindu tidak dilarang untuk melakukan usaha dagang, dan dalam berdagang memperoleh keuntungan

Untuk hal ini diungkapkan dalam Atharvaveda XIX. 8. 2,

dengan penjelasan “ semoga para pedagang memperoleh keuntungan

dan menggunakan keuntungan tersebut dengan hemat “

Berikan komentar Saudara tentang bunyi ayat Atharvaveda XIX.8.2 tersebut.

P.10.06. Pemerintah sebuah Negara dinyatakan mempunyai kewenangan untuk

menarik berbagai jenis pajak dari warga negaranya (Atharvaveda III. 4. 3).

Dari segi hukum, apa makna dari petunjuk yang diberikan oleh Atharvaveda III.4.3 tentang pemungutan pajak oleh Negara.

P.10.07. Penjelasan tentang pemungutan pajak tersebut ditemukan pada

Manawadharmastra (MDS VII. 127), berbunyi sebagai berikut :

“ Dengan mempertimbangkan sebaik-baiknya harga beli dan harga jual, panjang jalan yang dilalui (maksudnya ongkos angkut), terhadap harga bahan makanan

dan rempah-rempah, harga barang jadi, setelah itu Raja menetapkan Wajib

Pajak nya (WP) “. Berikan komentar saudara mengenai bunyi

Ayat MDV. di atas.

P.10.08. Bagi yang menemukan harta karun tersebut berhak 1/6 bagian atau sekitar 16,50%,

dan 33,50 % untuk biaya operasional merealisasikan penemuan harta tersebut,

sisanya sebesar 50 % untuk kas Negara. Masalah ini dijelaskan dalam Manava Dharmasastra Buku VIII. 38.

“ Bila pemerintah mempunyai harta karun yang tersembunyi dibawah

tanah, hendaknya ia menyerahkan seperenam bagian kepada brahmana

dan meletakkannya setengah bagian lainnya ke kas Berendaharaan

Negara “. (MDV VIII.38).

Berikan komentar saudara mengenai bunyi Ayat MDV. di atas.

P.10.09. Dalam buku Arthasastra, Rangarajan, V.ii. 227 ditemukan istilah “ *Vyaji* “ atau “ *transaction tax* “, atau **pajak penjualan**, tetapi pada bagian ini tidak ditemukan

penjelasan berapa besar prosentase pungutan dari jenis pajak tersebut. Namun dinyatakan bahwa pungutan pajak tersebut sangat penting bagi pemerintah.

Penjelasan mengenai tariff pajak penjualan ditemukan pada bagian lain, yaitu 5 % s.d. 9 % untuk perdagangan dalam negeri, dan 20 % untuk hasil ekspor.

Berikan komentar saudara berhubungan dengan pajak penjualan tersebut.

P.10.10. Jelaskan berapa besar pajak atas penyewaan tanah. Kenapa jumlahnya sebesar

tersebut.

P.10.11. Jelaskan besarnya pajak atas penjualan garam. Kenapa penjualan garam sampai dikenakan pajak.

P.10.12. Berapa besarnya pajak untuk barang-barang yang tidak dibuat oleh Negara, seperti madu, dan hasil alam lainnya. Kenapa pajaknya begitu murah. (Lihat Artha, Bk. II, Bab 25. ayat 39).

P.10.13. Jelaskan berapa prosen pajak untuk pakaian dan bahan-bahan pakaian. Kenapa pajaknya begitu kecil (lihat Artha, Bk. II, Bab 22 ayat 7).

P.10.14. Sebutkan 5 (lima) jenis pendapatan yang berasal dari *Durgam* (berasal dari kota yang dibentengi). Kenapa kota yang dibentengi menjadi sumber pendapatan. Berikan penjelasan secukupnya sehingga jelas maksudnya.

P.10.15. Sebuah harta karun direalisasikan dengan pembagian : yang menemukan harta karun tersebut berhak 1/6 bagian atau sekitar 16,50 %, dan 33,50 % untuk biaya operasional merealisasikan penemuan harta tersebut, sisanya sebesar 50 % untuk kas Negara. Nilai harta karun yang direalisasikan Rp. 100.000.000,00, dan tanggal terjadinya 1 Juni 2015.

Kepada Saudara diminta membuat jurnal untuk merealisasikan harta karun tersebut.

P.10.16. Berikut ini diberikan gambaran dari bentuk akun tempat mencatat pendapatan yang digunakan dalam Arthasastra Bab V.1. 247,

18

Date	Period of accounting	Date & time of received	Head of account	Classification current year or outstanding dues	Quantity received	Name of year	By whose order	Received by	Recorded by
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Berikan komentar Saudara terhadap bentuk akun tersebut di atas, meliputi :

- a). Kekurangan (kelemahan) dari bentuk akun dimaksud.
- b). Kekuatan (kelebihan) bentuk akun dimaksud dibandingkan dengan bentuk akun dalam akuntansi kontemporer.
- c). Saran saudara untuk memperkuat bentuk akun tersebut sehingga tercipta system pengendalian intern yang lebih baik.

P.10.17. Berikut ini diberikan gambaran dari bentuk akun tempat mencatat pengeluaran yang digunakan dalam Arthasastra Bab V.1. 247,

Place	Period of accounting	Date & time of payment	Head of expenditure	Counter value received	Occasion	What was paid	Amount paid	For what use	Authority ordering payment	Witness from store	Debit by	Received by
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Berikan komentar Saudara terhadap bentuk akun tersebut di atas, meliputi :

- Kekurangan (kelemahan) dari bentuk akun dimaksud.
- Kekuatan (kelebihan) bentuk akun dimaksud dibandingkan dengan bentuk akun dalam akuntansi kontemporer.
- Saran saudara untuk memperkuat bentuk akun tersebut sehingga tercipta system pengendalian intern yang lebih baik.

P.10.18. Berikut ini diberikan gambaran dari bentuk akun tempat mencatat saldo (barang-barang) pada akhir periode akuntansi yang digunakan dalam Arthasastra Bab V.1. 247,

18

Place	Date & time	Head of account	Dues left outstanding	Form in which balance received into the treasury	Quality	Amount received	Detail of container	Delevered to (name of treasury official)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Berikan komentar Saudara terhadap bentuk akun tersebut di atas, meliputi :

- a). Kekurangan (kelemahan) dari bentuk akun dimaksud.
- b). Kekuatan (kelebihan) bentuk akun dimaksud dibandingkan dengan bentuk akun dalam akuntansi kontemporer.
- c). Saran saudara untuk memperkuat bentuk akun tersebut sehingga tercipta system pengendalian intern yang lebih baik.

P.10.19. Berikut ini diberikan contoh kasus untuk dapat dicatat dalam akun saldo sebagai berikut :

- a) Tempat (place), Denpasar, tanggal 31 Oktober 2015, jam 12.30 Wita, barang yang perlu dicatat dan disimpan di gudang pemerintah sebesar 30.000 karung jagung pilihan siap dijual, dengan nilai Rp. Rp. 450.000.000. No. Akun 40.1. Nama Bendahara Negara ABC.
- b) Tempat (place), Denpasar, tanggal 31 Oktober 2015, jam 12.35 Wita, barang yang perlu dicatat dan disimpan di gudang pemerintah sebesar 40.000 karung beras pilihan siap dijual, dengan nilai Rp. Rp. 600.000.000. Beras berasal dari sisa tahun 2014. No. Akun 40.2. Nama Bendahara Negara ABC.
- c) Tempat (place), Denpasar, tanggal 31 Oktober 2015, jam 12.35 Wita, barang yang perlu dicatat dan disimpan di gudang pemerintah sebesar 250.000 karung kulit kayu pilihan siap dijual, dengan nilai Rp. 250.000.000. Berasal dari sisa tahun 2014. No. Akun 40.3. Nama Bendahara Negara ABC.
- d) Tempat (place), Denpasar, tanggal 31 Oktober 2015, jam 12.35 Wita, barang yang perlu dicatat dan disimpan di gudang pemerintah sebesar 150.000 karung kulit kayu bahan dupa wangi pilihan siap dijual, dengan nilai Rp. 300.000.000 Berasal dari sisa tahun 2014. No. Akun 40.4. Nama Bendahara Negara ABC
- e) Tempat (place), Denpasar, tanggal 31 Oktober 2015, jam 12.35 Wita, barang yang perlu dicatat dan disimpan di gudang pemerintah sebesar 50.000 karung benang pilihan siap dijual, dengan nilai Rp. 50.000.000 Berasal dari sisa tahun 2014. No. Akun 40.5. Nama Bendahara Negara ABCDiminta :Catatlah transaksi tersebut ke dalam akun saldo di atas.

P.10.20. Dinyatakan dalam Atharvaveda III. 4. 7, bahwa setiap Negara mempunyai cara-cara yang berbeda dalam mengenakan pajak kepada warga negaranya.

Berikan komentar Saudara berkaitan dengan bunyi ayat Atharvaveda III.4.7 di atas.

Apakah yang dinyatakan dalam ayat itu dapat berlaku sampai sekarang.

AKUNTANSI HINDU

Adattanam upadanam himsa caiva vidhanatah, paradaropaseva ca sariram trividam smartam
(Mdv. XII. 7)

Mengambil apa yang belum diberikan, melukai mahluk tanpa perintah hukum agama dan melakukan zina dengan istri orang lain, dinyatakan sebagai tiga macam kejahatan dari tingkah laku badan (Mdv. XII. 7)

BAB XI

KECURANGAN AKUNTANSI PADA ZAMAN ARTHASASTRA MASIH BERLAKU SAMPAI SAAT INI

1. PENDAHULUAN

Ajaran Hindu telah memberikan peringatan kepada penganut Veda, bahwa pada zaman **Kaliyuga** ini sangat sulit untuk menemukan manusia yang jujur sejujur-jujurnya.

Pada zaman Kaliyuga ini manusia yang benar-benar menjalankan kejujuran, atau menjalankan Dharma dengan sepenuhnya diperkirakan hanya sekitar seperempatnya saja atau sekitar 25 %.

Veda memberikan petunjuk, manusia-manusia yang tidak jujur atau berlaku curang tersebut harus dihadapi dengan cara bijaksana dan menggunakan akal sehat. Maksud dari menggunakan kebijaksanaan dan akal sehat dalam menghadapi manusia-manusia yang tidak jujur atau curang adalah dengan cara menciptakan sistem dan prosedur kerja yang baik dan penegakan hukum yang baik dan konsisten.

Gambaran atau petunjuk adanya manusia yang tidak jujur tersebut di atas dapat ditemukan dalam Rgveda I.51.1. dan Rgveda I.11.7 yang maknanya dirumuskan secara ringkas “ Hadapilah orang-orang yang licik (curang) dengan cara bijaksana, dan taklukkan orang-orang yang memanfaatkan sesuatu untuk keuntungan mereka sendiri dengan akal sehat “.

Dalam Rgveda X.25.7 ditekankan bahwa pihak-pihak yang menegakkan Dharma, berbudi luhur, jangan sampai kalah dengan para pelaku kejahatan.

Selanjutnya ditegaskan dalam Atharvaveda X.4.9, bahwa terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan hendaknya ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Manavadharmasastra Bab XII, paragraf 3 memberikan petunjuk bahwa ada 3 jenis perbuatan manusia yang memberikan dampak baik dan buruk bagi yang melakukan, yaitu perbuatan yang berasal dari **pikiran, perkataan, dan tindakan.**

Selanjutnya dalam Manavadharmasastra Bab XII. Paragraf 7, diberikan contoh mengenai perbuatan manusia yang tidak baik, seperti mengambil barang atau uang yang tidak akan diserahkan atau belum diserahkan kepada yang bersangkutan, artinya, barang atau uang itu tidak menjadi hak atau belum menjadi hak dari yang menerima.

Dari segi **Hukum Karma**, perbuatan tersebut di atas berakibat kepada yang melakukan perbuatan, dan dicatat dengan cermat oleh unsur Ilahi (Roh) yang ada dalam diri manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Yang memberikan penilaian atas kualitas perbuatan manusia tersebut adalah maha Roh atau Brahman, Tuhan Yang Maha Esa.

Dari segi kualitas perbuatan, **Hukum Karma** mengkualifikasi ke dalam tiga kelompok perbuatan, yaitu :

(1) **Pararabda Karma**, yaitu perbuatan yang dilakukan sekarang, hasilnya juga diterima sekarang. Dalam hal ini, mungkin dapat digunakan sebagai contoh, orang

yang bersangkutan mendapat pekerjaan menggali sebuah sumur. Batas waktu menggali sumur tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Setelah sumur digali sampai dengan dapat keluar air dengan baik, maka upah menggali sumur sesuai perjanjian dibayar oleh yang memberikan pekerjaan. Bila dikaitkan dengan prinsip akuntansi, **Pararabda Karma** sama dengan menerapkan **prinsip Kas**.

(2) **Sancita Karma**, yaitu perbuatan yang dilakukan sekarang, hasilnya baru akan diterima pada periode kehidupan berikutnya. Dari segi prinsip akuntansi, kegiatan ini dicatat berdasarkan **basis akrual**.

(3) **Kriyamana Karma**, maksudnya pada kehidupan sekarang diterima hasil-hasil dari perbuatan pada periode kehidupan sebelumnya. Dari segi prinsip akuntansi, kegiatan ini dicatat berdasarkan **basis akrual**.

Untuk menegakan Hukum Karma agar semua karma makhluk tercatat dengan baik dan benar, perhitungan hasil dari perbuatan tidak terjadi distorsi, maka semua makhluk mempunyai akses langsung dengan pusat data alam semesta.

2. KECURANGAN AKUNTANSI

2.1. Kejahatan Kerah Putih

Dalam sistem akuntansi kontemporer, kecurangan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan entitas termasuk dalam kelompok kecurangan akuntansi atau disebut juga sebagai kejahatan kerah putih (white-collar crime), karena dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai pendidikan dan pelatihan yang cukup dibidangnya.

Beberapa ahli (Sawyers, Buku 3, Edisi 5, hal, 339....) memberikan pengertian mengenai kejahatan kerah putih sebagai tindakan atau serangkaian tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik melalui penyembunyian ataupun penipuan untuk mendapatkan uang ataupun harta benda, untuk menghindari pembayaran atau hilangnya uang atau harta benda, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Kejahatan kerah putih tampaknya sudah terjadi sejak zaman sebelum abad Masehi, yaitu sejak sudah dimulainya penerapan sistem akuntansi untuk pencatatan dan pelaporan kekayaan suatu entitas.

⁴⁶ Sawyers, mengelompokkan pelaku kecurangan ke dalam kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

Kecurangan karyawan, adalah kecurangan yang dilakukan atas inisiatif karyawan itu sendiri, karena karyawan terbelit utang. Kecurangan tersebut seperti : mengambil uang kas, pencurian barang di gudang, memperkecil angka penerimaan uang, memperbesar jumlah pengeluaran biaya, dan sebagainya.

¹¹ **Kecurangan manajemen**, terdiri dari seluruh bentuk kecurangan yang diperaktekan oleh para manajer untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan organisasi. Kecurangan oleh para manajer, orang yang berada di posisi yang memiliki kekuatan dan kepercayaan, bukanlah suatu hal yang sering dibicarakan. Kecurangan manajemen lebih sering ditutup-tutupi dari pada diungkapkan. Kecurangan manajemen biasanya

ditutup-tutupi oleh para korbannya untuk menghindari dampak merugikan dari publikasi yang buruk.

Dimana kecurangan manajemen dapat terjadi.

Dalam organisasi-organisasi yang terdesentralisasi, direktur utama, wakil direktur utama, direktur divisi dan manajer umum diberi wewenang yang relatif lengkap. Kinerja mereka dinilai oleh kelompok eksekutif sentral korporat dan dewan komisaris. Kinerja tersebut biasanya tercermin dalam laporan-laporan dan laporan keuangan. Khayalan yang tinggi nilai seninya dari para pelaku kecurangan tidak memiliki kesulitan untuk membuat yang merah menjadi hitam.

Kecurangan tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Kecurangan tersebut terus berlangsung selama tidak ada pengawasan yang seksama.

Kecurangan manajemen terus berlangsung dimana para wakil direktur utama kelompok yang mengunjungi organisasi terdesentralisasi tersebut menggunakan kunjungannya untuk tujuan sosial, bukan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kecurangan manajemen terus berlangsung dimana tidak terdapat auditor-auditor internal tingkat atas yang menganalisis dan membedah baik operasi-operasi dan laporan-laporan yang dibuat manajemen tersebut.

Ketika kecurangan tersebut muncul ke permukaan, atau dimana kecurigaan memicu dilakukannya investigasi, kerugian telah terjadi dan para pelaku biasanya berpindah untuk merumpuk di padang yang lain. Kerusakan yang ditinggalkan dapat tidak terhitung jumlahnya.

Kecurangan manajemen, misalnya manajemen bekerjasama dengan pemasok, membeli bahan baku dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah. Selisih harganya masuk ke saku pribadi.

Manajemen bekerja sama dengan karyawan untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan, dimana karyawan memperoleh imbalan tertentu, atau memperoleh janji promosi.

2. Jenis-Jenis Kecurangan Kerah Putih

Tanda-tanda petunjuk untuk meningkatkan kecurigaan dalam pikiran auditor, tentang kemungkinan adanya kecurangan dalam entitas yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut. Dibawah ini Sawyer mencatat 40 (empat puluh) bentuk umum kecurangan, seperti berikut :

- 1) Pemalsuan cap (stempel) perusahaan.
- 2) Mencuri barang dagangan, peralatan, persediaan, dan barang-barang perlengkapan lainnya.
- 3) Mengambil sejumlah kecil uang kas dari mesin kasir.
- 4) Tidak mencatat penjualan barang dan mengantongi hasilnya.
- 5) Menciptakan kelebihan dana kas dan register dengan melakukan kurang pencatatan.
- 6) Pembebanan berlebihan pada akun-akun pengeluaran atau menggunakan uang muka untuk kepentingan pribadi.
- 7) Memutar penagihan atas rekening pelanggan.
- 8) Mengambil pembayaran dari rekening pelanggan, mengeluarkan tanda terima di atas secarik kertas atau dari buku tanda terima yang dibuat sendiri.

- 9) Menagih rekening, mengambil uangnya, dan kemudian membiayakannya; mengambil pembayaran rekening yang sudah dibiayakan dan tidak melaporkannya.
- 10) Membiayakan rekening pelanggan dan mencuri uangnya.
- 11) Mengluarkan kredit untuk klaim dan pengembalian oleh pelanggan, ⁶
- 12) Tidak melakukan setoran harian ke bank, atau menyetorkan sebagian dari uang yang seharusnya disetorkan.
- 13) Mengganti tanggal pada slip setoran untuk menutupi pencurian.
- 14) Membulatkan penjumlahan setoran, kemudian mencoba untuk mengejar kekurangan setoran di akhir bulan.
- 15) Mencantumkan penggunaan tenaga bantuan tambahan fiktif dalam penggajian, atau menaikkan tarif atau jam kerjanya.
- 16) Masih mencantumkan nama-nama karyawan dalam daftar gaji, meskipun karyawan tersebut telah melewati tanggal akhir masa kerja aktualnya.
- 17) Memalsukan penambahan daftar gaji; menahan upah yang belum diklaim (dibayarkan).
- 18) Menghancurkan, mengubah, atau membatalkan faktur penjualan dan mengambil uang hasil penjualan. ⁶
- 19) Mengambil uang yang diterima dari penjualan kas (tunai) dengan menggunakan rekening pembebanan palsu.
- 20) Mencatat diskon kas (tunai) yang tidak jelas.
- 21) Meningkatkan jumlah voucher kas kecil dan/atau jumlah totalnya dalam mempertanggungjawabkan pembayaran.
- ⁶ 22) Menggunakan tanda terima pengeluaran pribadi untuk mendukung pembayaran-pembayaran palsu.
- 23) Menggunakan salinan dari voucher yang asli yang sudah digunakan sebelumnya, atau menggunakan voucher tahun lalu yang telah disetujui dengan benar dengan mengganti tanggalnya.
- 24) Membayar faktur-faktur palsu, yang dibuat sendiri atau diperoleh melalui kolusi dengan pemasok.
- 25) Meningkatkan jumlah dari faktur pemasok melalui kolusi.
- 26) Membebaskan pembelian-pembelian pribadi ke perusahaan melalui penyalahgunaan order pembelian.
- 27) Menagih barang curian kerekoning fiktif.
- 28) Mengirimkan barang curian ke rumah karyawan atau keluarganya.
- 29) Memalsukan catatan persediaan untuk menutupi pencurian atau kejahatan kejahatan lainnya.
- ⁶ 30) Mengambil cek dan menguangkannya yang dibayarkan kepada organisasi atau pemasok.

- 31) Meningkatkan atau menggunakan cek bank yang dibatalkan agar sama dengan jurnal-jurnal fiktif.
- 32) Memasukkan lembar buku besar fiktif.

- 33) Melakukan penjumlahan yang salah dalam penerimaan kas dan juga penjumlahan yang salah dalam buku pengeluaran.
- 34) Dengan sengaja mengacaukan pembukuan ke akun kontrol dan akun rincian.
- 35) Menjual limbah dan bahan baku sisa serta mengantongi hasil penjualannya.
- 36) “ Menjual “ kunci-kunci pintu atau kombinasi dari lemari besi yang sudah tidak terpakai.
- 37) Menimbulkan saldo kredit di buku besar dan mengkomversinya ke kas.
- 38) Memalsukan konosemen (*bill of loading*) dan membagi dua hasilnya dengan pengirim.
- 39) Mendapatkan cek-cek kosong (yang tidak dijaga) dan memalsukan tanda tangan.
- 40) Memberikan harga khusus atau istimewa kepada pelanggan, atau memberikan bisnis kepada pemasok yang disukai, untuk mendapatkan “ imbalan balik “

2.3. Tanda-Tanda Bahaya Adanya Penggelapan.

Bagi auditor profesional dengan menggunakan analisis profesional, seperti analisis tren, maka dapat mendeteksi tanda-tanda bahaya adanya penggelapan. Sawyer memberikan petunjuk 20 (dua puluh) jenis tanda-tanda penggelapan, yang penting diketahui oleh manajemen dan auditor entitas, terinci berikut ini :

- 1) Meminjan sejumlah kecil uang dari sesama karyawan
- 2) Menempatkan cek-cek pribadi di dalam dana perubahan, tanpa tanggal, diberi tanggal setelahnya, atau meminta orang lain untuk “ memegang “ cek-cek tersebut.
- 3) Cek pribadi diuangkan dan dikembalikan dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
- 4) Penagih atau kreditor muncul dilokasi bisnis, dan penggunaan telepon yang berlebihan untuk “ menahan “ para kreditor.
- 5) Menempatkan surat utang yang tidak sah dalam dana, atau membujuk pihak lain yang berwenang menerima surat utang sebagai bukti pinjaman kecil jangka pendek.
- 6) Kecendrungan menutup-nutupi ketidakefisienan dengan “ menambal “ atau mengubah angka pengeluaran.
- 7) Mengungkapkan kritik kepada orang lain untuk mengalihkan kecurigaan.
- 8) Menjawab pertanyaan dengan memberikan penjelasan yang tidak masuk akal.
- 9) Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di luar kemampuannya dalam menerima kerugian.
- 10) Minum yang berlebihan dan pergi ke klub malam atau berhubungan dengan orang-orang yang mencurigakan.
- 11) Membeli atau memperoleh mobil-mobil mahal dan perabotan-perabotan yang mewah melalui saluran-saluran “ bisnis “.
- 12) Menjadikan uang hasil sisa penjualan tanah sebagai alasan standar hidup yang lebih tinggi.
- 13) Merasa terganggu bila mendapat pertanyaan-pertanyaan yang wajar,

- 14) Menolak melepaskan penjaan atas catatan-catatan di waktu kerja, rutin bekerja lembur.
- 15) Tidak mau mengambil cuti dan menolak promosi karena takut ketahuan.
- 16) Memiliki hubungan tetap dengan, dan dihibur oleh, anggota staf pemasok.
- 17) Memiliki saldo bank yang besar dan tidak wajar, atau membeli surat berharga dalam jumlah besar.
- 18) Menderita sakit yang berkepanjangan, baik diri sendiri maupun keluarganya, biasanya tanpa memiliki rencana untuk melikuidasi utang.
- 19) Membanggakan penggunaan, dan/atau membawa sejumlah uang yang tidak wajar.
- 20) Menulis ulang laporan untuk menyamarkan kerugian dalam presentasi.

2.4. Kejahatan Komputer

Dalam era digital, perusahaan-perusahaan tidak terhindar dari kemungkinan menggunakan komputer untuk mempercepat proses bisnisnya. Penggunaan komputer menimbulkan masalah tersendiri dalam kecurangan akuntansi, yang lazim disebut dengan kejahatan komputer. Kejahatan dalam penggunaan komputer semakin meningkat, dan hanya sejumlah kecil yang dapat diungkap. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan komputer sangat besar jumlahnya. Metode dan cara yang digunakan untuk menipu perusahaan dan keagenan sangat banyak jumlahnya, dan kemungkinan untuk mendeteksi seluruh kecurangan yang ada melalui komputer hanyalah impian belaka. **Perlindungan yang terbaik dari kecurangan melalui komputer adalah pencegahan.**

Kontrol-kontrol preventif (**pencegahan**) yang perlu dilakukan meliputi hal-hal berikut :

- 1) Penyeleksian karyawan.
- 2) Definisi tugas yang jelas.
- 3) Pemisahan tugas yang jelas
- 4) Akses ganda yang jelas
- 5) Etika profesional.
- 6) Lisensi
- 7) Kontrol atas perancangan sistem.
- 8) Keamanan atas akses fisik
- 9) Keamanan atas akses eletronik.
- 10) Kontrol dan pengeditan internal
- 11) Ketakutan akan deteksi.

Sehubungan dengan kejahatan komputer tersebut di atas, **AICPA Audit And Accounting Manual**, memberikan petunjuk mengenai **area-area kontrol** yang direkomendasikan untuk **mengatasi risiko inheren** yang ada, disajikan berikut ini :

1) **Fungsi Komputer Tidak Sepenuhnya Terpisah Dari Pengguna.**

Misalnya, suatu departemen pengguna dapat membuat dokumen sumber, memasukkannya ke dalam sistem, mengoperasikan komputer, dan menghasilkan output. Lingkungan seperti ini mengandung risiko-risiko seperti kesalahan-kesalahan yang sengaja ditutup-tutupi, perubahan arsip induk secara tidak sah, kesalahan input karena kekuranghati-hatian, dan data hilang atau rusak. Beberapa kontrol untuk mengatasi risiko-risiko ini meliputi *log-log* kontrol transaksi dan *batch*, penelaahan *independen atas log*, penggunaan *password* (kata sandi) dan supervisi akses yang lainnya, rotasi dalam tugas pengguna, sebuah persyaratan bahwa arsip induk hanya dapat diubah oleh program aplikasi yang membuat sebuah *log* internal tentang sebuah perubahan yang dibuat dan siapa yang membuatnya, dan perbandingan secara berkala dari program-program pemasok dengan versi yang dimiliki oleh perusahaan.

2) **Lokasi Dari Komputer di Area Pengguna Memberikan Peningkatan Terjadinya Risiko-Risiko Kejahatan.**

Kondisi lokasi komputer seperti dijelaskan pada topik di atas dapat menyebabkan penggunaan arsip secara tidak sah, modifikasi atas program secara tidak sah, dan penyalahgunaan sumber daya komputer. Kontrol yang disarankan untuk mengatasi risiko-risiko ini termasuk menu yang diproteksi oleh *password*, penelaahan berkala atas laporan, catatan penggunaan, dan kontrol fisik atas piranti keras sistem, seperti terminal yang terkunci dan hanya bisa membaca saja.

3) **Kurangnya Pemisahan Tugas Dalam Departemen Komputer.**

Kurangnya pemisahan tugas dalam departemen komputer dapat menimbulkan risiko-risiko akses terhadap program dan arsip induk yang tidak sah, penutup-tutupi kesalahan yang disengaja, dan program-program yang secara representatif tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Kontrol-kontrol untuk mengurangi risiko-risiko seperti ini meliputi akses yang terbatas ke kode sumber, perbandingan secara berkala dari program-program yang digunakan dengan versi dari program-program yang sah, proteksi **password** untuk membatasi akses atas dasar sesuai dengan kebutuhan, dan penelaahan manajemen atas log.

4) **Kurangnya Pengetahuan Teknis Komputer Dari Karyawan Yang Bertugas Mensupervisi Komputer.**

Kondisi seperti dijelaskan di atas ⁴ meningkatkan terjadinya potensi-potensi risiko seperti ketidak mampuan supervisi untuk mengenali kegagalan dalam pemenuhan sasaran manajemen dan ketidak mampuan untuk menguji dan ¹ menelaah sistem secara efektif.

Kontrol-kontrol untuk mengatasi risiko-risiko ini meliputi penggunaan dokumentasi dan daftar cek serta perekrutan karyawan dari luar untuk menelaah ¹ modifikasi-modifikasi yang dilakukan pada program.

5) **Penggunaan Program Utilitas Yang Melewati Log Sistem Untuk Membuat Arsip Induk Dan Modifikasi Program.**

Kondisi seperti dijelaskan di atas akan mengarah ke beberapa risiko seperti : akses yang tidak sah ke data dan program, perubahan arsip yang tidak terdeteksi, serta pemrosesan dan penyembunyian transaksi-transaksi yang tidak sah. Cara utama untuk mengontrol risiko yang ada adalah dengan mengaruskan seluruh modifikasi program dan arsip induk dibuat melalui program aplikasi yang relevan, dan membatasi akses ke utilitas sistem.

6). **Disket memiliki beragam risiko karena relatif mudah disemDibunyikan akibat ukuran dan kapasitas data yang dimiliki.**

Risiko-risiko itu termasuk pemrosesan arsip data yang salah dan melewati log kesalahan. Kontrol meliputi pembatasan akses ke penyimpanan disket kontrol dan penggunaan terminal-terminal *read only*(terminal yang hanya dapat membaca saja).

7). **Terminal yang berlokasi di sekuruh area perusahaan dan lapangan memiliki risiko terhadap akses dan pemasukkan data yang tidak sah.**

Kontrol yang dapat dilakukan meliputi terminal-terminal *read only*, terminal yang dapat mengakses program dan arsip tertentu, serta keamanan fisik dari piranti keras dan log akses.

8). **Piranti lunak pemasok yang tersedia mendorong suboptimalisasi dari sasaran-sasaran manajemen.**

Hal ini terjadi karena pengguna lebih mudah menggunakan program yang telah mereka kenal, meskipun paket piranti lunak seperti itu kurang mampu memenuhi sasaran manajemen. Program-program tersebut sering tidak diuji oleh karyawan yang berwenang sebelum digunakan dan diterima. Satu-satunya kontrol atas risiko ini adalah mengharuskan semua piranti lunak yang dibeli oleh pengguna diuji oleh petugas sistem untuk memastikan kepatuhannya terhadap sasaran manajemen.

3. JENIS-JENIS KECURANGAN AKUNTANSI MENURUT ARTHASASTRA.

Masalah perbuatan curang atau licik yang mungkin dilakukan oleh manusia, secara umum telah dijelaskan dalam Veda. Kecurangan akuntansi termasuk bagian dari kelompok kecurangan yang dijelaskan dalam Veda.

Secara spesifik, jenis-jenis kecurangan akuntansi diberikan petunjuk dalam Arthasastra Buku II, tentang KEGIATAN KEPALA DEPARTEMEN, Bab 18 tentang Penentuan Pendapatan Yang Diselewengkan Oleh Pegawai. Pada Paragraf 20 dinyatakan ada sekitar 40 (empat puluh) jenis penggelapan yang mungkin dilakukan oleh pegawai pengelola perbendaharaan.

Rincian jenis-jenis penggelapan yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh para akuntan dimuat pada Paragraf 21, dengan rincian sebagai berikut :

- 39) 1) Apa yang telah diperoleh tetapi baru dinyatakan kemudian;
- 2) 39) a yang akan diperoleh kemudian, tapi telah dinyatakan lebih dahulu;
- 3) Apa yang seharusnya dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan;
- 4) Apa yang tidak perlu dilaksanakan, dilaksanakan;
- 5) Apa yang dilaksanakan seakan-akan tidak dilaksanakan;
- 6) Apa yang tidak dilaksanakan, tapi seakan-akan dilaksanakan;
- 7) Apa yang sedikit dilaksanakan, tapi seakan-akan dikerjakan banyak;
- 8) Apa yang banyak dilakukan, seakan-akan sedikit dilakukan;
- 9) Satu hal dilakukan, sedang yang lain seakan-akan dilakukan;
- 10) Apa yang dilakukan dari satu sumber, seakan-akan dilakukan dari sumber yang alin;
- 11) Apa yang hendaknya dibayar, tidak dibayar;
- 12) Apa yang tidak dibayarkan, dibayarkan;
- 13) Pembayaran tidak dilakukan pada waktunya;
- 14) Pembayaran dilakukan, menyalahi waktu;
- 15) Sedikit dibayarkan, seakan-akan banyak;
- 16) Yang dibayar kelebihan, seakan-akan sedikit dibayarkan;
- 17) Sesuatu diberikan, sedang benda lain seakan-akan diberikan;
- 18) Apa yang dibayarkan kepada seorang, seakan-akan dibayarkan kepada orang lain;
- 19) Apa yang diserahkan ke dalam perbendaharaan (kas negara), seakan-akan tidak diserahkan;
- 20) Apa yang tidak diserahkan, seakan-akan diserahkan;
- 21) Hasil hutan yang harganya belum dibayar, tapi diserahkan;
- 22) Apa yang sudah dibayar, tidak diserahkan;
- 23) Pemusatan (barang), seakan-akan penyebaran;
- 24) Penyebaran (barang), seakan-akan pemusatan;
- 25) Benda yang bernilai tinggi, ditukar dengan yang bernilai rendah;
- 26) Benda yang bernilai rendah, ditukar dengan yang bernilai tinggi;
- 27) Harga dinaikkan;
- 28) Harga diturunkan;
- 29) Tahun dibuat tidak cocok dengan bulan;
- 30) Bulan dibuat, tidak cocok dengan hari;
- 31) Ketidakcocokan dengan sumber-sumber;
- 32) Ketidakcocokan tentang topik (pokok) = buku besar, penghasilan;
- 33) Ketidakcocokan dengan pekerja;
- 34) Ketidakcocokan dalam pelaksanaan;
- 35) Ketidakcocokan dalam jumlah seluruhnya;
- 36) Ketidakcocokan dalam mutu;
- 37) Ketidakcocokan dalam harga;
- 38) Ketidakcocokan dalam menimbang;
- 39) Ketidakcocokan dalam mengukur;
- 40) Ketidakcocokan tentang wadah/tempat;

Pada Paragraf 22 dijelaskan, apabila ditemukan adanya penggelapan, maka auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terkait, yaitu **petugasbawahan, penjaga gudang, pencatat aset (Bagian Pembukuan), penerima uang atau barang, orang yang membayar, orang yang menyebabkan tindakan pembayaran (otorisator), penasehat dan pembantu bidang keuangan.**

Dengan dilakukan langkah-langkah pemeriksaan seperti dijelaskan di atas, maka besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penggelapan tersebut dapat diketahui dengan pasti, disamping dapat diketahui pula modus operandi (cara-cara) penggelapan yang dilakukan oleh para pengelola keuangan kerajaan.

Mengacu kepada penjelasan jenis-jenis kecurangan yang berlangsung sampai dengan saat ini seperti dijelaskan pada sub 2 Bab XI di atas, maka jenis-jenis kecurangan yang dijelaskan dalam buku Arthasastra, saat ini ternyata berlanjut dan berkembang sesuai dengan kemajuan perekonomian dan kemajuan teknologi komputer.

4. CONTOH KASUS KECURANGAN ATAU PENGGELAPAN.

Berikut ini diberikan ilustrasi kasus kecurangan atau penggelapan yang terjadi pada sebuah entitas, dan diberikan petunjuk penyelesaiannya dari sudut akuntansi, baik pada sistem akuntansi kontemporer maupun pada sistem akuntansi Arthasastra (Hindu).

KASUS :

Kasus 1

Diketahui pada periode Agustus 2014 terjadi pencurian uang kas yang dilakukan oleh Kasir dan seorang rekannya, sehingga menimbulkan kerugian kepada perusahaan sebesar Rp. 150.125.000,00. Saldo kas yang seharusnya ada Rp. 350.250.000,00. Sisa Kas pada saat pemeriksaan Rp. 200.125.000,00

Pencurian uang tersebut diketahui oleh pihak perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2014 pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kas oleh Tim Pemeriksa Intern.

Setelah dilakukan interogasi oleh Tim Pemeriksa Intern, Kasir bernama A, mengakui bahwa uang kas tersebut dia ambil secara bertahap bersama-sama dengan seorang pegawai lainnya yang bertugas sebagai Kolektor, bernama B. Kasir A mengaku menerima sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- diakui diambil oleh Kolektor B. Sisanya sebesar Rp. 5.125.000,00 mereka tidak mengaku mengambilnya. Kasir A dan Kolektor B berjanji akan mengembalikan uang yang dicurinya tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Janjinya tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian tertulis bermeterai sesuai ketentuan. Kedua pegawai tersebut tetap dipekerjakan dalam perusahaan, tetapi dengan posisi yang berbeda dari jabatan sebelumnya.

Kasus 2

Pada tanggal 31 Agustus 2014 dilakukan pemeriksaan fisik persediaan barang gudang oleh Tim Pemeriksa Intern. Tim Pemeriksa Intern melakukan pengujian atas stok persediaan barang yang ada di gudang dengan cara membandingkan antara catatan dalam kartu stok barang yang ada di kantor dengan catatan dalam kartu stok yang ada di gudang serta data yang tertuang dalam kartu gantung pada masing-masing barang. Berdasarkan pengecekan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

No. Urt.	Nama/Jenis Barang	Harga Per Satuan	Kartu Persediaan Kantor (Unit)	Kartu Persediaan Gudang (Unit)	Kartu Gantung (Unit)	Selisih Persediaan (Unit & Nilai)
(1)	(2)	(3)	(4) (Kg & Rp.)	(5)	(6)	(7)
1	AB	Rp. 125.000	1.500/ 187.500.000	1.300	1.295	200/ Rp.25.000.000
2	ABG	Rp. 150.000	2.000/ 300.000.000	1.875	1.872	125/ Rp. 18.750.000
3	CDH	Rp. 155.000	750/ 116.250.000	745	745	5/Rp. 775.000
4	GDB	Rp. 205.000	1.250/ 256.250.000	1.240.	1.239	10/ Rp. 2.050.000
5	GDR	Rp. 250.000	1.000/ 250.000.000	975	975	25/ Rp. 6.250.000
	Nilai Selish Persediaan	---	6.500/ 1.110.000.000	---	---	Rp. 52.825.000

Sehubungan dengan ditemukannya selisih persediaan seperti di atas, maka Tim Pemeriksa Intern melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang terkait, yaitu Bagian Akuntansi Persediaan di Kantor, Kepala Gudang dan Pegawai Staf Gudang. Jumlah pegawai staf gudang sebanyak 2 (dua) orang, bernama AA dan BB. Dari hasil interogasi diketahui pula, bahwa Kepala Bagian Gudang, Sdr. CC menerima bagian uang sebesar Rp. 10.000.000,00, dan Sdr. CC mengkuai hal tersebut dan berjanji akan segera mengembalikannya kepada perusahaan. Saudara AA dan BB memberitahukan kepada Tim Pemeriksa Intern bahwa barang-brang yang dicurinya tersebut hanya laku dijual dengan harga Rp. 40.500.000,00, dan mereka sanggup mengembalikan kerugian perusahaan dengan senilai tersebut.

Kesanggupannya tersebut²²ituangkan dalam perjanjian tertulis bermeterai, AA sanggup mengembalikan Rp. 20.500.000,00 dan sisanya Rp. 20.000.000,00 oleh Saudara BB. Kerugian selebihnya sebesar Rp. 2.325.000,00, Sdr. CC, AA dan BB tidak mau menanggungnya. Ketiga pegawai tersebut tetap dipekerjakan pada perusahaan, namun mereka ditempatkan pada posisi yang berbeda dari jabatan sebelumnya.

Terhadap kasus 1 dan 2, pihak manajemen perusahaan memutuskan menyelesaikan kasus tersebut secara internal, tidak membawanya ke penegak hukum.

PENYELESAIAN KASUS PENGGELAPAN/KECURANGAN:

A. Penyelesaian Kasus Sesuai Sistem Akuntansi Kontemporer

Kasus 1.

Sehubungan dengan adanya pencurian uang kas pada periode Agustus 2014 yang menimbulkan kerugian kepada perusahaan, maka selanjutnya manajemen perusahaan membuat bukti pendukung untuk dasar pembuatan jurnal.

Bukti pendukung tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jurnal yang dibuat sebagai berikut :

12.01 Piutang Pegawai, Sdr. A	Rp. 100.000.000,00	
12.02 Piutang Pegawai, Sdr. B	Rp. 45.000.000,00	
30.01 Kerugian kas		
karena pencurian	Rp. 5.125.000,00	
010.Kas		Rp.150.125.000,00

Berdasarkan jurnal tersebut di atas selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam Buku Besar sesuai Akun yang terkait.

Kasus 2.

Sehubungan dengan adanya pencurian barang persediaan pada periode Agustus 2014 yang menimbulkan kerugian kepada perusahaan, maka selanjutnya manajemen perusahaan membuat bukti pendukung untuk dasar pembuatan jurnal.

Bukti pendukung tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jurnal yang dibuat sebagai berikut :

12.03 Piutang pegawai, Sdr. CC	Rp. 10.000.000,00	
12.04 Piutang pegawai, Sdr. AA	Rp. 20.500.000,00	
12.05 Piutang pegawai, Sdr. BB	Rp. 20.000.000,00	
30.01 Kerugian karena adanya		
Pencurian barang	Rp. 2.325.000,00	
13.01 Persediaan barang AB		Rp.25.000.000,00
13.02 Persediaan barang ABG		Rp. 18.750.000,00
13.03 Persediaan barang CDH	Rp. 775.000,00	
13.04 Persediaan barang GDB		Rp. 2.050.000,00
13.05 Persediaan barang GDR		Rp. 6.250.000,00

Berdasarkan jurnal tersebut di atas selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam Buku Besar sesuai Akun yang terkait.

B. Penyelesaian kasus sesuai tata cara dalam Arthasastra.

Kasus 1

Kecurangan Kas yang terjadi pada **kasus 1** pencatatan dilakukan dalam **Buku Saldo** berkolom. Susunan kolomnya disesuaikan, agar sesuai dengan kasus yang terjadi.

Untuk menyelesaikan **kasus 1** perlu dilengkapi dengan data sebagai berikut :

- 1) Nama tempat : Denpasar
- 2) Nomor Akun : 010.00 (Kas)

- 3) Nomor Akun : 12.00 Piutang Pegawai
 12.01 Piutang Pegawai A
 12.02 Piutang Pegawai B
 30.01 Kerugian tak terduga
- 4) Nama Pejabat : Perbendaharaan : Aditya,

Buku Saldo (berkolom)

Tgl.	Tempat	No. Akun	Piutang Pegawai	Kerugian Tak Terduga	Jumlah Kas	Penanggung jawab	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4) (Rp)	(5) (Rp)	(6) (Rp)	(7)	(8)
31-8-2014	Denpasar	010.00	----	----	350.250.000	Aditya	Saldo awal Kas
31-8-2014	Denpasar	--	----	----	(150.125.000)	Aditya	Pencurian kas
31-8-2014	Denpasar	12.01	100.000.000	----	----	Aditya	Piutang Pegawai A
31-8-2014	Denpasar	12.02	45.000.000	----	----	Aditya	Piutang Pegawai B
31-8-2014	Denpasar	30.01	----	5.125.000	----	Aditya	Kerugian tak terduga
Jumlah	---	---	145.000.000	5.125.000	200.125.000	---	

Pencatatan ke dalam Buku Saldo berkolom tersebut sebetulnya sudah sekaligus membuat jurnal dan mencatat ke dalam buku besar masing-masing akun.

Kasus 2

Kecurangan dalam persediaan yang terjadi pada **kasus 2**, pencatatannya dilakukan dalam **Buku Saldoberkolom**. Susunan kolomnya disesuaikan, agar sesuai dengan kasus yang terjadi. Untuk menyelesaikan kasus 2 perlu dilengkapi dengan data sebagai berikut:

Nama tempat : Denpasar

Nomor Akun : 13.00 (Persediaan)
13.01 Persed. Barang AB
13.02 Persed. Barang ABG
13.03 Persed. Barang CDH

Tgl.	Tempat	No. Akun	Piutang Pegawai	Kerugian Tak Terduga	Jumlah Persediaan	Penang Gung jawab	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (Rp & Kg)	(7)	(8)
31-8-2014	Denpasar	013.00	---	----	6.500/ 1.110.000.000	Rahela	Saldo awal
31-8-2014	Denpasar	12.03	10.000.000	----	----	Rahela	Piutang pegawai CC
31-8-2014	Denpasar	12.04	20.500.000	----	----	Rahela	Piutang pegawai AA
31-8-2014	Denpasar	12.05	20.000.000	----	----	Rahela	Piutang pegawai BB
31-8-2014	Denpasar	30.01	----	2.325.000	----	Rahela	Kerugian tak terduga
31-8-2014	Denpasar	13.01	----	----	(200/ 25.000.000)	Rahela	Kurang Persed.AB
31-8-2014	Denpasar	13.02	----	----	(125/ 18.750.000)	Rahela	Kurang Persed.ABG
31-8-2014	Denpasar	13.03	----	----	(5/ 775.000)	Rahela	Kurang Persed.CDH
31-8-2014	Denpasar	13.04	---	----	(10/ 2.050.000)	Rahela	Kurang Persed.GDB
31-8-2014	Denpasar	13.05	---	---	(25/ 6.250.000)	Rahela	Kurang Persed.GDR
			50.500.000	2.325.000	6135/ 1.057.175.000		

Pencatatan ke dalam Buku Saldo berkolom tersebut sebetulnya sudah sekaligus membuat jurnal dan mencatat ke dalam buku besar masing-masing akun.

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI.

P.11.1. Jelaskan yang dimaksud dengan : pararabda karma, sancita karma dan kriyamana karma.

- P.11.2. Sebutkan agama lainnya yang percaya kepada Hukum Karma, selain agama Hindu.
- P.11.3. Apakah Saudara percaya kepada bekerjanya hukum karma.
- P.11.4. Siapakah yang bertugas melakukan pencatatan atas semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- P.11.5. Menurut Saudara, siapakah yang berwenang memberikan penilaian atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- P.11.6. Jelaskan yang dimaksud dengan modus operandi penggelapan “ apa yang telah diperoleh, tetapi baru dinyatakan kemudian “. Berikan contoh kasusnya.
- P.11.7. Jelaskan yang dimaksud dengan modus operandi penggelapan “ ketidakcocokan dengan sumber-sumber “. Berikan contohnya.
- P.11.8. Jelaskan yang dimaksud dengan modus operandi penggelapan “ ketidakcocokan dengan pelaksanaan “. Berikan contohnya.
- P.11.9. Jelaskan yang dimaksud dengan modus operandi penggelapan “ ketidakcocokan dengan harga “. Berikan contohnya.
- P.11.10. Jelaskan yang dimaksud dengan modus operandi penggelapan “ ketidakcocokan dengan mutu “. Berikan contohnya.
- P.11.11. Jelaskan yang dimaksud dengan modus operandi penggelapan “ ketidakcocokan dalam menimbang “. Berikan contohnya.
- P.11.12. Jelaskan yang dimaksud dengan modus operandi penggelapan “ apa yang dibayarkan, tidak dibayarkan “. Berikan contohnya.
- P.11.13. Jelaskan yang dimaksud dengan kejahatan kerah putih. Beri contohnya sehingga jelas maksudnya.
- P.11.14. Menurut Arthashastra, apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh para akuntan ditemukan kecurangan, langkah-langkah audit lengkap apa yang harus dilakukan. Jelaskan langkah-langkah audit yang dimaksud dan jelaskan pula apa tujuannya.
- P.11.15. Jelaskan yang dimaksud dengan kecurangan karyawan dan kecurangan manajemen. Masing-masing berikan contohnya, sehingga menjadi jelas maksudnya.
- P.11.16. Dari segi kerugian yang ditimbulkan, jenis kecurangan mana yang lebih berbahaya bagi perusahaan. Apakah kecurangan karyawan atau kecurangan manajemen. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.11.17. Langkah apa yang harus dilakukan oleh manajemen puncak untuk mengatasi kecurangan manajemen divisi (unit) pada perusahaan terdesentralisasi, tidak sampai terjadi berlalu-lurut.
- P.11.18. Kejahatan komputer sangat sulit diketahui, dan dapat menimbulkan kerugian besar kepada perusahaan. Untuk mencegah kejahatan komputer maka dapat dilakukan dengan menggunakan kontrol preventif. Jelaskan maksud beberapa langkah kontrol preventif berikut ini :
- a). Penyeleksian karyawan.
 - b). Definisi tugas yang jelas.
 - c). Pemisahan tugas yang jelas
 - d). Akses ganda yang jelas
 - e). Etika profesional
- P.11.19. Fungsi pencegahan sangat penting artinya dalam upaya memperkecil terjadinya kejahatan komputer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan komputer. Fungsi-fungsi manakah yang harus melakukan tugas tersebut. Jelaskan.
- P.11.20. Jelaskan makna dari fungsi komputer tidak sepenuhnya terpisah dari pengguna. Kenapa kondisi ini bisa terjadi. Bagaimana cara mengatasi

kelemahan kondisi ini.

P.11.21. Jelaskan makna dari kurangnya pemisahan tugas dalam departemen komputer. Kenapa kondisi ini bisa terjadi. Bagaimana cara mengatasi kelemahan kondisi ini.

P.11.22. Jelaskan makna dari kurangnya pengetahuan teknis komputer dari karyawan yang bertugas mensupervisi komputer. Kenapa kondisi ini bisa terjadi. Bagaimana cara mengatasi kelemahan kondisi ini.

P.11.23. Jelaskan makna dari disket memiliki beragam risiko karena relatif mudah disembunyikan akibat ukuran dan kapasitas data yang dimiliki.

Kenapa kondisi ini bisa terjadi. Bagaimana cara mengatasi kelemahan kondisi ini.

P.11.24. Pada awal Desember 2014 Firma – ABC mempunyai saldo piutang dagang sebesar Rp. 750.350.000,00. Direktur perusahaan ingin mengetahui berapa saldo piutang dagang yang seharusnya dicantumkan dalam Neraca per 31 Desember 2014, untuk itu bagian akunting diperintahkan untuk mengirim surat konfirmasi kepada masing-masing debitur. Berdasarkan buku nominatif piutang diketahui jumlah debitur sebanyak 85 debitur. Debitur yang mengembalikan surat konfirmasi sebanyak 80. Berdasarkan jawaban konfirmasi tersebut diketahui 10 debitur yang menyatakan tidak sesuai saldo utangnya kepada perusahaan, dengan rincian sbb. :

No. urut	Nama & Alamat Debitur	Saldo Piutang Menurut Perusahaan	Saldo Piutang Menurut Konfirmasi	Perbedaan lebih/kurang	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CV Adi, Denpasar	15.150.000	13.000.000	(2.150.000)	
2	CV.Cahaya, Denpasar	20.750.000	15.250.000	(5.500.000)	
3	PT. ABC Tabanan	17.500.000	12.500.000	(5.000.000)	
4	PT.Seroja, Negara	25.750.000	22.500.000	(5.250.000)	
5	CV.Topan, Banyuasi	27.500.000	27.450.000	50.000	
6	Firma Rapi, Gianyar	15.000.000	15.100.000	100.000	
7	CV Jepun, Klungkung	20.000.000	19.000.000	(1.000.000)	
8	Firma Sentosa, Bangli	17.500.000	17.550.000	50.000	
9	PT. Murtisari, Tabanan	22.500.000	20.000.000	(2.250.000)	
10	PT. Batuakik	15.750.000	13.000.000	(2.750.000)	

Terhadap saldo hasil konfirmasi yang berbeda, baik yang menunjukkan saldo lebih besar, apa lagi yang menunjukkan saldo lebih kecil pihak perusahaan melakukan penelusuran dengan teliti melalui petugas Satuan Pengawas Intern.

Dari penelusuran petugas SPI diketahui bahwa saldo lebih timbul pada saat mengisi jawaban konfirmasi pihak debitur mengaku salah menuliskan angka saldo utangnya. Sedangkan untuk saldo konfirmasi yang negatif, pihak debitur sudah benar mengisi formulir konfirmasi yang diterimanya dan dikirimkan kembali ke pihak perusahaan.

Selanjutnya untuk saldo konfirmasi negatif pihak perusahaan melakukan penelusuran kepada tenaga kolektor yang menangani debitur yang bersangkutan. Setelah dilakukan interogasi secara intensif, kolektor A, B, C dan D mengakui dengan terang bahwa setoran debitur mereka pakai untuk kepentingan pribadi. Kolektor A menangani debitur CV Adi dan CV Cahaya, kolektor B menangani PT. ABC dan PT. Seroja, kolektor C menangani CV Jepun dan PT Murtisari serta kolektor 106 menangani PT. Batuakik.

Kolektor C mengajukan surat pengunduran diri dan menyerahkan uang ke perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,00. Pihak perusahaan menerima pengunduran diri pegawai tersebut.

Diminta :

Berdasarkan informasi tersebut di atas buatlah perhitungan dan jurnal sesuai sistem akuntansi kontemporer dan pembukuan sesuai petunjuk Arthashastra.

Bila dari kasus tersebut dirasa ada data yang kurang, Sdr. dapat melengkapinya.

PENGANTAR AKUNTANSI HINDU

“ yad-yad acarati sresthas tat-tad evetaro janah, sa yat pramanam kurute lokas tad anuvartate “
(Bhg. III.21)

“ Perbuatan apapun dilakukan oleh orang-orang besar, hal yang sama akan diikuti oleh yang lainnya. Kaedah apapun yang dia pastikan, dunia akan mengikutinya “. (Bhg. III.21)

BAB XII

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KONVENSIONAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN MENURUT ARTHASASTRA.

1. PENGAWASAN MEMERLUKAN KETELADANAN JAJARAN MANAJEMEN.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari 5 (lima) fungsi pokok manajemen, yaitu fungsi **perencanaan, pengorganisasian, stafing** dan memberikan **pengarahandan pengawasan**

Termasuk dalam pengertian pengawasan adalah upaya manajemen mengendalikan jalan seluruh bagian organisasi, dengan tujuan mengamankan seluruh harta dan kekayaan organisasi, personil dan metode kerja yang digunakan untuk melaksanakan misi organisasi. Manajemen bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun rancangan sistem dan prosedur pengendalian intern organisasi sebaik mungkin serta bertanggung jawab untuk melaksanakan serta memperbaiki system tersebut bila ditemukan kelemahan selama pelaksanaannya. Pihak manajemenlah yang pertama kali harus patuh melaksanakan sistem dan prosedur yang dirancangnya, bila manajemen menginginkan seluruh pegawai mau mematuhi.

Sejalan dengan kepatutan tersebut diatas, sangat tepatlah apa yang disampaikan oleh **Awatar Krisna** kepada **Arjuna** mengenai **kepemimpinan** yang dituangkan dalam **Bagawdgita III.21**, menyatakan :

“Perbuatan apapun dilakukan oleh orang-orang besar, hal yang sama akan diikuti oleh yang lainnya. Kaedah apapun yang dia pastikan, dunia akan mengikutinya “.

Dalam tulisan ini ungkapannya disesuaikan dengan topik bahasannya, **bahwa yang dimaksud dengan orang besar adalah pemimpin**, maka :

“ apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin (orang besar) sebuah organisasi (entitas), hal yang sama akan dilakukan atau ditiru oleh pegawai organisasi tersebut, peraturan apapun yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin yang adil dan taat aturan akan dipatuhi oleh semua pengikutnya “.

Petunjuk Sri Kresna tentang kualifikasi seorang pemimpin adalah pada tindakannya yang dapat dijadikan panutan oleh sekelompok masyarakat yang dipimpinya. Seorang pemimpin harus bertindak, harus melaksanakan tugas-tugasnya dengan nyata, bukan menebar teori.

Kautilya dalam Arthasastra Bk. I. 8.: 25, memberikan penekanan kembali dan memberikan petunjuk kepada raja dalam mengangkat menteri haruslah menteri yang mempunyai **keahlian pada bidangnya dan berpengalaman dalam praktek.**

Walaupun seseorang dinyatakan sebagai seorang ahli (dalam bidang ilmu tertentu) tetapi bila tidak berpengalaman dalam praktek, bila ditunjuk menduduki jabatan sebagai menteri akan sulit dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Semua **pejabat pemerintahan (atmaya)**, haruslah mempunyai latar belakang keahlian pada bidangnya masing-masing dan berpengalaman dalam praktek, karena

dari kemampuan mereka bekerja, kemampuan pejabat pemerintahan dinilai (Arthashastra Bk. I. 8 : 28).

Selanjutnya, pedoman kepemimpinan yang ditekankan oleh Kautilya, yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi oleh seorang raja (pemimpin), dituangkan dalam Athashastra Bk. I, 19 : 34

“ Pada kebahagiaan rakyatnya adalah letak kebahagiaan raja, dan apa yang bermanfaat bagi rakyatnya juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan apa yang berharga bagi dirinya sendiri belum tentu berguna bagi Negara. Tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya adalah bermanfaat bagi raja “.

Berdasarkan petunjuk kepemimpinan yang dijelaskan di atas, bahwa Kautilya sangat menjunjung tinggi asas demokrasi, karena semuanya diukur dengan kepuasan rakyat yang dipimpinnya. Penekanan pada asas demokrasi, berarti berpedoman pada asas akuntabel (pertanggungjawaban yang sehat) pada semua sisi kehidupan bernegara, penegakan hukum yang transparan. Pada sisi penegakan hukum, Kautilya sangat tegas, semua pegawai yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dikenakan sanksi, dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat. Sanksi paling berat yaitu hukuman mati.

2. SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG BERLAKU UMUM 1970 s.d. 2.000.

3 Mulai Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I), yang diawali sejak tahun 1969/1970, pemerintah Indonesia mulai 3 menggalakkan istilah dan penerapan Pengendalian Intern atau Pengawasan Intern (internal control system) atau disebut dengan Pengawasan Melekat (Waskat) dalam lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengawasan melekat dimaksudkan adalah pengawasan yang dapat berfungsi secara otomatis, artinya perangkat pengawasan dapat berfungsi dengan baik tanpa perlu intervensi campur tangan pihak luar organisasi. Perangkat pengawasan ini dalam bentuk sistem dan prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (sisdur, juklak dan juknis), yang dibuat secara tertulis yang berlaku dalam organisasi tersebut.

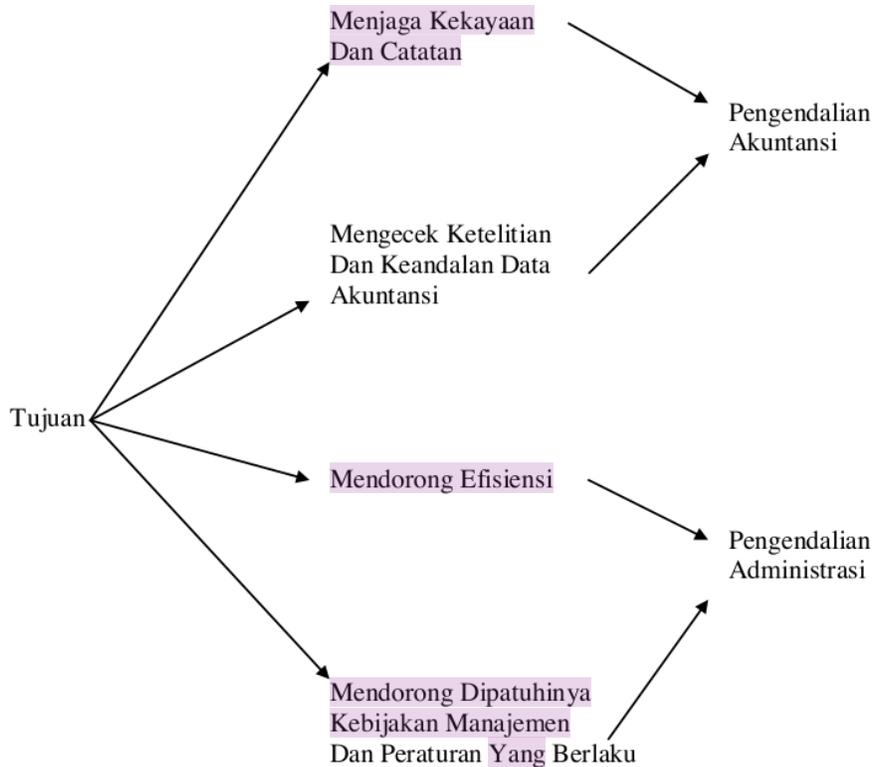
Sebelum menginjak lebih jauh, kiranya ada baiknya terlebih dahulu diberikan pengertian “ **Sistem Pengendalian Intern** “ dalam kurun waktu 1970 sampai dengan 1992, yang berlaku pada organisasi bisnis dan organisasi lainnya sesuai dengan Standard on Auditing Procedures (SAP) No. 33, tahun 1949. Pengertian Sistem Pengendalian Intern tersebut digunakan oleh Ikatan Akuntan Terdaftar Amerika (American Institute Certified Public Accountants /AICPA), dan sekaligus juga digunakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

22 “ **Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen “ (Mulyadi, 1992 : 162).**

Struktur 69 Pengendalian suatu organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai

Bagan XII.1

Tujuan Sistem Pengendalian Intern.



Sumber : Gambar 3.1. Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan*, Edisi 4, 1992.

77 Unsur-unsur sistem pengendalian internal yang dimuat dalam Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) 1994, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah : 114

- 25
- 1) Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung Jawab dan Fungsi Secara Tegas.
 - 2) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan Yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang Pendapatan dan Biaya.
 - 3) Praktek Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Tiap Bagian Organisasi.
 - 4) Karyawan Yang Mutunya Sesuai dengan Tanggungjawabnya.

Sesuai unsur **pengendalian intern yang pertama**, jelas diberikan petunjuk kepada manajemen untuk **melakukan pemisahan tanggung jawab dan pemisahan fungsi secara tegas dalam organisasi yang dibentuknya.**

Sebab disadari oleh perancang sistem, apabila terjadi penggabungan tanggung jawab dan penggabungan fungsi dalam suatu organisasi atau entitas, maka akan mudah terjadi penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh unsur manajemen atau karyawan yang dapat merugikan kekayaan perusahaan.

Dari segi fungsi, manajemen setiap organisasi memiliki beberapa jenis fungsi, dan secara umum dikenal 5 jenis fungsi, yaitu :

- 1) **Fungsi otorisasi**
- 2) **Fungsi pencatatan**
- 3) **Fungsi penyimpanan**
- 4) **Fungsi pengawasan**
- 5) **Fungsi operasi**

Penjelasan ringkas dari 5 (lima) fungsi tersebut sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Otorisasi**
Fungsi otorisasi merupakan fungsi tertinggi bagi manajemen, yaitu fungsi manajemen untuk membuat keputusan atau tidak membuat keputusan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas managerialnya. Tugas membuat keputusan ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak, selain kepada pihak yang masih berkedudukan atau dalam lingkaran manajemen. Suatu organisasi itu bergerak karena adanya otorisasi (keputusan) yang yang dibuat oleh manajemen. Tanpa adanya keputusan manajemen organisasi akan mandeg atau tidak bergerak.
- 2) **Fungsi Pencatatan**
Fungsi ini adalah satu jenis fungsi yang melaksanakan tugas-tugas pencatatan dan pelaporan yang diperlukan organisasi atau entitas. Fungsi ini dipegang oleh Direktur Keuangan dengan semua stafnya, yaitu melakukan pencatatan sejak awal transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan lengkap pada setiap akhir periode akuntansi. Laporan keuangan lengkap yang harus disusun manajemen terdiri dari : (1) Neraca; (2) Daftar laba rugi; (3) Laporan arus kas; (4) Laporan perubahan ekuitas, dan (6) Catatan atas laporan keuangan.
- 3) **Fungsi Penyimpanan.**
Fungsi penyimpanan merupakan fungsi penting dari manajemen, yaitu fungsi mengamankan asset-asset yang dimiliki perusahaan. Fungsi ini biasanya dipegang oleh Direktur Keuangan dengan semua stafnya sampai dengan tingkat yang paling bawah. Kekayaan milik perusahaan/entitas biasanya dalam bentuk fisik dan non fisik, semuanya harus diamankan atau disimpan dengan baik oleh pihak manajemen. Terakhir, semua kekayaan yang dimiliki entitas/perusahaan harus dilaporkan dengan cermat dalam laporan keuangan yang dibuat manajemen pada setiap akhir tahun pelaporan, sehingga laporan keuangan tersebut mencerminkan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.
- 4) **Fungsi Pengawasan.**
Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang dimiliki oleh semua tingkatan manajemen, yaitu dari tingkat manajemen tertinggi sampai dengan tingkat paling bawah. Fungsi ini bertujuan memastikan bahwa semua kebijakan yang

telah ditetapkan manajemen telah dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan yang dikehendaki manajemen dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Fungsi pengawasan secara umum dapat diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk menciptakan system dan prosedur. Sistem dan prosedur yang diciptakan dalam suatu organisasi biasanya terdiri dari system dan prosedur akuntansi dan system dan prosedur kerja yang bersifat teknis.

Sistem dan prosedur akuntansi dirancang dengan sasaran untuk mengamankan kekayaan perusahaan, dan tujuan akhirnya dapat menyusun laporan keuangan secara cermat, tepat waktu pada setiap akhir periode akuntansi.

Selanjutnya system dan prosedur yang bersifat teknis seperti system dan prosedur produksi, system dan prosedur pengadaan bahan baku untuk mendukung proses produksi, system dan prosedur penyimpanan bahan baku dan barang jadi dalam gudang, dan sebagainya.

5) **Fungsi Operasi**

Fungsi operasi sama dengan fungsi kerja, merupakan fungsi dari semua tingkatan manajemen, yaitu dari manajemen puncak sampai dengan pegawai tingkat yang paling bawah. Semua harus bekerja dengan dilandasi integritas dan kejujuran yang tinggi dalam rangka melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh manajemen. Program-program yang telah ditetapkan oleh manajemen tanpa dikerjakan dengan intensif dan dilandasi dengan kejujuran dan integritas yang tinggi, maka tujuan organisasi yang telah ditetapkan tidak akan tercapai dengan baik.

Masih berpegangan pada unsur pengendali intern yang pertama, dimana diberikan petunjuk kepada manajemen untuk melakukan pemisahan tanggung jawab dan pemisahan fungsi secara tegas dalam organisasi yang dibentuknya.

Berdasarkan petunjuk tersebut di atas berarti manajemen juga harus memperhatikan kemungkinan adanya penggabungan tugas dan fungsi dalam manajemen perusahaan.

Umumnya terdapat 3 (tiga) jenis penggabungan fungsi, yaitu :

- 1) **Penggabungan fungsi vertical**
- 2) **Penggabungan fungsi horizontal, dan**
- 3) **Penggabungan fungsi diagonal.**

Berikut ini diberikan penjelasan ringkas mengenai makna dari masing-masing penggabungan fungsi tersebut, sebagai berikut :

1) **Penggabungan fungsi vertical.**

Penggabungan fungsi vertical, maksudnya semua fungsi yang ada yaitu fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan, fungsi pengawasan dan fungsi operasi dipegang oleh seorang pejabat. Penggabungan fungsi vertikal secara umum dilarang, tetapi kenyataannya, pada perusahaan-perusahaan kecil penggabungan fungsi ini masih sering dijumpai. Pada perusahaan-perusahaan besar penggabungan fungsi vertical seharusnya tidak boleh terjadi, karena penggabungan fungsi ini memberi peluang sangat luas kepada

pemegangnya untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.

2) **Penggabungan fungsi horizontal**

Penggabungan fungsi horizontal terjadi apabila seorang pejabat atau pegawai dalam perusahaan memegang beberapa **fungsi** yang **serupa** dalam kegiatan operasionalnya. Misalnya, berhubungan dengan penggabungan **fungsi pencatatan**, seperti : mencatat kas, mencatat piutang, mencatat persediaan, mencatat personalia, dan sebagainya.

Penggabungan beberapa fungsi pencatatan ini dari segi system pengendalian intern dapat melemahkannya, karena dapat membuka peluang kecurangan, seperti penggabungan fungsi pencatatan piutang dengan fungsi pencatatan kas. Penggabungan fungsi pencatatan persediaan di kantor dengan fungsi pencatatan utang. Penggabungan fungsi-fungsi seperti tersebut seharusnya dihindarkan. Penggabungan fungsi pencatatan yang tidak berbahaya dari segi pengendalian intern, seperti penggabungan fungsi pencatatan persediaan digabung dengan fungsi pencatatan personalia, pencatatan asset tetap, dan sebagainya.

3) **Penggabungan fungsi diagonal**

Penggabungan fungsi diagonal berarti seorang pejabat atau pegawai perusahaan dalam operasional kesehariannya melaksanakan beberapa fungsi yang berbeda, misalnya fungsi pencatatan digabungkan dengan fungsi penyimpanan, atau dapat juga dengan fungsi-fungsi lainnya.

Dalam melakukan **penggabungan fungsi diagonal** perlu diperhatikan, penggabungan fungsi ini jangan sampai melemahkan system pengendalian intern, seperti menggabungkan fungsi pencatatan dengan fungsi penyimpanan, misalnya fungsi mencatat piutang dengan fungsi penagihan kas bersumber dari piutang. Dilarang pula menggabungkan antara fungsi otorisasi penjualan dengan fungsi pencatatan piutang, atau fungsi penagihan piutang.

Berdasarkan uraian berkaitan dengan jenis-jenis fungsi dan jenis-jenis penggabungan fungsi di atas, untuk lebih memudahkan memahami maksud dari kedua istilah tersebut, berikut ini diupayakan dirumuskan dalam sebuah bagan sebagai berikut :

Bagan XII.2

Penggabungan Fungsi dan Jenis-Jenis Fungsi

Penggabungan Fungsi	Jenis-Jenis Fungsi				
	Otorisasi	Pencatatan	Penyimpanan	Pengawasan	Operasi
VERTIKAL	—————→				
HORIZONTAL	→	→	→	→	→
DIAGONAL	————→				

- Catatan :** 1) Penggabungan fungsi vertical dilarang
2) Penggabungan fungsi horizontal tidak dilarang, namun harus diperhatikan fungsi-fungsi yang dapat memperlemah satu dengan lainnya.
3) Penggabungan fungsi diagonal secara prinsip sama dengan penggabungan fungsi

horizontal

3. SISTEM PENGENDALIAN INTERN SESUAI COSO

Sejalan dengan perkembangan dalam bidang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan, khususnya bagi Akuntan Publik, maka rumusan sistem pengendalian internal yang digunakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik (IAPI) sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, sebagaimana tertuang dalam buku “ Standar Profesional Akuntan Publik, bersumber dari *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*. Namun demikian tujuan dari dibangunnya sistem pengendalian internal tidak mengalami perubahan sebagaimana digambarkan di atas. Pengertian pengendalian intern menurut COSO **adalah :**

“ suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas lainnya, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan, meliputi :

- (1) keandalan pelaporan keuangan;
- (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Selanjutnya **COSO** menekankan pada 4 (empat) konsep dasar pengendalian internal, yaitu :

- 1) Pengendalian internal merupakan suatu proses
- 2) Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang
- 3) Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya *keyakinan yang memadai*
- 4) Pengendalian internal diarahkan kepada pencapaian tujuan :
 - (1) keandalan pelaporan keuangan,
 - (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta
 - (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Struktur pengendalian internal dengan mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, maka **COSO** mengidentifikasi 5 (lima) komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu :

- 1). Lingkungan Pengendalian (control environment)
- 2). Penilaian Risiko (risk assesment)
- 3). Informasi dan Komunikasi (information and comunication)
- 4). Aktivitas Pengendalian (control activity)
- 5). Pemantauan (monitoring).

Penjelasan singkat dari 5 (lima) komponen (unsur) pengendalian internal COSO adalah sebagai berikut :

3.1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Menetapkan corak dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya.

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian mencakup 7 unsur atau factor yang berkaitan dengannya, sebagai berikut :

- (1) Integritas dan nilai etika
- (2) Komitmen terhadap kompetensi
- (3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit.
- (4) Filosofi dan gaya operasi manajemen
- (5) Struktur organisasi
- (6) Pemberian wewenang dan tanggung jawab.
- (7) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

3.2) Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan, dan diperkirakan terdapat 9 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan risiko, sebagai berikut :

- (1) perubahan dalam lingkungan operasi;
- (2) personil baru;
- (3) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki;
- (4) Pertumbuhan perusahaan yang pesat;
- (5) Adanya teknologi baru;
- (6) Lini produk, produk, atau aktivitas baru;
- (7) Restrukturisasi korporat;
- (8) Operasi luar negeri;
- (9) Penerbitan standar akuntansi baru.

3.3) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Dalam hal ini yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yaitu sistem akuntansi, terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang dibangun untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan mengolah serta melaporkan transaksi-transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk memelihara akuntabilitas dari asset, utang dan ekuitas yang bersangkutan.

Sistem informasi akuntansi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk :

- (1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.
- (2) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci, penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
- (3) Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.

- (35) Menentukan periode waktu terjadinya transaksi.
- (5) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang sesuai dalam laporan keuangan.

Komunikasi, mencakup pemberian pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab individu dalam entitas, berkenaan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

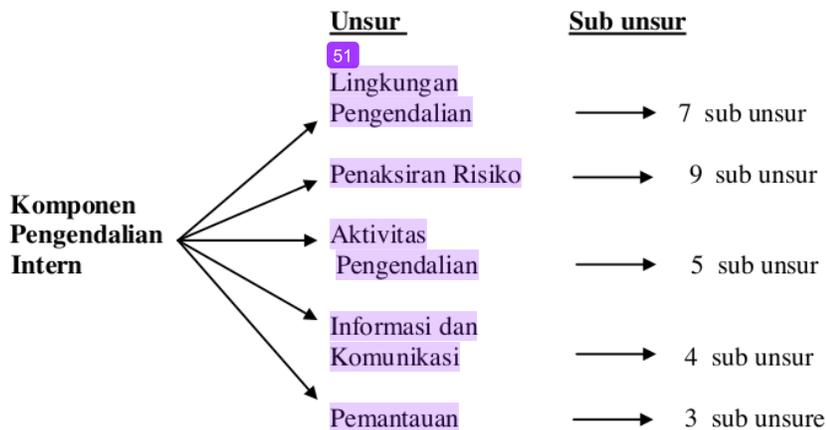
3.4) **Aktivitas Pengendalian (Control Activity)**

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasi dan fungsional.

Aktivitas pengendalian yang relevan digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal berikut :

- (1) review kinerja;
- (2) Pengolahan informasi

Bagan XII.3



4. **PENGENDALIAN INTERN DALAM ARTHASASTRA**

Pengertian pengendalian intern menurut Arthasastra tampaknya lebih luas dibandingkan dengan rumusan yang dianut oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang diadopsi dari Standar Auditing Procedure No. 33 maupun yang diambil dari Committee of Sponsoring Organizations (COSO).

Kautilya, mengawali dengan memberi petunjuk, bahwa semua ilmu yang dipelajari manusia berasal dari Weda. Dari mempelajari Weda manusia bisa mendapat petunjuk, tindakan mana yang benar dan mana yang salah.

Misalnya, tentang **kesejahteraan** dan **kemiskinan** dalam masyarakat harus dipelajari dari **Warta (ilmu ekonomi)**. Masalah kebijakan yang baik dan buruk dalam menjalankan pemerintahan sebuah Negara dipelajari dari **Dandaniti (ilmu politik)**.

Dalam peraktek kesehariannya, hal-hal yang berkaitan dengan penentuan baik dan buruk (menyangkut rasa), agar supaya tidak berdampak negatif terhadap Warta, maka semua tindakan yang akan dilakukan harus diawali dengan pengendalian indria para pelakunya, yaitu mengekang hawa nafsu : amarah, tamak, kesombongan, tinggi hati dan keras kepala (Artha Bk.I, Bab 6 butir 1).

Pengendalian indria para pelaku organisasi merupakan unsur pertama dan utama dalam membangun suatu sistem pengendalian internal. Unsur utama ini yang disebut dengan **pengendalian indria**, yang hakekatnya sama dengan **berpuasa moral (Anastaka)**, (Brhadaranyaka Upanisad IV.22, dalam Yayurveda, Adhyaya-40 : 686), yaitu menjauhkan diri dari sifat-sifat yang negatif yang dapat merugikan organisasi, harus terserap kedalam pelaksanaan unsur-unsur lainnya yang bersifat fisik yang akan dibangun kemudian. Unsur utama ini bersifat non fisik, namun paling menentukan dalam menjalankan suatu organisasi. Unsur **pengendalian indria** ini tidak terdapat dalam sistem pengendalian internal konvensional.

Jadi pengertian sistem pengendalian intern dari hasil galian dari Arthasastra, digabungkan dengan pengertian pengendalian intern konvensional seperti diuraikan sebelumnya, menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Sistem pengendalian internal akuntansi meliputi pengendalian indria, struktur organisasi, metode dan prosedur yang dikoordinasikan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kecermatan sehingga data akuntansi dapat dipercaya, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berlaku “.

“ Sistem pengendalian administrative meliputi pengendalian indria, struktur organisasi, metode dan prosedur, yang utama ditujukan untuk menilai tingkat efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap kebijakan manajemen serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berlaku “.

Jadi ciri khas perancangan sistem pengendalian intern menurut **Kautilya** bagi semua organisasi dimulai dari pembentukan watak manusia pelaksana dari sistem pengendalian itu sendiri. Tampaknya, sejak jaman dahulu disadari oleh para ahli organisasi pemerintahan maupun sector swasta, bahwa menegakkan suatu rancangan sistem pengendalian tanpa dibarengi dengan perbaikan moral para pelaksana sistem itu sendiri, hasilnya tidak akan pernah maksimal, bahkan akan lebih banyak mengalami kegagalan, yaitu akan terjadi penyelewengan atau korupsi.

Kautilya, meletakkan masalah korupsi pada posisi yang lebih dalam yaitu pada sisi kejiwaan dan kerohanian, karena pada umumnya orang korupsi disebabkan oleh jiwa orang tersebut lemah, karena didorong oleh sifat serakah, angkuh, ingin dipandang hebat, dan bukan semata-mata karena factor kemiskinan materi, namun disebabkan oleh kemiskinan rohani. Faktor kemiskinan rohani sangat sulit untuk dideteksi dan mengetahuinya, karena tertutup rapat dalam jiwa masing-masing orang.

Dalam organisasi publik maupun bisnis, sistem pengendalian internal mempunyai posisi strategis. Anggaran pendapatan dan belanja organisasi publik (pemerintahan) bersumber dari sumbangan masyarakat, terdiri dari pajak dan retribusi. Jumlahnya umumnya sangat besar. Bagi sektor pemerintahan, dan perusahaan bisnis yang sudah

besar, keberadaan sistem pengendalian internal tidak dapat diabaikan. Pengabaian terhadap sistem pengendalian internal berarti berani menantang risiko kerugian, cepat atau lambat pahitnya akan dirasakan oleh organisasi tersebut.

Dalam sub unsur dari unsur “ **Lingkungan Pengendalian** “ dalam sistem pengendalian internal COSO, tercantum sub unsur “ **integritas dan nilai etika** “. Namun tidak ditemukan penjelasan secara rinci apa maksud dari masing-masing sub unsur yang ada dalam Lingkungan Pengendalian. Demikian juga dengan sub unsur yang ada pada 4 Unsur Pengendalian lainnya tidak dilengkapi dengan penjelasan.

Kata “ **integritas** “, ternyata mempunyai arti yang sangat luas dan mulia. Kata integritas menurut **Rsi Valmiki** yang dikenal sebagai penyusun **epos Ramayana** (Ramayana, Kumala Subramaniam, hal. 3) berarti : (1) keberanian; (2) kejujuran; (3) sopan santun; (4) kebaikan; (5) teguh pendirian; (6) karakter yang sempurna; (7) perhatian kepada semua makhluk; (8) terpelajar; (9) terlatih; (10) penuh keindahan; (11) kharisma yang berwibawa; (12) penuh semangat; (13) berseri-seri; (14) kesanggupan untuk mengontrol angkara; (15) pengendalian diri yang sempurna; (16) tanpa rasa iri hati dalam keadaan apapun; (17) sifat kepahlawanan; (18) tidak memiliki musuh karena semua musuhnya telah dikalahkan.

Bahkan dikatakan hanya manusia tertentu saja yang mempunyai integritas 100 %. Dalam hal ini dikatakan hanya R a m a yang mempunyai integritas 100 %. Para Deva, para Rsi termasyurpun tidak mempunyai integritas 100 %. Integritas itu mempunyai makna mahir secara teori dan mahir dalam peraktek.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat keterkaitan antara sistem pengendalian internal yang berlaku masa ini dalam mengelola organisasi dengan sistem pengendalian intern yang diuraikan dalam **buku Arthasastra**, susunan **Kautilya**, yang ditulis sekitar tahun 321-296 sebelum Masehi.

5. UNSUR-UNSUR DAN TUJUAN PENGENDALIAN INTERN KONVENSIONAL DAN PENGENDALIAN INTERN MENURUT ARTHASASTRA

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ³ agar tercipta suatu pengendalian intern yang baik dan dapat berfungsi secara otomatis, maka SAP 33 merumuskan unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi yaitu :

- 1) Adanya Struktur Organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, kewajiban, ekuitas (modal) serta pendapatan dan biaya.
- 3) Peraktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi, dan
- 4) Karyawan yang jujur serta mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan tujuan dari dibangunnya system pengendalian internal adalah ²² untuk :

- (1) menjaga keamanan kekayaan (asset) dan catatan akuntansi ³² organisasi
- (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi;
- (3) mendorong efisiensi usaha organisasi, dan
- (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan segala peraturan yang berlaku.

Arthashastra ternyata memuat secara lengkap unsur-unsur pokok system pengendalian intern seperti diuraikan di atas, bahkan ditambahkan satu unsur pokok lainnya yaitu keharusan **Pengendalian Indria (PI)** dari masing-masing pelaku pengendalian intern, dan unsur ini justru tidak terdapat dalam SAP 33 maupun dalam sistem pengendalian intern terakhir, yang dianut oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia. Memang dalam SAP 33 telah dipersyaratkan adanya unsur kejujuran bagi semua pelaku organisasi, namun jujur itu sendiri maknanya masih jauh lebih sempit dari pada yang dianut **Arthashastra**, yaitu pengendalian indria, yang merupakan pengendalian diri secara total.

Arthashastra secara tegas menyatakan, bahwa apa saja yang diuraikan dalam **buku Arthashastra** bersumber dari Weda, yaitu Rg. Weda, Sama Weda, Yajur Weda dan Atharwa Weda. Untuk mengukur tindakan manusia yang benar dan salah dapat dipelajari dari **Veda.Veda** memberikan petunjuk rahasia (terselubung) bagi manusia yang ingin memahami cara-cara hidup yang baik di dunia ini. **Warta** (ilmu ekonomi) dan **Dandaniti** (ilmu bernegara), memberikan petunjuk penting bagi seseorang yang ingin memahami tentang penyebab kemiskinan dari masyarakat suatu negara dan juga cara memberikan kehidupan sejahtera kepada masyarakat (Artha Bk. I, Bab2, butir 1-11). Dalam kaitan dengan kerangka pengendalian intern organisasi, **Arthashastra** melengkapinya dengan **pengendalian indria** bagi pelaksana organisasi pada semua tingkatannya.

Berikut ini diuraikan secara ringkas tiap unsur pengendalian intern tersebut, sebagai berikut :

5.1 Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggungjawab Secara Tegas.

Unsur pengendalian intern yang pertama dalam sebuah organisasi adalah adanya struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan tingkat-tingkat tanggungjawab dari masing-masing pejabat yang ada dalam organisasi, dimulai dari jabatan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Jabatan tertinggi dalam pemerintahan sistem kerajaan adalah raja, sedangkan dibawahnya adalah para Menteri, Direktur, dan seterusnya. Tentang persyaratan dan cara mengangkat para **Menteri** dan **Direktur** dijelaskan dalam Arthashastra (Artha Bk I, Bab 8, butir 1-29).

Berdasarkan ayat-ayat **Arthashastra** tersebut diperoleh petunjuk yang **baik** dan **kurang baik** atau **patut dihindari** mengenai pengangkatan pejabat setingkat Menteri (**Amatya**), antara lain sebagai berikut :

- pejabat yang diangkat berasal dari teman dekat, pejabat bersangkutan dapat menjadi kurang hormat kepada raja.
- pejabat yang berasal dari teman dekat, dikhawatirkan mengetahui semua kelemahan raja, sehingga raja menemui hambatan dalam melakukan tindakan bila pejabat tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan.
- pejabat yang diangkat berasal dari anak bekas pejabat kerajaan ada baiknya, kesetiaan dan perilaku mereka sudah diketahui oleh raja, sehingga raja dapat mempercayainya dengan sepenuh hati.
- **namun** bila pejabat terlalu banyak diberikan kebebasan mengambil keputusan, karena dipercaya, mereka akan merasa kerajaan tersebut sebagai miliknya.

Berarti pejabat tersebut melakukan penggabungan fungsi otorisasi, maka dapat berbuat sewenang-wenang dalam mengambil keputusan dan keputusan yang diambil dapat saja merugikan keuangan kerajaan.

- bila yang diangkat seorang ahli dalam bidang tertentu, tetapi bila yang bersangkutan tidak berpengalaman dalam peraktek, pejabat tersebut akan sulit melaksanakan tugas-tugasnya.
- angkatlah pejabat dari keturunan dan kelahiran orang baik-baik, memiliki kecerdasan, integritas, keberanian dan loyalitas kepada raja dan kerajaan.
- dari kemampuan bekerjalah, kemampuan seorang pejabat kerajaan dinilai.
- Mengukur kemampuan seorang pejabat kerajaan bukan berdasarkan keturunan dan keahlian yang dimiliki, tetapi dari segi kemampuan bekerja menerapkan keahliannya tersebut, ditambah berdasarkan integritas, keberanian dan loyalitas pejabat tersebut.

Jumlah Kementerian yang berfungsi membantu Raja, penjelasannya ditemukan dalam Arthashastra, L.N. Rangarajan, VII.i, hal. 275-276, yang menguraikan tentang “ Pimpinan Departemen (Heads Of Departements) “. Jumlah kementerian yang ada sebanyak 33 buah, masing-masing dipimpin oleh seorang Menteri (*Adhyaksa*). Rincian dari menteri-menteri tersebut dituangkan dalam **Bagan IX.2** berikut ini.

Bagan XII.4

Daftar Nama-Nama Departemen / Kementerian Pada Kerajaan Mangadha, India, 300 Tahun Sebelum Masehi

No. Urut	Nama Departemen		
	Bahasa Sansekerta	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nagavanadhyaksha	Chief Elephat Forester	Menteri Urusan Gajah Rimba
2	Kasashadhyaksha	Chief Superintendent of Treasury	Menteri Pengawasan Perbendaharaan
3	Akaradhyaksha	Chief Controller of Mining and metallurgy	Menteri Pengawasan Pertambangan dan Metalurgi
4	Lohadhyaksha	Chief Superintendent of Metals	Menteri Pengawasan Barang Logam
5	Lakshanadhyaksha	Chief master of Mint	Menteri Urusan Percetakan Uang Logam
6	Khanyadhyaksha	Chief Superintendent of Mines	Menteri Pengawasan Pertambangan
7	Lavanadhyaksha	Chief Salt Commissioner	Menteri Urusan Pergaraman
8	Suvarnadhyaksha	Chief Superintendent of Precious Metals and	Menteri Pengawasan Logam Mulia dan

		Jewellery	Perhiasan
9	Koshtagaradhyaksha	Chief Superintendent of Warehouses	Menteri Urusan Perumahan
10	Panyadhyaksha	Chief Controller of State Trading	Menteri Urusan Perusahaan Negara
11	Kupyadhyaksha	Chief Superintendent of Forest Produce	Menteri Pengawasan Produksi hasil Hutan
12	Ayudhagaradhyaksha	Chief of Ordnance	Menteri Urusan Alat Perang
13	Pauthavadhyaksha	Chief Controller of Weight and Measures	Menteri Pengawasan Ukusan dan timbangan
14	Manadhyaksha	Chief Surveyor and Timekeeper	Menteri Urusan Ukuran dan Penjaga Waktu
15	Sukadhyaksha	Chief Controller of Custom and Octroi	Menteri Pengawasan Bea dan Cukai
16	Sutradhyaksha	Chief Textile Commissioner	Menteri Urusan Sandang (Tekstil)
17	Sitadhyaksha	Chief Superintendent of CrownLand	Menteri Pengawasan Tanah Negara (kerajaan)
18	Suradhyaksha	Chief Controller of Alcoholic Beverages	Menteri Pengawasan Minuman Beralkohol
19	Sunadhyaksha	Chief Protector of Animals and Controller of Animal Slaughter	Menteri Pencegahan (keluar / masuk) Hewan dan Pengawasan Pemotongan Hewan
20	Ganikadhyaksha	Chief Controller of Entertainers (Courtesans, Brothels, Prostitutes and other Entertainers)	Menteri Pengawasan Hiburan (pelacuran, germo, pelacur dan jenis hiburan lainnya)
21	Navadhyaksha	Chief Controller of Shipping	Menteri Urusan Pengawasan Perkapalan
22	Pattanadhyaksha	Chief Controller of Ports and Harbours	Menteri Pengawasan Pelabuhan dan Kesahbandaran
23	Go-adhyaksha	Chief Superintendent of Crown Herds	Menteri Pengawasan Gembala Ternak Kerajaan
24	Asvadhyaksha	Chief Commander of Cavalry	Menteri Komando (Urusan) Kavaleri
25	Hasthyadhyaksha	Chief Commander of Elephant Corps	Menteri Komando (Urusan) Pasukan Gajah
26	Rathadhyaksha	Chief Commander of Chariot Corps	Menteri Komando (Urusan) Kereta Pertempuran
27	Patthyadhyaksha	Chief Comander of Infantry	Menteri Komando (Urusan) Infanteri
28	Mudradhyaksha	Chief Passport Officer	Menteri Urusan Paspor
29	Vivitadhyaksha	Chief Controller of Pasture Lands	Menteri Urusan Padang Rumput.

30	Dhyutadhyaksha	Chief Controller of Gambling	Menteri Pengawasan Perjudian
31	Samsthadhyaksha	Chief Controller of Private Trade	Menteri Urusan Pengawasan Perusahaan Privat (Suasta)
32	Bandanagradhyaksha	Chief Superintendent of Jails	Menteri Urusan Pengawasan Penjara.
33	Devatadhyaksha	Chief Superintendent of Temples	Menteri Urusan Candi (Tempat Ibadah)

Dari 33 Kementerian seperti tercantum di atas, hanya 7 Kementerian yang tampak tidak ada kaitan dengan masalah perekonomian negara. Sisanya 26 Kementerian atau **sekitar 79 %** adalah Kementerian yang berkaitan langsung atau secara tidak langsung dengan ekonomi.³

Berkaitan dengan jumlah Kementerian yang harus ada dalam pemerintahan kerajaan, ditemukan dialog antara pengikut Manu, Brhaspati, Usana dan Kautilya. Menurut Kautilya, jumlah Menteri yang diperlukan adalah sesuai kebutuhan Kerajaan dan Menteri yang diangkat tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut (Artha Bk. XV. Bab1, butir 22). Sedangkan menurut Manu, Brhaspati dan Usana, menyebutkan jumlah pasti, seperti 12, 16, dan 20. Dari hasil dialog tersebut tercermin, pendapat Kautilya sangat maju, dimana jumlah Menteri yang harus diangkat oleh raja sesuai kebutuhan, dan Menteri yang diangkat harus mempunyai kemampuan untuk bekerja. Pernyataan **Kautilya** ini sesuai benar dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang dianut pada jaman ini.

Ditemukan dialog mengenai bagaimana persyaratan dan cara mengangkat seorang Menteri antara Bhawadvaja, Visalaksa, Parasara, Pisuna, Kaunapadanta, yang semuanya berkedudukan sebagai penasehat raja. Ada pendapat, seorang menteri sebaiknya berasal dari teman seperguruan raja, karena raja telah mengenal integritas dan kemampuan mereka, tetapi ini mempunyai kelemahan karena menteri tersebut dikawatirkan akan kurang hormat kepada raja. Baik dan buruknya semua dikaji dengan cermat. Tampaknya cara pertemanan (nepostime) dari dulu sudah ada.

Apabila seorang menteri diangkat dari mereka yang telah pernah berjasa menyelamatkan raja dari bahaya, dari segi loyalitas dan pengabdian memang telah terbukti, tetapi belum tentu memenuhi syarat dari sisi kecerdasan dan kepintaran memimpin sebuah Departemen (Artha Bk. I, Bab 8, butir 10). Dijelaskan pula bahwa tidak tepat apabila seorang menteri diangkat dari seorang ahli ilmu, tetapi tidak berpengalaman dalam peraktek, mereka akan sulit dalam melaksanakan tugas. Dinyatakan, bahwa dari **kemampuan bekerjalah**, kemampuan seorang menteri dinilai. Sebab menyandang gelar ahli ilmu belum tentu mempunyai kemampuan dalam bekerja (Artha Bk. I, Bab 8, butir 25, 28).

Pada zaman itu, para penasehat menyarankan agar raja mengangkat menteri orang yang memiliki kebangsawanan dari kelahiran, kecerdasan, integritas, keberanian dan loyalitas, karena kualitas tersebut dianggap sangat penting (Artha Bk. I, Bab 8, butir 26).

Disamping mengangkat para Menteri dan Direktur, Raja juga harus mengangkat Penasehat dan Pendeta. Banyak sekali prsyarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai penasehat, antara lain : jujur,

mempunyai kemampuan menangani/memberi nasehat orang lain, tidak plin-plan, tidak suka menimbulkan kebencian, dsb.nya (Artha Bk. I, Bab 9, butir 3). Sedangkan persyaratan menjadi **Pendeta** kerajaan diuraikan dalam (Artha Bk.I, Bab 9, butir 9) antara lain : terlatih dalam Weda, ahli pertanda alam, ahli ilmu politik, dan ahli pengobatan berdasarkan *Atharwa Weda*.

Kerajaan juga mengangkat petugas rahasia (intelejen kerajaan). Kalau dinegara kita disebut Bakin, di Amerika CIA dan di Rusia terkenal dengan KGB. Persyaratan dan cara pengangkatannya diatur tertib dan teratur. Beberapa persyaratan penting agen rahasia, antara lain : pemberani, pintar ilmu bela diri, tidak takut berkelahi, suka uang, tidak punya belas kasihan (Artha Bk. I, Bab12, butir 2, 3). Para Duta Besar juga diangkat oleh raja dan semua hal yang berkaitan dengan persyaratan dan apa yang harus dilaksanakan oleh para duta tersebut diatur dalam Arthasastra secara teliti (Artha Bk. I, Bag. 16, butir 1-35). Kedudukan seorang **Duta Besar**(*Nisristartha*) yang mempunyai kuasa penuh, disamakan dengan seorang Menteri. Seorang Duta Besar harus mengetahui antara lain, kondisi umum Negara dimana ia ditempatkan, luas Negara, ukuran benteng yang dimiliki, kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan, titik-titik lemah dari Negara tersebut. Seorang Duta Besar juga harus mempelajari budaya dari masyarakat Negara tersebut, sifat-sifat masyarakatnya, kehalusan budi pekerti dan ucapan, ekspresi masyarakatnya, dan sebagainya. Seorang Duta Besar harus pintar bermain kata-kata, baik menyatakan setuju dan tidak setuju dengan kebijakan Negara dimana ia berada.

Juga diangkat pejabat-pejabat dibawah Menteri seperti Direktur Pergudangan (*Sannidhata*), yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan mesiu, hasil hutan, persenjataan dan penjara. Bangunan gudang tersebut harus dibuat kokoh sebagian terletak dibawah tanah, dengan konstruksi kayu yang kuat, dan bangunannya bertingkat 3, dengan satu pintu dilengkapi dengan tangga yang bergerak secara mekanis (apakah ini sudah memakai lift ?)(Artha Bk. II, Bab5, butir 1, 2).

Juga diangkat **Administratur** yang bertugas mengurus sumber penerimaan Negara yang berasal dari benteng (*durga*), penerimaan dari Negara Bagian (*rashtra*), tambang (*khani*), irigasi (*setu*), hutan (*vana*), padang gembalaan (*vraja*) dan jalur perniagaan (*vanikpatha*) sebagai sumber utama penerimaan. Institusi yang berada dibawah Administratur ini antara lain **Bea Cukai**, Standarisasi Berat dan Ukuran (**Pautavam**), Pengawas Kota (*nagaraka*), Kepala Percetakan Uang (*Laksanadhyaksha*), Pengawas Pembuatan Paspor(*mudradhyaksha*. Penjelasan mengenai jabatan Administratur dan uraian tugasnya ditemukan dalam Arthasastra Bk. II, Bab 6, butir 1 – 29.

Untuk menangani kegiatan pertambangan dan pabrik, diangkat Direktur Pertambangan dan Pabrik-Pabrik.

Uraian tugas dan fungsi dari Direktur Pertambangan dan Pabrik dituangkan dalam Arthasastra Bk. II. Bab 12, butir 1 s/d. 37.

Direktur Pertambangan harus dijabat oleh seorang ahli dalam : (1) ilmi-ilmu logam (*subasastra*) yang ada diperut bumi, (2) ahli metalurgi (*bhumiparik sastra*), (3) seni melebur dan seni mewarnai permata (*rasapaka*).

Terdapat juga Direktur Emas, yang mengatur secara khusus pertambangan dan perdagangan emas dan perak. Direktur Emas harus ahli dalam bidang emas dan perak. Harus mendirikan pabrik dan bengkel untuk tempat mengolah produksi tambang emas dan perak, serta Direktur Emas harus mengangkat

pandai emas yang terampil dalam profesinya, berwatak jujur dan dapat dipercaya (Artha Bk. II, Bab 13, butir 1- 3).

Pande emas tersebar sampai ke Desa-Desa, dan Kerajaan mengawasi cara kerja pande emas tersebut sehingga diperoleh produksi emas yang terbaik. Pande emas yang diketahui bekerja tidak dan tidak jujur langsung dikenakan sanksi dari yang paling ringan sebesar **Pana 12**, dan yang paling berat sebesar **Pana 200** (Artha Bk. II, Bab 14, butir 1, 2, 11, 14).

Pemerintah Kerajaan juga memiliki dan mengelola **Gudang** tempat menyimpan bahan kebutuhan pokok penduduk yang terdiri dari barang-barang hasil pertanian seperti gandum, kacang-kacangan, berbagai jenis gula, sirup, mangga, jeruk, buah delima, lada panjang, lada hitam, dsb.nya. Juga disimpan berbagai jenis lemak binatang, gula, garam, dan ikan asin. Manajer yang menguasai semua gudang Kerajaan disebut dengan Direktur Gudang. Direktur gudang harus menjaga perputaran persediaan yang ada digudang, jangan sampai ada persediaan barang yang rusak, atau kadaluwarsa. Harus juga dijaga ketersediaan bahan makan untuk menghadapi bencana dengan jumlah 50 % dari total persediaan yang ada (Artha Bk. II. Bab 15, butir 1, 2, 8, 12, 20).

Untuk urusan perdagangan diangkat Direktur Perdagangan. Direktur Perdagangan harus mahir dalam seluk beluk perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Perdagangan luar negeri harus digairahkan dengan mendorong kegiatan ekspor dan impor. Direktur Perdagangan bertugas mengatur supply and demand dari barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Barang kebutuhan pokok masyarakat, penjualannya tersebar dibanyak tempat, bahkan sampai ke desa-desa, dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah (Artha Bk. II, Bab 16, butir 1, 2, 8, 11).

Pada zaman tersebut hasil hutan juga mempunyai peran penting sebagai sumber penerimaan Negara, maka diangkat Direktur Hasil Hutan. Direktur Hasil Hutan harus memelihara dan menjaga hutan-hutan produksi yang dimiliki kerajaan. Harus didirikan pabrik-pabrik untuk mengolah hasil hutan, sehingga penjualan hasil hutan mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan bila dijual secara asalan (Artha Bk. II, Bab. 17, butir 1, 2, 17).

Untuk kepentingan pertahanan negara, maka diperlukan tentara yang kuat dengan kualitas senjata yang memadai pula. Senjata atau mesin-mesin perang perlu dibuat dipabrik-pabrik senjata dalam jumlah secukupnya. Selama tidak dipakai senjata tersebut harus disimpan dalam gudang yang aman dari pencurian dan kerusakan. Untuk keperluan persenjataan ini diangkat Direktur Persenjataan, yang mempunyai tugas membuat senjata untuk dipakai dalam peperangan, baju perang dan perlengkapan prajurit lainnya (Artha Bk II, Bab 18, butir 1, 3, 20).

Dari uraian di atas tampak dengan jelas dalam organisasi kerajaan telah terdapat struktur organisasi dengan pemisahan tugas dan fungsi secara jelas, yaitu sebagai pimpinan tertinggi adalah raja, dibawah raja para menteri sebagai pejabat Negara, dibawah menteri adalah pejabat-pejabat lainnya, yang semuanya diangkat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

99

5.2 Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Berdasarkan unsur pokok **pengendalian intern** tersebut di atas dapat dipilah menjadi 2 (dua) bagian penting yaitu : 1) pembagian wewenang yang jelas dan tegas dalam organisasi; 2) adanya prosedur pencatatan dan penerapan prinsip

akuntansi yang jelas pula, sehingga kekayaan, kewajiban, pendapatan dan biaya yang dikelola oleh organisasi tersebut dapat terkendalikan dan terlindungi dengan baik. Selanjutnya penguraiannya dipisahkan sebagai berikut :

5.2.1) Pembagian Wewenang Yang Jelas dan Tegas

Suatu ciri dalam sebuah organisasi yaitu terdapat system pembagian wewenang yang jelas, ditandai dengan setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas. Dengan adanya uraian tugas dan fungsi yang jelas, maka tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat-pejabat yang ada.

Pembagian system wewenang harus dengan tegas memisahkan snatar fungsi-fungsi otorisasi, pencatatan, penyimpanan, pengawasan dan pelaksanaan. Pada organisasi yang masih kecil penggabungan fungsi dengan tujuan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas sangat dimungkinkan. Dalam melakukan penggabungan fungsi, hendaknya selalu diperhatikan fungsi-fungsi yang saling dapat mempengaruhi, hendaknya tidak digabungkan begitu saja, karena dapat merugikan organisasi, seperti penggabungan fungsi otorisasi dengan pencatatan dan penyimpanan, fungsi pencatatan uang atau persediaan digabung dengan fungsi penyimpanan.

Dengan tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi, maka organisasi akan berjalan dengan harmonis, karena tidak terjadi pejabat yang merasa dirugikan disebabkan oleh tugasnya diambil oleh pihak lain. Semangat kerja pejabat yang ada akan menjadi tinggi, efisiensi dan efektivitas kerja akan meningkat. Ada pendapat umum bahwa organisasi sector pemerintahan cenderung lebih tidak efisien dan tidak efektif jika dibandingkan dengan organisasi sektor swasta. Faktor penyebabnya, sering suatu jabatan diadakan berhubung ada orang yang perlu diberikan jabatan, disebabkan berbagai alasan, seperti karena ada orang telah berjasa atau teman dekat (nepotisme) pimpinan tertinggi yang sedang menduduki jabatan, pada hal orang-orang dimaksud tidak mempunyai kapasitas dan kredibilitas untuk menduduki jabatan dimaksud. Hal yang menyangkut nepotisme (pertemanan), yang mempunyai dampak kurang menguntungkan kepada organisasi kerajaan cukup cermat dibahas dan disikapi oleh penasehat kerajaan pada zaman kautilya tersebut.

Yang tepat, adalah dibentuk suatu organisasi baru kalau ada pekerjaan baru yang harus dikerjakan oleh seorang pejabat dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien kalau jabatan tersebut dirangkap oleh pejabat lainnya. Sektor swasta sangat memperhatikan masalah efisiensi dan efektivitas organisasi. Setiap akan menambah struktur organisasi, maka swasta selalu menghitung dengan cermat untung dan ruginya dari segi financial dan aspek lainnya. Arthasastra memperingatkan bahwa “ pengangkatan seorang pejabat tidak boleh semata-mata berdasarkan teman, jasa yang pernah diberikan, atau semata-mata karena orang tersebut mempunyai keahlian. Pengangkatan pejabat (menteri) harus berdasarkan kecerdasan, integritas, keberanian, loyalitas dan berasal dari keturunan yang baik (Artha Bk I, Bab 8, butir 1, 4, 10, 11,12, 25, 26). Arthasastra telah memperingatkan bahwa pengangkatan pejabat yang berasal dari teman, orang yang pernah berjasa atau semata-mata karena memiliki

keahlian tertentu memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan.

Semua pejabat setingkat Direktur tersebut mempunyai uraian tugas yang jelas. Direktur pergudangan misalnya, mempunyai tugas membangun gudang tempat perbendaharaan, tempat mesiu, tempat hasil hutan, gudang persenjataan dan penjara.

Bangunan gudang tersebut juga ditentukan persyaratan teknis dan peruntukannya, seperti harus dibuat dari batu bata yang dibakar, dengan banyak lantai atau bangunan bertingkat, sengan tiang kayu yang kuat, dilengkapi peralatan pencegah kebakaran, ada bangunan tempat untuk sembahyang, dsb.nya.

Mengenai eprsyaratn barang yang boleh diterima oleh Direktur Pergudangan juga dijelaskan, yaitu barangnya harus bersih, baru dan jumlahnya harus cukup. Dalam rangkaian tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat, dijelaskan juga sanksi ringan dan berat yang harus dipikul oleh pejabat tersebut apabila terjadi kerugian Negara sebagai akibat kelalaiannya. Pada setiap departemen hukuman untuk pejabat bawahan, bila terjadi defalkasi (kerugian karena penurunan nilai barang yang disimpannya) adalah satu sampai empat pana. Bagi seseorang yang ditugasi menangani urusan perbendaharaan melakukan korupsi (merampok perbendaharaan), dijatuhi hukuman mati (Artha Bk. II, Bab 5, butir 17).

Administratur mempunyai uraian tugas cukup banyak yaitu mengurus benteng, Negara bagian, tambang-tambang, irigasi, hutan-hutan, ladang gembalaan dan jalur pernigaan, bea cukai / pajak, denda, urusan paspor, dsb.nya (Artha Bk. II, Bab 6, butir 2). Pokoknya semua pejabat setingkat Direktur tersebut di atas mempunyai uraian tugas dan fungsi yang jelas sehingga kecil kemungkinan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas diantara pejabat-pejabat tersebut.

Selanjutnya kita lihat uraian tugas dan fungsi dari Direktur Kota, antara lain menjaga kota, membuat data penduduk, meliputi laki, perempuan, nama keluarga, pekerjaan, pendapatan dan pengeluarannya. Direktur Kota, juga harus menjaga kebersihan kota, dan menyediakan alat pemadam kebakaran. Untuk penduduk yang membuang kotoran atau sampah di jalan didenda seperdelapan pana. Membendung air, apalagi mengandung lumpur, lalu menggenangi jalan, didenda seperempat pana. Apabila terjadi kebakaran rumah karena kelalaian, maka didenda lima puluh empat pana. Kalau membakar rumah dengan sengaja, hukumannya sangat berat yaitu hukuman mati. Direktur kota juga mempunyai tugas mengawasi dan melaporkan kepada Raja penduduk yang hidup mewah dan melakukan tindakan korupsi (Artha Bk. II, Bab 36, butir 3, 9, 15).

5.2.2) Prosedur Pencatatan dan Penerapan Prinsip Akuntansi Yang Jelas.

Adanya prosedur pencatatan dan penerapan prinsip akuntansi yang jelas dalam suatu organisasi adalah sangat penting. Suatu prosedur akuntansi biasanya dimuat dalam Buku Pedoman Akuntansi. Buku Pedoman akuntansi pada umumnya memuat : (1) nomor urut akun, dimulai dari sisi aktiva (sisi Debet), yang dirinci dalam aktiva lancar, seperti kas, piutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, aktiva tetap. Lalu sisi kredit / kewajiban (Kredit), dirinci : hutang lancar, kewajiban lain-lain, hutang jangka panjang, dan terakhir modal (ekuitas). Diberikan juga pengertian dari maasing-masing akun yang

merupakan unsure-unsur laporan keuangan, seperti kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, hutang, pendapatan, dan modal/ekuitas. Juga diberikan beberapa contoh cara membukukan atau mencatat transaksi lengkap dengan jurnalnya. Dalam buku pedoman akuntansi diberikan juga uraian tugas dari pejabat-pejabat yang berhubungan erat dengan kegiatan akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan memberikan persetujuan (otorisasi), sehingga suatu transaksi dapat terjadi dan berpengaruh terhadap kekayaan, hutang dan modal perusahaan.

Pada lembaga Nirlaba istilah modal disetarakan dengan aktiva bersih, terdiri dari : aktiva bersih tidak terikat; terikat temporer dan terikat permanent.

Masalah prinsip akuntansi yang dianut dan cara penerapannya juga dijelaskan dalam buku pedoman akuntansi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip akuntansi yang dianut, Arthasastra jelas menganut 2 (dua) dasar prinsip akuntansi, yaitu : Akrual dan Nilai Perolehan.

Prinsip akrual, artinya semua hak dan kewajiban diakui pada saat timbulnya. Konsekuensinya, pada saat timbul hak dan atau kewajiban harus dibuat jurnal berpasangan, sehingga antara sisi Debet dan Kredit jurnal menunjukkan jumlah yang sama. Pos-pos dalam jurnal dipindahkan ke buku Besar, dan selanjutnya dibuat Neraca Lajur. Apabila pencatatannya dalam jurnal sudah betul, maka pemindahannya ke dalam Buku Besar diharapkan akan benar pula, sehingga angka-nangka dalam Neraca Lajur benar pula. Inilah yang merupakan kebaikan kebaikandari system tata buku berpasangan. Suatu ciri Arthasastra telah menerapkan tata buku berpasangan (double entry accounting), hal ini terlihat dari ditemukannya istilah “ Penerimaan Yang masih Terbuka “ (Artha 3 : 35). Istilah penerimaan yang masih terbuka atau Rekening Terbuka, hanya ditemukan dalam system tata buku berpasangan. Semua rekening aktiva dan hutang serta modal (ekuitas) merupakan rekening terbuka, karena rekening tersebut pada akhir tahun ditutup, dan pada wal tahun berikutnya saldo yang masih ada dipindahkan dan merupakan saldo awal dari masing-masing perkiraan tersebut. Rekening biaya dan pendapatan merupakan akun tertutup atau disebut juga dengan rekening nominal, karena pada akhir tahun buku saldo-saldonya dipindahkan ke rekening Laba-Rugi. Selanjutnya sisa rugi akan mengurangi modal atau mengurangi laba ditahan, sedangkan laba yang timbul pada tahun yang bersangkutan merupakan hak pemilik dan dapat dibagi sesuai forsi kepemilikan dalam perusahaan. Sisa laba yang tidak dibagikan dipindahkan ke rekening laba ditahan, yang merupakan kelompok modal. Memperkuat alasan bahwa telah diterapkan system tata buku berpasangan dalam Arthasastra, terbukti dengan ditemukannya kata “ **Perkiraan Pendapatan Yang Diperoleh, Pendapatan Berupa Tagihan (Pihutang), Penghasilan serta Pengeluaran dan Saldo** “ (Artha Bk. II, Bab 6, butir 13).

Ditegaskan pula, bahwa unsur-unsur itulah merupakan pokok-pokok dalam pembukuan.

Pada system kas, tidak dibuat catatan resmi (intra comptabel) atas pendapatan yang masih harus diterima (pihutang).

Pada (Artha Bk. II, Bab 7, butir 30), lebih jelas lagi disebutkan bahwa pada masa itu telah diterapkan tata buku berpasangan, dengan ditemukannya ungkapan :

“ dan ia (pengawas) hendaknya mengecek (rekening) setiap hari, lima hari, dua minggu, sebulan, empat bulan dan setahun “.

Jadi sarana pengecekan bagi pengawas adalah data dalam rekening tersebut, apakah pengecekannya dilakukan tiap hari, empat harian, sebulan, empat bulanan atau setahun sekali.

Bagian akuntansi dituntut bekerja cepat, cermat dan teliti, dan apabila melakukan kesalahan dikenakan sanksi, hal ini dijelaskan pada (Artha Bk. II, Bab 7, butir 35). Bagi seseorang yang menuliskan suatu butir (penerimaan dan pengeluaran di dalam rekening) tanpa berurutan atau dengan urutan yang salah, atau dengan cara yang tidak memenuhi syarat, atau menuliskan dua kali, dendanya dua belas pana. Masih banyak burit-butir yang memuat saksi bagi bagian akunting apabila melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.

Diterapkan prinsip nilai perolehan dalam mencatat persediaan diketahui dari penjelasan yang menyebutkan bahwa Kepala Biro Perbendaharaan sebagai pejabat yang ahli dalam berbagai produk hendaknya menerima hasil tambang, hasil hutan, yang mempunyai nilai perolehan tinggi maupun rendah. Apabila terjadi penipuan atas barang yang bernilai tinggi, pelakunya dikenakan hukuman berat (hukuman potong anggota badan), sedangkan penipuan atas barang yang bernilai rendah, pelakunya diharuskan mengganti senilai perolehan barang tersebut dan ditambah denda (Artha Bk. II, Bab 5, butir 8, 9). Yang dijadikan dasar pengenaan bea masuk untuk barang yang diimpor adalah nilai perolehan (Artha Bk. II, Bab 22, butir 3).

Kautilya, merancang system pengendalian intern sector pengelolaan keuangan kerajaan dengan teliti, pelaksanaannya diawasi dengan ketat, dan kepada pelaku system yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi yang tegas tanpa pilih kasih. Dengan cara seperti itu, system yang dirancang dan dilaksanakan akan berjalan dengan baik.

Konon, Kautilya sebagai seorang Yogi besar pada zamannya, menjadi penasihat raja, hidup sederhana disebuah gubuk, yang jauh dari hiruk pikuk dan keramaian kerajaan. Dengan demikian, beliau melaksanakan prinsip-prinsip pengendalian intern yang diciptakan tanpa beban.

22

5.3 **Praktek Yang Sehat Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

Pembagian tanggungjawab secara struktural dan fungsional yang jelas dan adanya prosedur pencatatan dan penerapan prinsip akuntansi yang jelas tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin adanya praktek yang sehat dalam pelaksanaan organisasi. Suatu pelaksanaan pekerjaan dinyatakan mengikuti praktek yang sehat, artinya pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan system dan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak seorang pegawai pun diberikan peluang untuk melanggar system dan prosedur yang ada, termasuk pimpinan tertinggi organisasi. Dalam praktek, justru yang lebih banyak melanggar system dan prosedur yang telah digariskan adalah tingkat pimpinan dengan berbagai alasan, seperti alasan kebutuhan mendesak, untuk kebutuhan organisasi yang lebih besar, desabnya. Sekali saja terjadi tingkat pimpinan melanggar system dan prosedur yang telah ditetapkan, maka secara perlahan tetapi pasti bawaha akan mengikutinya. Apabila suatu saat diketahui bawahan melanggar suatu prosedur, maka atasan akan sulit untuk melakukan tindakan, karena yang bersangkutan akan membandingkan dengan dirinya, yang pernah melanggar prosedur dan merugikan organisasi.

Umumnya cara yang ditempuh untuk menciptakan praktek yang sehat dalam organisasi, duraikan secara ringkas dibawah ini :

5.3.1) Formulir Dengan Nomor Berurutan dan Penggunaannya Dipertanggungjawabkan.

Bagian pembukuan, yang terdiri dari para akuntan pada zaman Arthasastra, dalam menggunakan formulir-formulir penting untuk dasar pencatatan keuangan atau barang telah menerapkan prinsip bahwa formulir-formulir tersebut harus mempunyai nomor urut yang tertib, lebih baik lagi kalau diberikan nomor lebih dahulu.

Pertanda telah digunakan formulir dengan nomor urut yang tertib, dan apabila ketentuan itu dilanggar maka pelanggarnya dikenakan denda, hal ini diketahui dari ungkapan yang tertulis dalam (Artha Bk. II, Bab 7, butir 35) yaitu “ Bagi seseorang yang menuliskan suatu butir didalam akun tanpa berurutan, atau dengan cara yang tidak memenuhi syarat, atau dua kali, dendanya dua belas pana “.

Formulir atau bukti, seperti bukti penerimaan dan pengeluaran uang, bukti penerimaan dan pengeluaran barang. Keharus setiap transaksi didukung dengan alat bukti, dalam praktek, kadang kala dianggap menghambat, sehingga timbul praktek yang tidak sehat, yaitu oknum pegawai yang berusaha menerobos, sehingga terjadi pengeluaran uang atau barang tanpa didukung dengan bukti. Bentuk-bentuk praktek tidak sehat lainnya adalah formulir/bukti diisi dengan tidak sepatunya, antara lain : (1) tanggal pelunasan sebagai bukan pelunasan, (2) tanggal belum lunas ditulis sebagai pelunasan, (3) jumlah penerimaan dikurangi, (4) jumlah pengeluaran ditambah. Semua tindakan oknum pegawai di atas tergolong dalam korupsi, dendanya empat kali jumlah yang dikorupsi (Artha Bk. II, Bab 8, butir 10)

Apabila dicermati masih banyak ungkapan yang menjelaskan telah digunakannya bukti pembukuan yang mempunyai nomor urut, dan para pelaksana pembukuan harus mentaati system dan prosedur yang telah ditetapkan, dan apabila tidak mentaati dikenakan sanksi yang berat.

5.3.2) Pemeriksaan Mendadak atau Periodik Oleh Atasan atau Oleh Pengawas Intern.

Pemeriksaan mendadak dan atau periodik sangat perlu untuk memastikan bahwa system yang dirancang dan ditetapkan untuk digunakan telah ditaati oleh para pelaksana organisasi. Pemeriksaan mendadak atau periodik ini penting dilakukan terhadap pejabat/pegawai yang mengemban tugas penting, seperti bendaharawan uang, bendaharawan barang, dan pemegang otorisasi atas suatu kegiatan.

Dengan adanya pemeriksaan mendadak dan atau terjadual, diharapkan mereka akan selalu bekerja harti-hati, teliti dan cermat. Apabila ditemukan adanya penyimpangan segera dapat dilakukan perbaikan.

Masalah pelaksanaan dari pemeriksaan secara rutin dan atau mendadak, ditemukan dalam Arthasastra (Artha Bk. II, Bab 7, butir 30, 32) “ Bahwa para pengawas hendaknya melakukan pengecekan rekening tiap hari, lima hari, sebulan, empat bulan dan setahun. Para pengawas juga berkewajiban

memeriksa penghasilan dan pengeluaran berpedoman pada periode waktu, jenis, sumber, jumlah pembayar dan jumlah penerima pembayaran “.

Apabila pengecekan rekening tiap hari, jam pengecekannya selalu sama/hampir sama, demikian juga dengan pemeriksaan tiap lima hari, apabila hari dan jamnya sama/hampir sama, maka ini tergolong pemeriksaan rutin. Namun bila jam dan atau hari pemeriksaannya selalu berbeda, dan yang diperiksa tidak mengetahui sebelumnya bahwa ia akan diperiksa, maka jenis pemeriksaan ini dapat digolongkan pada kelompok pemeriksaan mendadak.

Pernyataan tentang adanya pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dapat ditemukan berikut ini : “ Bila petugas Perbendaharaan telah datang dengan membawa buku rekening yang disegel, pemeriksa hendaknya menetapkan batas pemeriksaan pada buku tersebut, dan tidak diizinkan pembicaraan antara mereka “, (Artha Bk. II, Bab 7, butir 17). Pengawas hendaknya menetapkan batas pemeriksaan pada buku / rekening tersebut. Maksudnya adalah pemeriksa memberikan tanda penutupan buku dengan garis lurus, lalu diberi tanggal penutupan dan ditandatangani oleh pengawas/pemeriksa yang melakukan penutupan buku. Selanjutnya ada ungkapan, tidak mengizinkan pembicaraan antara mereka, maksudnya adalah antara pemeriksa dengan yang diperiksa tidak boleh ada rembugan. Rembugan disini adalah pembicaraan yang mengarah kepada tindakan kolusi (kongkalikong).

Pemeriksa harus bersikap independent, mampu mengendalikan indria. Tidak boleh berkolusi dengan yang diperiksa.

Peraktek pemeriksaan tiap hari terhadap kegiatan-kegiatan yang bernilai uang, baik penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh PT. Ispat Indo di Pasuruan Jawa Timur, yang selama ini menerapkan **Parta Akunting** dalam melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan atas kegiatan perusahaannya. Setiap informasi atau data yang bernilai uang harus diketahui oleh pimpinan secara harian, dan dianalisa kecenderungannya, serta dilakukan langkah-langkah perbaikan apabila terjadi penyimpangan yang merugikan perusahaan.

Dengan melakukan tata cara pengawasan seperti di atas, **PT. Ispat Indo** yang didirikan tahun 1976 oleh **Laksmi Mittal**, dengan menerapkan **Parta Akunting**, ternyata saat ini sukses menjadi pabrik baja terbesar di dunia. Apa makna dari pemeriksaan tiap hari, empat hari dan seterusnya, tiada lain adalah kerja keras. Hasilnya menakjubkan, ternyata **Laksmi Mital** menjadi perusahaan baja tingkat dunia.

25

5.3.3) Pelaksanaan Transaksi Dari Awal Sampai Akhir Tidak Boleh Dilakukan Oleh Satu Orang.

101

Apabila suatu transaksi secara lengkap dilaksanakan oleh satu orang, ini berarti fungsi-fungsi yang ada, yaitu otorisasi, pendacatatan, penyimpanan, pengawasan serta operasional/pelaksanaan dikerjakan oleh satu orang. Perangkapan fungsi seperti ini sangat berbahaya dari sisi penegakkan internal control, karena tidak ada pengecekan dari pihak lain. Apabila suatu kegiatan dikerjakan oleh lebih dari satu orang, maka akan terjadi pengecekan secara otomatis diantara mereka. Setelah dicermati ternyata unsur pengendalian intern ini juga telah diterapkan pada zaman Arthasastra. Masalah ini antara lain termuat pada (Artha Bk.

II, Bab 5, butir 10), yang menyatakan bahwa sebelum uang diterima oleh bendahara, terlebih dahulu penerimaan tersebut disahkan oleh pemeriksa mata uang, yang disebut *Rupadarsaka*. Jadi terhadap penerimaan tersebut sudah ada mekanisme pengecekan oleh pihak lain, berarti prinsip pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan dengan baik.

Hal yang berhubungan dengan prosedur pengeluaran dari Bendahara Negara, bahwa pengeluaran baru boleh dilakukan setelah ada perintah dari raja. Perintah raja yang berhubungan dengan pengeluaran ini wajib dalam bentuk tertulis. Hal ini berarti pemegang perbendaharaan tidak dapat melakukan pengeluaran sebelum ada perintah tertulis dari raja (Artha Bk. II, Bab 6, butir 15). Ini berarti bahwa tidak ada pejabat yang diberikan kewenangan melakukan kegiatan dari awal sampai akhir, sekalipun raja sebagai pimpinan tertinggi kerajaan, tidak dapat melakukan hal itu, karena akan berdampak pada melemahkan sistem pengendalian intern yang ada.

5.3.4) Mutasi Jabatan Secara Rutin Atau Mendadak Sesuai Dengan Keperluannya.

Mutasi jabatan berupa pindah tempat kerja, tetapi eselon jabatan tetap sama, atau pindah tempat dengan perubahan eselon jabatan yang diemban. Pola mutasi jabatan seperti di atas diharapkan dapat menghindari adanya kolusi diantara pejabat dengan bawahan, pejabat dengan masyarakat lingkungannya, disebabkan oleh pejabat terlalu lama menduduki jabatan pada suatu tempat atau wilayah. Mutaasi jabatan ini juga dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan diantara jabatan yang dianggap basah dan kering.

Tampaknya pada zaman Arthashastra, promosi dan pemberian penghargaan bagi pejabat yang berhasil telah dilakukan. Dari uraian-uraian yang ditemukan, bahwa bagi pejabat yang berhasil diberikan penghargaan oleh raja dan bagi yang tidak berhasil dan atau bersalah serta melakukan korupsi diberikan hukuman langsung berupa denda dan atau hukuman fisik ringan atau berat sesuai dengan kadar kesalahannya. Pada (Artha Bk. II, Bab 9, butir 9). dinyatakan bahwa bagi pejabat yang berhasil melakukan pekerjaan sesuai perintah atau malahan lebih baik, akan menerima kedudukan lebih tinggi dan mendapat penghargaan dari raja. Selanjutnya pada (Artha Bk. II, Bab 9, butir 36) dijelaskan bahwa bagi pejabat yang tidak korupsi, bahkan berhasil menambah kekayaan kerajaan dengan cara yang benar, diberikan kenaikan jabatan (dengan dipromosikan), karena pengabdianya memberikan manfaat kepada kerajaan.

Masalah pejabat kerajaan melakukan korupsi, tampaknya telah ada sejak zaman Arthashastra, dan pejabat yang melakukan korupsi dihukum berat, yaitu dengan hukuman mati. Masalah tersebut di atas terungkap dari (Artha Bk. II, Bab 9, butir 32, 33), yang menyatakan bahwa mustahil pejabat tidak mencicipi madu atau racun yang ditaruh dipermukaan lidahnya, demikian pula adalah mustahil bagi seseorang yang mengelola uang kerajaan tanpa mencicipi uang tersebut secuilpun. Seperti ikan yang bergerak di dalam air tanpa bisa mengetahui kapan minum air, begitu pula para petugas yang diangkat untuk melakukan suatu pekerjaan tidak dapat diketahui kapan mempergunakan uang itu.

Untuk pejabat perbendaharaan yang melakukan korupsi dijatuhi hukuman mati, hal ini diketahui dari (Artha Bk. II, Bab 5, butir 17) yang berbunyi “ Bagi seseorang yang ditugaskan menangani urusan perbendaharaan, apabila

melakukan korupsi dikenakan hukuman mati . Bagi mereka yang membantunya, hukumannya adalah separohnya (Artha Bk. II, Bab 5, butir 18).

5.3.5) Pejabat / Karyawan Penting Wajib Mengambil Cuti Tahunan.

Pegawai ataupun pejabat pemegang peran penting apabila yang bersangkutan sudah berhak untuk cuti, maka diharuskan mengambil hak cutinya. Selama yang bersangkutan cuti, maka jabatan atau fungsinya digantikan sementara oleh yang lain, sekaligus dilakukan pengamatan untuk mengungkap kemungkinan penyimpangan yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Uraian tentang pejabat yang memegang fungsi penting diwajibkan mengambil hak cutinya, sejauh ini belum ditemukan dalam Arthasastra. Mungkin pada zaman tersebut belum ada ketentuan yang mengatur tentang hak cuti pegawai / pejabat kerajaan. Sistem dan prosedur pengawasan yang mengharuskan pegawai mengambil hak cutinya pada waktu itu mungkin belum ada karena belum diperlukan, mengingat dari ketentuan yang ditulis dalam Arthasastra berkaitan dengan hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin adalah berupa teguran, denda, dimulai dari yang paling kecil sampai dengan denda tiga kali lipat dari nilai uang/barang yang diambil. Untuk tindakan penyimpangan yang keempat kalinya hukumannya lebih berat lagi, seperti pemotongan anggota badan dan atau hukuman mati. Berkaitan dengan penjatuhan hukuman mati bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, diuraikan dalam (Artha Bk. II, Bab 5, butir 170), sedangkan berkenaan dengan penjatuhan denda dua kali lipat dan pemotongan anggota badan (seperti telinga), diungkapkan antara lain pada (Artha Bk. II, Bab 27, butir 12)

Tampaknya, konsep dan pelaksanaan penegakan hukum pada zaman Arthasastra sudah demikian baik, yaitu dimulai dari pejabat tertinggi harus memberi contoh yang terbaik, seperti menjatuhkan hukuman yang adil kepada siapa saja, termasuk kepada keluarga dekat raja seperti putra-putrinya. Ungkapan yang menyatakan raja harus adil dalam menjatuhkan hukuman tertuang dalam (Artha Bk. III, Bab 1, butir 42), yang kalau diuraikan secara bebas berbunyi antara lain sbb. : “ raja yang tidak melindungi rakyat atau memberi hukuman dengan tidak adil, raja tidak dapat masuk sorga; dunia ini dan juga dunia yang lain dijaga oleh penegak hukum, oleh karena itu raja harus berbuat adil kepada semua yang bersalah **termasuk kepada putra-putri** dan juga **musuhnya** “.

5.3.6) Pengecekan Fisik Kekayaan, Kewajiban dan Modal Dengan Catatannya Secara Periodik.

Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kerajaan, maka segera dilakukan tindakan perbaikan, agar kekayaan kerajaan aman, dan apabila terjadi kerugian segera dapat terpulihkan. Terhadap pejabat yang melakukan penyimpangan dijatuhi hukuman sesuai dengan bobot perbuatannya.

Kekayaan yang bersifat fisik dan non fisik memerlukan pengecekan secara periodik seperti kas, persediaan, piutang, hutang, aktiva tetap dan sebagainya. Uraian tentang adanya kewajiban pengecekan fisik kekayaan dan kewajiban dibandingkan dengan catatannya sangat banyak ditemukan dalam Arthasastra, seperti (Artha Buku II, Bab 7, butir 29, 33) yang menyatakan bahwa

pemeriksaan secara harian, lima hari, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap catatan perbendaharaan. Pengecekan (audit) dilakukan oleh para pemeriksa, yang dalam hal ini para akuntan professional dan berpengalaman.

Dijelaskan pula mengenai sanksi untuk bendahara yang tidak datang melaporkan kekayaan atau uang yang dikuasainya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, atau datang tanpa membawa buku catatan yang menunjukkan mutasi penerimaan dan saldonya, maka yang bersangkutan dikenai denda dengan sepersepuluh dari jumlah uang/nilai yang seharusnya ada.

Sanksi denda juga dikenakan kepada “ akuntan “ yang tidak hadir pada waktu dan tempat seharusnya mereka melakukan tugas pemeriksaan (Artha Bk. II, Bab 7, butir 21, 22)

Termasuk peraktek sehat dalam mengamankan aktiva (aset), kewajiban dan modal (ekuitas) adalah : uang tunai harus disimpan dalam brandkas yang kuat dan terkunci aman. Kunci brandkas seharusnya dipegang oleh dua orang, artinya brandkas tidak boleh dibuka hanya oleh satu orang. Apabila kunci brandkas hanya dipegang oleh satu orang, maka harus diciptakan alat pengawasan lainnya, misalnya pada setiap akhir jam kerja kantor, saldo kas harus dihitung dan dicocokkan dengan catatan dalam buku kas, secara bersama-sama, yaitu kasir didampingi oleh pegawai lain yang berfungsi sebagai pengawas. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan perbedaan lebih atau kurang uang kas, perbedaan kas tersebut harus ditelusuri sampai diketahui penyebabnya, dan segera dilakukan langkah-langkah perbaikannya.

Gudang tempat penyimpanan barang harus kuat dan dikunci sebagaimana mestinya, dan secara tegas dilarang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam gudang. Terhadap persediaan barang yang disimpan dalam gudang harus juga dilakukan pengecekan secara cermat. Untuk barang yang berharga mahal dan mudah diperjualbelikan, pengecekannya harus dilakukan setiap hari, sama dengan pelaksanaan pengecekan kas. Penanggungjawab atas barang yang disimpan dalam gudang harus jelas, sehingga mudah melakukan penuntutan dan penindakan apabila terjadi penyimpangan.

Untuk barang yang mudah mungkir disebabkan factor alamai, juga harus dilakukan pengecekan secara harian, dan tempat penyimpanannya juga harus secara khusus. Untuk barang semacam ini harus dibuatkan standar kesusunannya yang sekaligus sebagai alat pengawasan. Terhadap piutang dan hutang, yang disebut dengan akun terbuka, juga harus dilakukan pengecekan minimal sebulan sekali. Caranya adalah dengan melakukan perbandingan antara jumlah piutang dan atau hutang menurut Buku Besar dengan saldo menurut total buku pembantunya. Apabila ditemukan perbedaan segera dilakukan penelusuran, yaitu dengan melakukan konfirmasi. Konfirmasi, adalah suatu metode untuk meyakinkan kebenaran saldo piutang atau hutang pada periode tertentu, dengan cara meminta penegasan kepada tiap debitur atau kreditur sesuai catatan yang ada dalam organsiasi.

5.3.7) Pembentukan Unit Pengawas Internal

Pembentuk unit ini disesuaikan dengan kebutuhan lembaga/perusahaan. Suatu lembaga dengan pegawai 100 orang, adalah sangat baik apabila dilengkapi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI). Pembentukan Satuan Pengawas Intern disesuaikan dengan sifat dan ruang lingkup kegiatan lembaga. Lembaga yang tugasnya menghimpun dana publik/dana masyarakat, walapun masih kecil

adalah sangat baik apabila sudah dilengkapi dengan Satuan Pengawas Intern. Selama Unit Pengawas Intern belum terbentuk, maka fungsi pengawasan ini menjadi tanggungjawab pimpinan tertinggi organisasi. Atau pelaksanaan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada pejabat-pejabat dibawahnya, yang berfungsi sebagai pengawas intern.

Pengawasan atasan langsung terhadap bawahannya tidak boleh berkurang intensitasnya walaupun sudah terbentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Pada zaman Arthasastra Lembaga Unit Pengawasan Intern (SPI) telah ada dan berjalan dengan baik. Untuk hal ini penjelasannya ditemukan pada (Artha BkII, Bab. 7), dimulai dari judul Bab menyebutkan “ Pokok Akunting Dalam Pencatatan dan Kantor Audit “. Khusus mengenai Kantor Audit, bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Kerajaan.

Tugas pemeriksaan ini ditemukan pada (Artha Bk. II, Bab 7, butir 22, 30, 31,32, 33), yang menyebutkan antara lain : “ pemeriksa hendaknya mengecek rekening setiap hari, kelompok lima hari, dua minggu, sebulan, empat bulan dan setahun. Disamping itu auditor hendaknya memeriksa penghasilan dan atau penerimaan **Bendaharawan** dengan mengacu pada periode waktu, tempat, jenis penghasilan, sumber, yang melakukan pembayaran, pencatat dan penerima “.

Apabila dibandingkan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia saat ini, kedudukan Kantor Audit pada zaman Arthasastra setara dengan **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**, yang tugasnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan keuangan pemerintahan. **Kantor** Audit merupakan alat dari pemerintah (Raja).

Keadaan ini tentu sangat mengagumkan mengenai tata pengorganisasian pemerintahan kerajaan seperti yang diuraikan di atas, suatu pertanda pengorganisasian yang sungguh sudah sangat maju.

Selanjutnya dijelaskan mengenai tata letak Kantor Akunting dan Kantor Audit serta gudang tempat penyimpanan arsip harus terpisah. Demikian juga tempat para pemeriksa melakukan tugas mengaudit harus terpisah dengan gudang tempat menyimpan arsip. Hal ini terlihat antara pada (Artha Bk. II, Bab 7, butir 1, 2) yang berbunyi “ Para pengawas hendaknya membangun kantor pencatatan menghadap ke timur atau utara, dengan bangsal terpisah, sebagai tempat menyimpan buku-buku catatan. Disana (auditor) hendaknya menerima laporan para bendaharawan, yang terdiri dari buku-buku catatan, yang memuat besar jumlah yang diterima, kegiatan dan total pendapatan per departemen, dst. “. Dengan adanya pemisahan tata letak kantor dan hal lainnya sebagaimana diuraikan di atas, ini berarti telah diterapkan konsep **pemisahan fungsi horisontal** dan **diagonal** yang baik, yaitu antara fungsi **pencatatan**, **penyimpanan** dan **pengawasan** yang satu sama lain dapat saling mempengaruhi secara signifikan kedudukannya telah dipisahkan.

Untuk kepastian waktu pelaksanaan anggaran, dan kepastiasn waktu periode yang diaudit, maka satu tahun anggaran dan sekaligus satu tahun kerja audit ditetapkan 354 hari dan malam (Artha Bk. II, Bab 7, butir 6)

3 5.4). **Karyawan Yang Berkualitas, Jujur dan Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya.**

3 Struktur organisasi 82 g baik yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi yang jelas, system otorisasi dan prosedur pencatatan dan berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong peraktek yang sehat, tingkat keberhasilannya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakan. Karyawan yang berkualitaas dimaksudkan adalah karyawan yang mempunyai kompetensi (keahlian dan keterampilan) tertentu, untuk bidang tugasnya dan tidak mudah melakukan perbuatan tercela 25 bidang keuangan dan bidang lainnya. Karyawan yang ahli, terampil dan jujur akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien meskipun sedikit unsur pengawasan intern lain mendukungnya.

Namun perlu disadari bahwa unsur pengendalian intern terdiri dari pegawai yang kompeten dan jujur saja tidak cukup untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Unsur pengendalian intern lainnya harus tetap dilaksanakan. Hal ini mengingat manusia pada umumnya mempunyai kelemahan alami yang memekat pada dirinya, seperti mudah bosan, tidak puas, tujuan pribadinya 32 ubah dan bahkan dapat bertentangan dengan tujuan organisasi, dsb. nya.

Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya, dapat ditempuh berbagai cara, antara lain :

5.4.1) Seleksi Calon Karyawan

32 Untuk mendapatkan karyawan yang mempunyai kecapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus membuat analisis jabatan yang ada dalam organisasi dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Program seleksi karyawan yang baik akan diperoleh karyawan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Arthasastra menjelaskan, bahwa dalam pengangkatan seorang Menteri, harus diperhatikan beberapa persyaratan pokok seperti kesetiaan kepada raja, ahli dalam ilmu pemerintahan, cerdas dan mempunyai pengalaman yang cukup dalam pemerintahan. Hal yang menyangkut kesetiaan kepada raja disebutkan dalam (Artha Bk. I, Bab 8, butir 16), yaitu raja harus mengangkat seorang menteri yang ayah atau kakeknya bekas seorang menteri, karena perilaku mereka yang asli sudah diketahui. Dari ungkapan ini terlihat, bahwa kesetiaan kepada raja merupakan syarat utama, melebihi persyaratan lainnya. Alasan mengutamakan kesetiaan, karena raja yakin menteri tersebut tidak akan meninggalkan raja pada waktu raja menghadapi kesulitan, karena keluarga mereka sudah lama berhubungan baik dengan keluarga raja.

Persyaratan berikutnya adalah kepintaran, kemauan dan kemampuan bekerja, serta pengalaman dalam peraktek kerja.

5.4.2) Pendidikan dan Latihan

Berikut ini diberikan uraian ringkas tentang pendidikan dan latihan yang diperlukan oleh para pegawai secara umum maupun tata cara pendidikan dan pelatihan yang uraiannya ditemukan dalam Arthasastra.

5.4.2.1) Pendidikan :

Setelah dilakukan seleksi calon karyawan, maka yang berhasil lolos seleksi, sebelum mereka menduduki posisinya terlebih dahulu diberikan pengarahan tentang situasi umum maupun khusus tempat kerjanya. Apabila pekerjaan yang akan dilakukan bersifat spesifik, tidak dapat dikerjakan dengan mengandalkan

pengetahuan dasar yang mereka miliki, maka karyawan tersebut harus menjalani pelatihan khusus terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pelatihan khusus tersebut baru mereka ditempatkan ketempat kerjanya dengan dibimbing oleh pengawas yang kompeten. Setelah mereka mahir baru dilepas, dengan rekomendasi dari pengawas tersebut.

Tentang betapa pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM), sangat dijunjung tinggi dalam Arthasastra. Dalam rangka menunjang kualitas SDM, Arthasastra menyusun kelompok ilmu-ilmu utama yang wajib dipelajari dalam dunia pendidikan adalah : (1) anvikshaki (filsafat); (2) ketiga Weda (Rg. Weda, Sama Weda dan Yayur Weda); (3) Varta (ilmu ekonomi); dan (4) Dandaniti (masalah politik/ilmu pemerintahan) (Artha Bk. I, Bab 2, butir 1).

Selanjutnya dijelaskan, bahwa masalah Kebenaran dan Kebatilan Tindakan dipelajari dari Weda, Kesejahteraan dan Kemiskinan dipelajari dari Varta (ekonomi), Kebijakan Yang Baik atau Buruk terhadap masyarakat dipelajari dari Dandaniti (ilmu politik). Sedangkan filsafat dipandang sebagai sinar segala ilmu, alat penunjang semua hukum (Artha Bk. I, Bab 2, butir 12).

Pada zaman Arthasastra, semua penduduk wajib belajar. Karena penduduk disana pada zaman tersebut dipisahkan dalam catur warna (bukan kasta), yaitu Brahmana, Ksatriya, Vaisya dan Sudra. Semua warna wajib belajar supaya menguasai benar bidangnya masing-masing, seperti Brahmana belajar bagaimana melakukan korban suci untuk diri sendiri dan masyarakat pada umumnya, kaum Ksatria belajar tatacara melindungi rakyat, Vaisya belajar berdagang, bekerja dibidang pertanian, peternakan, dsb.nya. Sudra belajar tatacara memberikan pelayanan kepada ketiga warna lainnya, dan juga bekerja dibidang pertanian, pertukangan, perdagangan serta kesenian (Artha Bk. I, Bab3, butir 5-8). Disamping memperhatikan dan memberikan pendidikan kepada ke empat warna yang ada, juga pendidikan diberikan kepada catur asrama, yaitu : Brahmanacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Sanyasin (Artha Bk. I, Bab 3, butir 4).

5.4.2.2) Pelatihan.

Disadari bahwa untuk mendapatkan pegawai yang terampil dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus mendapatkan latihan yang cukup dalam bidangnya. Latihan dalam porsi yang cukup, menyebabkan pegawai menjadi terampil dan disiplin. TERampil dan disiplin membawa dampak kepada hasil pekerjaan yang berkualitas, dan hal ini sesuai benar dengan tuntutan masyarakat dari zaman kezaman, dan lebih-lebih zaman ini. Masalah terampil dan disiplin sangat ditekankan pada Arthasastra. Bahkan masalah disiplin dijelaskan, ada yang berasal dari bawaan sejak lahir dan dieproleh melalui latihan, jadi disiplin dapat dibentuk (Artha Bk. I, Bab 5, butir 3). Dalam menuntut ilmu apapun diperlukan disiplin dalam menggunakan waktu, tahan terhadap godaan, percaya kepada diri sendiri (Artha Bk. I, Bab 5, butir 5)

Apabila dalam pelatihan sudah ditetakkan masalah keterampilan dan disiplin, maka dalam peraktek kerjanya juga akan diperoleh pegawai yang terampil dan disiplin, sehingga dapat dihasilkan produk yang berkualitas.

5.4.2.3) Pendapatan Pegawai Yang Memadai

Semua pengeluaran pemerintah (kerajaan) harus dicatat dengan tertib dan teratur, termasuk pengeluaran gaji pegawai (Artha Bk. II, Bab 7, butir 2). Istilah yang sudah digunakan dalam Arthashastra, yaitu gaji untuk pegawai perusahaan, gaji untuk pegawai Negara/Kerajaan, bahkan juga ditemukan istilah gaji khusus untuk pegawai kerajaan yang berjasa. Mungkin dalam hal ini dimaksudkan adalah gaji untuk para veteran dan pensiunan pegawai kerajaan. Hal ini berarti pada zaman Kautilya, pemerintah kerajaan sangat memperhatikan kesejahteraan mereka, khususnya para abdi kerajaan yang masih aktif agar bekerja dengan tekun dan disiplin, sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan yang baik sebagaimana diharapkan. Hal yang berkaitan dengan gaji pegawai negeri diuraikan secara khusus pada (Artha Bk. V, Bab 3, butir 1-24). Dijelaskan, dengan besaran gaji yang ditetapkan tersebut para pegawai negeri tidak akan terpicat dan berniat untuk korupsi dan tentara tidak berniat untuk memberontak, karena besarnya gaji yang diterima dapat menunjang kesejahteraan jasmani dan rohani mereka (Artha Bk. V, Bab 3, butir 2, 4). Sesuai dengan penjelasan yang ada, urutan besarnya gaji adalah : paling tinggi gaji untuk guru negara, berikutnya gaji perdana menteri, menteri agama (pendeta), panglima angkatan bersenjata, putra mahkota, ibu suri, permaisuri. Setelah itu disusul dengan gaji hakim, gubernur, komandan tentara, dewan menteri, kepala wilayah perbatasan dengan gaji tertinggi (Artha Bk. V, Bab 3, butir 3, 7)

Ketentuan yang cukup menarik adalah, putra mahkota, ibu suri dan permaisuri diberikan gaji oleh kerajaan, yang jumlahnya sama dengan kelompok perdana menteri, panglima angkatan bersenjata, dsb.nya.

Mungkin hal ini dimaksudkan sebagai contoh keteladanan, agar keluarga paling dekat raja tidak bertindak boros, semena-mena dengan keuangan pemerintah dalam membelanjai kehidupannya. Dengan telah ditetapkan besaran gaji dari orang-orang yang paling dekat dengan raja, maka mudah mengontrol pola hidup mereka. Kepada mereka diharapkan tidak melakukan korupsi, karena kebutuhan hidupnya telah dipenuhi oleh pemerintah kerajaan.

5.4.2.4) Penghargaan dan Sanksi Kepada Pegawai.

Masalah pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi telah dilakukan pada zaman Arthashastra. Jadi pemerintah kerajaan telah berbuat seimbang, kepada yang berprestasi diberikan penghargaan dan kepada yang tidak berprestasi dan korupsi dikenakan sanksi dari ringan sampai hukuman mati. Seperti dijelaskan pada (Artha Bk. II, Bab 9, butir 36), bahwa bagi pegawai yang tidak korupsi dan bahkan memberikan prestasi kepada kerajaan, akan terus diberi jabatan. Tampaknya, pegawai negeri dan atau pegawai perusahaan suka korupsi, sejak zaman dahulu sudah ada. Masalah adanya pegawai yang korupsi ini, khususnya yang bertugas mengelola uang, dijelaskan pada (Artha Bk. II, Bab 9, butir 32, 33), yang menyatakan bahwa mustahil bagi pegawai yang mengelola uang pemerintah (kerajaan) tidak suka mencicipi atau mengambil untuk dirinya sendiri (korupsi). Bagi pegawai yang suka korupsi, mereka diharuskan mengembalikan uang yang dikorupinya dan ia dipecat, atau paling ringan dipindahkan tempat kerja yang tidak memungkinkan untuk korupsi lagi (Artha Bk. II, Bab 9, butir 35). Kepada mereka yang melakukan korupsi dapat dikenakan hukum cambuk, dan hukuman potong anggota badan atau paling fatal adalah hukuman mati (Artha Bk. IV, Bab 9, butir 4,7,12).

5.5). Pengendalian Indria.

Sebagai salah satu unsur pengendalian intern adalah karyawan yang berkualitas dan jujur. Arthasastra sudah menguraikan dengan jelas bagaimana caranya untuk memperoleh pegawai yang berkualitas dan disiplin, yaitu dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan. Dengan merancang dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan secara tertib dan teratur, maka akan diperoleh pegawai yang terampil dan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ditegaskan pula, bahwa dengan terampil dan disiplin saja tidak cukup, maka pegawai tersebut juga harus mampu “ **Mengendalikan Indria** “, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemampuan mengendalikan indria maknanya jauh lebih luas dari tuntutan bersikap jujur kepada pegawai sebagaimana dipersyaratkan oleh system pengendalian intern konvensional.

Mengendalikan indria dimaksudkan membuang hawa nafsu : amarah, tamak, sombong, tinggi hati dan keras kepala (Artha Bk. I, Bab 6, butir 1).

Jadi agar organisasi dapat berjalan dengan tertib dan teratur serta dapat menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, merupakan perpaduan dari tiga unsur pokok yaitu (1) keterampilan, menguasai dengan baik secara teori dan peraktek apa yang harus dikerjakan; (2) kedisiplinan, dan (3) pengendalian indria.

Tuntutan bahwa pegawai harus bertindak jujur, sebagai persyaratan dalam system pengendalian intern konvensional, hanya mewakili sifat tidak tamak (loba/serakah). Tuntutan harus mengendalikan indria, berarti harus mengendalikan hawa nafsu : marah, sombong, tinggi hati dan keras kepala sama sekali tidak tersentuh. Sering terjadi, pegawai yang jujur, namun belum tentu mampu mengendalikan unsur lainnya, yaitu marah, sombong, tinggi hati dan keras kepala. Hal ini pasti mengganggu keharmonisan jalannya organisasi. Misalnya, karena tidak mampu mengendalikan kesombongan, tinggi hati dan keras kepala, maka dapat mengganggu jalannya koordinasi antar pegawai. Koordinasi dapat berjalan dengan baik apabila aparat yang berkoordinasi terhindar dari sifat-sifat negatif sebagaimana diuraikan di atas. Koordinasi merupakan urat nadinya organisasi.

Untuk membentuk pengendalian indria, Arthasastra menganjurkan setiap personil lembaga dididik ilmu agama, diberikan latihan dan keterampilan dalam bidang ilmu-ilmu yang diajarkan, sebab pengendalian indria hanya dapat diperoleh dengan cara tersebut. Karena itu, tujuan utama dari keseluruhan ilmu yang dipelajari tiada lain adalah untuk pengendalian indria (Artha Bk. I, Bab 6, butir 3).

Selanjutnya diberikan penjelasan lagi tentang pentingnya pengendalian indria, yaitu “ Seorang raja, yang berperilaku bertentangan dengan itu, dan karenanya tidak mampu mengendalikan indrianya, akan segera musnah meskipun ia seorang penguasa keempat penjuru dunia (Artha Bk. I, Bab 6, butir 4)

Hawa nafsu, marah, sombong, tinggi hati dan keras kepala melekat pada diri manusia, setiap saat diupayakan untuk dikendalikan, bukan dimusnahkan.

Cara untuk mengendalikan indria, diberikan rumusannya seperti : “ tidak berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan dari bunyi-bunyian, sentuhan, warna, rasa, dan bau, yang dinikmati melalui indria pendengar, raba dan penglihatan, lidah dan indria penciuman, berarti telah mampu mengendalikan

indria. Tetap berkonsentrasi dalam menuntut ilmu, berarti juga sudah mengendalikan indria (Artha Bk. I, Bab 6, butir 2).

Hal ini berarti, Arthashastra menekankan pada pendidikan rohani dan budi pekerti pada aparat pelaksana organisasi. Arthashastra juga menekankan pada keteladanan dari pihak-pihak yang menyebut dirinya atau berkedudukan sebagai pemimpin formal maupun informal.

Masalah memberi teladan ini memang dirasakan paling sulit, mudah dikatakan dan sulit dilaksanakan.

Masalah pemberian keteladanan oleh pimpinan dampaknya jauh lebih baik dari pada hanya memberikan petunjuk atau arahan kepada bawahan, hal ini dijelaskan dalam Bg. III.8, yang berbunyi “ Perbuatan apapun dilakukan oleh orang-orang besar, hal yang sama akan diikuti oleh yang lainnya. Keadaan apapun yang dia pastikan, dunia akan mengikutinya “.

Bagaimana caranya para pegawai agar mampu melakukan pengendalian indria. Kemampuan mengendalikan indriapun harus dilakukan latihan, supaya pegawai terbiasa melakukannya. Kalau tidak dilakukan latihan mustahil keterampilan itu diperoleh. Kadang-kadang sudah dilatihpun belum tentu yang bersangkutan terampil dalam melaksanakannya. Masalah indria ada dalam pikiran tiap orang, pikiran manusia sangat sulit ditebak. Bentuk latihan yang diperlukan untuk memperoleh keterampilan dalam mengendalikan indria antara lain dilakukan dengan ujian kejujuran, jujur kepada diri sendiri juga kepada orang lain, meditasi, yoga, dan ceramah-ceramah pendidikan budi pekerti.

Begitu sulitnya mengendalikan pikiran bagi semua orang, dijelaskan dalam Sarasamuccaya butir 511 : 397, yang berbunyi :

“ Tatan kena linaksanan, tan papakatonan, luput winikalpa, jnananika sang jnani ngaranira, kadyangganing tapaking manuk anglayang ring akasa, tan katon tapaknya ring langit, mwang ikan tan katon tapaknya ring wwai”.

“ Sukar untuk dapat diwujudkan (dibuktikan), sukar untuk dapat dibayangkan, bebas tidak dapat dihalang-halangi budi pikiran itu dengan saktinya yang gaib, sebagai misalnya burung melayang-layang diudara, tidak tampak jejaknya di langit; demikian pula bagaikan ikan tidak tampak jejaknya di dalam air “

Untuk menegakkan pengendalian indria oleh aparaturn kerajaan, Kautilya menyarankan dan dilaksanakan oleh raja sebagaimana diuraikan di atas, dan dapat diringkaskan sebagai berikut :

- (1) Para menteri dan pejabat-pejabat penting dibawahnya dipilih dari orang-orang yang berasal dari keturunan yang baik, dan kalau dapat dari keturunan pemimpin pada zamannya.
- (2) Para menteri dan pejabat dibawahnya dipilih dari orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, berpengalaman dan atau cukup berpengalaman dalam peraktek pada bidangnya, sertasetia kepada kerajaan.
- (3) Pengangkatan pejabat harus bebas dari politik uang, tidak berdasarkan upeti, yaitu harus berdasarkan keahlian dan pengalaman pada bidangnya, serta kesetiaan kepada kerajaan.

- (4) Penghasilan/gaji pejabat harus mencukupi, sehingga tidak ada dorongan untuk korupsi dengan alasan gaji tidak cukup untuk menunjang kehidupan diri dan keluarganya.
- (5) Kepada semua pemimpin dalam lingkup kerajaan disyaratkan memberikan ketauladanan yang baik kepada bawahannya masing-masing dan juga kepada rakyatnya.
- (6) Penegakkan hukum dan peraturan kerajaan harus tegas dan tidak pandang bulu. Kepada pegawai kerajaan yang berperestasi diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang diberikan. Penghargaan bagi pegawai yang berperestasi seperti diberikan kenaikan pangkat, pemberian jabatan yang lebih tinggi atau lebih penting. Kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, seperti korupsi diberikan sanksi sesuai dengan berat ringan perbuatannya. Sanksi untuk korupsi, misalnya yang bersangkutan harus mengembalikan ke kas kerajaan 10 kali dari uang yang dikorupsi, dihukum potong anggota badan dan yang paling berat hukuman mati.
- (7) Kepada semua pegawai kerajaan secara rutin diberikan pemahaman tentang ajaran baik dari Veda dengan Upanisadnya, dan diminta memperaktekannya dalam kehidupan sehari-harinya. Kepada masyarakat pada umumnya juga diberikan pengetahuan tentang Veda dan dituntun memperaktekannya

Berdasarkan uraian di atas, unsur po⁷² pengendalian intern menurut Arthashastra lebih lengkap dibandingkan dengan unsur sistem pengendalian intern konvensional, yaitu ada tambahan satu unsur yaitu **pengendalian indria**. Jadi susunan unsur pengendalian intern Arthashastra menjadi sebagai berikut :

- (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
- (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, kewajiban, pendapatan dan biaya.
- (3) Peraktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi.
- (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.
- (5) Pengendalian Indria (PI).

Sedangkan tujuan dari dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Arthashastra adalah sama dengan yang dirumuskan oleh sistem pengendalian intern konvensional. Apabila system pengendalian intern Arthashastra diterapkan dalam mengelola lembaga bisnis dan non bisnis serta lembaga pemerintahan (sektor publik), dapat dipastikan hasilnya akan jauh lebih baik, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat dapat dicapai.

6. **KETERBATASAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam operasionalnya. Kegagalan yang sering terjadi pada system pengendalian intern antara lain disebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut :

2

1)

Pertimbangan Yang Kurang Matang

Efektivitas dari system pengendalian intern dibatasi oleh adanya keterbatasan yang dimiliki manusia itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil sangat dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan seperti, waktu yang tersedia, informasi yang dimiliki dan tekanan yang berasal dari lingkungan tertentu. Ada kalanya, beberapa keputusan yang diambil dalam kondisi seperti itu akan memberikan hasil yang kurang efektif dan efisien dari yang diharapkan sebelumnya.

2

2).

Gagal Dalam Menterjemahkan Suatu Perintah

Meskipun system pengendalian intern telah dirancang dengan baik, system tersebut masih mungkin mengandung kelemahan sehingga menyebabkan kegagalan. Kegagalan dalam hal ini diakibatkan oleh adanya pegawai yang menyalahartikan suatu perintah. Mereka membuat pertimbangan yang salah, atau membuat kesalahan sebagai akibat ketidaktahuan, keteledoran ataupun kealpaan. Kegagalan sistem ini akan lebih besar pengaruhnya jika yang membuat kesalahan adalah seorang pimpinan, karena secara otomatis akan berdampak pada pengambilan keputusan pimpinan dibawahnya,

3)

Pengabaian Manajemen

Sistem pengendalian intern hanya dapat berjalan secara efektif jika masing-masing pelaksana dari atas sampai kebawah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki system pengendalian intern yang memadai, jika salah satu atau beberapa dari unsur pimpinan atau pelaksana, mengabaikan prosedur pengendalian tersebut akan mengakibatkan tidak efektifnya system pengendalian yang bersangkutan.

Istilah “**pengabaian manajemen**“, ditujukan pada tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau untuk memberikan gambaran yang lebih bagus kondisi laporan kegiatan atau laporan keuangan organisasi yang bersangkutan dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya.

Seorang pimpinan unit atau bahkan pimpinan puncak suatu organisasi mungkin mengabaikan system pengendalian dengan berbagai alasan, misalnya meningkatkan laporan kegiatan atau kinerja organisasi untuk menutupi terjadinya ketidaktepatan dalam pencapaian target yang telah ditentukan, meningkatkan laporan pendapatan untuk memenuhi anggaran pendapatan yang tidak realistis, untuk memenuhi proyeksi pendapatan guna mendukung laporan realisasi pendapatan secara keseluruhan, atau bahkan untuk menyembunyikan adanya tindakan melawan hukum atau ketentuan yang berlaku.

Peraktek-peraktek pengabaian sistem pengendalian intern ini juga termasuk penyalahgunaan data atau laporan kepada Bank, Konsultan Hukum, Instansi Pengawasan, Pemasok dan sebagainya dengan cara menerbitkan dokumen palsu.

Istilah “**pengabaian pengawasan**“, disini berbeda dengan istilah “**intervensi manajemen**“, yang merupakan tindakan manajemen pengabaian atau mengesampingkan kebijakan atau prosedur yang ada, tetapi justru ditujukan untuk kepentingan organisasi. Intervensi manajemen diperlukan untuk mengatasi kejadian atau transaksi yang tidak biasa dan diperkirakan akan mengakibatkan kerugian bagi organisasi jika ditangani dengan tidak tepat melalui sistem pengendalian.

Sebagaimana diketahui karena tidak ada satu sistem pengendalian intern pun yang dapat dirancang untuk mengantisipasi setiap kondisi yang terjadi atau akan terjadi secara mendadak.

4) Kolusi

Terjadinya kecurangan yang melibatkan dua pihak atau lebih dapat mengakibatkan kegagalan dalam system pengendalian intern. Misalnya para pelaku dalam organisasi melakukan perubahan atau menyembunyikan data keuangan atau informasi manajemen lainnya dengan suatu cara yang tidak dapat diidentifikasi oleh pengawasan melekat (oleh sistem pengendalian yang 2)la).

Kolusi antara pegawai yang memiliki kewenangan penting dengan pemasok atau pegawai lainnya, dapat dicontohkan sebagai berikut : pemasok menyerahkan barang yang dipesan dengan kualitas atau kuantitas yang berbeda tetapi dinyatakan dalam faktur penagihan sesuai dengan yang dipesan. Dilain pihak, sipenerima barang memperoses penerimaan barang seolah-olah telah diterima sesuai dengan kualitas atau kuantitas yang dipesan.

PERTANYAAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI.

P.12.01. **Awatar Krisna** memberikan wejangan kepada **Arjuna** mengenai **kepemimpinan** yang baik, dituangkan dalam **Bagawdgita III.21**, menyatakan :

“Perbuatan apapun dilakukan oleh orang-orang besar, hal yang sama akan diikuti oleh yang lainnya. Kaedah apapun yang dia pastikan, dunia akan mengikutinya “.

- a). Jelaskan pendapat Saudara, mengenai penekanan Krisna tentang sosok seorang pemimpin?.
- b). Apakah persyaratan seorang pemimpin seperti diperintahkan Krisna kepada Arjuna masih relevan sampai sekarang.

P.12.02. Petunjuk yang diberikan oleh Krisna tentang kepemimpinan, dalam peraktek, mudah dilaksanakan atau sulit dilaksanakan. Jelaskan pendapat Saudara.

P.12.03. Bagaimana halnya dengan pemimpin-pemimpin si Indonesia saat ini, apakah pelaksanaannya sejalan dengan petunjuk yang diberikan oleh Krisna dalam Bg.III.21?

P.12.04. Apakah petunjuk Krisna tentang kepemimpinan itu berlaku pula untuk pemimpin dalam keluarga. Jelaskan pendapat Sdr.?

P.12.05. Pedoman kepemimpinan yang ditekankan oleh Kautilya, yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi oleh seorang raja (pemimpin), dituangkan dalam Athasastra Bk. I, 19 : 34

“ Pada kebahagiaan rakyatnya adalah letak kebahagiaan raja, dan apa yang bermanfaat bagi rakyatnya juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan apa yang berharga bagi dirinya sendiri belum tentu berguna bagi Negara. Tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya adalah bermanfaat bagi raja “

- a). Jelaskan makna atau hakekat dari kepemimpinan yang dikembangkan oleh Kautilya.
- b). Apakah kepemimpinan yang dikembangkan oleh Kautilya sesuai dengan zamannya, atau bertentangan dengan zamannya, jelaskan pendapat Saudara.

P.12.06. Sebutkan unsur-unsur system pengendalian intern menurut SAP.33 yang juga digunakan dalam SPAP 1994 sebagai unsure-unsur pengendalian intern.

P.12.07. Berikan rincian dan penjelasan dari masing-masing unsure system pengendalian intern

- yang digunakan dalam SPAP 1994
- P.12.08.COSO menekankan 4 (empat) konsep dasar pengendalian intern, satu diantaranya pengendalian internal merupakan suatu proses. Jelaskan maksud dari konsep dasar yang di anut tersebut.
- P.12.09.Konsep dasar lainnya yang dianut oleh COSO adalah pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Jelaskan maksud dari konsep dasar yang di anut tersebut.
- P.12.10.Jelaskan yang dimaksud dengan pengawasan melekat, dimana istilah ini dipopulerkan oleh pemerintah pada zaman Orde Baru.
- P.12.11.Apakah unsure-unsur pengawasan melekat yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan unsure-unsur pengendalian intern yang berlaku pada tahun 1990-an ?
Jelaskan jawaban Saudara.
- P.12.12.Jelaskan maksud unsur pengendalian intern “ peraktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi “.
- P.12.13.Jelaskan yang dimaksud dengan pengendalian administrasi dan demikian pula dengan pengendalian akuntansi.
- P.12.14.Menurut Saudara, system pengendalian intern mana yang lebih penting, apakah system pengendalian intern akuntansi atau system pengendalian intern administrasi ?
Jelaskan pendapat Saudara.
- P.12.15.Apakah Saudara pernah mendengar penggunaan kata “ kebijakan “, dalam suatu organisasi. Kira-kira apa maksudnya. Jelaskan pendapat Saudara mengenai hal tersebut.
- P.12.16.Secara konseptual apakah sama penggunaan kata kebijakan dalam peraktek keseharian organisasi. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.12.17.Unsur pertama dari system pengendalian intern COSO adalah manajemen wajib menegakkan “ integritas dan nilai etika “ dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jelaskan yang dimaksud dengan menegakkan integritas dan nilai etika tersebut.
- P.12.18.Tolong saudara selidiki, apakah dalam unsure system pengendalian intern yang dimuat dalam SPAP 1994 ada dimuat masalah menegakkan integritas dan nilai etika. Jelaskan pendapat Saudara.
- P.12.19.Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pemisahan fungsi yang Saudara ketahui ?
- P.12.20.Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis penggabungan fungsi yang Saudara ketahui ?
- P.12.21.Mengapa menggabungkan fungsi verikal dilarang.
- P.12.22.Bagaimana pendapat Kautilya tentang penggabungan fungsi verikal ini ? Jelaskan komentar Saudara.

WEDA (KITAB SUCI UMAT HINDU)

Jumlah buku yang terdapat pada masing-masing Weda Sruti dan Weda Smerti

I. WEDA SRUTI

Mantra	Resensi	Brahmana/Karma Kanda	Upanisad/Aranyaka/Jnana Kanda	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2+3+4)
RG. VEDA (10 MANDALA)	1. Sakala 2. Baskala 3. Aswalayana 4. Sankyayana 5. Mandukeya	1. Aitareya (40 Bab) 2. Kausitaki (Sankyayana 30 Bab)	1. Aitareya 2. Kausitaki 3. Nadabindu 4. Atmaprabodha 5. Nirwana 6. Aksamalika 7. Tripura 8. Saubhagya 9. Bhwrca 10. Mudgala 27	17 Buku
SAMA VEDA (1810 MANTRA)	1. Arcika (dari Rg.Veda) 2. Uttaracika (mantra tambahan) - Ramayana Kautuma Jaiminiya (Talawakara)	1. Tandya (Pancawimsa) 2. Sadwimsa (25 buku)	1. Kena 2. Chandogyia 3. Aruni 4. Maitrayani 5. Vadjrasucika 6. Yogasudamani 7. Vasudewa 8. Mahat 9. Sanyasa 10. Awyakta 11. Kondika 12. Sawitri 13. Rudraksa Jabala 14. Darsana 15. Jabali 16. Maitreyi	20 Buku
YAJUR VEDA (101 RESENSI (PUTIH))	1. Kanwa 2. Madhyandina (1975 Mantra)	Satapatha (100 Adyaya)	1. Isawasya 27 rhadaranyaka 3. Jabala 4. Hamsa 5. Pramahamsa 6. Subata 7. Mantrika 8. Niralambha 9. Trishiki Brahmana 10. Turiyatika 11. Adwanyataraka 12. Pinggala 13. Bhiksu 14. Adyatma 15. Tarasara 16. Yajnwalkya 17. Satyayani	22 Buku

			18. Muktika. 19. Mandala	
(HITAM)	1. Katakhasamhita 2. Mapisthalakatha Samhita 3. Maetrayani Samhita 4. Taithiriya Samhita 1) Apasthamba 2) Hiranyakesin :	Taittiriya	1. Kahanthawali 2. Taittiriyaka 3. Yogakundalini 4. Kiwalya 5. Swetaswatara 6. Saraswatirahasya 7. Garbha 8. Narayana 9. Amrtaabindu 10. Tejobindu 11. Dhyanaabindu 12. Brahmawidya 13. Awaduhuta 14. Yoga Tattwa 15. Daksinamurti 16. Skanda 17. Sariraka 18. Pancabrahma 19. Yogashika 20. Ekasara 21. Aksi 22. Brahma 23. Sukharahasya 24. Rudrahrdaya 25. Paranagnihotra 26. Waraha 27. Kalisandraha 28. Ratna-katha 29. Asartanada 30. Kalagnirudra 31. Kaushika 32. Sarwasara	39 Buku
ATHARVAVEDA (5987 MANTRA)	1. Saunaka (21 buku) 2. Paippalada.	Gopatha	27 1. Prasna 2. Mundaka 3. Mandhukya 4. Atharvasria 5. Atharwasikha 6. Brhajjabala 7. Nrsimhatapini 8. Naradapariwrajaka 9. Sita 10. Mahanarayana 11. Ramarahasya 12. Rama Tapini 13. Sandilya 14. Paramahamsa 15. Annapurna 16. Surya 17. Atma 18. Pasupata 19. Parabrahma 20. Tripuratapini 21. Dewi 22. Bhawana 23. Brahma 24. Ganapati 25. Mahawakya 26. Gopalatapini 27. Krsna 28. Hayagriwa 29. Dattareya 30. Garuda 31. Sarabha.	34 Buku
			Jumlah Buku Weda Sruti	132 Buku

Lampiran 2

II WEDA SMERTI

WEDA SMERTI	SIKSA / PURANA, DSB.	PRATISAKHYA	JUMLAH BUKU
(1)	(2)	(3)	(4)
WEDANGGA	SIKSA (PHONETIK)	Pratiskhya : 1. Rg. Vedapratiskhya 2. Taitripratisakhyasutra 3. Wajasenayipratikhyasutra 4. Samapratikhyasutra 5. Atharwawedapratiksakhyasutra (catur Adhyayika)	5 Buku
	WYAKARANA (TATA BAHASA)	1. Asthadhyayi 2. Patanjali Bhasa	2 Buku
	CHANDA (LAGU)	1. Nidhana Sutra 2. Chanda Sutra 36	2 Buku
	NIRUKTA (SINONIM & ANONIM)	1. Naigantuka Kanda 2. Naighama Kanda 3. Daiwa Kanda	3 Buku
	JYOTISTA (ASTRONOMI)	1. Jyotista Wedangga	1 Buku
	KALPA (RITUAL)	1. Sruta 2. Grhya Sutra 3. Dharma Sutra 4. Sradha kalpa 5. Pitrimedhasutra 6. Prayascittasutra 7. Ciwa Ratri Kalpa 8. Chandra Bumi 9. Sulva Su 36 1) Clipa Sastra 2) Kautama 3) Mayamata 4) Wastuwidya 5) Manasara 6) Wisnudharmatarapurana	15 Buku
UPA WEDA	PURANA	1. Satwika : 1). Wisnu 2). Narada 3) Bhagawata 4) Garuda 5). Padma 6). Waraha 2. Rajasika 1). Brahmanda 2). Brahmawaiwarata 3). Markandeya 4). Bhawasya 5). Wamana 6). Brahma 3. Tamasika 1). Matsya 2). Kurma	7 Buku

		3). Lingga 4) Siwa 5). Agni 6). Skanda	
	ITIHASA	<p>74 MAYANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bala kanda 2. Ayodya Kanda 3. Aranyaka Kanda 4. Kiskinda kanda 5. Sundara Kanda 6. Yudha Kanda 7. Uttara Kanda <p>43 HABHARATA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adi Parwa 2. Sabha Parwa 3. Wana Parwa 4. Wirata Parwa 5. Udayoga Parwa 6. Bhishma Parwa 7. Drona Parwa 8. Karma Parwa 9. Salya Parwa 10. Sauptika Parwa 11. Stri Parwa 12. Santhi Parwa 13. Anusasan parwa 14. Aswamedhika Parwa 15. Asramawasika Parwa 16. Mausala Parwa. 17. Mahaprasthanika Parwa 18. Swargarohana Parwa. <p>36</p>	7 Buku 18 Buku
	ARTHASASTRA / NITISASTRA / RAJA DHARMA /DANDA NITI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usana 2. Nitisara 3. Sukraniti 4. Manawa Dharmasastra 5. Purwadigama 6. Agama 7. Sarasamuscaya 8. Dewadigama 9. Nagarakramasana 10. Wratisasana 	10 Buku
	AYURWEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayur Weda <ol style="list-style-type: none"> 1). Salya 2). Salakya 3) Kayacikitsa 4) Bhutawidya 5). Kaumarabhrtya 6). Agadatantra 7) Rasayamatantra 8). Wijikaranatantra 2. Carakasamhita <ol style="list-style-type: none"> 1). Sutrathana 2). Nidanasthana 3). Wimanasthana 4). Sarithana 5). Indriyasthanana 6). Cikitasasthanana 7). Kalpasthana 8). Siddhisthana 3. Susrutasamhita 4. Kasyapa Samhita. 	9 Buku 9 Buku 6 Buku

	GANDHARWA WEDA	5. Astangga Hrdaya 6. Yoga Sara 7. Kama Sutra 8. Yoga Sastra 1. Natyasastra 1). Natyawedagama 2). Dewadasahasri 2. Rasarnawa 3. Rasaratnasaramuscaya	5 Buku
	BHAGAWADGITA	Memuat 18 Bab	1 Buku
		Jumlah Buku Weda Smerti	114 Buku
		Jumlah Buku Weda Sruti + Weda Smerti	244 buku

- NIBANDHA :
1. Sarasamusccaya
 2. Purwimamsa
 3. Bhasya
 4. Brhatika
 5. Agama
 6. Brahmasutra
 7. Wedantasutra
 8. Wahya
 9. Brahmamimamsa
 10. Uttaramimamsa
 11. Wariga
 - 1). Lontar-lontar Bhagawan Garga
 - 2). Caturwara
 - 3). Ekajala Resi
 - 4). Saptawara
 - 5). Wirakusuma
 - 6). Candrabhumi
 - 7). Sewakadharna
 - 8). Candrapramana
 12. Gubahan dari Itihasa (Ramayana dan Mahabharata)
 - 1). Adiparwa
 - 2). Bharata-Wam Cattatwa
 - 3). Kaurawaprasada
 - 4). Sabhaparwa
 - 5). Swargarohanaparwa
 - 6). Kapiparwa
 - 7). Kaurawaasrama
 - 8). Uttarakanda
 - 9). **61** ataparwa
 - 10). Arjuna Wiwaha
 - 11). Subadra Wiwaha
 - 12). Partha Wijaya
 - 13). Wijayasraya
 - 14). Ramayana
 - 15). Bharatayuda
 13. Puja mantra
 - 1). Weda Parikrama
 - 2). Surya Sewana
 - 3). Atma Mantra
 - 4). Argha Patra
 - 5). Pujaweda Kesatria
 - 6). Sattwa Bharata (Stotra / Stotri)
 - 7). Argha Adhyatmika
 - 8). Pita Puja
 - 9). Kelepasan
 - 10). Anustana
 14. Kelompok Babad.
 - 1). Pamancangah

2). Wamsawati
15. Kelompok Tantri : 9 buah takep lontar.
Jumlah buku dan lontar = 56 buah

DAFTAR PUSTAKA

- 134 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, **Bhagavad-Gita Menurut Aslinya**
Penerbit -- , Tahun – 40
Astana, Made, Ir, MBA dan Anomdiputro, C.S, **Kautilya Arthashastra**, Terjemahan,
Paramita Surabaya, Cetakan Pertama, 2003.
- AI. Haryono Jusuf, **Dasar-Dasar Akuntansi**, Jilid I, Edisi ke-6, Penerbit STIE YPKN,
Yogyakarta, 2009. 126
- Ahmed Raihi-Belkaoui, **Accounting Theory (Teori Akuntansi)**, Buku Dua, Edisi 5, Penerbit
Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Bharati Krsna Tithaji Maharaja, **Matematika Veda**, Paramita Surabaya, Cetakan Pertama
2008.
- C. Rajagopalachari, **Mahabharata & Ramayana**, Penerbit Dipta, Banguntapan, Yogyakarta,
155 Cetakan Pertama 2013. 4
- Charles T. Horngren, George Foster, Penterjemah Marianus Sinaga, **Akuntansi Biaya**, Jilid 1,
Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
9. Indrahartanto, **Reinkarnasi**, Penerbit Narasi, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2008
- Horngren, Sundem, Elliott, **Pengantar Akuntansi Keuangan**, Jilid 2, Edisi Keenam, Penerbit
23 Erlangga, Jakarta, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), **Standar Akuntansi Keuangan**, September 2007, Salemba
Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), **Standar Akuntansi Keuangan**, Juni 2012, Cetakan ke dua,
104 Juni 2013.
- Joel G. Siegel, Jae K. Shim, **Kamus Istilah Akuntansi**, Penerbit PT. Elex Media
Komputindo, Jakarta.
- Kajeng, Nyoman, dkk, **Sarasamuccaya**, Paramita Surabaya, Tahun -
- Kamala Subramaniam, **Ramayana**, Penerbit Paramita, Surabaya, 2007.
- L.N. Rangarajan, Kautilya, **The** 154 **hasastra**, Penguin Books, India, 1992.
- Lawrence B. Sawyers, Mortiner A. Dittenhofer, James H. Sheiner, **Internal Auditing**, Edisi 5,
Buku 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Maswinara, I Wayan, Penterjemah, **Rg Veda Samhita**, Mandala I, II, III,
Paramita Surabaya, Tahun -
- Mulyadi, **Akuntansi Biaya**, Edisi 5, Penerbit dan Percetakan STIE YPKN, Yogyakarta,
Februari 2012.
- 1 Mulyadi, **Pemeriksaan Akuntan**, Edisi 4, Penerbit STIE YPKN, Yogyakarta, 1992.
- Pudja, G, MA dan Sudharta, Tjokorda Rai, MA, **Manava Dharmasastra**,
Paramita Surabaya, Cetakan Pertama, Tahun – 153
- Ngurah, Made, I Gusti, dkk, **Doa Sehari-Hari Menurut Hindu**, Kantor Wilayah
152 Kementerian Agama Provinsi Bali, Tahun 2011.
- 121 at Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, BPKP, **Fraud Auditing**, 1997.
- Pastur Alvin V.P.Hart dan Satyaraja Dasa Adhikari (Steven Rosen), **Dialog TimurBarat**, Tim
Penterjemah Pustaka Bhakti-Bhagavata, Penerbit Hanuman Sakti (Jakarta), 2008.
- R.P. Kangle, MA, **The Kautilya Arthashastra**, University of Bombay, Second
Edition, 1972.
- S. Pendit, Nyoman, **Bhagavd-Gita**, Hanuman Sakti- Jakarta, 1995.

- S. Pedit, Nyoman, **Aspek-Aspek Agama Hindu**, Pustaka Manik Geni, Jakarta, Desember 1993.
- S. Pedit, Nyoman, **Sad-Darsana**, Filsafat Hindu Dharma, Pustaka Bali Post, Denpasar, April 2007
- Suparta Ardana, I.B, **Kalender 200 Tahun (1901 s.d. 2100 Masehi)**, Paramita Surabaya, 2007.
- Surada. I Made, Drs. MA, **Pelajaran Bahasa Sanskerta**, Paramita, Surabaya, 2006.
- Suhardana, K.m, Drs., **Catur Marga**, Paramita, Surabaya, Januari 2010.
- S. Radhakrishnan, **Bhagavad Gita**, Penerjemah Agus S. Mantik, Paramita Surabaya, 2007.
- Sushama Londhe, **Penghormatan Kepada Agama Hindu**, Buku I, Terjemahan Bahasa Indonesia, Media Hindu, tahun 2011.
- Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, 1993, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 190 yanto, **Hindu Agama Bumi**, Narana Smrti Press, Maguwoharjo, Yogyakarta, 2007.
- Soemarso SR, **Akuntansi**, Suatu Pengantar, Buku 2, Edisi Keempat, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- 48 Titib, I Made, **Veda Sabda Suci**, Pedoman Praktis Kehidupan, Paramita, Surabaya, 1996.
- Tuanakota, Theodorus, M, **Teori Akuntansi**, Buku Satu, Edisi 2000, Lembaga Penerbit Universitas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Wirawan B. Ilyas, Diaz Priantara, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi Asli, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- William K., Karter, Akuntansi Biaya, **Cost Accounting**, Penerjemah : Krista, Buku 2, Edisi 14, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.

TENTANG PENULIS

1. I WAYAN DHANA ¹ saat ini adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. Sebelumnya, 2000 s.d. 2007, adalah staf pengajar pada program MM (Pascasarjana) dan pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar. Lahir di Klungkung, Bali, 5 Juni 1943. Gelar Akuntan Berprestasi 3r Negara diperoleh melalui pendidikan pada Institut Ilmu Keuangan (IIK), Departemen Keuangan, Jakarta, lulus tahun 1972. Saat ini IIK berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pendidikan S2 Bidang Management dengan Konsentrasi Keuangan ditempuh melalui Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta periode 2005-2007. Kariernya sebagai Auditor Keuangan Pemerintah dimulai sejak tahun 1964, setelah selesai menempuh pendidikan pada Kursus Djabatan Pembantu Akuntan (KDPA), Departemen Keuangan, di Bandung, tahun 1963. Pendidikan kedinasan selanjutnya ditempuh pada tahun 1966 s.d. 1968 pada Akademi Djabatan Ajun Akuntan (ADAA), di Bandung. Pendidikan bidang akuntansi terakhir pada Institut Ilmu Keuangan (IIK), Departemen Keuangan, Jakarta, periode 1970-1972.

Gelar profesi Certified Accountant (CA) diperoleh dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan gelar Certified Public Accountant (CPA) diperoleh dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sebagai pegawai Department Keuangan RI sejak tahun 1963-1982 dan pegawai ¹⁵¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1983, pernah mendapat penugasan di Makasar tahun 1964-1966 di Surabaya dan Jember tahun 1968-1970, Singaraja-Denpasar tahun 1973-1983, Yogyakarta 1984-1988, Medan 1988-1991 ²⁹ dan terakhir kantor pusat BPKP, Jakarta, tahun 1991-1999. Pengalaman audit pada Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta audit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan sejak tahun 1964 s.d. 1999. Disamping menjalankan tugas pokok sebagai auditor pemerintah, juga sering mendapat penugasan mengajar sebagai instruktur pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Departemen dan Pemerintah Daerah. Pada sore harinya juga aktif mengajar pada Perguruan Tinggi Swasta dimana yang bersangkutan bertugas. Setelah purna bakti pada tahun 1999, mulai tahun 2000 aktif sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik. Pada tahun 2004 mendapat ijin set ¹⁵⁰ i Akuntan Publik dari Department Keuangan RI dan langsung bergabung dengan Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & rekan di Denpasar. Buku yang ditulis dan diterbitkan AUDITING (PARIKSAN), Disertai Konsep Akuntansi dan Audit Menurut Ajaran Hindu.

2. I Wayan Suartina. ¹ sampai saat ini adalah Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dengan posisi distruktural kampus Kepala Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia. Lahir di Yeh Embang, Jembrana pada tanggal 15 Agustus 1966. Pendidikan Dasar Menengah dan Atas ditempuh di kota Negara, sedangkan jenjang Strata satu (SE) dan Strata dua (M.M) ditempuh di Denpasar. Pada 2000 sampai th 2005 menjabat sebagai Direktur Utama PT Bali Dunia Dukungan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Property, dengan kantor utama berlokasi di Denpasar. Disamping saat ini aktif mengajar sebagai Dosen serta tetap menjalankan tridharma perguruan tinggi salah satunya menulis juga sebagai owner UD Bali Grafika.

Akuntansi Hindu

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	1%
2	docobook.com Internet Source	1%
3	amalia-tirta.blogspot.com Internet Source	1%
4	pt.scribd.com Internet Source	<1%
5	bcventura.files.wordpress.com Internet Source	<1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1%
8	adilwinarno.blogspot.com Internet Source	<1%
9	id.scribd.com Internet Source	<1%

10

serbaserbihinduveda.blogspot.com

Internet Source

<1%

11

www.bp-creator.com

Internet Source

<1%

12

raihanazahraa.blogspot.com

Internet Source

<1%

13

jia-xiang.biz

Internet Source

<1%

14

muhammadrivandi18.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

15

jdih.banglikab.go.id

Internet Source

<1%

16

www.coursehero.com

Internet Source

<1%

17

mertamupu.blogspot.com

Internet Source

<1%

18

sanjayaditya.com

Internet Source

<1%

19

library.binus.ac.id

Internet Source

<1%

20

es.scribd.com

Internet Source

<1%

21

semangathindu.blogspot.com

Internet Source

<1%

22

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1%

23

danielstephanus.wordpress.com

Internet Source

<1%

24

cakepane.blogspot.com

Internet Source

<1%

25

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

26

dekjayanegara.blogspot.com

Internet Source

<1%

27

www.hindudharmaforums.com

Internet Source

<1%

28

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

29

islamicmarkets.com

Internet Source

<1%

30

www.patikab.go.id

Internet Source

<1%

31

gustiaryayunedi.blogspot.com

Internet Source

<1%

32

nonosun.staf.upi.edu

Internet Source

<1%

33

fr.slideshare.net

Internet Source

<1%

34

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1%

35

repositori.umsu.ac.id

Internet Source

<1%

36

www.smkn3singaraja.sch.id

Internet Source

<1%

37

buletinprema.blogspot.com

Internet Source

<1%

38

www.jogloabang.com

Internet Source

<1%

39

phdi.or.id

Internet Source

<1%

40

doku.pub

Internet Source

<1%

41

bugiskha.wordpress.com

Internet Source

<1%

42

Calvien Kawenas, Sifrid S. Pangemanan, Robert Lambey. "ANALISIS PENERAPAN PMK NOMOR 31/PMK.07/2005 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG DI RSUP PROF Dr. R. D. KANDOU MANADO",

<1%

GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

43 slameti.blogspot.com <1%
Internet Source

44 www.detlef108.de <1%
Internet Source

45 www.purasegarasurabaya.org <1%
Internet Source

46 Submitted to iGroup <1%
Student Paper

47 ejournal.ihdn.ac.id <1%
Internet Source

48 www.forum.or.id <1%
Internet Source

49 sudarmadakaripura.wordpress.com <1%
Internet Source

50 repositori.kemdikbud.go.id <1%
Internet Source

51 docplayer.info <1%
Internet Source

52 konsultasiskripsi.com <1%
Internet Source

thesis.binus.ac.id

53

Internet Source

<1%

54

ngurahparikesit.blogspot.com

Internet Source

<1%

55

moam.info

Internet Source

<1%

56

xa.yimg.com

Internet Source

<1%

57

polyglotta.no

Internet Source

<1%

58

mbukubali.blogspot.com

Internet Source

<1%

59

mohmansurfauzi.blogspot.com

Internet Source

<1%

60

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1%

61

mafiadoc.com

Internet Source

<1%

62

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

63

madib.blog.unair.ac.id

Internet Source

<1%

64

amaybangpok.wordpress.com

Internet Source

<1%

65	dwiermayanti.wordpress.com Internet Source	<1%
66	repo.unhi.ac.id Internet Source	<1%
67	wayan-anjasmara.blogspot.com Internet Source	<1%
68	rohmadekonomi.wordpress.com Internet Source	<1%
69	sonilaksono.yolasite.com Internet Source	<1%
70	Andy Prasetiawan Hamzah, Akhmad Priharjanto, Dyah Purwanti. "PENDAMPINGAN PERANCANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KLATEN", KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, 2019 Publication	<1%
71	mencobablogbaru.wordpress.com Internet Source	<1%
72	idoc.pub Internet Source	<1%
73	legendakitabsuci.wordpress.com Internet Source	<1%

74 ceritakomang.blogspot.com <1%
Internet Source

75 archive.org <1%
Internet Source

76 eprints.iain-surakarta.ac.id <1%
Internet Source

77 core.ac.uk <1%
Internet Source

78 akuntansiut.wordpress.com <1%
Internet Source

79 p2tel.or.id <1%
Internet Source

80 repository.unhas.ac.id <1%
Internet Source

81 kc.umn.ac.id <1%
Internet Source

82 Submitted to Universitas Pelita Harapan <1%
Student Paper

83 rudiirawantofeuh.blogspot.com <1%
Internet Source

84 Christian Lindtner. "From Brahmanism to Buddhism", Asian Philosophy, 1999 <1%
Publication

85	sino-platonic.org Internet Source	<1%
86	manusiahindu.blogspot.com Internet Source	<1%
87	nimadeayusetiawati.blogspot.com Internet Source	<1%
88	kups.ub.uni-koeln.de Internet Source	<1%
89	fr.scribd.com Internet Source	<1%
90	docslide.us Internet Source	<1%
91	siskum.kotabogor.go.id Internet Source	<1%
92	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
93	puramedangkamulan.wordpress.com Internet Source	<1%
94	budipekertijawi.blogspot.com Internet Source	<1%
95	dharmasastra3.wordpress.com Internet Source	<1%
96	edoc.site Internet Source	<1%

<1%

97

metro86.blogspot.com

Internet Source

<1%

98

www.dannydarussalam.com

Internet Source

<1%

99

123dok.com

Internet Source

<1%

100

majalahhinduraditya.blogspot.com

Internet Source

<1%

101

www.slideshare.net

Internet Source

<1%

102

advaita-vedanta.co.uk

Internet Source

<1%

103

garuda.ristekbrin.go.id

Internet Source

<1%

104

journal.uwks.ac.id

Internet Source

<1%

105

leadershipsecret2016.wordpress.com

Internet Source

<1%

106

bacabse.blogspot.com

Internet Source

<1%

107

somososunicosnouniverso.blogspot.com

Internet Source

<1%

108	ervinaedelweis.blogspot.com Internet Source	<1%
109	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1%
110	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	<1%
111	alexandria05.blogspot.com Internet Source	<1%
112	mahasewa.blogspot.com Internet Source	<1%
113	lenteradharma.blogspot.com Internet Source	<1%
114	ml.scribd.com Internet Source	<1%
115	"Public Budgeting in India", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	<1%
116	Submitted to STIE Kesatuan Bogor Student Paper	<1%
117	ranulogong.blogspot.com Internet Source	<1%
118	Submitted to Institute of Technology, Nirma University	<1%

119 Jared S. Klein. " Rigvedic : Configurational Syntax, Semantics, and Poetics ", Transactions of the Philological Society, 2019

Publication

<1 %

120 mantramhindubali.blogspot.com

Internet Source

<1 %

121 www.narayanasmrti.com

Internet Source

<1 %

122 imeldaputri231207.blogspot.com

Internet Source

<1 %

123 arief-geologist.blogspot.com

Internet Source

<1 %

124 www.bphn.go.id

Internet Source

<1 %

125 filsafat-hindu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

126 karyanya.blogspot.com

Internet Source

<1 %

127 mcx-ra.ru

Internet Source

<1 %

128 text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

129 smalleagleinthesky.blogspot.com

	Internet Source	<1%
130	dimazpancairawan.wordpress.com Internet Source	<1%
131	stahdnj.ac.id Internet Source	<1%
132	bagenin.wordpress.com Internet Source	<1%
133	vahn-saryu1.blogspot.com Internet Source	<1%
134	sanatanadharmaindonesia.blogspot.com Internet Source	<1%
135	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
136	repository.narotama.ac.id Internet Source	<1%
137	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
138	library.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
139	sekartya.blogspot.com Internet Source	<1%
140	ppid.dephub.go.id Internet Source	<1%

141	www.azzayyan.tk Internet Source	<1%
142	fisip.unimal.ac.id Internet Source	<1%
143	indopos.co.id Internet Source	<1%
144	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
145	yofivian.blogspot.com Internet Source	<1%
146	baliotonom.com Internet Source	<1%
147	issuu.com Internet Source	<1%
148	idabagussaduarsa.blogspot.com Internet Source	<1%
149	hindualukta.blogspot.com Internet Source	<1%
150	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1%
151	www.asei.co.id Internet Source	<1%
152	vdocuments.site	

	Internet Source	<1%
153	bali.kemenag.go.id Internet Source	<1%
154	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
155	catalogue.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%
156	www.suplemengki.com Internet Source	<1%
157	bangunkembali.blogspot.com Internet Source	<1%
158	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
159	nicofergiyono.blogspot.com Internet Source	<1%
160	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
161	repository.its.ac.id Internet Source	<1%
162	www.atmajaya.ac.id Internet Source	<1%
163	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%

164	some-1.blogspot.com Internet Source	<1%
165	www.researchgate.net Internet Source	<1%
166	repository.uir.ac.id Internet Source	<1%
167	jakartakita.com Internet Source	<1%
168	mohammadfadlyassagaf.wordpress.com Internet Source	<1%
169	ppcipontianak.blogspot.com Internet Source	<1%
170	linadamayantidotcom.wordpress.com Internet Source	<1%
171	fhidayah17.blogspot.com Internet Source	<1%
172	ramzilhuda.wordpress.com Internet Source	<1%
173	www.theindonesianinstitute.com Internet Source	<1%
174	eswibawa-eswibawa.blogspot.com Internet Source	<1%
175	pidato.net	

Internet Source

<1%

176 penatabius.blogspot.com
Internet Source

<1%

177 repository.maranatha.edu
Internet Source

<1%

178 elitasuratmi.wordpress.com
Internet Source

<1%

179 rajatrepik.com
Internet Source

<1%

180 agamaetika.blogspot.com
Internet Source

<1%

181 teoriakuntansi-yoppy.blogspot.com
Internet Source

<1%

182 www.asura.co.id
Internet Source

<1%

183 cyberpande.blogspot.com
Internet Source

<1%

184 Rosi Mika Aditya Mustopa, Indah Umiyati,
Trisandi Eka Putri. "THE EFECT OF
IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING
INFORMATION SYSTEM AND CONTROL
ENVIRONMENT ON THE EFFECTIVENESS
OF INTERNAL CONTROL OF SALES AT CV.

<1%

KURNIA AGUNG (CASE STUDY AT CV.
KURNIA AGUNG REGIONAL JAWA BARAT)",
JASS (Journal of Accounting for Sustainable
Society), 2019

Publication

185 lib.ibs.ac.id <1 %
Internet Source

186 hendrajaya575758.wordpress.com <1 %
Internet Source

187 dispustakar.balikpapan.go.id <1 %
Internet Source

188 eprints.undip.ac.id <1 %
Internet Source

189 adoc.pub <1 %
Internet Source

190 digilib.uinsby.ac.id <1 %
Internet Source

191 Christian Jeanry Liho, Sifrid Pangemanan, Rudy
Pusung. "ANALISIS PENGENDALIAN
INTERNAL COMMITTEE OF SPONSORING
ORGANIZATIONS TERHADAP PIUTANG
USAHA PADA CV. KOMBOS MANADO 1",
GOING CONCERN : JURNAL RISET
AKUNTANSI, 2018 <1 %
Publication

192	peraturan.bkpm.go.id Internet Source	<1%
193	Muhamad Nur Afif, Rismawati Rismawati. "ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI UNTUK MENENTUKAN HARGA JUAL PRODUK GARMENT", JURNAL AKUNIDA, 2019 Publication	<1%
194	suaramatahatiku.blogspot.com Internet Source	<1%
195	I Gusti Ayu Ngurah, Ni Wayan Antariyani. "UPACARA TUMPEK LANDEP DI ERA GLOBALISASI DI KECAMATAN SELEMADEG TIMUR, KABUPATEN TABANAN", VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2019 Publication	<1%
196	trisnadeviberbagiilmupengetahuan.blogspot.com Internet Source	<1%
197	nonosun.wordpress.com Internet Source	<1%
198	adnyaninatha.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On